

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

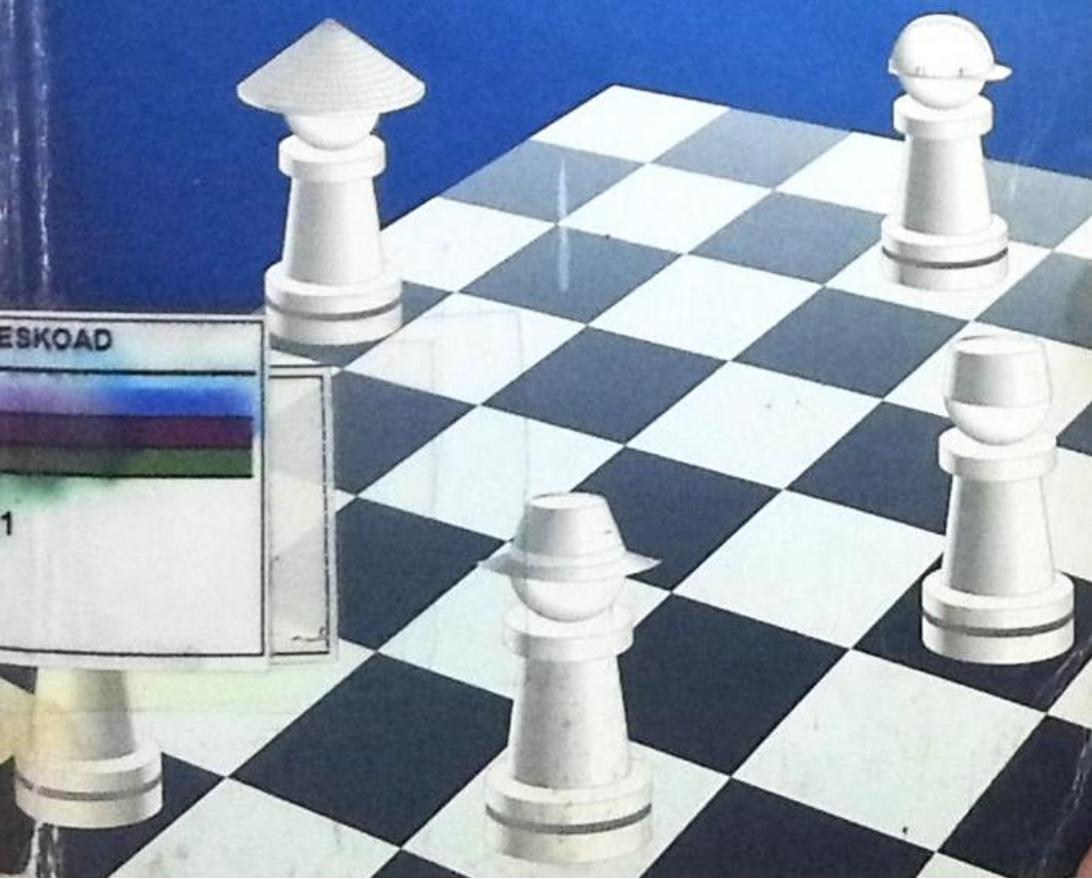
HUMANIORA

Edisi
Revisi

HARRY HIKMAT

Pengantar: Kusnaka Adimihardja

ESKOAD



1

20073755

307

HIC

**STRATEGI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

PERPUSTAKAAN AD
SESKOAD

No. Inv: 05529

SESKOAD

Hikmat, R. Harry

Strategi pemberdayaan masyarakat ; R. Harry
Hikmat ; kata pengantar, Kusnaka Adimihardja.
-- Cet. 4 -- Bandung ; Humaniora Utama
Press, 2006.
xvi + 240 hlm. ; 21 cm.

ISBN 979-9231-55-X

1. Kesejahteraan rakyat.

2. Pembangunan desa.

I. Judul

□□□

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Harry Hikmat

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kata Pengantar
Kusnaka Adimihardja

PENERBIT HUMANIORA

berkhidmat untuk ilmu

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

HMH060309

Diterbitkan oleh
Humaniora Utama Press (HUP)
Penerbit Buku Pendidikan - Anggota Ikapi
Berkhidmat untuk ilmu

Jalan Kiliningan II No. 9
Telepon/Faksimili (022) 7303144
Buarhatu – Bandung 40264

© Dr. R. Harry Hikmat, M.Si.
Kata pengantar, Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, M.A.
Penyunting, Usin S. Artyasa

Setting/Lay-out, Tim Humaniora
Desain cover, Rudy Farid
Cetakan pertama, Sya'ban 1422 H/November 2001M
Cetakan kedua, Jumadil Ula 1425 H/Juni 2004 M
Cetakan Ketiga, Sya'ban 1426 H/September 2005 M
Cetakan Keempat, Syaban 1427 H/September 2006 M

PENGANTAR

Buku *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* ini isinya mencakup kajian tentang konsep pemberdayaan; faktor determinan pemberdayaan masyarakat; konseptual strategi pemberdayaan masyarakat; praktek pemberdayaan; pemberdayaan dan advokasi; pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan sosial; pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat; pemberdayaan sebagai strategi dalam praktek perubahan sosial (contoh kasus di Amerika Serikat), urgensi strategi pemberdayaan dalam konteks krisis ekonomi di Indonesia, strategi pemberdayaan masyarakat berbasiskan sistem sosial budaya lokal; tantangan perubahan strategi menuju pemberdayaan masyarakat secara partisipatif; dan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Acuan utama dalam menyusun konsep-konsep pemberdayaan yaitu berdasarkan teori Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994) tentang *Strategies for Community Empowerment: Direct Action and Transformative Approaches to Social Change Practice*, yang digunakan untuk mengkaji strategi pemberdayaan dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya, sedangkan teori yang diajukan oleh Dubois dan Milles (1996) tentang *Problem Solving to Empowerment* digunakan untuk memahami proses pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih, khususnya kepada Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, M.A., yang telah memotivasi dan memberikan masukan untuk penulisan buku ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Jajah Koswara, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Makmur Sunusi, Ph.D., Dra. Kusbiyanti, Dra. Nina Sarjunani, M.A., Dra. Utami, M.Si., rekan-rekan sejawat dan LSM yang telah memberikan dukungan konsep, moral dan material sehingga diperoleh kelengkapan substansi kepustakaan tentang pemberdayaan masyarakat.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan, langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa. Amiin.

Penulis

KATA PENGANTAR

oleh Kusnaka Adimihardja

Istilah *pemberdayaan masyarakat* digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti oleh pembuat kebijakan, kalangan praktisi pelaksana program atau proyek, petugas sosial, dan kelompok profesional. Berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, program, proyek dan kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional, antara lain program inpres desa tertinggal (IDT), program Takesra/Kukesra, program kelompok usaha bersama (KUBE), program kredit lunak, program jaring pengaman sosial (JPS), dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP). Di daerah, gerakan pemberdayaan juga telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti *Gerakan Rereongan Sarupi* di Jawa Barat; dan Program Keberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga sosial masyarakat (LSM) dalam penanganan masalah kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Demikian juga oleh lembaga donor, seperti UNICEF dan UNDP juga telah mendukung program-program *participatory community empowerment* melalui LSM yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan (*vulnerable group*). Secara internasional, *World Bank* dan *Asian Development Bank* dalam memberikan dukungan dana bagi program pengembangan masyarakat (*community development*) juga telah menekankan pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1990-an. Kalangan ilmuwan dari perguruan

tinggi juga telah mendiskusikan konsep pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu sosial ekonomi, budaya dan politik. Tulisan karya Harry Hikmat ini ingin menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat sebagai konsep ilmu sosial, sosial-ekonomi, budaya dan politik secara komprehensif.

Dalam buku ini juga, pembahasan tentang strategi pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan model pembangunan yang berpusat pada rakyat yang lebih menekankan kepada pemberdayaan (*empowerment*), dengan memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan.

Di lain pihak, dalam buku ini juga diungkapkan telaahan kritis terhadap strategi pembangunan nasional. Sistem sosial budaya yang beragam di Indonesia sebagai potensi dalam pembangunan masyarakat kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga masyarakat cenderung kurang respons dan kreatif dalam membangun dirinya atau mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) dalam menghadapi perubahan dan masalah sosial yang ditimbulkan akibat adanya krisis ekonomi.

Dengan menyampaikan beberapa contoh di Jawa Barat, Bali dan Sumatra; penulis ingin menunjukkan bahwa keanekaragaman sistem sosial budaya di Indonesia telah ada dan dikenal sejak lama, namun cenderung diabaikan dan mulai dilupakan oleh sebagian masyarakat termasuk kalangan pemerintah yang telah melakukan perencanaan program pembangunan dari atas (*top down planning*) dengan menggunakan pola penyeragaman strategi pembangunan masyarakat.

Argumen-argumen yang diuraikan oleh penulis menarik sebagai bahan diskusi di kalangan akademis dan praktisi pembangunan. Penulis mengungkapkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya, cenderung dirancang oleh pemerintah dengan pola seragam dan bersifat instruksi dari atas yang harus dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Masyarakat dalam hal ini lebih sebagai objek pembangunan dan pelaksana program yang telah dirancang sebelumnya oleh pemerintah. Pola IDT, Takesra/ Kukesra, Kelompok Usaha Bersama, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K),

dan jaring perlindungan sosial (JPS); merupakan contoh strategi pembangunan yang diseragamkan dari Sab Merauke tanpa memperhatikan keanekaragaman si budaya di Indonesia. Berbagai laporan evaluasi dari program pembangunan tersebut hasilnya semu dan kurang menunjukkan kondisi nyata yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dan keberhasilan pembangunan pun akhirnya penuh dengan manipulasi data untuk menyenangkan pihak pemrakarsa program dari pemerintah.

Kajian yang bersifat prospektif, juga diuraikan secara lugas, dengan merujuk pada kondisi aktual yang dialami bangsa Indonesia. Di tengah gencarnya upaya penanggulangan dampak sosial dari krisis ekonomi sejak 1997 diberbagai sektor pembangunan, sering terungkap kata-kata dan istilah-istilah, yang arti-hakikinya agak berbeda dari apa yang dimaksud oleh para ahli atau ilmuwan. Kadang-kadang terselip *distorsi* atau penyelewengan terhadap arti sebenarnya. Ini sering terjadi apabila kata-kata asing yang dipergunakan. Salah satu contoh yang menarik adalah penggunaan istilah *empowerment* atau diterjemahkan secara bebas menjadi *pemberdayaan*.

Kalangan birokrat yang ingin menunjukkan semangat penguasa untuk mengatasi masalah sosial sebagai dampak krisis, maka istilah pemberdayaan didistorsikan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks usaha ekonomi, dan juga ada kecenderungan sebagai suatu usaha menarik simpati masyarakat bagi kepentingan politik atau elite politik tertentu terutama menjelang Pemilu.

Pemberdayaan lebih diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan eksternal golongan atau kelompok penguasa, bukan sebagai tujuan internal dalam mencapai ketahanan sosial, partisipasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi krisis. Selain itu, orientasi pada pencapaian target kuantitatif dari proyek lebih dominan daripada orientasi pada pencapaian target fungsional melalui proses pemberdayaan yang sebenarnya. Hal ini merupakan suatu contoh kekacauan peristilahan atau *semantic confusion*, sebab secara ilmiah-objektif dan bersandarkan kepada sumber-sumber referensi ilmiah,

maka pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Secara paradoks, memberdayakan sistem lain; atau secara paternalistik melimpahkan kekuatan (*power*) kepada orang lain dapat juga berarti memberdayakan mereka.

Memberikan kekuatan (*power*) akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan oleh Simon (1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*, berikut.

Pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat.

Uraian di atas merupakan cuplikan dari isi buku ini, yang menunjukkan bahwa penulis ingin menggugah kita semua bahwa penggunaan istilah pemberdayaan tidaklah semudah mengucapkan dengan kata-kata. Dalam buku ini diuraikan pula konsekuensi logis dari penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat.

Penulis juga memberikan peringatan kepada para politisi dan ekonom, bahwa makna pemberdayaan dalam era reformasi dan situasi krisis ekonomi saat ini lebih kuat diwarnai perspektif politik dan ekonomi daripada perspektif sosial dan budaya. Hal ini terlihat oleh adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber yang datang dari atas untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, dengan kurang memberikan peluang agar inisiatif tumbuh dari masyarakat atau menumbuhkembangkan perilaku sosial

masyarakat untuk didukung melalui pengayaan orientasi, motivasi dan perluasan mantra pengambilan keputusan oleh masyarakat itu sendiri, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Buku karya Harry Hikmat ini, memberikan wacana yang menyeluruh tentang konsep strategi pemberdayaan masyarakat. Harapan saya semoga buku ini dapat memperkaya literatur yang berbasiskan pada perspektif sosial budaya tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia.



DAFTAR ISI

Pengantar – v

Kata Pengantar oleh Kusnaka Adimihardja – vii

Daftar Isi – xiii

1. **Konsep Pemberdayaan** – 1
 - Power dan Empowerment – 1
 - Pemberdayaan dan Partisipasi – 4
 - Retorika Pemberdayaan Masyarakat – 5

2. **Faktor Determinan Pemberdayaan Masyarakat** – 9
 - Dilema Pemberdayaan pada Era Pasar Bebas – 9
 - Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat – 11
 - Pengaruh Partai Politik – 12
 - Identifikasi Faktor Determinan – 13

3. **Landasan Konseptual: Strategi Pemberdayaan Masyarakat** – 19
 - Perbandingan Matrik I: Teori “Mengapa Anda Kerjakan?” – 20
 - Perbandingan Matrik II: Konsep “Apa yang Anda Kerjakan?” – 23
 - Perbandingan Matrik III: Keterampilan “Bagaimana Anda Mengerjakan?” – 29

4. **Praktek Pemberdayaan Masyarakat** – 41
 - Konsientisasi (*conscientization*) – 41
 - Pemecahan Masalah melalui Proses Pemberdayaan – 43
 - Keberdayaan Masyarakat – 46

5. **Pemberdayaan dan Advokasi – 49**
 - Pentingnya Advokasi – 49
 - Advokasi dan Proses Pemberdayaan – 50
 - Advokasi dan Contoh Kasus Pemberdayaan Kulit Hitam – 51
 - Peran Pekerja Sosial – 55

6. **Pemberdayaan sebagai Strategi dalam Pembangunan Sosial – 59**
 - Pembangunan Masyarakat (*Community Building*) – 59
 - Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi dalam Pembangunan Sosial – 61
 - Dimensi Pembangunan Sosial – 64
 - Model Pembangunan Masyarakat – 66
 - Jenis-jenis Kekuatan Masyarakat – 72
 - Orientasi Nilai, Asumsi Metode dan Prinsip-prinsip – 76
 - Strategi Pembangunan Masyarakat pada Masa Mendatang – 81
 - Unsur-unsur Perubahan Struktural dalam Pembangunan Masyarakat – 87

7. **Pemberdayaan sebagai Strategi dalam Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat – 89**
 - Pembangunan Sosial – 89
 - Model Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat – 90

8. **Pemberdayaan sebagai Strategi dalam Praktek Perubahan Sosial di Amerika Serikat – 97**
 - Praktek Perubahan Sosial Tradisional – 97
 - Munculnya Gerakan Sosial – 100
 - Reformasi Kontemporer – 103
 - Direct-Action Social Change Practice* – 104
 - Liberal dan Keadilan Liberal – 106
 - Sosialisme dan Keadilan Sosial – 107
 - Historis Materialisme – 108
 - Analisis Dialektika – 109
 - Kontradiksi dalam Hubungan Sosial – 109
 - Praktek Transformasi Perubahan Sosial – 111
 - Pendidikan bagi Perubahan Sosial – 115
 - Dimensi Budaya dan Agama dalam Praktek Perubahan Sosial – 117

9. **Urgensi Strategi Pemberdayaan dalam Konteks Krisis Ekonomi di Indonesia – 121**
 - Krisis Ekonomi: Penyebab dan Dampak – 121
 - Penanggulangan Masalah Kemiskinan – 127
 - Peran LSM dan Organisasi Sosial – 130
 - Refleksi atas Situasi Krisis – 131
 - Semantic Confusion* tentang Pemberdayaan – 133
 - Dominasi Pemberdayaan Ekonomi – 135

 10. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sistem Sosial Budaya Lokal – 137**
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui Rereongan Sarupi di Propinsi Jawa Barat – 137
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatra Barat – 151
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui Aktualisasi Sistem Banjar di Propinsi Bali – 157
 - Aktualisasi Institusi Tradisi – 161

 11. **Tantangan Perubahan Strategi Menuju Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif – 171**
 - Kasus Proyek Pengembangan Masyarakat di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes – 171
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data – 171
 - Profil Desa Kecipir – 174
 - Kondisi Umum Pelaksanaan Proyek – 180
 - Evaluasi Kegiatan – 186
 - Pembahasan – 208
 - Kesimpulan dan Rekomendasi – 210

 12. **Teknik Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif – 217**
 - Mitra Kerja Sama – 221
 - Pemetaan Masalah, Potensi dan Sumber Sosial – 221
 - Perencanaan Partisipatif – 227
 - Manajemen Perencanaan Partisipatif – 228
 - Monitoring dan Evaluasi Partisipatif – 229
- Kepustakaan – 233**



1 KONSEP PEMBERDAYAAN

Power dan Empowerment

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, antikeamanan (*anti-establishment*), gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan *civil society* (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwasedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *post-modernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (*humanisme*). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk *power* yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Demikian juga, aliran neo-marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas dapat mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Sosiologi struktural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan pengertian lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Hal inilah yang oleh Schumacker disebut *pemberdayaan* (Thomas, 1992).

Pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual bersifat *zero-sum*, maksudnya, proses pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya *power* kelompok terhadap kelompok lainnya. Weber mendefinisikan *power* sebagai kemampuan seseorang/individu/kelompok untuk mewujudkan keinginannya, kendatipun terpaksa menentang lainnya. Jika keadaan seperti itu, istilah pemberdayaan yang disamakan dengan *power* harus dinegosiasikan sebagai strategi untuk mengadakan reformasi sosial (Craig dan Mayo, 1995).

Craig dan Mayo (1995) menyatakan bahwa perspektif Marxis terhadap *power* dalam masyarakat kapitalis tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi. *Power* ini bersinggungan erat dengan kepentingan-kepentingan kapitalis lewat kerja sama transnasional yang

berskala global. Dalam keadaan semacam itu, pemberdayaan masyarakat miskin dibatasi oleh gerakan-gerakan kapitalis. Karena itu, masyarakat miskin dan sangat miskin harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Kemampuan tawar-menawar (*bargaining position*) dan pelayanan terhadap masyarakat miskin pun semakin meningkat. Namun demikian, keadaan ini tidak terlepas dari masalah untung-rugi dalam pasar global.

Perspektif Marxis terhadap *power of ideas* adalah proses *setting* ideologi dan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci untuk menganalisis kerangka kerja ekonomi dan kekuatan politik. Keduanya dimanfaatkan sebagai alat legitimasi dan *contestable* yang efektif dalam masyarakat kapitalis. Hal tersebut merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi, politik, dan transformasi sosial (Craig dan Mayo, 1995).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif

sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasi.

Pemberdayaan dan Partisipasi

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Craig dan Mayo, 1995).

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri (Paul, 1987).

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil risiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat.

Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat di negara-negara dunia ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan industrialisasi (Craig dan Mayo, 1995). Bank Dunia meletakkan pemberdayaan sebagai salah satu objek utama dalam partisipasi masyarakat (Paul, 1987).

Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja

sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat (Clarke, 1991). Brudtland menyimpulkan bahwa jaminan pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (Craig dan Mayo, 1995). Clarke menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui LSM, saat ini, merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan cara ini, masyarakat kecil (kelompok *grassroot*) dapat memperoleh keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Namun, penyertaan para sukarelawan LSM dalam proses pemberdayaan itu bukanlah satu-satunya cara pemberdayaan.

Pendekatan ini sama dengan laporan Lembaga Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendefinisikan partisipasi dalam pola pengambilan keputusan dan *power* yang ada, termasuk partisipasi ekonomi (UNDP, 1993). Kini, pemberdayaan masyarakat miskin sudah menjadi slogan umum. Dalam bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan merupakan hal terpenting bagi pembangunan negara-negara yang belum berkembang dan miskin di bagian Utara-Selatan (Craig dan Mayo, 1995).

Retorika Pemberdayaan Masyarakat

Apa yang menjadi ambigu dari pemberdayaan adalah sebuah pertanyaan tentang kesanggupan pemenuhan kebutuhan diri sendiri (Payne, 1986). Berapa banyak orang harus melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri? Boleh jadi, pencapaian tujuan pribadi harus memenuhi beberapa tahapan, yaitu

- a. identifikasi kebutuhan;
- b. identifikasi pilihan atau strategis;
- c. keputusan atau pilihan tindakan;
- d. mobilisasi sumber-sumber;
- e. tindakan itu sendiri.

Secara konservatif, pengertian pemberdayaan dibatasi oleh situasi mandiri (Payne, 1986). Menurut pandangan ini, pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif langkah-langkah di atas secara menyeluruh dengan intervensi minimal pihak luar. Bagaimanapun, penggunaan intervensi akan dapat meningkatkan isu keadilan. Bagi mereka

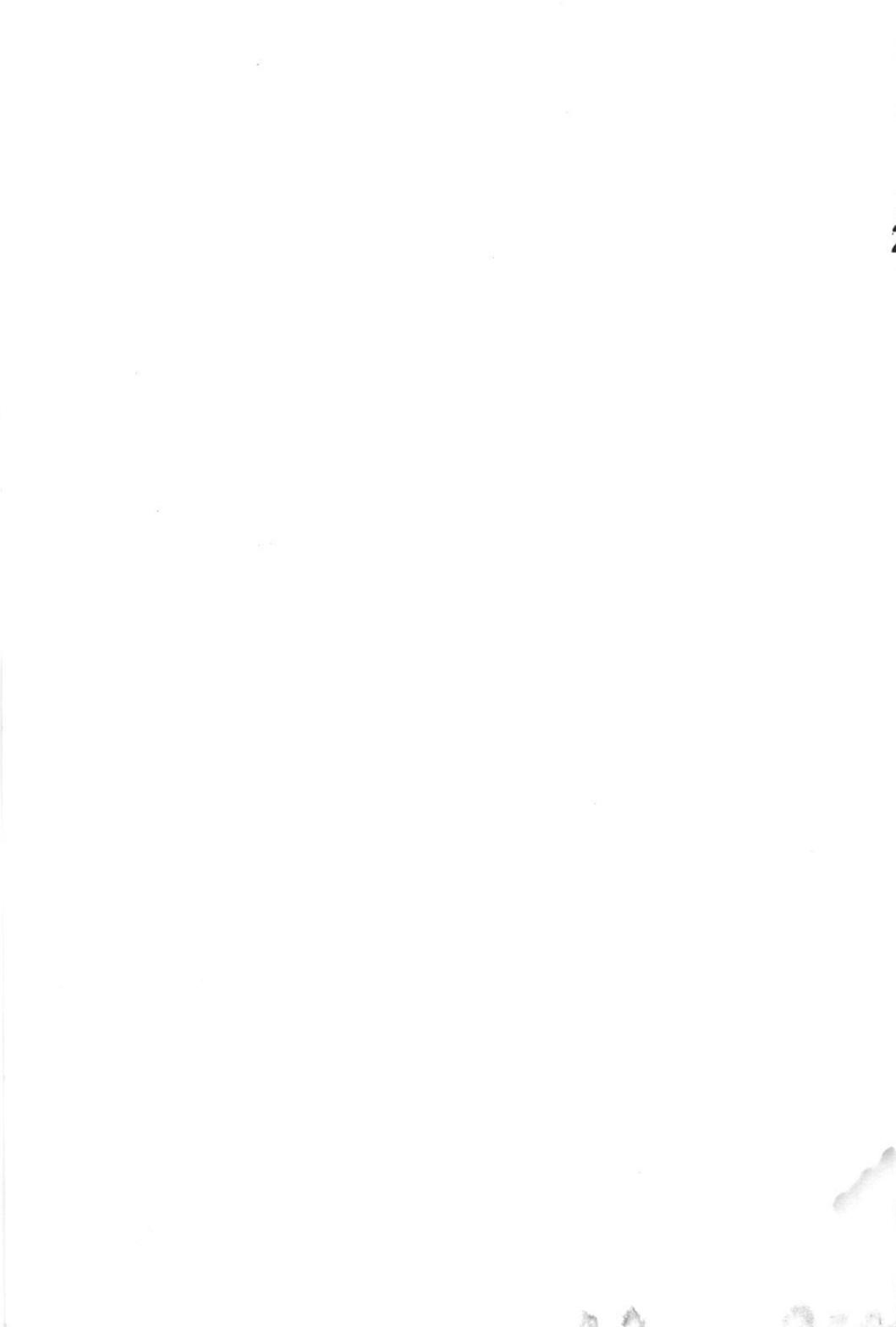
yang paling membutuhkan dan belum dapat menyiapkan diri terhadap kebutuhan mereka, biasanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan, keterampilan, uang, atau kekuatan fisik. Kondisi ini mendorong intervensi dari luar menjadi tidak proporsional atau berlebihan.

Kotze (1987) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasiannya itu menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin. Oleh karena itu, pemberdayaan yang lebih menekankan kemandirian dianggap gagal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pandangan yang lebih jelas dikemukakan oleh McArdle (1989) bahwa hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pola demikian sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, di antara banyak pilihan yang ada di masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya seluruhnya dikerjakan oleh para profesional atas nama "pemberdayaan". Oleh karena itu, banyak kritikan yang diarahkan terhadap pendekatan pemberdayaan ini. Pendekatan tersebut dapat gagal menjalankan fungsinya dalam proses kontrol terhadap masyarakat untuk akses terhadap sumber. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru menjadikan masyarakat menjadi tidak mampu diberdayakan (Rose dan Black, 1983).

Jelaslah bahwa uraian di atas lebih banyak berhubungan dengan persoalan perbedaan pemahaman konsep. Dengan perkataan lain, pemberdayaan hanyalah retorika yang menyelimuti jasa-jasa pelayanan sosial. Fungsi program rasionalisasi ekonomi swasta dikembalikan kepada masyarakat. Program ini merupakan retorika kemandirian, pengambilan keputusan lokal, dan pengawasan jasa dalam upaya menemukan sumber lain untuk pelaksanaannya. Meskipun retorika ini melekat erat pada pendekatan lainnya, program perawatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan menurut kelompok profesio-

nal. Seluruh pelaksanaannya berada di bawah pengawasan profesional yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan masyarakat dalam memanfaatkan sumber. Dalam kondisi ini pemahaman tentang pemberdayaan menjadi retorika belaka. ◻



2

FAKTOR DETERMINAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dilema Pemberdayaan pada Era Pasar Bebas

Konsep pemberdayaan dan penerapannya telah menyebar luas di Utara dan Selatan dalam konteks kemiskinan, polarisasi, dan reformasi sosial. Donnison (1993) mengemukakan bahwa kita hidup pada masa ketakutan. Sementara itu, negara-negara makmur di Barat menyatakan bahwa sejumlah besar orang tidak terpakai akibat resesi ekonomi dan restrukturisasi. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sangat dilematis, dibayar dengan upah yang sangat murah atau menjadi pengangguran dalam jangka waktu yang lama.

Pauline Conroy mengungkapkan dilema di sekitar pemberdayaan masyarakat Eropa yang terpisah-pisah oleh adanya kelas-kelas sosial. Pemisahan dan perbedaan kelas ini termasuk juga dalam klasifikasi warga negara Eropa dan non-Eropa. Di negara-negara dunia ketiga, hal tersebut berkembang dalam jangkauan dan skala yang sangat luas. Fenomena busung lapar pun semakin meluas. Menurut data akhir 1980, diperkirakan sekitar 20-30% rumah tangga di dunia adalah rumah tangga yang sangat miskin sehingga makan pun hanya untuk hidup sekadar dapat hidup. Pasar bebas — strategi neo-liberal yang pada akhir 1970-an mengembangkan pembangunan ekonomi yang diharapkan menetes ke bawah dalam rangka membantu orang miskin dan

melaratpun diluncurkan. Pada kenyataannya, program penyesuaian struktural dari Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Funding*) gagal menciptakan *marketed development*, khususnya bagi masyarakat termiskin (Lipton, 1991). Sebaliknya, program ini melibatkan *cut-back* pemerintah yang menghabiskan banyak uang. Alih-alih menyejahterakan masyarakat kecil, justru meningkatkan kemiskinan dan secara simultan memaksa pemerintah mengurangi program kesejahteraan sosial. Anak-anak miskin adalah yang paling tidak berdaya yang ditandai oleh kesehatan yang cenderung menurun dan penyebaran penyakit yang berhubungan erat dengan kekurangan gizi dan pendidikan (UNICEF, 1989). Pasar bebas, neo-liberal, hak-hak asasi manusia adalah *roll-back* dari pemerintah di negara-negara dunia ketiga, baik di daerah urban maupun industri. Pada mulanya, program ini dimaksudkan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi belanja kesejahteraan sosial melalui *private market* sebagaimana yang dilakukan oleh para sukarelawan LSM dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip *self-help*. Pada perkembangan selanjutnya, konsep ini menjadi *trend* yang semakin meluas, bahkan mendapat dukungan organisasi internasional semacam Bank Dunia dan IMF. Sungguhpun demikian, kecenderungan program ini memiliki bentuk dan jangkauan yang berbeda-beda bergantung pada keadaan lokal, serta tekanan dan usaha politik (Mishra, 1990; Glennerster dan Midgely, 1991).

Perspektif seperti ini seharusnya berhubungan luas dengan pengurangan biaya bagi sektor publik. Tujuannya, mendorong masyarakat sebagai sukarelawan mandiri untuk menolong masyarakatnya sendiri agar dapat memotong anggaran pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Program tersebut dirancang sangat efektif, dan disebarluaskan dengan cara-cara yang benar. Dikatakan demikian karena program ini tidak melibatkan subsidi yang terus menerus melalui penyeleksian biaya, termasuk input masyarakat yang didasarkan atas *self-help*. Program pembangunan perkotaan di negara-negara dunia ketiga, terutama di bagian Utara, terdapat tempat perawatan masyarakat yang memberikan pelayanan sosial. Strategi yang dipakai adalah menggiatkan kembali *saving*, salah satu sasaran pelayanan bagi mereka yang sudah teridentifikasi sebagai masyarakat miskin (Craig dan Mayo, 1995).

Marilyn Tailor memperdebatkan program gabungan ekonomi kesejahteraan. Menurutnya, program tersebut justru membiarkan masyarakat dalam ketidakpastian. Helen Meekosha dan Martin Mowbray membandingkannya dengan isu-isu di Australia. Menurutnya, sejak 1980, pemerintah Australia melihat masyarakat sebagai *cutting-back* kesejahteraan sosial dan privatisasi penanganan masalah sosial. Pada kenyataannya, pembangunan masyarakat hanya menjadi slogan (*lips service*) yang membedakan jenis organisasi. Istilah di atas menjadi semakin populer sebagai gerakan masyarakat tentang gerakan liberalisasi dan transformasi di Brazil, Nikaragua, Bangladesh, dan Afrika Selatan (Craig dan Mayo, 1995).

Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa partisipasi masyarakat dan pemberdayaan yang didasari oleh perbedaan perspektif telah mengantarkan LSM menjadi pusat harapan untuk mengatasi segera krisis akibat dilaksanakannya pembangunan global, perdamaian lingkungan wanita dan pergerakan hak-hak asasi manusia (Korten, 1990). LSM telah menjadi karakteristik pendekatan alternatif terhadap kegagalan pembangunan industri dan paternalistik *top-down* terhadap kemiskinan, masalah wanita dan sebagainya di tingkat *grassroot* berskala kecil. Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sebagai pola potensial dalam strategi alternatif bagi pembangunan masyarakat itu sendiri. Asumsi dasarnya untuk membangun adalah harus didasarkan pada pemberdayaan masyarakat.

Seperti halnya Galjart, konsep yang diusung oleh Karina Conestantino-David pun mengacu pada pengalaman khusus di Amerika Latin dan Filipina. Berdasarkan temuannya, para sukarelawan atau LSM yang menjadi agen sponsor pemerintah untuk meningkatkan peningkatan pelayanan terhadap sektor publik secara kontras berbeda dengan kesejahteraan di bidang ekonomi. LSM tersebut dikenal sebagai agen pembangunan di tingkat *grassroot* dalam organisasi masyarakat. Tipe organisasi sukarelawan atau LSM difokuskan pada kemandirian dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan, jaringan kerja, dan kampanye yang menggunakan pendekatan strategis dalam pembangunan melalui partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan regional (Craig dan Mayo, 1995).

LSM sendiri memiliki arah yang berbeda-beda. Pada satu sisi, LSM mengusahakan diri sebagai agen kemandirian dan kesejahteraan; pada sisi lain, LSM harus menjadi penyokong proyek pembangunan lokal sebagai pendekatan yang lebih strategis dalam pembangunan (Korten, 1990). Dalam hal ini, LSM perlu bernegosiasi dengan struktur pemerintahan lokal dan nasional sebagai *partnership* dengan mereka sebagai sektor *private* ke arah pendekatan yang lebih strategis. Bila keadaan LSM seperti itu, perlu mengembangkan jaringan, kampanye, dan lobi internasional atas nama pemerintah untuk menghadapi skala global (Clarke, 1991).

Sementara itu, ada pula LSM yang lebih mengarah pada kedekatan kerja sama dengan struktur *official*. Tujuannya, untuk lebih mampu menggaet ke pasar melalui ikatan mereka dengan proses yang ada (Gutch, 1992; Mayo, 1994). Agar tetap dapat bertahan, para sukarelawan organisasi tersebut dihadapkan pada keadaan agar bertindak secara komersial sebagai proses kompetitif terhadap pasar. Dengan cara demikian, mereka tetap dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka.

Problematika yang lazim ada dalam tubuh LSM adalah keradikalan terhadap isu yang muncul. Tanpa ikatan antara negara dan proses politik pada tingkat yang berbeda, masyarakat lokal menghadapi risiko termarginalisasi jika melakukan kerja sama. Dalam kaitan ini, strategi penting yang dapat dilakukan dalam strategi tersebut adalah menghubungkan proyek dan gerakan lokal secara lebih strategis di tingkat lokal dan nasional.

Pengaruh Partai Politik

Dalam hal ini, ada hubungan antara proses politik formal dan pergerakan partai politik, seperti yang terjadi di Nikaragua, Filipina, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Pada perkembangan selanjutnya, hubungan ini menjadi aliansi pembangunan antara *community base organization*, pergerakan masyarakat, dan partai politik. Di Filipina, hubungan tersebut lebih menekankan pada partai politik yang menghadapi tantangan lebih luas akibat struktur dari masalah lokal. Maka, hubungan tersebut pada akhirnya menjadi strategi jangka panjang yang efektif bagi pembangunan masyarakat sebagai alat transformasi. Kecenderungan seperti di atas, yakni hubungan antara

community base organization dan pergerakan masyarakat, serta partai-partai politik akan lebih berkembang apabila partai-partai politik secara langsung berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Dengan perkataan lain, masing-masing komponen menjadi organisasi dan pergerakan masyarakat yang menunjukkan identitas dirinya.

Berdasarkan pengalaman Nikaragua dan Afrika Selatan, terbukti bahwa partai-partai politik perlu mengenal dan menghormati keberadaan perbedaan identitas dan integritas organisasi, serta pergerakan masyarakat, termasuk hak-haknya untuk melakukan kritik terhadap negara meskipun pemerintah telah membentuk dan meletakkan batasan-batasan kekuasaannya, seperti apa yang terjadi di Jerman Timur – dahulu. Jika partisipasi masyarakat dan pemberdayaan – sebagai tujuan dan strategi jangka panjang – yang digunakan dalam alternatif ekonomi, sosial dan politik, yang dapat dicapai oleh organisasi dan pergerakan masyarakat melalui proses politik yang luas akan lebih berhasil. Berakhirnya Perang Dingin telah menekan kepentingan global dan nasional terhadap kepentingan pembangunan sosial-ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada skala yang lebih luas. Hal tersebut ditandai oleh runtuhnya pemerintahan sosialis di Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1989. Penyebab keruntuhan tersebut adalah tidak ada antisipasi untuk melakukan pemecahan pasar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adanya perbedaan perspektif dan ideologi terhadap pendekatan pasar bebas merupakan akar persoalan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan orang miskin. Kasus apartheid-rasialis-diskriminatif di Afrika Selatan justru memunculkan konflik dan kekerasan yang berkepanjangan. Ini digambarkan oleh Korten sebagai permasalahan yang lebih besar dalam proses pembangunan sebagai strategi alternatif menghadapi pasar bebas yang semakin membutuhkan pendekatan demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pergerakan untuk meningkatkan pemberdayaan yang dianggap lebih vital daripada lainnya (Hanna dan Robinson, 1994).

Identifikasi Faktor Determinan

Pengaruh Karl Marx tampak sekali pada teori mereka yang menekankan kekuatan ekonomi sebagai modal dasar, atau faktor generatif dari proses pemberdayaan tersebut sehingga diperlukan proses pemberdayaan ekonomi. Selain itu, ada teori yang lebih melihat tentang betapa

kekuasaan politik merupakan sumber malapetaka terbesar terhadap eksistensi sebuah kelas sosial. Berdasarkan hal itu, strategi pemberdayaan harus bertumpu pada pemberdayaan politik masyarakat.

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan, antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi (Rojek, 1996). Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Rojek menekankan bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb (1981) mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi di mana mereka hidup (Bailey dan Brake, 1975b, 1980).

Pergeseran aliran pembangunan dari pembangunan yang bertumpu pada kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik menuju pembangunan yang menekankan pada legitimasi kekuatan rakyat, yang bertumpu pada manusia dan kemanusiaan yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) merupakan pilihan strategi pembangunan yang banyak digunakan negara-negara yang ingin keluar dari situasi krisis (ESCAP, 1999). Karena itu, sistem dan kekuatan ekonomi tidak lagi menjadi tumpuan pembangunan masyarakat. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya seputar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan-persoalan sosial dan politik.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pranarka dan Vidhyandika (1996) menyatakan bahwa dalam pergeseran aliran pembangunan, pusat perhatian bertumpu pada manusia dan kebutuhannya menurut ukuran mereka sendiri, bukan sebagaimana yang diperkirakan para praktisi pembangunan pada masa lampau.

2

Permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukan hanya disebabkan oleh adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, melainkan juga akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (ESCAP, 1999). Kebijakan yang sentralistik dalam penanganan masalah sosial berakibat masalah sosial bukan merupakan masalah komunitas. Masyarakat tergiring untuk kurang menyadari masalah sosial yang ada dalam lingkungan mereka. Mereka juga kurang mampu memanfaatkan potensi dan sumber sosial yang ada untuk menangani masalah sosial dari dan oleh masyarakat sendiri. Kondisi masyarakat berada dalam situasi struktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasikan potensi mereka dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan mereka. Akibatnya, masyarakat tersebut berada dalam kondisi tidak berdaya (Harry, 1999). Situasi sosial demikian membutuhkan reorientasi paradigma pembangunan yang dapat memobilisasi sumber sosial untuk kepentingan masyarakat sendiri. Karena itu, desentralisasi penanganan masalah sosial menjadi isu yang sangat penting dalam kurun waktu yang akan datang.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Korten (1993) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat.

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi.

3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi (ESCAP, 1999).

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Tujuan ini membutuhkan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat *mikro*, *mezzo*, dan *makro*. Melalui teknik pendekatan seperti ini masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa hambatan eksternal pada struktur *mezzo* dan *makro*. Struktur *mezzo* yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten-kota dan propinsi; sedangkan struktur *makro* dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah (*top-down*) daripada dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah.

Faktor-faktor determinan tentang sistem dan kemampuan sosial juga menjadi landasan dalam mengawali pemberdayaan dan inheren dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan, tahap konsientisasi, serta proses pemecahan masalah sampai pada terbentuknya aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi komunitas. Faktor-faktor determinan tersebut diperoleh dari empat pertanyaan berikut.

1. Apakah mengacu pada permasalahan atau tantangan?
2. Apakah melihat penyakit (patologis) ataukah sumber kekuatan?
3. Apakah orientasi waktu masa lalu atau masa depan?
4. Apakah menggunakan tenaga ahli profesional atau mitra kolaborasi? (Allyn dan Bacon, 1996 dalam Dubois dan Miley, 1996).

Faktor eksternal pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah keserasian hubungan vertikal antara sistem sosial di tingkat mikro, mezzo, dan makro. Faktor internal pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah peluang untuk terciptanya dorongan membangun dari, oleh, dan untuk rakyat dalam konteks ekologis setempat (*ecological approach*), dan sesuai dengan sistem sosial-budaya setempat.

Perbedaan antara pendekatan sistem sosial dan ekologis dalam pembangunan terletak pada arus kebijakan, hierarki, kewenangan, dan otonomi pengambilan keputusan. Pendekatan ekologis dalam pembangunan regional merupakan bagian integral dari sistem sosial-budaya (ESCAP, 1999). Objek dari pembahasan ini adalah untuk memungkinkan pembuat keputusan dan pemimpin pada tingkat menengah guna menerapkan nilai dasar pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Selain itu, pendekatan ini juga didasarkan pada pemahaman tentang pengertian pendekatan yang berpusat pada rakyat dan keyakinan yang kuat bahwa pendekatan tersebut adalah pendekatan pokok dalam pembangunan.



3 LANDASAN KONSEPTUAL: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Ketiga strategi tersebut dikemukakan oleh Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994) dalam *Strategies for Community Empowerment: Direct Action and Transformative Approaches to Social Change Practice*. Buku tersebut mengkaji strategi pemberdayaan dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya.

1. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
2. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
3. Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Setiap strategi terdiri atas teori, konsep, dan keahlian yang melekat erat pada masing-masing strategi yang kemudian dirinci ke dalam delapan teori khusus, sepuluh konsep, dan dua belas keahlian. Semua tanda yang ada di dalam matriks itu memberikan informasi yang

cukup untuk menjamin terciptanya hubungan yang harmonis antara satu dan lainnya. Penggunaan matriks tersebut akan memberikan klarifikasi terhadap bagian-bagian penting dalam praktek perubahan sosial bagi orang-orang yang terlibat. Pada tahap awal, para praktisi akan bekerja dengan baik melalui sosialisasi diri mereka terhadap tiga komponen dasar teori, konsep, dan keahlian sebagaimana usaha untuk memahami kategori ketiganya. Berdasarkan hal ini, perbandingan dari ketiga perbedaan metode perubahan sosial tersebut dapat dibuat.

Kendatipun ada semacam kompleksitas dalam proses ini, tetapi pada akhirnya harus mampu menjawab beberapa pertanyaan tentang masing-masing metode. *Pertama*, apa yang menjadi nilai sentral dan menyeluruh dari implikasi perubahan tujuan dari masing-masing metode? *Kedua*, faktor-faktor pribadi dan situasi seperti apakah yang mempengaruhi pilihan Anda terhadap metode? *Ketiga*, konsekuensi-konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang bagaimanakah yang kemungkinan ada dalam masyarakat, misalnya lingkungan tetangga, organisasi, ataukah diri untuk memilih salah satu metode atau yang lainnya?

Perbandingan Matriks I: Teori “Mengapa Anda Kerjakan”

Teori adalah seperangkat ide atau gagasan yang diformulasikan berdasarkan alasan-alasan dari fakta-fakta yang ada untuk menjelaskan sesuatu. Teori sering diidentifikasi secara tentatif-spekulatif sebagai ide-ide yang bersifat alamiah yang sayangnya diletakkan bertentangan dengan sejarah dari praktek atau pelaksanaannya. Dalam pola Yunani, sebuah teori diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali kedekatan hubungan antara teori dan praktek, sebagaimana *praksis* melekat dalam observasi sistematika kualitas dan gambaran dengan kekuatan terhadap kritik praktis dan konvensional. Penyalahgunaan teori akan dapat mengakibatkan penerapan yang aneh atau khayali (idealisme) atau impraktikal atau ideologi fanatik yang berlebih-lebihan (Williams, 1976).

Dalam pengertian politik, *ideologi* berarti seperangkat ide atau kekhususan definisi realita yang muncul dari atau melekat terhadap kepentingan yang sangat kuat (Boff, 1987), contohnya, dua partai yang

sangat dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Republik dan Demokrat. Masing-masing perwakilan kedua partai itu mewakili kepentingannya sendiri dan menjelaskan gambaran yang sesungguhnya berdasarkan kepentingannya. Partai Demokrat berusaha menjual realitas sebagai bagian dari kelas buruh, kelas sosial yang berpenghasilan rendah, dan yang menengah. Sementara itu, Partai Republik selalu berusaha melalui nilai-nilai kebebasan individu, dan kebebasan berusaha dari intervensi pemerintah. Sebagaimana semua sistem ideologi, nilai-nilai dasar dan prinsip kedua partai tersebut tidak dapat ditunjukkan atau dibuktikan; dan semua sistem dapat menyerap data baru tanpa mengurangi struktur dasar mereka (Boff, 1987).

Sebagaimana akibat adanya kekuatan ideologi, praktisi perubahan sosial pun ditekan untuk terus menentang sistem dalam upaya meraih sukses dalam sistem perubahan. Untuk mengawalinya, proses perubahan memerlukan pemahaman *dialektika* dari proses investigasi atau penyelidikan melalui alasan-alasan sistematis. Analisis dialektika terdiri atas tiga bagian, yaitu *tesis*, *antitesis*, dan *tesis*. Dalam satu pengertian, tesis diartikan sebagai pernyataan atau teori yang diletakkan di depan dan didukung oleh argumen. Misalnya, *pie apple adalah terbaik ketika dimasak oleh ibu*. Ketika tesis mengandung posisi kekuatan atau politik, dia mengacu pada realita sebagaimana yang muncul. Misalnya, *pie apple adalah terbaik ketika dibuat di Amerika oleh seorang ibu Amerika* (tesis ini hampir sama dengan idealisasi orang-orang yang menggambarkan iklan). Antitesis atau lawan dari tesis adalah ide yang menghancurkan premis awal; dalam hal ini, *pie apple adalah terbaik ketika dimasak oleh ibu*. Boleh jadi, siapa saja yang menyampaikan antitesis tersebut mengatakan bahwa *pie apple tidak sebaik dan mendukung keadaan lingkungan bila dimasak oleh seorang ibu Amerika*. Antitesis tersebut memunculkan kemungkinan-kemungkinan alternatif. Kendatipun bentuknya tidak sama, tetapi bersifat ofensif karena menyerang perasaan penonton yang kemungkinan akan menyerangnya juga, atau memodifikasi tesis. Akhirnya, posisi *tesis* akan muncul dari kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan atau kecenderungan yang berbeda di antara masing-masing bagian.

Kekuatan (*power*) adalah kemampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan tujuan. Bachrach dan Baratz (1970) membuktikan bahwa *power* adalah konsep rasional (*rational concept*). Dalam pandangan mereka, *power* dilakukan oleh: (A) hanya dilakukan dalam hubungan

individu atau kelompok; (B) untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan diberikan oleh (B) yang rela melakukan pilihan atas sanksi yang ada atau akan kehilangan sesuatu yang lebih tinggi (kedudukan atau uang). *Power* dibedakan dengan serangan karena ketika serangan dilakukan (peluru dimuntahkan), (B) tidak memiliki pilihan lebih lanjut apakah akan tunduk atau sebaliknya.

Power harus dibedakan dari pengaruh karena *power* memerlukan sanksi potensial sungguh pun garis yang membaginya tidak jelas. Otoritas atau wewenang juga berbeda dengan *power* atau kekuatan. Di dalam *power* ada kekuatan yang lebih dari sekadar ketakutan terhadap sanksi. Pada satu sisi, *power* bertindak sebagai orang yang memiliki wewenang, sedangkan lainnya bersikap tunduk karena didukung oleh argumen yang logis-rasional. Banyak organisasi masyarakat yang mengkritik Bachrach dan Baratz, setidaknya berkaitan dengan dua poin, yaitu (a) didorong oleh rasa ketakutan, tetapi lebih daripada janji untuk mendapatkan keuntungan atau hadiah, dan (b) berbeda terhadap otoritas yang kelihatannya bergantung pada argumen rasional yang biasanya palsu.

Teori *power* juga harus dibedakan atas pertanyaan keadaan *power* yang dapat ditunjukkan dalam pelaksanaannya. Jika (a) mendominasi (b) pada konflik yang tampak, akan ada pihak yang kalah dan menang, dan tidak ada seorangpun yang memperdebatkan akibat dari kekuatan yang dilaksanakan meskipun serangannya dilaksanakan. Jika (a) tidak pernah menunjukkan sikap perlawanan terhadap (b), namun demikian rintangan (b) mendominasi struktur debat dari isu konflik yang ada; kemudian (a) akan dapat melaksanakan kekuatan. Jika (a) sudah dapat memendam kesadaran (b) untuk menunjukkan kepentingannya, (a) dapat dikatakan telah melakukan *power*.

Di dalam konflik, siapa yang memenangkan keputusan biasanya akan berhubungan dengan dan menggenggam kekuasaan. Ketika konflik tidak diizinkan untuk mencapai keputusan, seperti halnya elite politik tidak boleh mengganti agenda formal, keputusan tersebut tidak berhasil membawa keputusan yang dapat berhubungan dengan *power*. Akan tetapi, ketika *power* sosial, ekonomi, dan politik semakin menajam, akan muncul keterpaksaan susunan pengambilan pilihan, terciptanya kebutaan budaya (*pie apple* terbaik ibu adalah satu-satunya pilihan, atau orang tidak dapat memilih warna Ford yang diinginkan sepanjang yang ada hanyalah warna hitam). Perbedaan yang ada tidak

memungkinkan terartikulasinya ideologi. Karena itu, di dalam dialektika politik, perkiraan apakah kekuatan itu dilaksanakan dalam suasana seperti itu atau tidak, adalah sesuatu yang dibolehkan.

Interest atau kepentingan adalah keuntungan pertimbangan individu atau kelompok, sedangkan *consent* merupakan komponen *power*; artinya, pemberian izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Ide-ide tentang *power*, otoritas, persuasi dan serangan, secara umum, bergantung pada apakah ada kebebasan ataukah tidak, dan apakah ada orang-orang yang tepat untuk memegangnya ataukah tidak. Biasanya disebut *informed consent* pusat untuk melakukan tugas sistem demokratik. Sistem ini membawa orang-orang pada pemahaman kebebasan untuk memilih oleh para pekerja sosial yang kemudian lazim disebut sebagai proses pemberdayaan. Sayangnya, kebebasan tersebut dipaksakan oleh mekanisme yang ada, baik keputusan ada atau tidak, maupun konflik-konflik kepentingan yang laten.

Oppositional community adalah bagian yang dipertimbangkan dari kerangka kerja praktek perubahan sosial. Bentuk nyata oposisi komunitas adalah *status quo* politik atau kondisi yang didasarkan atas nilai-nilai sentral dari status kelompok atau organisasi yang berlaku. Partai tradisional dibedakan antara kepentingan keanggotaan kelompok dan aksi lokal yang berhubungan erat dengan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan ini berhubungan langsung antara kelompok dan kedekatan kerja sama antara keluarga dan kelompok pendukung dengan masyarakat transformasi. Jika masyarakat oposan berkembang di Amerika Serikat, bahkan kemudian mencakup strategi *direct-action* dan transformatif, perubahan sosial akan mencapai masyarakat marginal dan memberdayakan mereka untuk mengambil alih dalam proses formasi masyarakat dan *modes of living*.

Perbandingan Matrik II: Konsep "Apa yang Anda Kerjakan?"

Konsep adalah ide-ide atau gagasan-gagasan. Dalam praktek perubahan sosial, ide merupakan karakteristik dari praktek. Secara umum, konsep bukanlah penjelasan teori-teori dan kekhususan pelaksanaan dari keahlian tertentu. Sesungguhnya, konsep matriks sama seperti

Tabel 3.1 Perbandingan Matrik I:
 “Mengapa dan Apa yang Anda Kerjakan?”

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Praxis	Dalam konteks parlementer dan pandangan politis utilitarian, serta proses pengawasan pemilu melalui iklan, media, uang <i>polling</i> dan manipulasi.	Setidak-tidaknya ada dua dimensi: metode protes umum dan kebijakan inisiatif yang melibatkan tindakan publik kelompok kecil atau besar. Program pembangunan dimulai dari organisasi kekuatan di tingkat <i>grassroots</i> .	Kelompok kecil dan proses kolektif diri mengembangkan kesadaran kritis dan secara bertahap dengan sosialisasi politik.
Ideologi	Proyek individualisme dan kapitalisme Barat, impian negara untuk memperoleh kesejajaran.	Populisme pemilu yang demokratis, tujuan reformasi struktur politik, nilai kasih, dan keadilan sosial.	Menggabungkan sosialisme dan demokrasi sosial, tujuan utopian dari sistem politik dan ekonomi baru.
Dialektika	Mitologi pasar gaib dan kepercayaan yang melekat dalam metode ilmiah untuk menjelaskan keadaan realitas. Kebebasan individu melawan tekanan totaliterisme.	Dunia apa adanya dan dunia yang seharusnya ada solidaritas pekerja, kebangkitan kembali masyarakat politik dan perluasan ekonomi.	Mempertanyakan ideologi negara dengan ekspansi pasar yang tidak terbatas, menjelaskan kehidupan sehari-hari, menanyakan asal-usul pesan, dukungan untuk menerima keadaan, dan bagaimana membelokkan struktur dominan atau mengingkari keberadaan alternatif.
Kekuasaan	Perspektif plural mengenai persaingan, keseimbangan kepentingan, satu dimensi pandang kekuatan yang hanya dijelaskan dengan kalah dan menang dalam pembuatan keputusan.	Perspektif elite kecil tingkat tinggi dan bawah, dua dimensi cara pandang kekuasaan yang mempertimbangkan pengambilan keputusan atau tidak sebagai batas kepentingan kekuasaan melalui	Perspektif liberal tiga dimensi pandang kekuasaan yang mencakup keputusan, atau bukan, dan kemungkinan munculnya kesadaran palsu dari nilai yang

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
		mobilisasi hubungan kekuasaan secara alamiah.	berhubungan dengan struktur pengetahuan.
Kepe- ntingan	Kepeentingan berasal dari partisipasi politik yang dibatasi oleh pilihan kebijakan kepentingan liberal.	Sistem politik tidak selalu memberikan kesejajaran dalam kepentingan. Kepentingan terpendam atau pilihan pengganti yang dimiliki merupakan pandangan kepentingan reformis. Apresiasi terhadap kerumitan dan ketidakstabilan dari kepentingan.	Kepeentingan tidak akan menjadi kenyataan bila kepentingan yang dimaksud lebih mengarah pada pilihan massa sebagaimana yang diiklankan secara massa, yang berseberangan dengan kepentingan asli.
Consent	Asumsi awal mengenai pengaruh otoritas, termasuk proses demokrasi, adalah untuk mendapatkan dukungan kemenangan, dengan berat mengabaikan adanya manipulasi yang digunakan dalam konflik politik; adanya paksaan dan penindasan bagi nilai-nilai yang bukan negara itu sendiri.	Mengenal manfaat pengaruh (otoritas dan manipulasi) dan kekuasaan dalam keadaan tertentu, untuk menghindari penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan, idealnya orang-orang memperoleh penjelasan mengenai kepentingan mereka dan memberikan informasi dasar dari kepentingan mereka.	Fokus terhadap konflik-konflik kepentingan laten, menggunakan ideologi kritik (dialektika dan dekonstruktif) yang berhubungan dengan kepentingan nyata jika kondisi lingkungan memperbolehkan analisis yang demikian. Inisiatif dengan menghasilkan sistem dominan yang kemungkinan bisa menjadi pengganti bagi sesuatu yang tidak bisa dipahami.
Masya- rakat oposisi	Afiliasi partai politik formal dan formasi kepentingan kelompok.	Formasi tindakan langsung organisasi <i>grassroots</i> , perlawanan didasarkan atas nilai-nilai dasar <i>private</i> (kadang kala dikumandangkan secara terbuka dalam basis kolektif) dan aksi publik.	Formasi dukungan dan kelompok solidaritas, ekonomi mandiri dan kerja sama sosial, perlawanan langsung seperti yang dilakukan warga sekolahan dan rohaniawan masyarakat.

halnya unsur bensin yang masing-masing saling melengkapi. Beberapa variasi merupakan perbedaan tipe dari bensin yang merupakan *style* dan tipe dari organisasi. Tetapi, beberapa pengalaman menunjukkan bahwa praktek perubahan sosial dan organisasi dapat berhasil dengan menggunakan konsep tersebut. Konsep tersebut menjawab pertanyaan “Apa yang Anda kerjakan?” dalam sebuah organisasi.

Visi adalah jembatan antara “Mengapa Anda kerjakan?” dan “Apa yang Anda kerjakan?” Pada prakteknya, visi tersebut memberikan penjelasan dan pilihan strategi, sedangkan pertanyaan “Apa yang Anda kerjakan?” merupakan pilihan dari unsur-unsur yang tepat. Tanpa visi yang jelas dan terarah, para praktisi dalam sebuah organisasi harus selalu mengganti dan mengubah aturan dan bentuk sistem yang telah ada dalam upaya mempertahankan *status quo*. Akibatnya, dinamisme dan kreativitas dihadapkan pada dua keadaan, dilumpuhkan ataukah diaktifkan kembali. Visi searti dengan cara pandang yang luas yang dalam penerapannya seringkali mengalami perubahan. Jelasnya, visi organisasi dihubungkan dengan nilai-nilai primer. Karena itu, pilihan dari strategi yang ada sebaiknya tidak mendahului formasi atau keadaan visi tersebut.

Power diartikan sebagai “kemampuan bertindak untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu, ada atau tanpa keberadaan sukarelawan”. Sesungguhnya, kekuatan tidak hanya sebuah kemampuan untuk mengubah yang sesaat, melainkan juga – setidaknya – secara nyata – dapat digunakan sewaktu-waktu. Penggunaan *power* berdasarkan penggunaan sebelumnya bisa jelas atau sebaliknya, terselubung. Kendatipun demikian, fokus *power* tidak hanya mencakup keahlian. Bahkan, perhatian atau tujuan utamanya seringkali berupa pertanyaan tentang nilai dan pilihan strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi konsekuensi penggunaan strategi yang dipilih.

Ketegangan dan konflik adalah keadaan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan, drama, dan antagonis antara dua sisi. Keduanya sangat strategis dan memiliki siasat yang khas. Dalam kaitan ini, perencanaan dari sebuah isu atau kegiatan kampanye sangat memerlukan strategi khusus atau pendekatan pilihan sebagaimana penggabungan antara teknik drama dan konflik selama kegiatan kampanye berlangsung. Pilihan strategi tersebut meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang visi, perhatian, dan sumber-sumber yang dipakai, sedangkan cara pemilihannya cenderung secara jelas dipengaruhi oleh

waktu dan reaksi antisipasi dari bagian dan perhatian yang beragam dari penonton, atau orang di luarnya. Ada saat-saat yang lebih tepat dalam pemilihan waktu untuk memperluas pengaruh politik. Karena itu, pemahaman konsep adalah sesuatu yang penting, meskipun pengalaman tidak dapat menggantikan masalah ini.

Politisasi—sebagai media peningkatan kesadaran bermasyarakat-bernegara—mengacu pada sebuah prinsip bahwa proses pendidikan adalah puncaknya, dengan meletakkan kegiatan pada posisi strategis. Pada mulanya, partisipasi diletakkan pada awal dari isu yang muncul dalam sebuah kampanye. Lebih penting lagi, partisipasi dimulai dengan pemahaman rasional atau secara intelektual untuk mengkaji sebab-sebab terbentuknya kondisi tersebut. Tujuannya, untuk menentukan tentang kondisi seperti apakah yang dapat berubah dengan menggunakan aturan sendiri dalam proses perubahan tersebut. Ini merupakan proses strategi yang sangat mendasar dan isu-isu yang muncul tidak secara samar-samar membagi kegiatan secara langsung dari pendekatan transformatif. Dalam kaitan ini, ada beberapa tindakan yang dapat dijadikan sebagai pilihan. Namun, manakala terjadi peningkatan politisasi atau kesadaran sebelum atau sesudah kegiatan publik, adalah tindakan yang paling dekat dari para praktisi atau organisasi untuk melakukan keputusan. Sungguh pun demikian, radikalisme kadangkala muncul dalam proses tindakan, dan ini bukanlah perselisihan, tetapi kesadaran yang adakalanya harus muncul melalui proses perhatian.

Secara tidak langsung, *kepemimpinan* menjawab berbagai masalah tentang arah kepemimpinan dan organisasi. Pemimpin yang kharismatik atau di luar itu masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian dalam kaitan dengan pemilihan strategi. Siapa yang memimpin bukanlah sesuatu yang penting (*urgen*) manakala sebuah organisasi sudah menentukan arah tentang dasar-dasar kepemimpinan dan siapa yang akan dipimpin melalui sistem hierarki atau proses kesepakatan, atau pilihan-pilihan yang ada di antara banyak pilihan.

Hubungan atau *komunikasi* merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sebuah organisasi, khususnya perubahan sosial dalam sebuah organisasi pada level *grassroots* yang tidak begitu birokratis. Melalui proposisi umum, para praktisi membuat pilihan-pilihan penting mengenai tingkatan formalisasi yang dimunculkan melalui sanksi. Jika tujuan prinsip dari sebuah organisasi adalah *power*

untuk kekuatan tindakan publik dari masing-masing anggota yang ada di dalamnya dan dapat dipertanggungjawabkan, keadaan itu kemungkinan besar akan dikurangi ketika ikatan afektif yang tercipta semakin berkembang. Kekhususan profesional tertentu di antara masing-masing anggota akan sangat dipertimbangkan dalam proyek tindakan langsung. Dengan perkataan lain, solidaritas kelompok termasuk salah satu yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan.

Dimunculkannya *akuntabilitas* adalah upaya untuk menjawab sebuah tindakan. Akuntabilitas tradisional cenderung untuk didefinisikan secara linear dan tersusun. Tindakan langsung dan transformatif serta praktek perubahan sosial merupakan sesuatu tindakan yang resiprokal dan dapat dipertanggungjawabkan dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Demikian pula dengan tindakan timbak-balik yang tak berujung pangkal serta tidak mengarah pada perbedaan status. Perbedaan juga dibuat di antara faktor-faktor internal dan eksternal organisasi yang mengacu pada masyarakat yang lebih luas dan keadaan politik.

Self-interest (kepentingan sendiri) dapat dikatakan sebagai benefit atau keuntungan individu yang muncul dalam sebuah masyarakat. Kepentingan diri ini sangat berhubungan erat dengan semua strategi perubahan sosial dan hubungan manusia. Misalnya, ketika Anda memilih sebuah pekerjaan yang ditawarkan dengan pertimbangan faktor-faktor lain seperti besarnya gaji, keuntungan, potensi untuk memperoleh kemajuan, kedekatan antara keluarga dan teman, kesempatan berekreasi, tingkat kesulitan, dan kualitas pendidikan anak-anak nantinya.

Dalam hal ini, pilihan Anda sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menurut Anda paling penting dan sangat mendasar bagi kehidupan Anda. Jika Anda adalah pasangan suami-istri yang memiliki perbedaan kepentingan, Anda harus menegosiasikannya terlebih dahulu kepentingan itu dengan pasangan Anda untuk mencapai kata sepakat antara Anda berdua. Motivasi kepentingan pribadi tersebut dapat disamakan dengan kepentingan dalam sebuah organisasi.

Kendatipun prosesnya memiliki kesamaan dengan kondisi dalam sebuah organisasi, tetapi keikutsertaan tersebut di luar kepentingan langsung pribadinya seperti motivasi untuk mencapai keadilan. Bagi seseorang, keadilan merupakan keadilan bagi semua, termasuk kepentingan

pribadinya. Isu-isu yang berkembang yang akan diterapkan di lapangan disesuaikan dengan nilai-nilai penting kepentingan pribadi. Sementara itu, prioritas dan waktu pelaksanaannya bisa berubah-ubah kapan saja. Bagi sebuah organisasi yang efektif, kepentingan pribadi secara bersama-sama berjalan seiring dengan kepentingan organisasi.

Komunikasi mengacu pada ungkapan secara tertulis dan lisan. Untuk melakukannya, komunikasi adakalanya menggunakan beragam cara atau strategi dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap konsekuensi yang ada. Karena itu, para praktisi harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh terhadap strategi yang hendak dipilih yang akan memberikan nilai lebih terhadap organisasi dan anggotanya. Komunikasi yang memaksimalkan efektivitas dan efisiensi akan berbeda jauh dari komunikasi yang mengembangkan kesejajaran dan hubungan interpersonal (bersifat pribadi).

Aturan dalam organisasi berfungsi sebagai jembatan penghubung antara teori, konsep, dan keahlian (*skilfull*). *Orang yang mengatur organisasi (organizer)* menginterpretasikan dilema pemimpin organisasi secara nyata.

Tampaknya, mereka mengizinkan dan memperbolehkan kepada setiap anggota untuk menemukan pengalaman personalnya atau untuk memfasilitasi tujuan yang hendak dicapainya secara efektif dan efisien. Seluruh *organizer* dan agen perubahan (*agent of change*), dengan melakukan tindakan langsung dan transformatif, setidaknya-tidaknya mengetahui perbedaan antara praksis yang diangkat dan dimanipulasi.

Perbandingan Matrik III: Keterampilan "Bagaimana Anda Mengerjakan?"

Pekerja sosial dan praktisi perubahan sosial memahami bahwa keterampilan (*skill*) adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Karena itu, keterampilan atau keahlian berkembang secara terus-menerus dan mengalami pengulangan.

Kelas-kelas pelatihan dibuka untuk memberikan pelajaran mengenai teori, paradigma, model dan beragam konsep pengetahuan. Tetapi, kesatuan pengetahuan dan kemampuan membutuhkan praktek. Namun, praktek tanpa didampingi oleh penasihat, supervisor, dan refleksi yang ada merupakan praktek yang tidak lengkap, bahkan

cenderung sia-sia. Karena itu, *skill* memerlukan perhatian yang sangat serius dari para siswa, tetapi mengalami atau melihat sendiri secara langsung merupakan guru yang lebih berpengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman sepanjang hidupnya, dan kesalahan yang segera diperbaiki merupakan perbaikan diri yang luar biasa.

Skill adalah kemampuan tentang “bagaimana dan apa yang Anda kerjakan?” Dalam kaitan ini, di satu sisi, para praktisi yang ahli-terampil tidak akan sama dengan semua aspek praktisi lainnya. Di sisi lain, pelatihan atau praktek tidak dapat menyiapkan segala sesuatunya — termasuk keahlian dan keterampilan — secara menyeluruh.

Tabel 3.2 Perbandingan Matrik II:
“Konsep Apa yang Anda Kerjakan?”

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Visi	Mempertahankan <i>status quo</i> organisasi dan secara berangsur-angsur meningkatkan <i>power</i> . Mencari keuntungan di dalam organisasi untuk kelompok-kelompok elite, sementara ada perselisihan paham di antara pengikutnya.	Dunia organisasi yang memiliki nilai-nilai kolektif dan progresif menggantikan sifat rakus dan dominasi. Demokratisasi massa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan antara pemimpin dan pengikutnya. Ditujukan langsung terhadap kepentingan pribadi untuk menggantikan hal-hal yang bersifat tersembunyi, manipulasi, dan perlindungan terhadap harta benda pribadi.	Menitikberatkan pada pemberdayaan diri agar mampu melakukan pengambilan keputusan secara pribadi yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Menyelesaikan masalah-masalah yang memberi tekanan terhadap moral.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Kekuatan	Mempertahankan kekuatan struktur yang ada dengan mempertahankan <i>status quo</i> . Persaingan yang terbatas di antara para pesaing.	Mengumpulkan kekuatan organisasi dengan melakukan negosiasi di antara para pemegang kekuasaan, sementara pada saat yang sama individu mengumpulkan kekuatan pribadi, atau membentuk organisasi atau koalisi tanpa memberdayakan individu.	Perubahan eksternal yang merupakan hasil transformasi dan pemberdayaan personal. Kelompok yang memungkinkan atau tidak memungkinkan berupaya untuk menciptakan dan melatih kekuatan organisasi.
Ketegangan & konflik	Meminimalisasi, menetralisasi dan mendelegitimasi semua manifestasi konflik. Membatasi ketegangan di antara kekuatan lawan sebagaimana kekuatan bersaing untuk memperoleh kedudukan atau posisi.	Kesepakatan terhadap perubahan sosial yang terjadi untuk menghilangkan frustrasi dari nilai-nilai kemanusiaan.	Menyepakati dan mengkaji ulang kesepakatan pada tingkat personal. Kelompok-kelompok memfokuskan terhadap dukungan-dukungan yang bersifat menguntungkan satu sama lainnya. Kelompok yang mungkin atau tidak mungkin mengurangi ketegangan dari struktur eksternal.
Politisasi/peningkatan kesadaran	Mensosialisasikan orang-orang dalam struktur yang ada dan peran yang dimainkan.	Mengintruksikan orang-orang kepada kekuatan dunia nyata dan kepentingan pribadi. Mencari legitimasi kekuatan individu dan kelompok, serta tantangan dan rasa tanggung jawab yang diemban.	Memahami tekanan-tekanan individu dalam struktur sosial.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Kepemimpinan	Membangun kepemimpinan masyarakat sebagai aktor yang signifikan di arena kebijakan publik.	Membangun kepemimpinan masyarakat sebagai aktor yang signifikan di arena kebijakan publik.	Kepemimpinan dibatasi oleh proses peran fasilitator yang ada. Konsensus secara kolektif merupakan peranan utama dari kepemimpinan.
	Membangun kepemimpinan baru dari orang-orang yang belum pernah mengambil peran. Para pengikut mencurahkan perhatian kepada pemimpinnya yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada struktur tradisional.	Membangun kepemimpinan baru dari orang-orang yang belum pernah mengambil peran. Para pengikut mencurahkan perhatian kepada pemimpinnya yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada struktur tradisional.	
Hubungan	Hubungan dalam ruang publik dibatasi oleh sedikit orang yang memainkan peranan pemimpin. Peranan orang-orang di luarnya dibatasi dalam ruang privat. Para pelaku ruang publik kadangkala mencampuradukkan hubungan tersebut hanya untuk memanipulasi dan mengontrol.	Dalam ruang publik, hubungan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana untuk mendapatkan atau menemukan kepentingan, termasuk kepentingan pribadi. Memperkenalkan hubungan dalam ruang publik kepada banyak orang, namun pada kenyataannya hanya berkembang pada kalangan tertentu (kecil).	Hubungan-hubungan mutualisme atau saling menguntungkan kepentingan personal dan politik. Kemungkinan berkembang dalam hubungan eksternal di ruang publik.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Akuntabilitas	Akuntabilitas merupakan hal utama di antara sesama pemimpin, dan hanya sedikit dalam hubungan antara pemimpin dan pengikutnya.	Akuntabilitas sangat kuat dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa masing-masing orang melaksanakan tugas dengan sangat baik, termasuk interaksi yang mengemban akuntabilitas pegawai publik. Akuntabilitas antara pemimpin yang satu dengan lainnya dan para pengikutnya.	Akuntabilitas yang saling menguntungkan difokuskan dalam proses kelompok daripada hasil atau penampakkannya.
Kepentingan pribadi	Didefinisikan lebih sempit di dalam sebuah struktur organisasi dengan asumsi kebaikan bagi semuanya.	Tingkat kesadaran kepentingan pribadi yang tinggi bagi individu ataupun kelompoknya. Fokusnya untuk mengatur orang yang ada di sekitarnya. Jangan mengasumsikan dengan apa ini, tetapi menemukan sesuatu dengan menciptakan hubungan dengan orang lain.	Tidak didefinisikan secara khusus. Kepentingan umum bagi orang-orang di dalamnya agar memahami tekanan terhadap mereka dan mencari tahu bagaimana menyelesaikannya.
Komunikasi	Komunikasi dua arah antara sejumlah kecil pemimpin secara <i>top-down</i> . Komunikasi rutin antara pemimpin dengan para pengikutnya.	Komunikasi searah untuk menemukan kepentingan pribadi dan membangun hubungan publik. Komunikasi internal untuk tetap menjaga hubungan antara pemimpin dan para pengikutnya, atau bagi warga masyarakat. Tipe pemimpin yang <i>action minded</i> sering melakukan komunikasi <i>top-down</i> antara pemimpin dan pengikutnya (yang dipimpin), dan dibatasi oleh mekanisme <i>respons balik</i> (<i>canvas, survey</i>).	Komunikasi dua arah (<i>two ways communication</i>) dalam <i>setting</i> kelompok kecil. Jika beberapa kelompok kecil dihubungkan secara bersama-sama dan merepresentasikan komunikasi dalam kelompok masing-masing.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Peranan Orang yang Mengatur Organisasi	Menciptakan aliansi kepentingan kelompok yang difokuskan dalam isu tertentu. Broker sependapat dengan struktur kekuasaan yang kadangkala mengatur lobi-lobi profesional dan memberikan kontribusi keuangan.	Mencari & mengembangkan pemimpin. Mengintruksikan orang-orang dalam konsep kekuatan, termasuk kepentingan pribadi & umum. Mengajak orang-orang dengan tetap berpijak pada nilai mereka untuk bekerja dalam ruang publik. Mengembangkan kekuatan organisasi melalui isu-isu strategi.	Fasilitasi penuh untuk melakukan analisis partisipasi dalam proses refleksi kelompok agar dapat mempengaruhi yang lainnya untuk melakukan tindakan.

Adalah hal yang tidak dapat disangkal bahwa semua keadaan praktis adalah sesuatu yang pasti berbeda. Pernyataan ini sama berbedanya antara siang dan malam, atau menjelang terbitnya matahari dan fajar. Dapat dikatakan bahwa para praktisi adalah orang baru yang cemas tentang sesuatu hal yang tidak mereka ketahui, mengerjakan sesuatu hal yang berguna, dan menghindari tindakan yang tidak perlu atau sia-sia.

Sesungguhnya, antara *perencanaan dan pelaksanaan tindakan*, serta antara perencanaan dan isu kampanye yang berjalan terdiri dari banyak kegiatan sebagaimana strategi umum. Demikian pula antara perencanaan dan tugas-tugas administrasi. Ketiga hal di atas merupakan satuan ikatan keterampilan yang lengkap dan menyeluruh. Perbedaan di antara ketiga strategi di atas berhubungan erat dengan pilihan-pilihan tradisional ruang lingkup para ahli yang lebih sempit yang berpusat pada sumber dan jaringan komunikasi (*communication network*), mobilisasi bertahan atau menyerang untuk melindungi perencanaan yang telah ada. Tindakan langsung lebih menyukai tindakan publik sebagai cara mengagitasi dan mempolarisasikan target dan konstitusi dalam upaya mengembangkan organisasi yang mereka dirikan. Organisasi transformatif mengikat tindakan publik untuk memenangkan permainan yang sesungguhnya. Namun, tindakan mereka yang sedemikian rupa itu, sesungguhnya, lebih terkait dengan proses pengujian nilai dalam penggunaan kekuasaan (*power*).

Pengembangan organisasi (organizational development—OD), termasuk pertemuan ilmiah, *one-one listening*, dan bangunan hubungan lainnya adalah kegiatan kelompok yang sangat akrab dengan *skill* dalam memberikan pelayanan yang sangat profesional kepada masyarakat. Tetapi, ada cara pandang yang berbeda-beda di antara *grassroots organizer*, khususnya antarpraktisi lembaga, sehingga menciptakan imperatif yang sesungguhnya. Sesungguhnya, penggunaan cara-cara tradisional dan *direct action* dalam pengembangan organisasi adalah sama. Tetapi, penggunaan proses *one-one listening* dalam pertemuan tertentu memunculkan aksionis langsung yang efisien-efektif dan unik dalam teknik wawancara *face to face* (langsung) dan kepemimpinan (dikembangkan dan dikerjakan dalam konteks aksi dan pertemuan). Bagaimanapun, pendekatan transformatif dapat mewujudkan sebuah proses untuk mencapai tujuan langsung.

Menganalisis dan memotong isu, analisis kekuatan, serta taktik penelitian dan perencanaan strategi merupakan gabungan berbagai dimensi politik dan teknik. Teknisi yang paling ahli sekalipun, tanpa intuisi politik dan seni tertentu, tidak akan sukses mengorganisasi kegiatan langsung. Bila demikian halnya, mereka sama saja dengan organisasi tradisional yang pengembangannya didasarkan pada prinsip seadanya, khususnya yang bersifat keahlian. Kegiatan secara langsung adalah sesuatu yang bersifat umum, dan biasanya melakukan berbagi keahlian. Juga, pengetahuan dan pengalaman di antara anggotanya. Dengan perkataan lain, ada banyak manfaat dari keahlian yang digunakan, khususnya kampanye organisasi *grassroot* yang terus berkembang luar biasa, sepanjang didasarkan atas teknis, seperti penelitian politik tradisional dan koordinasi kampanye dalam hal bekerja sama.

Pilihan taktik diletakkan dalam konteks kegiatan yang direncanakan atau poin variasi dalam pelaksanaan kampanye. Taktik memiliki banyak prosedur (cara) yang lazim digunakan untuk memperoleh keuntungan. Jangkauan wilayah kampanye sangat luas dan tak terbatas. Sekalipun tidak terikat pada aturan standar, keuntungan dari tindakan langsung ini cenderung dilakukan pada taktik tradisional. Sungguhpun demikian, semua strategi cenderung menggunakan taktik standar misalnya ketika ada iklan TV, teater, *public embarrassment*, bagian tindakan langsung atau solidaritas dan ketidakpatuhan terhadap transformalitas. Acapkali, taktik dapat diperkirakan tetapi trik taktik digunakan secara bersama-sama sehingga dapat saling

membangun bagian yang dapat menciptakan keuntungan strategis. Maksud pembuatan matriks tersebut adalah untuk menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara strategi tradisional, *direct-action* (tindakan langsung), dan strategi transformatif. Strategi *direct-action* dan transformatif memiliki potensi untuk mencapai perubahan sosial yang bermakna, sedangkan strategi tradisional – meskipun didukung oleh reformasi sosial yang bermakna – kurang mampu secara efektif menghadapi perubahan struktur yang tidak sejajar atau tidak adil. Dengan demikian, matriks tersebut mampu menjelaskan cara-cara strategi pemberdayaan *direct-action* dan transformatif yang mampu mempengaruhi perubahan sosial. **a**

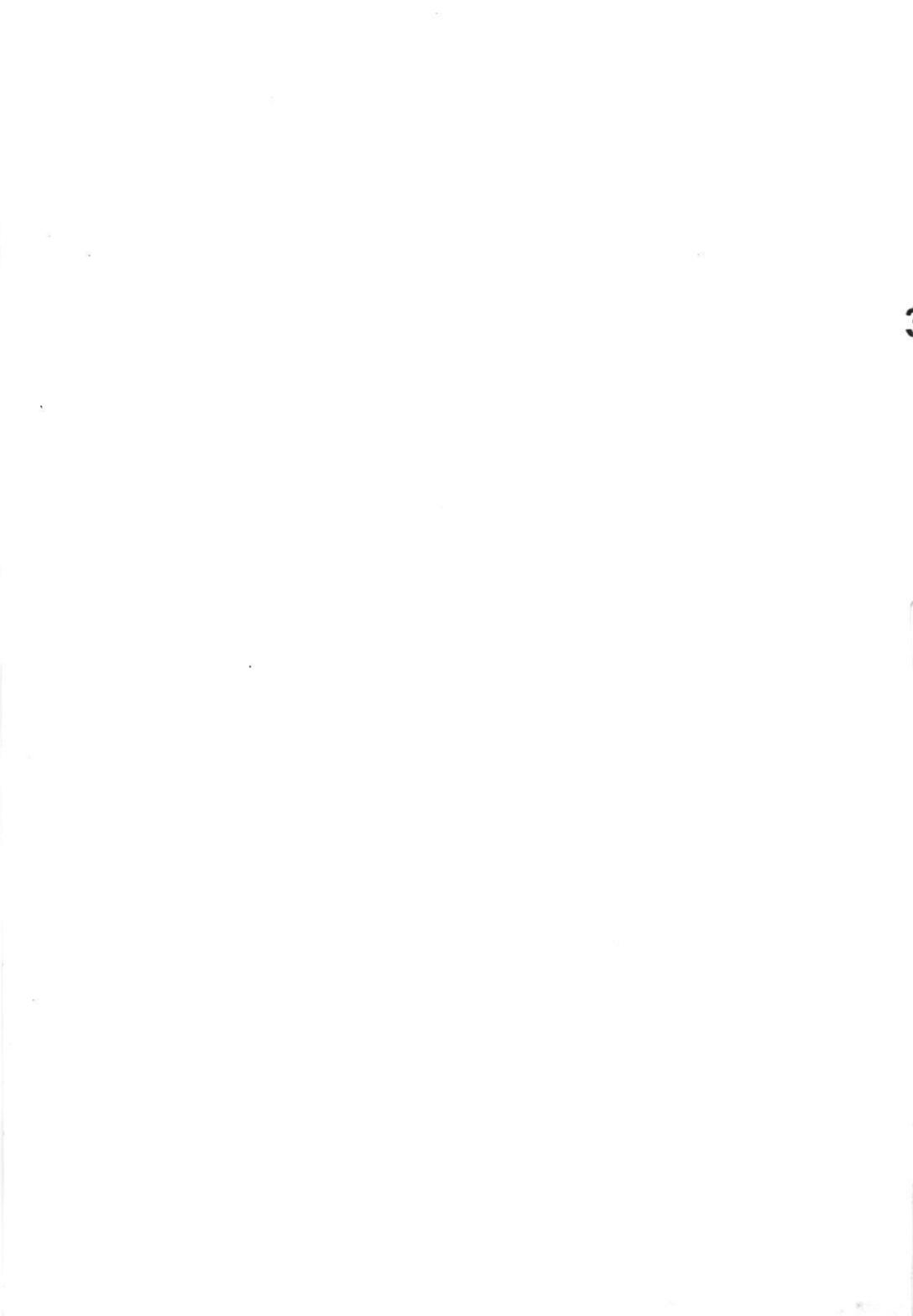
Tabel 3.3 Perbandingan Matrik III:
Keterampilan “Bagaimana Anda Mengerjakan?”

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Perencanaan dan pelaksanaan	Sedikit tindakan atau tidak ada tindakan sejak tujuan dicapai dengan membatalkan janji dengan pemimpin tingkat tinggi dan susunan kekuasaan.	Interaksi kelompok dengan kelompok target untuk mendapat respons, menggabungkan kepentingan pribadi dengan taktik yang bersifat menekan (mampu menolong dan mampu untuk melukai).	Interaksi kelompok dengan kelompok target untuk memungkinkan mendapatkan respons yang diinginkan, atau setidaknya mempublikasikan pandangan orang-orang atau kelompok contohnya, semacam protes moral.
Agitasi	Hanya sedikit agitasi di sekitar nilai. Seorang pemimpin kadang-kala melakukan agitasi satu sama lain di antara mereka.	Mobilisasi tindakan individu menghadapi tantangan mereka antara nilai dan perilaku mereka.	Kadangkala menghasut orang-orang untuk mengerjakan apa yang menjadi pandangan mereka.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Perencanaan dan menjalankan isu kampanye	Mobilisasi sumber organisasi, dan tertarik untuk memenangkan isu utama kelompok. Meningkatkan status pemimpin dan memperluas sumber-sumber kelompok (uang atau orang).	Menggunakan isu untuk membangun organisasi dengan pengaruh positif terhadap diri pribadi, berhubungan dengan konflik kepentingan dari struktur kekuasaan, pelatihan pemimpin menarik anggota baru, dan melibatkan banyak orang.	Bekerja untuk mengekspresikan nilai dan pandangan kelompok, serta menunjukkan nilai konflik dari struktur kekuasaan.
Pembangunan organisasi	Memahami dan menerapkan sebuah logika langkah kemajuan yang cepat untuk membangun dan meningkatkan struktur, ukuran dan kedalaman sebuah organisasi.	Memahami dan melaksanakan logika langkah kemajuan yang cepat untuk membangun dan meningkatkan struktur, ukuran dan kedalaman sebuah organisasi.	Sistem representatif menggabungkan bagian-bagian kecil.
Evaluasi	Refleksi dan evaluasi dan belajar dari kegiatan yang sudah dikerjakan oleh sejumlah kecil pimpinan.	Refleksi kelompok dalam masing-masing kegiatan dalam pelajaran, meningkatkan keahlian, dan mengumpulkan kepentingan pribadi serta kekuatan hubungan.	Refleksi kelompok kecil dalam suasana personal dan hubungan mereka terhadap tekanan struktur sosial.
Analisis & pemotong-an isu	Mempelajari isu yang secara langsung mempengaruhi kepentingan pribadi, topik yang diorganisasikan dalam kelompok untuk mendapatkan poin-poin yang langsung berhubungan.	Mengidentifikasi dan menjelaskan isu sehingga dapat bekerja, dapat mengarahkan fokusnya pada pengambilan keputusan individu dan polarisasi kepentingan individu melawan struktur kekuatan yang dalam hal tersebut yang terdapat konflik nilai.	Analisis isu dalam pola konteks tekanan yang lebih luas.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
Pertemuan	Proses hierarki untuk melaksanakan kegiatan dan bagi pemimpin untuk menunjukkan tugas kepada para pengikutnya. Kunci keputusan dibuat oleh sekelompok kecil pimpinan atas.	Melakukan pertemuan untuk menkonfirmasi rencana kegiatan, dan menjamin hubungan saling menguntungkan dari para partisipan. Pengambilan keputusan oleh pimpinan yang mewakili pandangan-pandangan pengikutnya.	Tidak langsung, proses yang tidak hierarki untuk menunjukkan ekspresi sepenuhnya dari masing-masing perasaan dan pikiran. Kelompok dari struktur eksternal diketuai oleh seorang fasilitator.
One-one listening dan bangunan hubungan	Dalam hal ini, biasanya pemimpin mengevaluasi pimpinan yang potensial, seperti belajar tentang hambatan atau mengooptasi orang.	Memperluas <i>one-one</i> untuk mendapatkan banyak kepentingan orang-orang dan isu, mengidentifikasi pimpinan yang potensial dan membangun hubungan untuk melibatkan dan menggerakkan orang-orang.	Dibatasi <i>one-one</i> yang dilakukan secara informal tak berstruktur bagi partisipan untuk mengenal kepribadian satu sama lain. Kebanyakan berbagi pengalaman satu sama lainnya dalam kelompok kecil
Analisis kekuatan	Memahami kepentingan atau struktur kekuatan individu dan organisasi, tetapi bukan untuk mempublikasikan hubungan dan tingkat pengawasan.	Menganalisis kepentingan, pengaruh pengambilan keputusan dan pengawasan untuk memahami serta membuka hubungan kekuatan dan mengidentifikasi target bagi tindakan.	Menganalisis struktur lembaga sebagai sistem tekanan. Biasanya, tidak melalui analisis untuk kepentingan khusus dari struktur kekuasaan. Kemungkinan menggunakan dialektika atau analisis ekonomi-politik untuk membuat rencana kepentingan kekuatan.
Penelitian teknik	Mengumpulkan informasi yang berguna untuk isu kampanye dengan meneliti proses pengambilan	Mengumpulkan informasi yang berguna untuk isu kampanye dengan meneliti proses pengambilan	Dibatasi sejumlah penelitian, sejak kepercayaan diletakkan dalam analisis abstraksi dari lembaga.

Dimensi	Tradisional	Tindakan Langsung	Transformatif
	keputusan, alternatif pemecahan isu, kepentingan individu dan organisasi yang dimainkan, dan hubungannya dengan struktur kekuasaan.	keputusan, alternatif pemecahan isu, kepentingan individu dan organisasi yang dimainkan, dan hubungannya dengan struktur kekuasaan.	
Perencanaan strategi	Mengumpulkan visi, tujuan, jadwal yang mungkin, membutuhkan perencanaan kerja, sumber-sumber, partisipasi.	Mengumpulkan visi, tujuan, jadwal yang mungkin, membutuhkan perencanaan kerja, sumber-sumber, partisipasi.	Dibatasi oleh sejumlah perencanaan, memperluas jumlah sel dan fasilitator, dan menciptakan hubungan struktur antara sel.
Pilihan taktik	Menggunakan taktik tradisional yang dapat diterima melalui saluran, kekuatan. Taktik nontradisional jarang digunakan dalam situasi yang ekstrem.	Mengidentifikasi taktik yang merupakan pengalaman dari pemilih, dan jika memungkinkan pengalaman dari target diluarnya. Menciptakan peranan untuk memainkan taktik baru daripada menerima perilaku yang seringkali melibatkan banyak orang.	Kadang-kadang menggunakan taktik tradisional, tetapi selalu menggunakan atau menciptakan sesuatu yang berasal dari luar dan merupakan norma-norma yang dapat diterima.



3

4 PRAKTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Konsientisasi (*Conscientization*)

Analisis Marx mengenai kekuasaan sebagai alat atau metode yang tepat untuk meneruskan cita-cita eksistensialisme, fenomenologi atau personalisme, sekurang-kurangnya mencakup bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ekonomi diterima sebagai basis dasar kekuasaan. Kekuasaan itulah yang kemudian membuat bangunan-bangunan atas yang sangat manipulatif, termasuk sistem pengetahuan, politik, hukum, ideologi, dan religi. Sementara itu, yang tertinggal hanyalah manusia yang berkuasa menghadapi manusia yang dikuasai. Dalam kondisi demikian, gerakan pembebasan harus terjadi melalui proses liberarisasi atau emansipasi yang memerlukan proses *empowerment of the powerless*.

Pranarka dan Vidhyandika (1996) menyatakan bahwa pengaruh Freud juga sedemikian menguat. Menurutnya, ajaran Freud mengenai relasi *Ego-Id* dan *Superego* merupakan alat analisis dan metode kerja yang diperkirakan dapat menjadi wahana operasionalisasi gelombang antisistem, antideterminisme, dan antikekuasaan. *Superego* adalah kekuasaan yang menekan secara operatif dan represif terhadap *Ego*, melalui *Id*, yang menjadi faktor *subconsciousness*. Gerakan pembebasan

Ego perlu dilakukan melalui proses konsientisasi seiring dengan melepasnya cengkeraman kekuasaan Superego yang represif.

Konsientisasi merupakan faktor antara (*intervening*) dalam proses pemberdayaan (*process of empowerment*). Paulo Freire, seorang pakar pendidikan berkebangsaan Brasil memperkenalkan istilah konsientisasi (*conscientization*) dalam bukunya yang berjudul *Pedagogy of the Oppressed*. Buku yang menjadi *master piece*-nya ini mengandung muatan pemikiran mengenai kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Freire menjelaskan pengertian *conscientization* sebagai berikut.

"... Every human being, no matter how ignorant or submerged in the culture of silence he maybe, is capable of looking critically at his world in a dialogical encounter with others. Provided with the proper tools for such an encounter, he can gradually perceive his personal and social reality as well as contradiction in it, become conscious of his own perception of that reality, and critically with it. ... the stimulation of self-reflected critical awareness in people of their social reality and of their ability to transform that reality by their conscious collective action."

Pendekatan Freire tentang masalah pendidikan anak-anak agar dapat bertahan dalam kenyataan (*realitas*) kehidupan disebutnya sebagai proses konsientisasi (*conscientization process*). Proses konsientisasi diartikan sebagai proses pemberdayaan kolektif untuk menentang pemegang kekuasaan melalui kesadaran berpolitik.

Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri (*looking inward*), serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Konsientisasi merupakan proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-hubungan politis, ekonomi, dan sosial. Seseorang menganalisis sendiri masalah yang dihadapinya, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan skala prioritasnya, dan memperoleh pengetahuan baru darinya. Konsientisasi merupakan sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang (*inner space*) yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Analisis realitas harus dilakukan oleh orang yang dapat memutuskan sendiri apa kebutuhannya yang sesungguhnya dan

pengalaman yang penting baginya, bukan diputuskan oleh orang lain atau para pakar yang tidak memahami kelebihan dan kekurangan dirinya.

Melalui analisis semacam ini, orang akan mampu mengambil tindakan sendiri untuk menentang unsur opresif dari realitasnya, termasuk di dalamnya pemecahan (pematahan) hubungan antara subjek dan objek untuk kemudian membentuk esensi partisipasi yang sungguh-sungguh. Ini juga merupakan kritik terhadap konsep partisipasi yang telah berkembang lebih dulu. Pendekatan alternatif pembangunan tidak hanya terfokus pada keterlibatan (partisipasi) pihak penerima dalam proses pembangunan, tetapi juga memampukan mereka untuk mengawasinya guna melindungi kepentingannya sendiri (Friedmann, 1992).

Pemecahan Masalah melalui Proses Pemberdayaan

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Menurut Rappaport (1985), praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang-orang lain yang kita anggap penting, serta masyarakat di sekitar kita. Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan sehingga akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.

Ide yang menempatkannya lebih dari sekadar subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan tersebut. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya

membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 1984). Kecenderungan atau proses yang pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. *Kedua* atau *kecenderungan sekunder*, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sesungguhnya, di antara kedua proses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Libassi dan Maluccio (1986) menerjemahkan hal ini ke dalam praktek pekerjaan sosial. Ia memandang klien sebagai mitra kolaboratif – sebagai orang yang memiliki segala aset dan potensi yang dianggap tidak sekadar sebagai sumber, tetapi juga sebagai karier dan sumber patologi. Mereka mengharapkan pekerja sosial sebagai seorang profesional yang memberikan informasi penting untuk klien dalam mencapai tujuan-tujuannya, menjajagi proses-proses pengembangannya dan melaksanakan tugas-tugas adaptifnya.

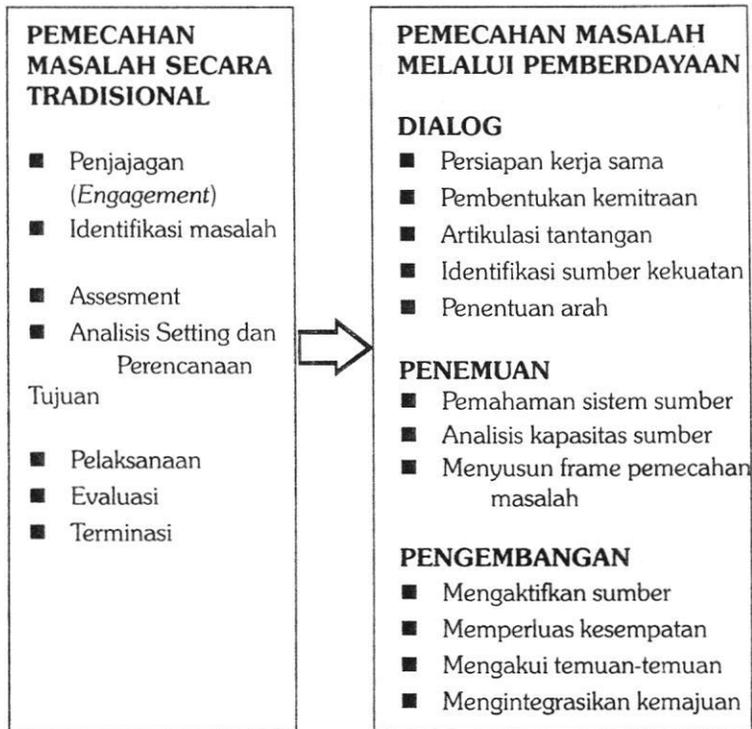
Dalam prakteknya, pekerjaan sosial berbasiskan pemberdayaan – baik pekerja sosial maupun klien – melakukan pendekatan kerja bersama sebagai mitra kolaboratif. Bagi klien, kerja sama kolaboratif berarti merupakan aktualisasi pemberdayaan.

Paparan berikut adalah proses pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan sosial mulai dari pekerjaan yang bersifat tradisional sampai dengan pekerjaan yang merefleksikan praktek berbasiskan pemberdayaan, seperti yang dikemukakan oleh Dubois dan Milles dalam gambar 4.1 berikut. Adapun model sistem strategi pemberdayaan masyarakat disajikan dalam gambar 4.2

Berdasarkan konsep tersebut, proses pemberdayaan secara umum meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

1. Merumuskan relasi kemitraan.
2. Mengartikulasikan tantangan-tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada.
3. Mendefinisikan arah yang ditetapkan.
4. Mengeksplorasi sistem-sistem sumber.

Gambar 4.1 Pemecahan masalah
Secara Tradisional dan Pemberdayaan



Sumber: Dubois dan Miley, 1996, *Social Work an Empowering Profession*, hal. 253.

5. Menganalisis kapabilitas sumber.
6. Menyusun frame pemecahan masalah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan.
8. Mengakui temuan-temuan.
9. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Sejak awal, proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsip bekerja bersama masyarakat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai.

Keberdayaan Masyarakat

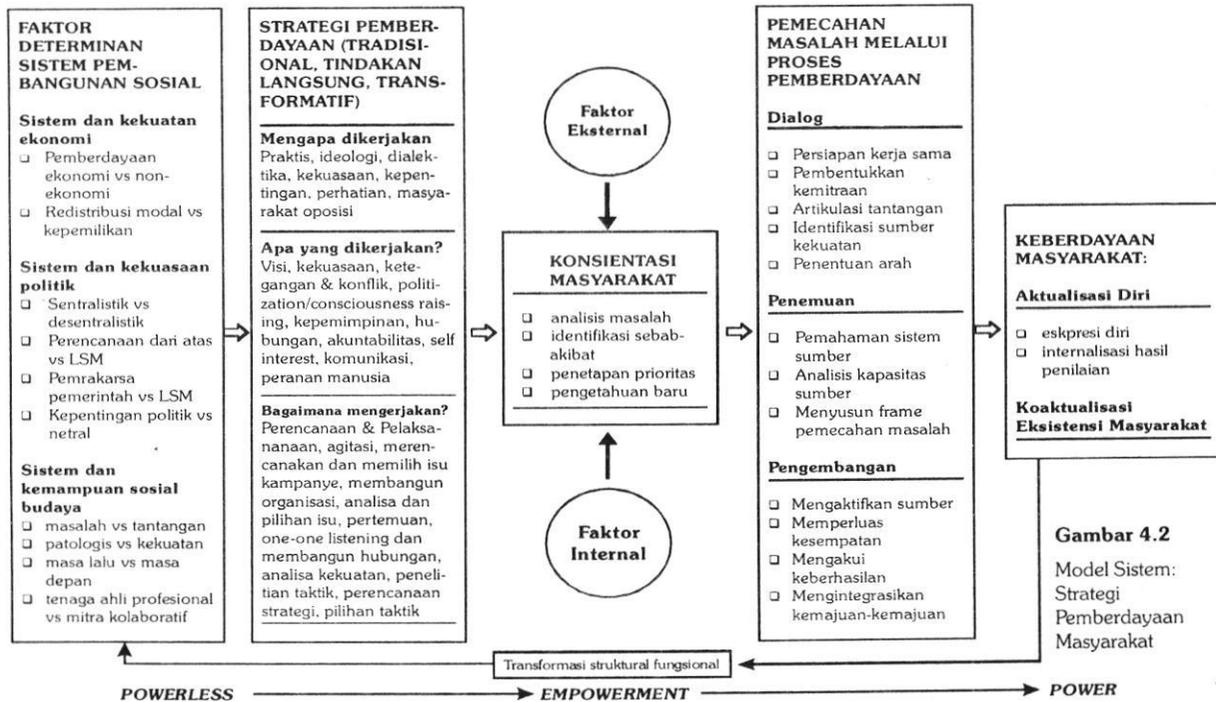
Secara sosiologis, Pranarka dan Vidhyandika (1996) menyatakan bahwa terhadap sistem dan kekuasaan yang menjadi manifestasi dari determinisme sendiri, terbukti ada variasi dalam sikap dan pandangan. *Pertama*, siap radikal, yakni tindakan yang menghinilisasikan segala apa yang dinamakan sistem, dan apa yang dinamakan *power*. Saat itu, gerakan yang dikenal adalah istilah *power to nobody*. *Kedua*, pendekatan yang menyatakan bahwa kekuasaan dan sistem harus dipegang oleh semua orang secara sama (*power to everybody*). Pendekatan ini, pada akhirnya, bermuara pada situasi anarki atau *power* tanpa norma dan etika yang disepakati bersama. *Ketiga*, pendekatan yang berprinsip pada gagasan bahwa yang penting adalah memberikan *power* kepada yang *powerless*. Hanya dengan memiliki *power*, mereka — yang terhimpit dalam ketidakberdayaan (*powerless*) itu — akan dapat melaksanakan proses aktualisasi-eksistensi dirinya.

Demikianlah, garis-garis besar pendekatan yang kemudian menjadi pola dasar dari gerakan pemberdayaan (*empowerment*). Gerakan ini tetap mengamanatkan tentang makna penting dan perlunya *power*, dan juga menekankan keberpihakan kepada *the powerless*. Gerakan ini, pada dasarnya, berniat meyakinkan pihak lain yang *the powerless* bahwa semua pihak dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan proses aktualisasi-eksistensi diri. Secara struktural, manusia memang perlu diberi kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasikan eksistensinya (*self-actualization*). Bagaimanapun, aktualiasasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipungkiri.

Konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual (*individual self-empowerment*), tetapi juga secara kolektif (*collective self-empowerment*). Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri (*self-actualization*) dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan perkataan lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Payne (1991) menyatakan bahwa

“many client’s oppression by and alienation from powerful groups in society is better recognized, as is the close relationship of social workers and their agencies with those groups”.

PRE-EXISTING CONDITION → STRATEGI → INPUT → PROSES → OUTPUT & OUTCOMES



Gambar 4.2
Model Sistem:
Strategi
Pemberdayaan
Masyarakat

Strategi: Pemberdayaan Masyarakat

Sementara itu, Russel-Erich dan Rievera (1986) mengemukakan bahwa pemberdayaan dalam komunitas yang opresif merupakan respons yang esensial untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi dan politik bagi masyarakat tersebut di dalamnya (Payne, 1991). Karena itu, konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif-efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional; termasuk dalam bidang politik, ekonomi, maupun lainnya (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).^a

5 PEMBERDAYAAN DAN ADVOKASI

Pentingnya Advokasi

Kelompok Marxis menawarkan perspektif pekerja sosial dengan konsentrasi pada perubahan sosial. Pada akhirnya, formulasi teori yang tergolong “canggih” tersebut lebih banyak berhubungan dengan sekelompok kecil masyarakat atau individual dan keluarga daripada aksi politik yang sedemikian luas. Sungguhpun demikian, kelompok ini telah berusaha dalam upaya memberikan petunjuk guna memberikan kontribusi terhadap konflik objek sosial dalam perubahan sosial. Mereka berupaya meningkatkan aspek positif dalam diri manusia agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Pekerja sosial radikal telah memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam pekerjaan sosial, khususnya di Eropa. Mereka juga berhasil memastikan bahwa pekerja sosial telah menyadari fungsi-fungsi kontrol sosial berkaitan dengan pekerjaan. Mereka menyadari adanya potensi konflik antara perawatan yang diberikan oleh mereka dan aturan-aturan dari fungsi-fungsi kontrol *official*. Berdasarkan potensi itu, timbullah kesadaran yang sangat besar bahwa teori pekerja sosial harus mampu beradaptasi secara baik dan elegan dengan keadaan sosial yang ada. Karena itu, model-model pembangunan praksis didesain sedemikian rupa untuk dapat digunakan dalam pekerjaan sosial. Dalam kaitan

ini, konsep yang paling penting untuk meningkatkan peran mereka adalah pemberdayaan.

Solomon (1996) memberikan analisis yang sangat lengkap mengenai perspektif tersebut. Sebaliknya, Furlong (1987) melihat pemberdayaan sebagai tujuan penting dalam *case work* karena menghindari terjadinya polarisasi dalam aksi sosial dan perspektif individu yang meletakkan individu dan keluarga dalam konteks objek sosial. Russel-Erlich dan Revera (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan dalam masyarakat yang tertekan ditujukan untuk mengatasi kecenderungan tekanan kehidupan ekonomi dan politik. Bagi Rojek (1986), sungguhpun pemberdayaan berhubungan sangat dekat dan bersifat perspektif dengan teori yang dikemukakan kelompok Marxis, advokasi dan strategi pemberdayaan merupakan objek yang sangat berbeda. Keduanya berasumsi bahwa pemberdayaan merupakan sesuatu yang mungkin saja bisa mengubah keadaan klien.

Pendekatan radikal adalah sesuatu yang bersifat materialis, dan mengklaim bahwa sistem sosial membutuhkan perubahan yang sangat luas sebelum strategi pemberdayaan digunakan. Pekerja sosial radikal melihat bahwa pemberdayaan lebih banyak menciptakan kontradiksi dalam masyarakat daripada keadaan rasional masyarakat secara langsung. Adapun advokasi adalah praktek kerja sosial untuk meningkatkan klien dalam rangka menghadapkan diri mereka dengan kehidupan sosial masyarakat. *Case advocacy* dilakukan oleh para profesional untuk meningkatkan klien agar dapat memperoleh keuntungan, dan meningkatkan perubahan sosial untuk kepentingan kelompok sosial.

Advokasi dan Proses Pemberdayaan

Proses peningkatan kemampuan masyarakat yang mengalami gangguan dan hambatan mental telah mendorong pekerja sosial untuk memberikan bantuan agar mereka memperoleh haknya kembali. Ternyata, proses ini berkembang pesat di Amerika Serikat dan Inggris sehingga memungkinkan para penyandang masalah sosial menemukan dirinya kembali. Untuk kembali menjadi normal, mereka diberikan dan ditanamkan nilai-nilai kehidupan seperti halnya orang-orang yang

berada di luar kelompok mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian perhatian dan perawatan serta bekerja sama dengan orang-orang yang mengalami masalah sosial sangat berguna dalam proses pembangunan. Bagi Rose dan Black (1985), proyek tersebut merupakan bentuk nyata dari kehidupan bebas bagi penyandang masalah sosial dalam masyarakat. Bagaimanapun, pemberdayaan seharusnya menjadi subjek utama daripada sekadar objek jika melibatkan mereka dalam advokasi. Melalui debat kritis dengan klien telah memberikan situasi yang sangat beragam hingga menimbulkan kesadaran pada diri subjek bahwa mereka memiliki keterbatasan kemampuan terhadap lingkungannya. Transformasi klien dari tergantung menjadi tidak tergantung merupakan hasil dukungan dari jaringan pekerjaan sosial secara kolektif.

Semua perubahan sosial memiliki isi yang bersifat politis, apakah mereka menerima atau menolak dalam keadaan sekarang ini. Klien dalam wilayah praksis, *acting* dan pengalaman nyata yang mereka alami berpengaruh terhadap aksi mereka kemudian. Para pekerja berusaha untuk memahami apa yang dilakukan oleh para klien. Pengungkapan diri dalam rangka menolong mereka untuk mendapatkan kembali kemampuan yang sebelumnya mereka miliki merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Dalam posisi ini, pekerja sosial membantu klien untuk berekspres secara optimal. Klien lebih banyak menjadi partisipan produser daripada sebagai konsumen yang menerima pelayanan secara pasif. Tabel 5.1 berikut menunjukkan bahwa pendekatan kepada klien bersifat radikal, tetapi hubungan kemanusiaan dengan ide-ide, nilai-nilai pengontrol diri, dan pengetahuan masih menjadi kontrol yang rasional dalam hubungan di antara mereka.

Advokasi dan Contoh Kasus Pemberdayaan Kulit Hitam

Di dalam bukunya, Solomon sangat tertarik kepada kehidupan dan nasib etnik minoritas hitam. Menurut Solomon (1995), ketidakberdayaan dalam individual atau kelompok sosial dianggap sebagai ketidakmampuan untuk mengatur emosi, *skill* (keahlian dan keterampilan), pengetahuan (*knowledge*), dan sumber-sumber material lainnya dalam tatanan nilai-nilai sosial.

Tabel 5.1 Advokasi dan Proses Pemberdayaan

Tahap	Proses	Kegiatan
Awal	Membatasi masalah	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifikasi masalah klien dengan menjajaki persepsinya sehingga dapat diketahui bahwa dunia luar telah menciptakan permasalahan tersebut. ■ Meneliti perbedaan pandangan permasalahan antara pekerja sosial dan klien. ■ Meningkatkan keyakinan tentang kebenaran hasil penelitian.
	Mengidentifikasi pilihan tindakan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan pengetahuan pekerja sosial untuk menolong klien agar dapat memahami bahwa dunia ini terpengaruhi. ■ Mengidentifikasi klien sebagai aktor (subjek) daripada hanya sebagai objek dalam hubungan untuk sebuah permasalahan tertentu. ■ Menghindari dominasi kepemimpinan—adanya pembagian tanggung jawab pengambilan keputusan.
Praktek Pemberdayaan	"Verstehen" (pemahaman)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami perspektif atau cara pandang klien, khususnya tentang konsep diri mereka sendiri. ■ Menunjukkan kepercayaan. ■ Tidak ada dominasi atas kesempatan terhadap pemahaman bahasa baru dan poin-poin acuan.
	Topik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menentukan <i>generative themes</i> dalam kehidupan klien (isu sentral mengenai terganggunya dan tertekannya kehidupan mereka).
	Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Munculnya kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakberdayaan akibat tekanan legitimasi dan kenyataan yang membingungkan.
	Anomie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengevaluasi gambaran dunia klien secara kritis bahwa akan terjadi perubahan.

Tahap	Proses	Kegiatan
	Analisis konsekuensi dari tindakan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menolong klien untuk memahami bahwa ketakutan mereka terhadap ketergantungan hidup pada masa lalu dapat dipahami. ■ Mendukung rencana rasional pada masa depan daripada reaksi-reaksi yang mencemaskan.
	Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perencanaan strategis, akses terhadap kegiatan yang realistis. ■ Menolong klien untuk memahami perbedaan kekuatan dan konflik-konflik kepentingan yang akan menghambat tindakan.
	Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memilih sasaran untuk tindakan, apakah akan dikerjakan ataukah tidak.
	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Merefleksikan dan menganalisis tindakan agar terus berlanjut untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya.
	"Verstehen"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memperkirakan bahwa klien dan pekerja dapat diubah oleh tindakan, dan prosesnya akan dimulai di segala bagian dan semua siklus kegiatan.

Secara khusus, pemberdayaan dilakukan dalam rangka mengurangi eliminasi, serangan, dan valuasi negatif oleh kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan individu dan kelompok sosial. Boleh jadi, hal ini sangat berguna dalam kasus-kasus yang dihadapi keluarga sehingga dapat memperkuat kemampuan anggota keluarga untuk tetap *survive*. Keadaan ini diekspresikan oleh para pekerja sosial dalam budaya keluarga. Pada prakteknya, para pekerja sosial mengalami kesulitan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan karena agensi mereka hanyalah sistem sosial bagi kelompok minoritas tersebut. Orang yang datang kepada agen mengharapkan adanya kesejajaran dan tidak ada diskriminasi. Kadangkala, cakupan valuasi negatif begitu luas sehingga para agen tidak mampu memikirkan bagaimana memberdayakan mereka.

Ketika para klien tidak menerima perlakuan sejajar, juga terjadi pada para agen yang tidak mempekerjakan orang kulit hitam dalam posisi senior. Mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang biasanya didominasi oleh populasi etnik minor. Dominasi ini untuk melindungi staf dari potensi kekerasan etnis minoritas tersebut dalam valuasi negatif yang lazim disebut *institutional racism*. Biasanya, orang-orang yang ada dalam kelompok sosial tersebut menderita akibat ketidakadaan *power*, bukan karena kegagalan *power* (mereka sudah menggunakan *power* dan kalah).

Berdasarkan tahapannya, ada tiga tingkatan pelaksanaan pemberdayaan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Pengalaman positif dalam keluarga yang memberikan rasa percaya diri dan persaingan dalam interaksi sosial.
2. Memaksa kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan sosial dan menggunakan institusi sosial (sekolah) untuk memperoleh kompetensi.
3. Mereka dapat menerima dan menampilkan nilai-nilai sosial.

Kemiskinan yang menjerat dan menghimpit kehidupan mereka telah berperan besar dalam menumbuhkembangkan ketidakmampuan mereka mengurangi kepercayaan dalam interaksi sosial. Mengenai hal ini, Solomon berpendapat bahwa pekerjaan sosial yang lebih dikonsentrasikan pada perubahan individu daripada lembaga sosial akan dapat menyebabkan titik lemah dalam berhubungan dengan kekuatan (*power*) lainnya. Karena itu, jawaban yang paling tepat untuk mereka adalah proses pemberdayaan (*process of empowerment*). Proses pemberdayaan yang dimaksud adalah untuk menolong klien supaya

1. mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri klien untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi;
2. ilmu pengetahuan dan *skill* (keahlian dan keterampilan) pekerja sosial dapat digunakan oleh klien secara optimal;
3. pekerja sosial sebagai partner yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi;
4. struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka untuk dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Sementara itu, model praktek proses pemberdayaan yang harus dilakukan, sebagai berikut.

1. Memberikan respons di antara klien dari valuasi negatif sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi.
2. Memperoleh dukungan efektif-efisien dalam memecahkan berbagai masalah di atas.

Peran Pekerja Sosial

Para pekerja sosial harus menyadari adanya ketidakberdayaannya dalam melihat berbagai penyebab masalah klien. Karena itu, mereka harus berusaha untuk mengetahui bahwa klien juga dapat dianggap sebagai penyebab yang dengan itu mereka mengatasi dan mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) yang mereka hadapi. Contohnya, saya bekerja dengan seorang wanita yang mengabaikan anaknya karena ia terhimpit dalam kemiskinan. Karena itu, pekerja sosial harus melihat klien secara objektif dan pendekatan empati, serta mencari cara untuk mengatasi agar anak tersebut dapat dikirim ke tempat perawatan anak-anak. Jika, misalnya, saya melakukan ini, saya akan frustrasi dan menyalahkan dia karena ketidakmampuannya mengatur waktu dengan anaknya dan ketidakkreativitasannya bermain dengan anak-anak sehingga menjadi bosan.

Sebenarnya, masalah ini bukanlah masalah wanita tersebut semata-mata, melainkan juga masalah yang meluas, yakni lingkungan kemiskinan yang menyebabkannya harus berusaha kuat untuk memaksimalkan waktu dan tenaganya. Sementara itu, karakteristik praktis yang bukan rasis menerapkan beberapa hal berikut.

1. Kemampuan untuk melihat penjelasan alternatif bagi perilaku yang seharusnya ditolak.
2. Kemampuan untuk memilih alternatif penjelasan yang lebih relevan terhadap klien.
3. Kemampuan berempati sehubungan dengan adanya ras atau karakteristik lainnya.
4. Kemampuan untuk membuang kesalahpahaman atau distorsi.

Agaknya, pendekatan yang dilakukan Solomon dalam sistem klien orang hitam sangat berguna bagi pemberdayaan kelompok-kelompok

tertekan. Asumsi dasar tentang orang hitam yang mendatangi agen-agen sosial sangat meyakinkan mereka bahwa para pekerja sosial menawarkan sesuatu yang lain. Karena itu, seorang pekerja harus mampu menunjukkan rasa akrab dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan kliennya. Dalam hal ini, pembagian kriteria untuk memotivasi pekerja tidaklah tepat karena nilai-nilai setiap pekerja sosial berkeyakinan bahwa budaya klien bukanlah nilai (*value*). Namun demikian, budaya diharapkan dapat memotivasi semangat juang klien. Peranan seorang pekerja sosial dianggap baik dan berkualitas dalam proses pemberdayaan bila memiliki kriteria berikut.

1. Sumber konsultan yang menghubungkan klien untuk dapat menghubungkan diri mereka dan dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi secara mandiri.
2. Membantu klien untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan kemampuan.
3. Pelatihan atau guru mengajari proses dan *skill* (keahlian) tertentu sehingga memungkinkan klien mengerjakan tugasnya dengan sangat baik.

Contohnya, saya bekerja dengan seorang jompo dari salah satu negara ASEAN. Orang ini cacat sehingga harus diisolasi karena beberapa temannya telah pulang lebih dulu ke Malaysia. Berbeda dengan pandangan yang saya miliki mengenai pusat-pusat perawatan yang tidak simpatik, beragam kemungkinan sosial dari organisasi yang kami ketahui pun dapat diidentifikasi sebagai pendekatan satu organisasi kepada organisasi lainnya. Sebenarnya, pendekatan bagi orang jompo tersebut merupakan dasar kepercayaan dan kemampuan diri sendiri terhadap alasan-alasan yang sangat beragam. Dalam kaitan ini, strategi yang sangat penting adalah menolong klien supaya mampu menyediakan pelayanan bagi keluarga, tetangga, dan masyarakat.

Contoh lain, seseorang menolong wanita untuk meningkatkan karier anaknya agar mandiri. Cara ini memberikan wanita itu sebuah keahlian sebagai umpan balik (*feed back*) kepada masyarakat dengan cara memberikan *skill* kepada masyarakat dalam hal hubungan keluarga, sekaligus menghindari anak-anak agar tidak memperoleh pengalaman buruk pada tahap awal perkembangan psikologisnya. Belajar dari teori

menolong bagi pekerja sosial di atas, ide ini memberikan dukungan yang sangat berarti terhadap beberapa penelitian ide pemberdayaan (Barber, 1986). Salah satunya adalah teori yang dikemukakan Seligman (1975). Teori ini didasarkan pada pengalaman tentang hubungan antara binatang dan manusia yang menunjukkan bahwa manusia memiliki pengalaman yang teramat penting dan sangat berarti baginya.

Strategi advokasi (*advocacy strategy*) dan pemberdayaan telah membuktikan ketertarikannya terhadap isu-isu pembangunan dan pekerja sosial. Ketertarikan tersebut merupakan tantangan orang hitam sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang sangat kuat. Dalam kaitan ini, advokasi telah menjadi bagian dari pergerakan pembebasan bagi orang-orang yang ingin dirawat lagi. Sesungguhnya, ide ini sangat idealis, juga praktis-aplikatif sehingga dapat diterapkan secara mudah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa advokasi dan proses pemberdayaan menciptakan sebuah ideologi perawatan, serta pengobatan yang berbeda dengan pengalaman klien dan pekerja.

Filosofis dari pengontrolan diri (*self-control*) dan tanggung jawab personal dalam pemberdayaan memiliki pendekatan yang sangat humanis (*humanism approach*). Karena itu, *power*, kelas, dan tekanan sebagai salah satu aspek masyarakat yang menunjukkan adanya aktualisasi diri (*self-actualization*) dan harus diaktifkan adalah sesuatu yang sangat signifikan. Pandangan kritis tentang pemberdayaan dan advokasi belum berkembang luas, meskipun potensi krisis itu dapat diidentifikasi. Potensi ini berkaitan pula dengan pandangan terapi, konsentrasi pemberdayaan dalam kapasitas klien, dan tidak melihat perubahan langsung terhadap struktur sosial yang cenderung meletakkan tanggung jawab perubahan sosial di atas klien.

Kesulitan lain yang dihadapi pekerja sosial saat berhubungan dan berinteraksi dengan individu adalah ketidakjelasan adanya jaringan masyarakat (*social network*). Padahal, adanya jaringan dapat meningkatkan *power* dan menambah sumber-sumber lingkungan sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, dalam lingkungan sosial dan politik yang sumbernya terbatas, pemberdayaan menjadi *setting* utama dalam upaya melawan kelompok lain, bukan menjadi model penyatuan mereka. a

6

PEMBERDAYAAN SEBAGAI STRATEGI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

Pembangunan Masyarakat (*Community Building*)

Para pekerja sosial dihadapkan kepada permasalahan individu yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pemikiran yang komprehensif melihat permasalahan yang dialami seorang individu sebagai subordinasi dari permasalahan keluarga, sedangkan permasalahan keluarga merupakan subordinasi dari permasalahan komunitas atau masyarakat tertentu. Maksud perkataan “subordinasi” adalah keadaan yang menyangkut unsur tertentu secara sistematis yang disubordinasikan dari unsur yang lebih besar dalam *universum* tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa tingkah laku individu-individu merupakan refleksi dari tingkah laku lingkungan sosial.

Bagi pekerja sosial, pendekatan untuk memahami tingkah laku yang disfungsi sosial menempatkan perspektif faktor-faktor yang bersifat inheren (faktor internal), seperti kepribadian dan faktor psikologis. Faktor ini dianalisis secara proporsional dengan faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial (keluarga, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat).

Pekerja sosial memandang bahwa individu adalah bagian dan terbentuk oleh keadaan masyarakat. Berdasarkan hal ini, pekerja sosial yang

bekerja melayani masyarakat, pada hakikatnya, dapat menjadi metode perantara dalam menyelesaikan masalah perorangan. Kasus seorang pengidap HIV atau penderita AIDS yang berdampak luas bagi masyarakat sekitarnya membutuhkan penanganan serius dari pekerja sosial. Melalui pendekatan humanistik yang diprakerankan seorang pekerja sosial, ia dapat meningkatkan fungsi sosial individu yang dianggap "sampah masyarakat" tersebut dalam konteks lingkungan sosialnya. Demikian pula, saat reaksi negatif masyarakat terhadap penyandang masalah tersebut membutuhkan penanganan pekerja sosial untuk menyadarkan masyarakat bahwa masalah yang dihadapi individu tersebut harus disikapi dengan pendekatan nurani.

Permasalahan yang dialami oleh seorang klien, jika dibiarkan sendiri menghadapi permasalahannya, pada satu sisi, klien akan terbenam sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan luar yang sangat kompleks. Pada sisi lain, ia tidak memahami permasalahan itu dan tidak dapat mengendalikannya. Jika klien menginginkan masa depan yang lebih baik, ia harus menggabungkan diri dengan orang-orang lain untuk menghimpun kekuatannya, baik kini maupun pada masa mendatang. Dengan cara itu, klien akan memperoleh harga diri dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan keahliannya yang dengan itu ia dapat menjadi warga negara yang bermartabat, mempunyai hak dan tanggung jawab yang jelas. Untuk konteks Indonesia, nilai-nilai kebebasan dan konsensus, individualisme dan kemasyarakatan tidak harus bertentangan atau terpisah. Memang, sangat mudah mengatakan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip kebebasan berusaha, kebebasan memiliki sesuatu, dan kebebasan memeluk agama. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebebasan-kebebasan tersebut kadangkala diikuti oleh perasaan keterasingan (teralienasi), kesepian, kemiskinan, dan perasaan tidak mampu, sesuatu yang seseorang tidak mempunyai pilihan lain untuk menampikannya. Inilah ciri-ciri yang menonjol dari masyarakat Indonesia yang tetap memerlukan rasa kebersamaan dalam menjalankan siklus kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut, praktek pekerjaan sosial dalam kehidupan masyarakat perlu diawali oleh titik pandang (paradigma) yang sama. Paradigma ini harus bersifat konvergen dan multidimensi. Setiap fakta atau realita sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam dan akurat tentang kesalingterkaitan atau interdependensi antarberbagai komponen, baik horizontal maupun vertikal. Secara hori-

zontal, seorang pekerja sosial (*social worker*) harus memahami berbagai macam jenis kekuatan yang ada di masyarakat tersebut (antarindividu, antarkeluarga, antarkelompok, antarorganisasi sosial, antarkomunitas). Secara vertikal, pekerja sosial harus memahami struktur formal (organisasi masyarakat dan pola-pola kekuasaan atau kepemimpinan, serta distribusi kekuasaannya) dan informal (hierarki kekuasaan informal) yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kehidupan masyarakat merujuk pada sesuatu yang menyangkut kehidupan bersama (tidak menyangkut kehidupan individual atau perorangan). Kehidupan bersama yang paling kecil adalah keluarga, sedangkan yang lebih besar adalah komunitas. Kehidupan di atas komunitas adalah masyarakat. Pekerja sosial harus berada dalam kehidupan masyarakat berarti ia bertanggung jawab untuk turut andil dalam membangun masyarakat itu. Pemahamannya tentang "makna dan proses pengembangan" akan dapat membantunya dalam menghasilkan ide-ide "kemajuan" (*progress ideas*). Dikatakan "ide kemajuan" karena gagasan ini berkonotasi ke masa depan atau ke atas (ke tingkat yang lebih tinggi), lazim disebut *futuris*.

Kemajuan dapat diukur, salah satunya, lewat kemajuan secara material dan spiritual. Ukuran material didasarkan pada ukuran konsumsi yang semakin tinggi, sedangkan ukuran spiritual mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat mempermudah kehidupan bersama. Pembangunan masyarakat merupakan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*) yang terwujud dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Karena itu, pembangunan masyarakat dapat berarti bahwa: "semua kegiatan yang direncanakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi praktek pekerjaan sosial yang digunakan untuk kehidupan bersama (bersifat sosial)".

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi dalam Pembangunan Sosial

Sesungguhnya, pembangunan sosial merupakan respons dari pembangunan ekonomi yang telah lama mendominasi model-model pembangunan. Pada perkembangan terakhir ini, paradigma pembangunan ekonomi ternyata perlu diimbangi oleh paradigma

pembangunan sosial; sebagai dikotomi yang saling terintegrasi dan komplementer. Todaro (1994) menyatakan bahwa

- “... sistem ekonomi perlu dianalisis dan didudukkan pada konteks sistem sosial secara keseluruhan di negara tertentu, dan tentu saja, juga dalam konteks global-internasional. Sistem sosial yang dimaksud adalah hubungan-hubungan yang saling terkait antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi”.

Para ahli ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita (*income per kapita*), tetapi juga harus melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk secara seimbang, dalam arti siapa yang sesungguhnya mengenyam dan merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Berdasarkan analisis ini, pemikiran-pemikiran pembangunan yang konvensional sudah mulai ditinggalkan.

Konsep pembangunan pada 1960-an dan 1970-an, secara keseluruhan, hampir selalu dilihat sebagai fenomena ekonomi. Menurut konsep pembangunan ini, pertumbuhan GNP (*gross national product*) per kapita yang cepat diharapkan akan “menetes ke bawah” (*trickle down effect*) kepada masyarakat luas dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan-kesempatan ekonomi lainnya. Selain itu, melalui program ini syarat-syarat yang diperlukan bagi pendistribusian manfaat-manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas akan tercipta. Masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan dianggap soal kedua – bahkan mungkin sepele – dibandingkan dengan “menyelesaikan tugas-tugas pertumbuhan”. Karena itu, dapat dimengerti bahwa dalam perkembangan metode pekerjaan sosial yang menekankan pengorganisasian komunitas (*community organization*) lebih cenderung menempatkan keterlibatan partisipasi masyarakat sebagai hal yang kurang esensial. Metode ini juga cenderung memisahkan diri dari pengembangan komunitas (*community development*) yang terlalu berorientasi pada pembangunan masyarakat desa.

Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin dapat terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Singkat kata, pertumbuhan ekonomi merupakan fakta yang bersifat “tersentralisasi”, sedangkan pemerataan pembangunan sosial lebih bersifat “terdistribusi” untuk semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *trickle down effect* yang cenderung bersifat *top-down* dianggap sebagai paradigma pembangunan yang konvensional. Sebaliknya, model-model pembangunan sosial yang lebih bersifat *bottom-up* dengan strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat bawah (*grassroots*), agaknya, lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sungguhpun demikian, pada akhirnya konsep *top-down* tidak akan dapat menyentuh seluruh kehidupan masyarakat luas, tetapi *bottom-up* juga tidak akan dapat menjadi kebijakan pembangunan satu-satunya karena keinginan yang ada di masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Karena itu, konsep terbaik dalam pembangunan masyarakat adalah kemauan dan kesungguhan untuk mengintegrasikan antara konsep *community organization* (pengorganisasian komunitas) dan *community development* (pengembangan komunitas) sebagai satu kesatuan yang saling komplementer.

Dua konsep tersebut, sesungguhnya, dapat digabungkan menjadi konsep baru yang disebut sebagai *community building*. Konsep *community building* yaitu konsep yang menjalankan fungsinya sebagai pengembangan sekaligus pengorganisasian masyarakat secara bersamaan dan bersinergi. Dalam perkembangannya, metode pekerjaan sosial sejak 1980-an secara partisipatif semakin populer di kalangan LSM. Tujuannya adalah untuk menggugat struktur ekonomi yang mendominasi struktur sosial masyarakat. Strategi-strategi tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pembangunan sosial (*social development*) di masa yang akan datang.

Isu kegagalan akibat dominasi paradigma pembangunan ekonomi yang kurang seimbang dengan pembangunan sosial menjadi lebih transparan setelah *World Summit for Social Development* pada 1995 di Kopenhagen, Denmark yang diprakarsai oleh PBB. Konferensi ini menampilkan tiga isu pokok untuk mengatasi kesenjangan terhadap kesejahteraan manusia secara global, regional, dan nasional. Ketiga isu tersebut meliputi

- 1) penanggulangan kemiskinan;
- 2) peningkatan produktivitas kerja dan mengurangi pengangguran;
- 3) meningkatkan integrasi sosial.

Konferensi tersebut melahirkan kesepakatan bahwa perlunya perhatian masyarakat internasional yang lebih besar pada usaha-usaha penanggulangan ketidakadilan sosial, disintegrasi sosial, dan kemiskinan dalam sistem pembangunan sosial. Komisi *Human Resources Development* dari *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP) sejak 1999 merekomendasikan pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) dalam melaksanakan agenda pembangunan sosial.

Dimensi Pembangunan Sosial

Dimensi-dimensi pembangunan sosial meliputi peningkatan produktivitas, pelayanan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembangunan masyarakat.

Peningkatan Produktivitas (Productivity Enhancement)

Dimensi ini dapat menjadi area pertemuan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*). Dalam konteks pembangunan sosial—sekaligus yang membedakannya dengan konteks pembangunan ekonomi—terutama adalah dalam hal pengorganisasiannya. Pembangunan sosial lebih mengarahkan pada pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*) yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pelayanan manusia, dan organisasi-organisasi sosial tingkat lokal. Tujuan utamanya berprinsip pada jargon bahwa manusia sebagai faktor produksi harus tetap sebagai subjek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai objek dari aktivitas ekonomi, atau objek dari segelintir kelompok yang mendominasi aktivitas perekonomian.

Pelayanan Sosial (Social Services)

Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup beberapa sektor pembangunan. Juga, mencakup ruang lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat yang merupakan subsistem pembangunan nasional.

Tentang ini, Kamerman dan Kahn (1979) menjelaskan enam komponen atau subsistem kesejahteraan sosial dalam arti luas, yaitu 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*); 4) pelayanan kerja; 5) perumahan; dan 6) pelayanan sosial personal (*personal social services*). Dengan demikian, dalam konteks pembangunan sosial, pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pelayanan kerja, dan perumahan. Sementara itu, untuk pemeliharaan penghasilan dan pelayanan sosial personal dapat berupa subsistem tersendiri sebagai bagian dari dimensi pembangunan sosial.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Services*)

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari pelayanan sosial dengan intinya kepada pelayanan sosial personal (*personal social services*) dengan sasaran mencakup 1) kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan pelayanan sosial, seperti kelompok usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat, dll.; 2) kelompok-kelompok marginal dalam konteks ekonomi atau dalam masalah pembangunan; (3) kelompok minoritas, seperti komunitas adat terpencil; dan (4) kelompok yang mengalami kecacatan.

Pembangunan Masyarakat (*Community Building*)

Hakikat pembangunan masyarakat adalah *community base development* atau pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom-up*). Ditinjau dari sisi pemerintah (*government*), pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subjek pembangunan). Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan masyarakat ada klausul yang menyatakan bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan, namun pada akhirnya keterlibatan dalam proses perencanaan dari bawah sulit sekali dilaksanakan. Ini berbeda dengan pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah, baik vertikal

maupun horizontal (wilayah administrasi). Keterlepasan ikatan ini menjadikan LSM lebih leluasa dalam membangun masyarakat yang pada tataran praktisnya disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Pembangunan masyarakat antara konsep yang direncanakan pemerintah dan LSM, pada akhirnya, harus saling komplementer karena pemerintah juga mengalami keterbatasan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk konteks Indonesia, konsep *community development* lebih memungkinkan untuk menerapkan model pendekatan *locality development* (pembangunan lokal) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Konsep *locality development* diharapkan lebih mampu menggerakkan warga masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan konsep wilayah yang lebih luas. Namun demikian, tidak semua masalah dapat diatasi di tingkat lokal sehingga perlu diintegrasikan dengan pembangunan masyarakat di tingkat yang lebih luas (regional atau nasional). Hal yang perlu diingat adalah bahwa kecenderungan peran pemerintah yang terlalu dominan dalam perencanaan pembangunan masyarakat di semua tingkatan struktur organisasi masyarakat sampai ke tingkat lokal, yang pada akhirnya, akan membawa dampak negatif, yakni tidak adanya titik temu (*meeting point*) antara program pembangunan masyarakat dan kebutuhan aktual masyarakat itu sendiri.

Model Pembangunan Masyarakat

Jack Rothman (1974) menyusun dan merumuskan tiga model dalam praktek pembangunan masyarakat, yaitu *locality development*, *social planning*, dan *social action*.

Model Pengembangan Lokal (*Locality Development Model*)

Model pembangunan lokal mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan

tindakan perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.

Pembangunan di tingkat desa bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat tingkat paling bawah (*grassroot*) dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan tindakan-tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya — yakni mengembangkan kemampuan masyarakat — dapat berfungsi secara integratif. Tujuan akhir tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara-cara kerja sama atas dasar atau atas prinsip swakarya dan menggunakan proses atau prosedur yang demokratis sebagai tujuan pokoknya.

Struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat ialah kurang aktifnya partisipasi warga masyarakat. Biasanya, masyarakat diikat oleh tradisi-tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang kurang berkehendak mengadakan perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari luar. Secara umum, masyarakat terdiri atas penduduk yang pendidikannya relatif rendah dan kurang memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Juga, kurang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memecahkan persoalannya. Masyarakat yang demikian juga kurang mengenal prosedur atau proses-proses yang demokratis dalam memecahkan permasalahannya. Mereka juga tipikal masyarakat yang relatif tertutup, dan mengarah pada isolasi diri (eksklusivitas).

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, perumu-

san kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan mereka sendiri. Jadi, strateginya ialah mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pembangunan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti tanda-tanda perubahan pun sudah tercapai.

Tema-tema pokok dalam *locality development model* mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerja sama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan kepemimpinan setempat, dan tujuan yang bersifat pendidikan. Misalnya, program ketetangaan di lingkungan permukiman, program pendidikan orang dewasa dan aktivitas yang berkaitan dengan dinamika kelompok secara profesional. Beberapa teknik yang dikembangkan dalam model pendekatan ini, antara lain, cara-cara atau prosedur-prosedur demokratis, seperti musyawarah, diskusi, komunikasi, pertemuan-pertemuan antargolongan. Juga, mengembangkan cara-cara kerja sama di antara lembaga-lembaga masyarakat, prinsip-prinsip swadaya, mengembangkan kepemimpinan masyarakat setempat, latihan pendidikan bagi tenaga-tenaga yang berasal dari warga masyarakat setempat, dan pertemuan-pertemuan antargolongan masyarakat untuk menghilangkan perbedaan dan hambatan-hambatan dalam masyarakat.

Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti kenakalan remaja, perumahan (permukiman), kesehatan mental, dan masalah sosial lainnya. Selain itu, model ini menganggap betapa penting menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Perencanaan dilakukan dengan sadar dan rasional, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Partisipasi warga masyarakat sangat beragam dan bergantung pada bentuk masalah itu sendiri dan variabel organisasional apa yang ada

di dalamnya. Pendekatan ini mempersyaratkan bahwa perubahan—misalnya, di lingkungan industrialisasi yang kompleks—memerlukan para perencana ahli yang melalui kemampuan teknisnya, serta kemampuan untuk memanipulasi organisasi birokrasi yang luas. Juga, dapat membimbing dengan cakap proses-proses perubahan yang kompleks. Sebenarnya, dalam model ini, partisipasi dari seluruh warga masyarakat tidak selalu ditekankan. Akan tetapi, untuk kondisi di Indonesia, perencanaan partisipatif sebaiknya penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan karena ada kecenderungan kebijakan dan program pembangunan masyarakat kurang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai dalam model pendekatan ini adalah menciptakan, menyusun, dan memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat materi maupun pelayanan-pelayanan yang berbentuk jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu, yang ingin dikembangkan melalui model ini adalah kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya melalui usaha-usaha yang terencana, terarah, dan terkendali. Seorang perencana melihat bahwa masyarakat merupakan bentuk kumpulan yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat yang menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda; atau kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama dan tertentu hingga diketahui jalan pemecahannya agar kepentingan itu dapat terwujud.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta dan data mengenai sesuatu permasalahan. Kemudian, mengambil tindakan yang rasional dan *feasible* (mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan). Jadi, strateginya adalah mengumpulkan dan menganalisis fakta dan data tentang permasalahan, dilanjutkan dengan menetapkan cara terbaik dalam penyusunan program, dalam memberikan pelayanan, atau dalam melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Implementasi model ini dapat berupa program-program yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, permukiman kumuh, pelacuran, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Teknik yang digunakan adalah mengerahkan keahlian dalam perencanaan, pengumpulan data, serta analisis data dalam menyusun gagasan atau program dan menciptakan kesepakatan (konsensus) atau persetujuan.

Model Aksi Sosial (*Social Action Model*)

Model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan sistematis. Juga, meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial atau demokrasi. Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam lembaga utama atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Model aksi sosial (*social action*) ini menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam hal pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi-organisasi formal.

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu adalah menggerakkan golongan-golongan masyarakat tertentu guna terlibat aktif dalam mengadakan perubahan-perubahan. Mereka dimotivasi untuk bersikap kritis dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti melalui perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi sendiri.

Berdasarkan struktur dan kondisi permasalahan, masyarakat dipandang sebagai susunan yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kekuatan-kekuatan atau status-status tertentu. Dalam hal ini, masyarakat seolah-olah menduduki strata tertentu yang sangat prestisius. Ada sebagian masyarakat yang berstatus tinggi, ada pula yang rendah. Ada sebagian masyarakat yang termasuk kelas elite, ada pula masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa (*powerless*) yang kemudian lazim disebut kelas *grass-root* (akar rumput). Kelompok yang menjadi perhatian utama para pelaksana aksi sosial (*social action*) ini ialah golongan-golongan yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat, golongan-golongan yang menderita dan terlantar, atau golongan penduduk yang menderita akibat praktek ketidakadilan sosial.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah mengadakan usaha-usaha yang lebih terorga-

nisir untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target tertentu. Maksudnya, melalui tindakan-tindakan yang lebih terorganisir dan terarah, golongan-golongan tersebut mampu memperoleh kekuatan dan tujuan yang diinginkan. Tindakan-tindakan masyarakat yang terorganisir dan terarah ini dapat ditujukan untuk lembaga-lembaga tertentu, juga untuk seseorang atau sekelompok orang. Teknik-teknik yang kemudian digunakan adalah menggerakkan kelompok masyarakat dalam kegiatan yang terorganisir, dan juga menggerakkan masyarakat dalam tindakan langsung (*direct action*) untuk memecahkan konflik-konflik atau pertentangan-pertentangan, termasuk teknik-teknik pengajuan usulan atau saran-saran dengan menggunakan kekuatan massa.

Implementasi model ini dapat berupa aksi sosial (*social action*) guna mengatasi permasalahan AIDS yang kian merebak dan melebar, berbagai permasalahan gender dalam pembangunan, eksploitasi buruh, kemiskinan dan permukiman kumuh, dan sebagainya. Kondisi di Indonesia saat ini, masih kurang mendukung aksi sosial untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kendatipun demikian, pada kenyataannya, gerakan massa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan orang banyak sudah mulai dikritisi. Sikap kritis ini berhasil mengubah kebijakan pemerintah hingga diganti atau dilikuidasi, misalnya kasus sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB). Untuk menerapkan model pendekatan *social action*, seorang pekerja sosial harus mengedepankan sikap berhati-hati dan melihat konteks permasalahan yang dialami masyarakat secara proporsional. Lebih baik lagi bila pendekatan itu diimbangi dengan pendekatan kultural (*cultural approach*). Sejauh masalah tersebut masih dapat diatasi melalui pendekatan yang komunikatif terhadap sumber-sumber kekuasaan dan pengambil keputusan, model pendekatan *social planning* merupakan alternatif yang paling memungkinkan.

Sungguh pun demikian, pekerja sosial harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, terutama dalam hal analisis kebijakan dan perencanaan sosial sehingga pekerja sosial mempunyai kemampuan untuk meyakinkan perlunya perubahan kebijakan terhadap para pembuat kebijakan.

Jenis-Jenis Kekuatan Masyarakat

Untuk mendukung ketepatan pemilihan model-model pendekatan, pekerja sosial harus memahami jenis-jenis kekuatan yang ada dan berkembang di masyarakat. Bagaimanapun, para pekerja sosial ketika bekerja akan dihadapkan pada berbagai jenis kekuatan yang ada dan hidup di masyarakat. Karena itu, ketajaman analisis dan kritisisme terhadap jenis-jenis kekuatan yang ada akan sangat membantu efektivitas kerja di masyarakat.

Kekuatan Pendorong

Kekuatan pendorong yang ada dalam suatu masyarakat dapat membantu berlangsungnya proses perubahan. Bahkan, proses perubahan itu bisa menjadi lebih cepat. Tanpa ada kekuatan pendorong, seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat bergerak untuk melakukan perubahan. Karena itu, kekuatan pendorong harus ada atau diciptakan terlebih dahulu pada awal proses perubahan dan kehadirannya harus dipertahankan selama proses perubahan berlangsung. Kekuatan pendorong dalam sistem sasaran perubahan dapat ditemukan dalam kehidupan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri berikut.

1. Merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi yang telah dirasakan dan biasanya selalu diikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi. Secara psikologis, orang-orang seperti ini biasanya lebih mudah terdorong dan terbujuk untuk mencari hal-hal baru untuk memenuhi kepuasan batinnya. Masalah yang kemudian muncul dan dihadapi oleh pekerja sosial adalah bagaimana hal-hal tersebut dapat ditemukan, diidentifikasi dengan cepat dan tepat, lalu dianalisis. Untuk masyarakat yang tingkat kualitas psikologisnya demikian, model pendekatan *locality development* dapat menjadi alternatif utama dalam pengembangan masyarakat. Seandainya sistem sasaran perubahan sudah menghasilkan rasa puas dalam diri individu terhadap situasi dan kondisi yang mereka hadapi, tugas pekerja sosial berikutnya adalah menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap sesuatu hal yang dipandang harus dimiliki lebih jauh oleh masyarakat. Cara ini perlu dilakukan untuk maksud-maksud pembangun-

an yang selalu diarahkan pada perubahan-perubahan situasi yang lebih baik daripada yang telah ada. Jika seseorang sudah merasa puas terhadap suatu keadaan, rasa apatis akan timbul dengan sendirinya. Individu yang apatis, dengan sendirinya pula, akan menciptakan masyarakat yang apatis pula. Sungguhpun demikian, usaha-usaha untuk menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat sebaiknya dilakukan secara sangat hati-hati sesuai dengan potensi yang mereka miliki agar tidak menimbulkan friksi dan frustrasi.

2. Rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan. Perasaan ini timbul karena tuntutan biologis, psikologis, atau sosiologis sehingga mendorong terjadinya perubahan di masyarakat. Misalnya, karena ada perasaan bersaing untuk mengumpulkan dana *Rereongan Sarupi*— setiap keluarga mengumpulkan uang sedikitnya Rp100,00 per bulan sebagai sumbangan sukarela untuk dana mengentaskan orang miskin di Jawa Barat—sebanyak mungkin, seorang Camat mengerahkan anggota Karang Taruna di wilayahnya untuk bertindak sebagai pelaksana pengumpulan dana tersebut dengan tertib.

Biasanya, pengerahan tenaga ini diikuti oleh penghargaan terhadap Karang Taruna yang paling berhasil melakukan penarikan. Perasaan bersaing ini, tentu saja, mencakup banyak aspek lain yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan masyarakat. Masalah yang kemudian muncul dan harus dicermati adalah kecermatan pekerja sosial untuk dapat memanipulasi perasaan bersaing tersebut ke arah maksud-maksud pembangunan.

3. Menyadari adanya kekurangan, dan karena itu berusaha untuk mengejar kekurangan. Misalnya, pengetahuan masyarakat tentang keberhasilan desa lain dalam hal mencapai prestasi sebagai Juara Perlombaan Desa di Jawa Barat akan mendorong masyarakat bersangkutan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang sama. Masyarakat mengetahui bahwa desa lain bisa berhasil karena digalakkannya gerakan Jumat Bersih setiap Jumat. Melalui gerakan yang dilaksanakan secara teratur dan didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat ini, desa mereka berhak mendapat anugerah penghargaan.

Karena itu, masyarakat tersebut terdorong untuk mengikuti pola yang sama dalam upaya mencapai prestasi yang sama.

Kekuatan Bertahan

Kekuatan bertahan di masyarakat berdasarkan tujuan untuk mempertahankan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya, kekuatan ini dicerminkan oleh rasa menentang setiap inovasi baru atau mungkin terbatas pada inovasi tertentu yang diduga akan menimbulkan perubahan terhadap sesuatu yang selama ini telah dimiliki dan dipertahankan. Sikap bertahan dapat bersumber dari perasaan takut mengalami kegagalan, ketidaktahuan terhadap inovasi yang bersangkutan, apatis, keinginan mempertahankan tradisi tertentu, atau sumber daya untuk mengadakan perubahan yang terbatas. Sumber daya tersebut dapat mencakup aspek fisik atau perilaku, misalnya kurang pengetahuan dan keterampilan untuk menerima dan melaksanakan inovasi baru yang bersangkutan. Juga, disebabkan oleh perilaku atau sikap negatif terhadap inovasi dan pembawa inovasi, yaitu pekerja sosial. Dalam kasus seperti ini, sikap pemaksaan kehendak hanyalah cara yang dapat memperburuk suasana. Karena itu, cara yang tepat dan harus menjadi alternatif utama dalam mengembangkan masyarakat yang kondisinya demikian adalah model pendekatan *social planning* (perencanaan sosial).

Untuk mengatasi rasa antipati terhadap inovasi, penyebaran inovasi tersebut sebaiknya diganti dengan inovasi lain yang masih ada kaitan dengan sebelumnya. Intinya, inovasi yang baru ini tetap mengarahkan masyarakat kepada inovasi awal yang akan diperkenalkannya. Dengan perkataan lain, perubahan tersebut bersifat sementara, misalnya, inovasi KB modern di masyarakat yang tetap mempertahankan pemakaian KB tradisional dapat dimulai dengan usaha memperbaiki gizi golongan rawan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Sebaliknya, jika sikap negatif terhadap inovasi baru disebabkan oleh rasa antipati masyarakat terhadap pembawa inovasi, sebaiknya menggunakan pihak ketiga sebagai perantara atau media inovasi. Dalam hal ini, pekerja sosial harus memiliki perencanaan yang sangat matang dalam rangka melaksanakan perubahan masyarakat yang dihadapinya.

Kekuatan Pengganggu

Kekuatan pengganggu dapat ditemukan pada setiap sendi kehidupan masyarakat. Secara umum, pengganggu tersebut dapat menghambat kecepatan penyebaran inovasi yang sesungguhnya bertujuan mengadakan perubahan tertentu di masyarakat. Untuk kondisi masyarakat demikian, model pendekatan *social action* yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat Indonesia dapat menjadi alternatif utama dalam pengembangan masyarakat. Dengan cara demikian kekuatan pengganggu tersebut dapat segera menyadari kekeliruannya untuk kemudian beralih dan turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Perlu ditekankan di sini bahwa untuk mengadakan perubahan terhadap pola pikir (*frame of thinking*) masyarakat yang demikian tidak berarti melakukan tindakan konfrontasi terhadap tokoh kunci (*key person*). Sebaliknya, tindakan yang paling tepat adalah melakukan gerakan massa yang proporsional dengan melibatkan seluruh unsur kekuatan yang ada di masyarakat, misalnya tokoh agama, pendidik, atau tokoh formal-informal. Cara ini dilakukan karena adanya kecenderungan yang sangat kuat dan tak dapat dipungkiri bahwa pengaruh *key person* terhadap pola pikir masyarakat sekitar dalam menolak perubahan. Kendatipun perubahan tersebut sesungguhnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang bersangkutan ke arah yang lebih maju. Dalam upaya menghadapi dan meyakinkan *key person* agar menerima gagasan-gagasan baru yang inovatif, penulis menyarankan agar melakukan pendekatan interpersonal (*case work*) atau kelompok (*group work*) yang intensif.

Kekuatan pengganggu yang mengakar di masyarakat dapat timbul atau disebabkan oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Adanya kekuatan di masyarakat yang bersaing untuk memperoleh pengaruh dan dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam alokasi biaya, tenaga, maupun tujuan yang ingin dicapai. Situasi seperti ini, biasanya, diikuti oleh perpecahan dalam tubuh masyarakat itu sendiri, dan akhirnya mengganggu pelaksanaan pembangunan.
- 2) Kerumitan inovasi baru yang diperkenalkan untuk menimbulkan perubahan, misalnya, pekerja sosial memperkenalkan

metode pengambilan keputusan di Badan Perwakilan Desa (BPD) tanpa memperhitungkan kemampuan anggota BPD dalam melaksanakan hasil musyawarah. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk menerimanya dengan cepat.

- 3) Terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan tersebut, termasuk tenaga, biaya, dan tenaga ahli. Misalnya, petani diperintahkan untuk menanam padi jenis baru, tetapi saat mengalami kesulitan, penyuluh sebagai tempat bertanya tidak ada atau tempat tinggalnya jauh dari lokasi tersebut. Keadaan ini pasti mengganggu kelanggengan adopsi padi jenis baru tersebut karena semakin sering petani mengalami kesulitan dan sebanyak itu pula tidak dapat mengatasinya, akhirnya ada kemungkinan bahwa ia kembali menanam jenis padi lama. Tentu saja, keadaan ini mengganggu pelaksanaan pembangunan bidang pangan.

Unsur kekuatan yang telah diuraikan di atas, yakni pendorong, bertahan, dan pengganggu, sangat perlu untuk diketahui oleh para pekerja sosial. Dengan mengetahui berbagai macam kekuatan tersebut, usaha mengurangi rintangan atau hambatan dari orang yang menentang gagasan perubahan dapat dilakukan sedini mungkin, baik melalui pendekatan perorangan (*casework*) maupun kelompok (*group work*). Sebaliknya, untuk mereka yang sejak awal menginginkan adanya perubahan dapat diarahkan pada perubahan positif dan menunjang kegiatan pembangunan. Dalam situasi ini, jelaslah bahwa peranan pekerja sosial adalah membantu masyarakat agar dapat bergerak ke arah perubahan yang mereka inginkan.

Orientasi Nilai, Asumsi Metode, dan Prinsip-Prinsip

Pengembangan masyarakat berasal dari kerangka referensi yang sangat unik dan khas. Kerangka referensi ini mengambil bentuk khas-spesifik sebagai hasil dari

- a) orientasi nilai yang sifatnya khas, berasal dari nilai-nilai keagamaan dan budaya, yang selanjutnya berkembang menjadi filsafat pekerjaan sosial (*social working*);

- b) konsepsi khusus tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia modern dalam bermasyarakat dan kehidupan sosialnya;
- c) asumsi-asumsi tertentu yang berasal dari orientasi nilai dan sebagian lagi dari pengalaman pekerjaan sosial.

Kerangka referensi ini memberikan garis batas yang sangat jelas, persyaratan dan pusat sasaran bagi pekerja sosial yang melaksanakan pembangunan masyarakat. Orientasi nilai dalam bekerja di masyarakat bermula dari penerimaan terhadap konsep-konsep dan fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai landasan untuk bekerja dengan masyarakat, antara lain, sebagai berikut.

- a) Menghargai martabat dan harga diri perorangan.
- b) Potensi-potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, organisasi dan masyarakat untuk mengatur kehidupannya.
- c) Pentingnya kebebasan untuk mengutarakan individualisasi perorangan.
- d) Kemampuan atau kapasitas yang besar dalam diri seseorang untuk tumbuh dan berkembang.
- e) Hak perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- f) Hak perorangan untuk memperoleh bantuan pada saat-saat kekurangan atau krisis.
- g) Pentingnya organisasi sosial sebagai tempat di mana perorangan dapat merasakan tanggung jawab dan bersikap tanggap (responsif) terhadap perasaan perorangan.
- h) Pentingnya iklim sosial yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan perorangan.
- i) Hak-dan kewajiban perorangan untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan masyarakat.
- j) Penggunaan diskusi, pertemuan, dan konsultasi sebagai metode untuk menanggulangi berbagai masalah yang muncul.

Dalam situasi kemasyarakatan, asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi metode pengembangan masyarakat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Masyarakat dapat mengembangkan kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi.

- b) Masyarakat menginginkan perubahan dan dapat diubah.
- c) Setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam upaya meniadakan, menyesuaikan, dan mengendalikan perubahan-perubahan utama yang terjadi di masyarakat.
- d) Perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dan dikembangkan dari dalam akan mempunyai arti dan lebih mantap dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang dipaksakan dari luar.
- e) Pendekatan holistik dapat mengatasi masalah yang ada dengan berhasil yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan fragmentaris atau terpecah-pecah.
- f) Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dan tindakan bersama dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Masyarakat membutuhkan bantuan dalam pengorganisasian usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sama halnya dengan perorangan yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah-masalah pribadinya.

Berlandaskan pada nilai-nilai pekerjaan sosial, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dapat dikatakan bahwa betapa nilai-nilai tersebut jarang dipertimbangkan dalam pembangunan masyarakat modern. Karena itu, perlu ada usaha yang serius dan kontinuitas untuk menentukan asumsi-asumsi tertentu yang timbul sebagai hasil analisis dari nilai-nilai sendiri dan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Asumsi-asumsi tersebut akan menentukan hakikat pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, metode yang digunakan pekerja sosial di lapangan, serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam proses.

Pembangunan masyarakat merupakan sebuah proses karena dipandang sebagai siklus dan paradigma yang berkesinambungan, yaitu dari satu tahapan ke tahapan lain atau dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Ini mencakup perubahan dari satu atau dua orang atau sebagian kecil elite yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan bagi perubahan masyarakat. Seluruh warga masyarakat akan mengambil keputusan terhadap masalah yang menjadi perhatian utamanya. Perhatian utama itu menyangkut perubahan kerja sama terbatas (mini-

mum) dengan kerja sama secara tidak terbatas (maksimum). Perubahan terjadi jika ada sedikit partisipasi seseorang kepada semakin meluasnya partisipasi dalam kegiatan bersama. Juga, perubahan dari menggantungkan diri pada sumber dan bantuan luar kepada penggunaan secara maksimal berbagai sumber untuk kepentingan bersama.

Unsur-unsur pokok bagi pekerja sosial dalam bekerja di masyarakat adalah *pertama*, melakukan perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan, menemukan, dan memperjelas arti masalah tertentu, mengungkapkan hakikat dan ruang lingkup masalah itu, mempertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangan masalah, serta mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya-upaya yang telah dirumuskan dan dipilih. *Kedua*, pengintegrasian masyarakat, yaitu proses penerapan sikap dan praktek kerja sama yang menghasilkan berbagai peningkatan dalam hal identifikasi masyarakat secara keseluruhan, minat dan partisipasi dalam urusan masyarakat, serta saling menukar nilai dan sarana.

Selanjutnya pengintegrasian masyarakat hendaknya dipandang sebagai proses sosial yang berfungsi memperlancar

- a) pertumbuhan kesadaran dan kesetiaan (loyalitas) kepada masyarakat, termasuk perorangan yang menjadi salah satu bagiannya,
- b) peningkatan perasaan tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap kondisi dan kedudukan masyarakat,
- c) pemunculan sikap-sikap yang memungkinkan adanya kerja sama yang baik dengan orang yang mempunyai perbedaan dalam berbagai segi, dan
- d) pertumbuhan nilai-nilai yang sama di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Proses pengintegrasian masyarakat tidak berarti masyarakat harus mempunyai norma, kepercayaan, nilai, dan cara kehidupan yang sama dan baku. Proses pengintegrasian masyarakat berkaitan erat dengan pengidentifikasian warga masyarakat ke dalam nilai-nilai bersama yang disepakati serta memberikan sumbangan positif bagi seluruh warga masyarakat. Keterikatan menjadi bagian dari kehidupan bersama dapat memberikan pengalaman kepada warga masyarakat untuk memperoleh ketentraman psikologis dan makna tertentu dalam kehidupannya. Jadi,

proses pengintegrasian masyarakat merupakan kualitas kehidupan masyarakat yang bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas bersama, saling berusaha secara sadar dalam aktivitas yang sama, serta mencari tujuan-tujuan yang sama. Semakin penting arti nilai, tugas, dan tujuan bagi warga masyarakat, bertambah besar pula kerja sama dalam aktivitas itu. Selanjutnya, bertambah besar kerja sama mereka, bertambah besar dan semakin mendalam pula perasaan kemasyarakatan yang dihasilkan. Dengan demikian, proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip berikut.

- a) Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial.
- b) Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat.
- c) Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat harus disalurkan ke dalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah bersama.
- d) Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat.
- e) Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerja sama dan melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur.
- f) Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.

Strategi Pembangunan Masyarakat pada Masa Mendatang

Kini, para pekerja sosial selain menangani berbagai kasus klien yang bersifat klinis, juga melakukan aktivitas lain dalam konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat dipandang sangat penting berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut.

1. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat
4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis.

Pada sisi lain, proses pembangunan masyarakat juga dimaksudkan sebagai upaya mencari jawaban terhadap terjadinya berbagai perubahan pada hampir semua bagian masyarakat dunia ketiga, seperti Indonesia. Permasalahan penambahan penduduk yang semakin meningkat, industrialisasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi yang tinggi untuk segala aktivitas ekonomi, pembagian kerja dan kelas sosial yang semakin heterogen, semakin banyaknya tenaga kerja asing, pengaruh globalisasi dari negara-negara maju, sistem informasi yang menembus ruang dan waktu (*borderless*) akan mengubah wajah Indonesia masa depan.

Ciri-ciri tersebut akan tampak jelas pada pesatnya pembangunan area industri baru, sentralisasi aktivitas ekonomi oleh kalangan elite tertentu, globalisasi informasi yang telah mempengaruhi perilaku masyarakat, kapitalisme modern yang mengabaikan masyarakat miskin, dan semakin kuatnya politisi dalam menentukan perencanaan dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan dibandingkan dengan ilmuwan sehingga produk kebijakan pemerintah sering berbenturan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasca isu kerusakan lingkungan global seiring dengan berlangsungnya liberalisasi APEC, masalah kesejahteraan sosial masyarakat akan menjadi isu sentral bagi dunia. Misalnya, masalah kemiskinan di negara-negara berkembang, gerakan radikal kaum buruh, narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, kriminalitas yang semakin canggih, legitimasi abortus, eksistensi homoseksual, kerusakan sosial, dampak perilaku sosial dari masyarakat anomi, isu hak asasi manusia (HAM), perilaku seksual remaja yang bebas, pergeseran nilai yang berdampak pada krisis keluarga, dan sudah tentu masalah epidemi penyakit menular (terutama HIV/AIDS) sebagai dampak kumulatif dari permasalahan sosial lainnya.

Seiring dengan semakin berkembangnya paradigma pembangunan sosial (*social development*), untuk mengimbangi paradigma pembangunan ekonomi (*economic development*), pada masa mendatang hakikat aktivitas pekerjaan sosial tidak terbatas sebagai intitusi sosial dan profesi pelayanan kemanusiaan, tetapi juga sebagai profesi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan sosial sebagai dasar utama dalam menghadapi perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Demikian juga dalam hal hakikat sasaran intervensi yang tidak terbatas pada klasifikasi individu, kelompok atau masyarakat, tetapi juga mengarah pada perubahan secara berencana dalam struktur sosial masyarakat secara makro. Kedudukan pekerja sosial dapat lebih berperan sebagai sistem agen pelaksana perubahan (*change agent system*). Sementara itu, hakikat fokus intervensi yang banyak mengacu pada keberfungsian sosial (*social functioning*) pada individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah dalam tugas kehidupannya, selayaknya diarahkan lebih luas lagi kepada pengembangan manusia (*human development*).

Dalam kaitan ini, pendekatan yang sekarang menjadi trendi yakni *Ecological Model of Human Behavior* sebagai sistem sasaran intervensi pekerjaan sosial dalam pembangunan masyarakat. Berpijak pada pendekatan ini, Zastrow (1989) menyatakan bahwa:

In the past several years social work has increasingly focused on using an ecological approach. This ecological approach integrates both treatment and reform by conceptualizing and emphasizing the dysfunctional transactions between people and their physical and social environments. Hu-

man beings are viewed as developing and adapting through transactions with all elements of their environments. An ecological model gives attention to both internal and external factors.

Atas dasar model tersebut, hakikat sasaran intervensi pekerjaan sosial (*social working*) tidak mengarah pada klasifikasi individu, kelompok atau masyarakat; tetapi lebih luas lagi pada sistem keluarga, pelayanan sosial, pelayanan barang dan jasa, politik, ketenagakerjaan, keagamaan, dan pendidikan. Model tersebut ada kesamaan dengan paradigma tentang pengembangan manusia yang semakin mendapat perhatian akhir-akhir ini. Model ekologi dalam perilaku manusia dapat dilihat pada gambar 6.1.

Pengembangan manusia dibedakan dengan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*) yang dianggap berkonotasi ekonomi semata-mata. Sebagai sumber daya manusia, manusia semata-mata menjadi faktor produksi dalam proses ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia cenderung dikaitkan dalam kedudukannya sebagai faktor produksi semata-mata. Berkaitan dengan ini, di lingkungan *United Nations Development Program* (UNDP) telah berkembang gagasan untuk menekankan pengembangan manusia (*human development*). Dua segi pengembangan yang dilakukan adalah: *pertama*, ikhtiar mengembangkan kemampuan (*capability*) manusia, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan; *kedua*, mengembangkan penggunaan kemampuan ini dalam rangka meningkatkan produktivitas, kesantiaian hidup, kegiatan sosial, budaya, dan politik.

Fokus intervensi pengembangan manusia (*human development*) adalah dalam upaya meningkatkan kemampuan manusia agar memiliki jangkauan pilihannya secara lebih luas. Jangkauan pilihan bisa bermacam-macam dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan waktu. Sungguhpun demikian, terdapat tiga pilihan yang bersifat pokok, yakni, *pertama*, memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan harapan usia hidup (*life expectancy*) yang panjang dan sehat; *kedua*, memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh pendidikan agar dapat menanggapi kemajuan zaman; *ketiga*, memperoleh kesempatan akses dalam mengusahakan sumber-sumber untuk menaikkan tingkat kehidupan. Sumber-sumber itu dapat berupa sumber pendapatan, alam, atau pembiayaan pembangunan. Berdasarkan

pijakan di atas, peran pekerja sosial dalam pembangunan sosial akan meliputi aktivitas berikut.

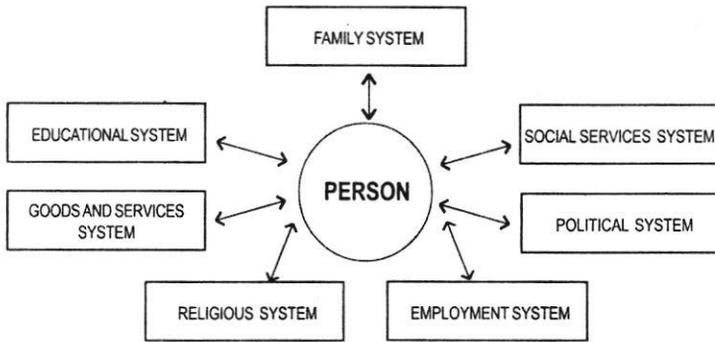
1. Analisis dan memberikan kontribusi desain kebijakan, serta terlibat aktif dalam perencanaan ekonomi yang tidak mengabaikan paradigma sosial dan kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan dan perencanaan pelayanan-pelayanan sosial.
3. Pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada potensi yang mereka miliki.
4. Melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ditangani pekerja sosial.

Aktivitas di atas merupakan tugas-tugas pekerjaan sosial yang harus dilakukan pada masa mendatang.

Pekerjaan sosial dalam pembangunan masyarakat pada masa yang akan datang akan menjadi "aktivitas pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi pelayanan sosial dalam melaksanakan perubahan berencana dan dalam struktur sosial masyarakat yang memfokuskan pada pembangunan manusia sebagai bagian dari sistem pembangunan sosial". Strategi pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dalam *kesatuan sistem pembangunan sosial* yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi, dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup pembangunan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengarahkan pada kehidupan yang taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat, serta terdistribusikan secara lebih adil dan merata.

Langkah awal yang harus ditempuh adalah strategi pengondisian manajemen perencanaan pembangunan masyarakat yang secara efektif membawa perubahan terhadap struktur masyarakat. Perubahan terstruktur itu meliputi hal-hal berikut.

1. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan penghimpunan dan penggunaan data program secara lebih efektif, relevan, dan andal bagi kepentingan pembangunan sosial.
2. Analisis kebijakan dan perencanaan sosial dengan mengacu pada paradigma pembangunan sosial.
3. Riset operasi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan.

Gambar 6.1 Ecological model of human behavior

Sumber: Zastrow dan Karen. (1992)
The Practice of Social Work. p. 18

4. Perhitungan secara ekonomi dari dampak sosial yang negatif, atas kekurangan keberhasilan kebijakan program pembangunan.
5. Penciptaan teknologi yang dapat mendukung keberhasilan *output* pelayanan dan kesejahteraan sosial.
6. Pemasaran sosial dari program-program yang dihasilkan melalui riset operasi agar dapat terlaksana untuk cakupan yang lebih luas (regional maupun nasional) kepada pihak-pihak swasta dan lembaga-lembaga bantuan asing.

Strategi-strategi untuk mengondisikan manajemen perubahan berencana tersebut diharapkan mendukung pembangunan sosial yang dapat mengimbangi atau melengkapi pesatnya pembangunan ekonomi. Adapun dimensi-dimensi pembangunan sosial, meliputi (a) peningkatan produktivitas, (b) pelayanan sosial, (c) pelayanan kesejahteraan sosial, dan (d) pembangunan masyarakat.

Untuk mendukung terlaksananya sistem pembangunan sosial, diperlukan pengorganisasian pemeliharaan penghasilan, pengorganisasian pelayanan manusia, dan pengorganisasian pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun strategi operasional dalam pembangunan sosial, meliputi strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan manusia, strategi pengembangan lokalitas (*locality development*),

strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*), dan strategi promosi kepercayaan diri (*self help promotion*).

Antarstrategi tersebut berada dalam satu kesatuan sistem pembangunan sosial yang berinteraksi. Apabila pembangunan nasional secara menyeluruh bertujuan meningkatkan kemajuan, kemampuan, kesejahteraan dan keadilan sosial, maka pelaksanaan pembangunan masyarakat diupayakan agar setiap orang – dalam konsisi bagaimanapun – memiliki kesempatan dan berkemampuan untuk menikmati pelayanan pembangunan, serta berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat menikmati pelayanan pembangunan dan yang sesungguhnya memiliki kesempatan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, pembangunan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk mereka yang dikategorikan sebagai penyandang permasalahan sosial agar tidak tertinggal oleh warga masyarakat lainnya. Karena itu, pembangunan masyarakat yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan salah satu aspek pembangunan sosial yang harus diwujudkan.

Upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, pada dasarnya, menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan keterampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, dan pelayanan sosial personal. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan masyarakat harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan dari pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai satu kesatuan sistem. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan sosial merupakan sistem yang erat berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan, kebijakan, serta program-program dan kegiatan pelayanan. Juga, pelayanan atau intervensi sosial, serta pengadaan atau *provisi* yang mengindikasikan adanya organisasi formal yang mendapat dukungan sosial.

Dalam pengertian sistem tersebut tercermin adanya interaksi dan keterkaitan antarberbagai bidang dalam sistem, dan antara sistem pembangunan sosial dengan lingkungannya. Dengan demikian, antara aspek-aspek hukum dan perundang-undangan, kebijakan dan program-program, serta kegiatan-kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial, juga antara usaha kesejahteraan sosial dan sistem ekonomi, politik, sosial, serta segenap aspek kehidupan masyarakat lainnya terjadi keterkaitan yang tak dapat dipisahkan.

Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui organisasi-organisasi formal, baik pemerintah maupun swasta. Pembangunan masyarakat merupakan perwujudan nilai-nilai dan bagian dari sistem nilai masyarakat yang ada. Sebab itu, strategi pemberdayaan masyarakat merupakan institusi dan kegiatan yang berkembang di dalam, diterima, atau mendapat dukungan dari masyarakat.

Unsur-Unsur Perubahan Struktural dalam Pembangunan Masyarakat

Secara umum, pekerja sosial — saat memerankan diri sebagai pelaksana perubahan yang direncanakan — harus memperhatikan keterpaduan yang harmonis fungsi-fungsinya (secara fungsional) dan keterpaduan tata ruang. Keterpaduan fungsional adalah keterpaduan yang mencakup semua aspek dan kegiatan, serta pelayanan sosial-ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keterpaduan tata ruang adalah keterpaduan antarhubungan berbagai kegiatan sosial-ekonomi yang secara spesifik mempunyai lokasi tertentu dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi lainnya. Komunitas yang berada dalam ruang wilayah geografis tertentu dalam membangun atau mengembangkan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat melepaskan diri dari komunitas lainnya yang berada di sekitarnya.

Para pekerja sosial di Indonesia, pada masa yang akan datang diperkirakan akan dihadapkan pada masalah-masalah struktural dalam pembangunan masyarakat. Alasannya, eksistensi peran pekerja sosial dalam pembangunan masyarakat belum berkembang, sementara permasalahan yang terjadi di masyarakat sudah demikian kompleks dan rumit.

Unsur-unsur perubahan struktural yang membutuhkan peran pekerja sosial dalam pembangunan masyarakat dijelaskan sebagai berikut.

1. Struktur tata ruang, terutama mencakup (a) dampak sosial dari perubahan tataguna tanah secara fungsional (misalnya: dampak sosial dari pergeseran penggunaan lahan pertanian menjadi lahan industri); (b) pola dan pengadaan fasilitas pelayanan (pendidikan, kesehatan, air bersih, lembaga perkreditan) sebagai konsekuensi dari pola tataruang tertentu di suatu wilayah; (c) dampak sosial dari pola jaringan transportasi dan komunikasi yang mendukung aksesibilitas masyarakat (aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat distribusi barang dan jasa, sumber energi, jaringan dan jenis komunikasi).
2. Struktur sosial-ekonomi, terutama mencakup: (a) pola ekonomi masyarakat yang berdimensi pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (organisasi produksi, sistem, dan pola usaha masyarakat, koperasi, kerja sama kelompok, distribusi pendapatan, kesempatan kerja di setiap sektor, produktivitas wanita dalam keluarga); (b) struktur sosial (kelompok-kelompok dan lapisan masyarakat secara fungsional dan pelapisannya, kepemimpinan, struktur kekuasaan, kelompok kepentingan, keanggotaan dan partisipasi dalam kelembagaan dan organisasi sosial, hubungan antarkelompok atau organisasi dan lapisan masyarakat).
3. Administrasi kesejahteraan sosial, terutama mencakup (a) administrasi pemerintahan dan pembangunan desa (sistem administrasi pemerintahan desa, struktur organisasi dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi perangkat pemerintahan desa, koordinasi organisasi-organisasi sektoral dan hubungannya dengan kelembagaan tersebut, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dan berpartisipasi dan hasil-hasilnya); (b) pengorganisasian partisipasi masyarakat (pelembagaan musyawarah, peningkatan fungsi lembaga adat-istiadat yang dapat mendukung konsep *people centre development*, fungsi-fungsi dan tugas-tugas dari setiap lembaga dan organisasi sosial, mekanisme kerja).a

7

PEMBERDAYAAN SEBAGAI STRATEGI DALAM PEMBANGUNAN YANG BERPUSAT PADA RAKYAT (PEOPLE CENTRED DEVELOPMENT)

Pembangunan Sosial

Bagaimanapun, pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai subjek yang berperanan aktif, sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama. Jika mau jujur, masalah-masalah tersebut dapat berubah menjadi penyebab instabilitas yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan. Permasalahan tersebut juga membawa pengaruh negatif, seperti semakin melonggarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai, serta hubungan antarmanusia.

Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial (Harry, 1999).

Tujuan akhir strategi pembangunan sosial adalah memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan

individu dan kolektif yang berpijak dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan sosial, pada intinya, adalah memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan yang distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata.

Prioritas awal diperuntukkan bagi daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya.

Model Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, berkembang pula pendekatan yang berpusat pada rakyat. Sebenarnya, model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi, termasuk di dalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Korten dan Carner (1993), secara sederhana menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada produksi lebih memusatkan perhatian pada hal-hal berikut.

1. Industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka dari pertanian.
2. Daerah perkotaan dan bukan pedesaan.
3. Pemilikan aset produktif yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas.
4. Investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang sedikit, bukan yang banyak.
5. Penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya manusia yang optimal sehingga sumber daya modal dimanfaatkan, sedangkan sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal.
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil

sumber daya, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan penguasaan basis sumber daya alami secara cepat.

7. Efisiensi satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan didasarkan pada perbedaan keuntungan internasional, dengan meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya lokal sehingga menghasilkan perekonomian yang tidak efisien dalam hal energi; kurang daya adaptasi dan mudah mengalami gangguan yang serius karena kerusakan atau manipulasi politik dalam bagian sistem tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, model pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah. Akan tetapi, peningkatan tersebut harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan. Sementara itu, hasil-hasil akhirnya harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tataekonomi internasional. Karena itu, pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

Korten dan Carner (1993) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya, Korten dan Carner mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu sebagai berikut.

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.

3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Manusia dan lingkungan merupakan variabel endogen yang paling utama sebagai titik tolak bagi perencanaan pembangunan. Perspektif dasar dan metode analisis yang digunakan dalam pendekatan pembangunan ini adalah ekologi manusia, yaitu disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara sistem manusia dan ekosistem. Selain itu, pendekatan ini juga mempersoalkan dua asumsi yang terkandung dalam model-model pembangunan ekonomi. *Pertama*, pembangunan dengan sendirinya harus membantu setiap orang; dan *kedua*, masyarakat berkeinginan dapat diintegrasikan dalam arus utama pembangunan model Barat, keadaan di mana mereka tidak mempunyai pilihan untuk merumuskan jenis masyarakat yang mereka inginkan.

Dengan menggunakan waktu sebagai ukuran dasar perubahan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat dibedakan antara strategi jangka panjang dan jangka pendek. Strategi jangka panjang diperlukan untuk menghancurkan struktur ketimpangan sosial, kelas, dan bangsa. Persyaratan dasar bagi proses ini termasuk di dalamnya adalah pembebasan nasional dari dominasi kolonialisme dan neokolonialisme, pergeseran dari strategi pertanian yang berorientasi ekspor, serta kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan multinasional. Sementara itu, strategi jangka pendek didefinisikan sebagai kebutuhan untuk menemukan cara-cara menghadapi krisis-krisis yang sedang berlangsung. Cara yang lazim ditempuh adalah membantu masyarakat dalam proses produksi pangan melalui peningkatan diversifikasi pertanian sebagaimana kesempatan kerja di sektor formal dan informal.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat kembali subordinasi mereka melalui organisasi-organisasi lokal secara *bottom-up*. Dalam kaitan ini, organisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang bermula pada pemenuhan kebutuhan praksis masyarakat yang konkret. Misalnya, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan persoalan kesehatan, ketenagakerjaan dan penyediaan pelayanan dasar. Hal yang perlu diingat, organisasi yang bersangkutan dapat memanfaatkan isu-isu tersebut sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat dalam konteks sosial-politik tertentu.

Dalam konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, mengidentifikasi kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat merupakan sesuatu yang niscaya. Karena itu, penting sekali untuk melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat guna menghindari waktu sebagai determinan perubahan. Bagaimanapun, perubahan jangka pendek belum menjamin adanya proses transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.

Kebutuhan praktis yang dimaksud adalah berbagai kebutuhan dasar manusia (*basic needs*). Sementara itu, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut adalah arena pekerjaan sosial yang selama ini diyakini sebagai profesi yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial yang terbatas pada pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan hanya dapat memenuhi kebutuhan praktis sesaat. Bahkan, jika strategi ini digunakan secara terus menerus dapat menimbulkan kebergantungan dari sasaran. Karena itu, bantuan-bantuan sosial harus diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai intervensi pekerjaan sosial. Misalnya, peningkatan kemampuan dasar (komunikasi, kepercayaan diri, motivasi, kemandirian, dll.), peningkatan interaksi sosial, penciptaan relasi-relasi sosial, pengembangan jaringan kerja, mobilisasi sumber sosial, peningkatan integrasi sosial (Dubois dan Miley, 1996).

Strategi pendekatan ini tidak akan digunakan tanpa adanya organisasi-organisasi lokal dan kelompok-kelompok sejenis atau yang lazim disebut *community base organizations* (CBO's). Karena itu, hal-hal penting yang akan digunakan oleh organisasi-organisasi seperti itu bukan saja perubahan-perubahan yang legal-formal, melainkan juga mobilisasi politik, peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, perbaikan manajemen pelayanan sosial dan pendidikan non-formal (Dubois dan Miley, 1996).

Zaman baru yang dibayangkan melalui pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat mensyaratkan adanya transformasi struktur-struktur yang mensubordinasi dalam ekologi manusia, yang telah

menindas masyarakat (Korten, 1987). Perubahan hukum, aturan kemasyarakatan, sistem hak milik dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial dan legal-formal yang melindungi kontrol sosial masyarakat merupakan hal-hal yang sangat penting jika masyarakat ingin memperoleh keadilan dalam tatanan sosial-politik tertentu.

Tabel 7.1 Perbandingan paradigma pembangunan yang berorientasi pada produksi dengan yang berpusat pada rakyat

Dimensi-dimensi	Pembangunan berpusat pada produksi	Pembangunan berpusat pada rakyat
Logika	Ekonomi-Produksi: Eksploitasi dan manipulasi sumber daya alam.	Ekologi-Manusia: Pemanfaatan sumber daya informasi dan prakarsa kreatif.
Tujuan	Maksimalisasi arus barang dan jasa.	Peningkatan potensi manusiawi (individu sebagai aktor). Pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal.
Sistem ekonomi	Konvensional: - Skala besar - Spesialisasi - Investasi - Keunggulan komparatif - Interdependensi global	Swadaya: - logika tempat - rakyat - sumber daya (sistem ekologi manusia)
Birokrasi	Birokrasi Besar: Masyarakat diorganisasikan dalam satuan produksi yang efisien dengan pengawasan terpusat.	Sistem swa-organisasi yang ada di sekitar satuan-satuan organisasi manusia dan berskala komunitas.
Kriteria	Efisiensi. Maksimalisasi laju kenaikan produktivitas sistem.	Nilai produk Partisipasi Mutu kehidupan kerja

Dimensi-dimensi	Pembangunan berpusat pada produksi	Pembangunan berpusat pada rakyat
Teknik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk organisasi sistem komando. - Metode analisis keputusan "bebas nilai" dan positivistik. - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif fungsional. - Sistem produksi didefinisikan secara fungsional. - Perangkat analisis tidak mempertimbangkan manusia dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk organisasi swadaya. - Peran individu dalam proses pembuatan keputusan dengan "nilai manusiawi" sebagai ukuran. - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial. - Pilihan-pilihan produksi dan prestasi didasarkan pada kerangka ekologi, yaitu melibatkan manusia dan menempatkannya sebagai proses analisis.
Proses pembuatan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Sentralisasi. - Didominasi oleh para ahli. - Tidak konsultatif. - Kendali pejabat yang tidak menanggung akibat keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi rakyat kapasitas hak untuk memasukkan nilai-nilai kebutuhan lokal dalam proses pembuatan keputusan. - Kendali pada rakyat yang hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu.
Teknologi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Diarahkan pada kebutuhan sistem komando. - Menekankan aturan main hukum. - Wewenang pengawasan pada struktur formal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem belajar swaorganisasi. - Struktur formal itu dilengkapi dengan berbagai teknologi organisasi yang kurang formal dan cepat adaptasi diri. - Jaringan informasi yang dibangun di sekeliling arus manusia, nilai dan informasi sebagai tanggapan terhadap kepentingan dan kebutuhan khusus sesuai dengan keadaan. - Kelompok-kelompok sosial yang lebih permanen, seperti keluarga, RT, organisasi sukarela, dsb.

Sumber: Corten, 1987. "Introduction" dalam *Community Management*. West Hartford, CT: Kumarian.

Berkaitan dengan cara mencapai kebutuhan itu, pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat yang ditempuh melalui strategi pemberdayaan secara mendasar berbeda jauh dengan pendekatan pembangunan lainnya. Pendekatan ini berupaya keras untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung

melalui kebutuhan praksis masyarakat. Juga, menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praksis masyarakat sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial-budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik menjadi sangat penting sebagai *input* untuk melakukan reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Melalui reformulasi ini, peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif aktif dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan, rakyat harus menjadi pelaku utama (subjek) dalam pembangunan. Ini membutuhkan kajian strategis yang intensif tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro. Melalui kajian ini, masyarakat lokal dapat mengembangkan potensinya tanpa hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten/kota dan propinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat dari atas ke bawah (*top-down*) daripada dari bawah ke atas (*down-top*).

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang signifikan, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial dapat ditangani oleh masyarakat atas fasilitas dari pemerintah.a

8

PEMBERDAYAAN SEBAGAI STRATEGI DALAM PRAKTEK PERUBAHAN SOSIAL DI AMERIKA SERIKAT

Praktek Perubahan Sosial Tradisional

Semangat protes berlangsung cepat di kalangan kelas menengah Amerika Serikat dan kelompok-kelompok pembaharuan terus bermunculan. Kelompok pembaharuan adalah pemercepat proses perubahan tersebut, meskipun tidak selalu dapat dirasakan oleh kelas menengah dan anggotanya, ataupun masyarakat luas.

Meskipun demikian dalam beberapa dekade ini belakangan kegagalan kelompok-kelompok pembaharuan selalu terjadi berulang kali. Namun, usaha-usaha keras untuk perubahan sosial masih terus berlangsung hingga kini. Perubahan dimulai dari kampanye untuk mengekang munculnya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga penggunaan manajemen yang efisien dan semangat para ahli untuk mewujudkan *good government* melalui usaha-usaha kolektif untuk membuat pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan warganya terus digulirkan.

Para pekerja sosial dan *human service* profesional yang bekerja pada agen-agen publik atau siapa pun yang tidak mengamati proses lokal atau nasional pemerintahan, mungkin tidak menyadari hadirnya proses pembaharuan yang sudah berlangsung sepanjang sejarah negara mereka. Ulasan yang sangat berani tentang sistem sosial-politik Amerika oleh Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994) dalam buku

mereka tentang *Strategies for Community Empowerment: Direction and Transformative Approaches to Social Change Practice*, akan membuka sedikit karakteristik perubahan sistem demokrasi yang konstitusional. Ulasannya ini diawali oleh penjelasan tentang bagaimana sulitnya mencapai perubahan sosial melalui strategi tradisional. Dalam kaitan ini, *republican legacy* mengacu pada "praktek perubahan sosial tradisional" yang disebutnya sebagai "politik pada usia modern". Politik itu tidak selalu dinodai atau dicemari oleh para praktisinya. Pada masa Yunani (tempat asal politik modern diambil), politik adalah usaha-usaha yang mulia dan penuh keberanian dan kesungguhan. Politik ini terdiri dari tindakan dan perkataan (*praxis* dan *lexus*).

Kata *demokrasi* berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* (orang) dan *kratia* (mengatur). Warga negara di negara tersebut memiliki persamaan persuasif untuk melakukan kompetisi secara sejajar dan terbuka terhadap isu-isu yang muncul. Semua warga berhak menjadi publik, dalam arti apa pun yang ada dapat "dilihat dan didengar" oleh siapa pun, yang biasa disebut ruang publik dan dibedakan dari ruang privat (Arendt, 1958). Satu hal yang perlu, dan harus, ditambahkan adalah bahwa tidak semua warga negara di Yunani memiliki kewarganegaraan penuh. Maksudnya, kaum perempuan dan para budak dibatasi ruang privat mereka oleh diberlakukannya posisi kepala rumah tangga sebagai pemegang kekuasaan.

Posisi ini sama pentingnya dengan sistem pemerintahan Yunani yang berpijak pada *ruled by the people* dengan doktrin republiknya. Doktrin berlaku bagi seluruh penduduk Yunani, termasuk Sparta, Roma, dan Venesia. Dalam sistem tersebut, ketidakpercayaan yang diatur oleh rakyat dan para pemimpin diputuskan oleh sebuah konstitusi yang merefleksikan dan mengimbangi kepentingan satu sama lainnya. Berdasarkan sistem ini, jelaslah bahwa sedikit banyak merupakan campuran antara pemerintahan yang demokrasi, aristokrasi, dan monarki, yang kelak ketiga komponen tersebut akan membawa kebaikan untuk semua (Dahl, 1989).

Berdasarkan pendekatan tradisional tersebut, benih perubahan sosial dalam sistem politik dan pemerintahan Amerika modern berasal dari Yunani kuno dan Romawi. Sistem ini kemudian berkembang luas ke seluruh pelosok negeri akibat pengaruh Kerajaan Inggris yang melakukan perluasan wilayah koloninya. Kolonis Amerika tidak sama dengan kolonis Inggris karena kolonis Amerika dan Inggris mewakili kelas dan keahlian pekerjaan tertentu seperti perdagangan,

pertukangan, dan pertanian. Secara ideologi, mereka adalah produk *Lockian Liberalism* yang mengembangkan pencerahan tentang kepentingan pribadi, individualisme, dan pendukung negara melalui bentuk-bentuk politik parlementer dan doktrin *laissez-faire* terhadap bidang-bidang ekonomi dan masalah pribadi (Ash, 1972).

Terjadinya ekspansi geografi secara cepat di Amerika-Utara dan terisolasinya negara koloni itu terhadap intelektual dan evolusi politik Eropa menyebabkan keadaan institusi sosio-politik Amerika menjadi terpecah berkeping-keping dan berpaham kolot (Ash, 1972). Adanya legenda *free enterprise* yang berasal dan muncul dari kalangan imigran yang terhempas di Eropa, ternyata, memunculkan kelas pedagang berikut ideologi kompetisinya. Semangat revolusi seperti itu membawa kemerdekaan bagi koloni yang didominasi oleh ekonomi liberal.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul pula konsensus politik di antara kekuatan-kekuatan kolonial yang berkuasa saat itu. Pada kenyataannya, masing-masing koloni dan wilayah mengembangkan budaya politiknya yang khas (LeLoup, 1986). Hal tersebut disebabkan tidak adanya kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan pusat. Akibat lanjutannya adalah terbagi-baginya sistem kekuatan dalam pemerintahan.

Amerika Serikat mengadopsi sistem pemerintahan yang memaksimalkan kepentingan materi dan otonomi, serta melakukan desentralisasi politik yang dirancang untuk melindungi hak kepemilikan. Sistem ini, pada akhirnya, membantu stabilitas institusi dengan mengamandemennya. Wakil rakyat dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan. Keuntungan yang didapat melalui hal tersebut adalah terwujudnya kemerdekaan dan kebebasan individual, diberlakukannya pembatasan kekuasaan pusat melalui gerakan-gerakan massa, serta memajukan bentuk-bentuk politik yang beraneka ragam (McConnel, 1966).

Sesungguhnya, hal-hal di atas dapat memunculkan bahaya besar bagi kekuatan privat dalam proses politik organisasi pemerintahan dan masyarakat. Kendatipun demikian, diyakini bahwa dengan adanya gerakan-gerakan massa, sistem yang berjalan akan dapat tetap diawasi secara ketat sehingga kepentingan-kepentingan privat yang mulanya akan menumbangkan kepentingan publik dapat dipersempit.

Dalam salah satu tulisannya, James Madison mengatakan bahwa "ada dua hal utama dalam kompetisi filosofi politik, yakni pluralisme dan

elitisme yang menjelaskan sistem politik menurut perspektif masing-masing. Seorang *pluralist*, seperti Robert Dahl, mengatakan bahwa sistem yang ada lebih baik daripada sistem demokratik yang lain. Ia memastikan bahwa kepentingan-kepentingan privat memiliki akses terhadap sistem politik sehingga sukar sekali untuk dapat mengimbangi kompetisi kepentingan tersebut. Sementara itu, para *elitists*, seperti Grant McConnell, C. W. Mills, dan E. E Schattschneider mengatakan bahwa tidak semua kepentingan itu bersifat sama karena kekuatan dapat terbagi-bagi dan mereka yang tidak atau sedikit memiliki kekuatan akan tersingkir dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan Schattschneider bahwa "di surga nyanyian koor terdengar dari kelas atas yang kuat; artinya sekitar 90% orang tidak dapat mencapai sistem *pressure* (Schattschneider, 1975).

Hal-hal di atas melatarbelakangi pemahaman tentang karakteristik sistem struktur politik Amerika Serikat. Juga, memprediksikan usaha-usaha pembaharuan dalam perubahan sosial yang menggunakan prosedur institusi tradisional terhadap hal-hal yang muncul yang ditempuh melalui partisipasi mereka.

Munculnya Gerakan Sosial

Gerakan sosial biasa didefinisikan sebagai "seperangkat perilaku dan kesadaran tindakan dari bagian kelompok orang yang diarahkan terhadap perubahan dalam struktur sosial atau ideologi masyarakat dengan menjalankan atau menggunakan sarana legitimasi ideologi yang ada untuk mewujudkan inovasi baru" (Ash, 1972). Manuver yang kemudian dilakukan oleh sekelompok kepentingan tertentu untuk mempengaruhi proses kebijakan seringkali dikategorikan sebagai profesional karena kampanye kelilingnya yang luar biasa. Itulah contoh gerakan massa yang berusaha membentuk pemerintahan berdasarkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan kelompok tertentu saja.

Kemampuan sistem konstitusional untuk menekan gerakan massa perlu memperhatikan dua periode penting sejarah kebangsaan Amerika selama berkembangluasnya mobilisasi, yakni kondisi revolusi dan perang dunia. Kedua kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan kondisi saat ini karena, bagaimanapun, dua hal di atas saat itu membawa pengaruh yang sangat serius dalam bidang politik atau ekonomi. Pada kenyataannya, industrialisasi setelah perang dunia

membawa perubahan yang sangat pesat dalam mendorong munculnya kapitalis-industrialis. Persekongkolan antara perusahaan dan status individu yang ada dalam proses industrialisasi telah menekan serikat buruh sehingga tidak dapat memunculkan tanggung jawab sosial (Ash, 1972).

Dalam kaitan dengan ini, gerakan yang paling radikal adalah *Molly McGuires*, sebuah organisasi teroris pertambangan di Pennsylvania, Amerika Serikat. Organisasi anarkis ini sedikit melakukan tindakan kekerasan dibandingkan dengan gerakan yang saat ini bermunculan yang selalu dibarengi oleh tindakan kekerasan. Beberapa kelompok tersebut menganut ideologi Marxian dan sosialis, atau setidaknya tidaknya memiliki alternatif filosofis lain untuk menentang produksi kapitalis. Hal ini bukan saja kasus yang banyak terjadi di *American Federation of Labor* (AFL) pimpinan Samuel Gompers yang muncul akibat adanya desakan ekonomi dan peningkatan suasana kerja.

Gerakan yang populer pada 1880-an dan 1890-an adalah gerakan petani, khususnya petani kecil. Gerakan tersebut menumbuhkan solidaritas di kalangan pekerja dengan menggunakan analisis Marxian untuk menjelaskan krisis pertanian berkaitan dengan distribusi kapitalis (Ash, 1972). Sayangnya, seperti kebanyakan gerakan buruh di Amerika Serikat lainnya, analisis tersebut memecah belah mereka karena karakter kepemimpinan di pedesaan yang masih menggunakan cara isolasi, kompetisi, kecurigaan terhadap pihak luar, dan cara pandang dunia yang primitif (Ash, 1972). Contohnya, banyak gerakan yang muncul di Bagian Selatan didukung oleh gerakan *Ku Klux Klan*, sementara Wiliam Jennings Bryan—seorang kandidat presidential dan pimpinan partai— justru melawan perubahan yang sedang digulirkan (Ash, 1972). Sesudah 1890-an, gerakan petani tersebut terpecah-pecah karena gerakan yang seharusnya menolong kaum tersisih, justru menjadi penolong pemilik kepentingan tertentu (Ash, 1972).

Munculnya kekuatan privat memberikan bentuk gerakan yang sangat besar pada abad ke-19 yang disebut-sebut sebagai gerakan progresif era 1905-1916. Tetapi, sama halnya dengan gerakan populer, gerakan ini justru menjadi gerakan yang terpecah-pecah jika tidak segera dilakukan *counter-productive*. Pada akhirnya, gerakan populis mengalami penurunan yang sangat drastis setelah adanya teori konspirasi melalui pergeseran kekuatan privat kepada konsentrasi kemakmuran privat, khususnya modal perusahaan.

Ujung tombak dari gerakan privat tersebut adalah sistem yang korupsi dan mencari bentuk-bentuk aturan perusahaan untuk membentuk kelompok-kelompok partai politik lokal dan pusat agar dapat mewakili suara mereka, termasuk rakyat, sehingga dengan cara demikian mereka dapat menjadi kandidat dalam pemilihan suara. Ini dilakukan seperti halnya upaya meningkatkan kondisi kerja dan hak pilih umum bagi semua orang, termasuk kaum imigran dan menengah yang tinggal di daerah perkotaan sebagai kelompok minoritas (Ash, 1972).

Pada kenyataannya, gerakan progresif dapat lebih menyebar luas dan menggerakkan masyarakat dibandingkan dengan gerakan populer, namun meninggalkan banyak kerusakan. Gerakan kelas menengah mendapat dukungan dari kelas pekerja, termasuk bagian humanitarian dan protestan, serta kelompok profesional yang memiliki ketertarikan terhadap pembentukan sistem politik yang efisien. Tindakan ini sama halnya dengan upaya-upaya menciptakan stabilitas pasar dan integrasi ekonomi dengan pemerintah (Ash, 1972). Kombinasi demikian, tentu saja, menimbulkan konflik kepentingan yang besar dan meluas. Terbukti dengan munculnya dua puluh empat negara yang meminta pelaksanaan referendum. Akan tetapi, untuk kasus Kalifornia, gerakan itu justru dikontrol oleh kelompok kepentingan privat yang memiliki kekuasaan. Semua itu berlangsung hingga memunculkan gelombang reformasi.

Setelah beberapa dekade, sistem pemerintahan profesional dengan model administrasi, komisi, dan otonomi luas bagi birokrasi sentral, muncullah pemerintahan *experts* dari sektor privat. Banyak harapan yang dimunculkan dari para analis yang memiliki kepentingan umum, seperti McConnell. Misalnya, dalam pengembangan pelayanan hutan, dimunculkanlah adanya ikatan politik terhadap konstitusi, pengawasan kepentingan umum yang berliku-liku, yang sesungguhnya semua itu adalah upaya untuk mengikat kepentingan khusus tertentu yang berlawanan dengan titik awal pergerakan progresif (McConnell, 1966).

Berkaitan dengan masalah tersebut, ada kritikan yang sangat tajam yang dilontarkan oleh Roberta Ash terhadap gerakan progresif ini. Menurutnya, dua gerakan tersebut sebenarnya hanya menimbulkan sistem politik yang korupsi untuk melawan elite-elite ekonomi. Gerakan tersebut akan menghilangkan keberadaan kelompok elite tersebut, dan pada akhirnya, tindakan mereka juga akan menimpa gerakan itu sendiri (Ash, 1972).

Reformasi Kontemporer

Perubahan terbesar terjadi setelah 1930-an seiring dengan berakhirnya era gerakan populer dan progresif yang memunculkan gerakan massa yang besar dalam menentang kemiskinan sejak 1960-an. Program reformasi penting telah tercapai berkat semakin kuatnya dukungan elite tradisional. Berdasarkan sejarahnya, Abbot (1987) mengatakan bahwa gerakan penyelesaian masalah rumah sudah mulai beralih ke profesi pekerjaan sosial. Kekuatan kulit hitam menjadi institusi dari tindakan afirmatif. Feminisme menjadi gerakan tersendiri dalam upaya meningkatkan karier bagi kepentingan individu melalui negara sebagai pendukung struktural. Intervensi kelompok reformasi menjadi pendukung negara sejahtera Amerika Serikat. Dalam hal ini, kelompok reformasi sebagai supervisor dan penyebar luas program. Dalam melancarkan reformasi sama halnya dengan kelompok serikat buruh atau pekerja yang tidak mampu berbuat apa-apa. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan ideologi pelayanan negara sejahtera.

Adalah benar bahwa masing-masing suksesnya kepemimpinan merupakan hasil dari pengalaman gerakan sebelumnya, atau termasuk gerakan yang berpura-pura. Semuanya telah membentuk ideologi Amerika Serikat yang demokratis, khususnya dalam kaitan dengan penciptaan kesejahteraan sosial. Semua itu memberikan kekuatan tersendiri bagi adanya sistem politik kapitalis. Pola praktek perubahan sosial seperti ini berhubungan sedemikian erat seperti yang dikatakan Ash. Gerakan profesional bergantung pada keadaan kehidupan di dalam dukungan tingkat elite yang sesungguhnya juga membutuhkan legitimasi dan integrasi massa dalam gerakannya. Semua itu merupakan kooptasi tingkat luas yang berjalan ketika kegiatan gerakan reformasi termarginalisasi oleh politik kapitalis.

Ada sebuah pelajaran penting yang harus dipelajari dari kegagalan periode *New Left* (Kiri Baru) di sepanjang 1960-an dan awal 1970-an. Ide demokrasi partisipatoris dan zona liberal yang dikupas secara tuntas dan detail oleh Harry Boyte dalam *Free Space* dan *Citizen Action and the New American Populism*. Munculnya visi pragmatik utopia yang tak terkendali telah membentuk elemen masyarakat yang berkelanjutan. Juga, memberikan kritikan yang sangat tajam bahwa hubungan tersebut menimbulkan kehancuran dalam hubungan antarelite pemimpin inti.

Gerakan-gerakan lain yang kemudian bermunculan adalah perang anti-Vietnam, lingkungan wanita, anti-kekuatan nuklir, dan hak-hak kaum gay yang tidak terkooptasi oleh kekuatan elite manapun, kecuali oleh perampasan hak-hak wanita seperti kesaksian Virginia Slims. Sungguhpun demikian, gerakan tersebut tidak sukses. Bahkan, hingga kini masih ada gerakan yang tetap mengangkat isu-isu seputar hak-hak reproduksi dan peraturan lingkungan. Gerakan-gerakan yang telah diuraikan di atas, bagaimanapun, tidak dapat dibendung oleh sistem politik yang ada karena semua hal tersebut berhubungan dengan perang terhadap kemiskinan.

Praktek Perubahan Sosial Aksi Langsung (*Direct-Action Social Change Practice*)

Pembahasan tentang masalah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perubahan sosial melalui aksi langsung (*direct-action*) berbeda dari parlementer tradisional, metode pembaharuan pemilu, dan kekuatan tentara yang berupaya terus mencari bentuk yang pas untuk menggantikan struktur sistem yang ada. Contoh tentang penggabungan atau percampuran dan pemusatan aksi langsung (*direct-action*) dengan pendekatan tradisional adalah hak-hak kaum gay yang memprotes tindakan sewenang-wenang tanpa melalui kekerasan. Gerakan protes mereka bertujuan menekan perusahaan obat-obatan agar tidak terlalu mahal menjual obat-obatan yang digunakan untuk melawan virus AIDS. Sementara itu, masyarakat kaum gay mengembangkan *Political Action Committee* (PAC) sebagai corong kampanye untuk mendapatkan dukungan kaum politik terhadap agenda yang mereka buat. Pada saat yang sama, tepatnya sepanjang 1960-an, telah terjadi gabungan aksi langsung (*direct-action*) dan pendekatan revolusioner ketika *Black Panthers* menjalankan kerja sama program pangan urban dengan mengikutsertakan kekuatan tentara dan polisi secara sporadis.

Aksi langsung (*direct-action*) mencakup *middle-ground* sebagai taktiknya. Sebagian besar dari taktik tersebut berasal gerakan buruh di Amerika Serikat, seperti pemogokan, gerakan boikot, rapat akbar atau umum, serta membentuk barisan dan duduk-duduk atau berdiam seperti yang dilakukan gerakan *automobile* pada 1930-an. Selanjutnya, tindakan ini berubah menjadi gerakan yang mengusung pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Banyak gerakan lainnya yang bersifat

nonkooperatif dan *civil disobedience* (pecahnya ketidakadilan hukum internasional) yang juga berkembang sebelum periode abolisi perang dunia. Gerakan ini menemukan jalan ke dalam gerakan Mahatma Gandhi terhadap kemerdekaan India, hak-hak sipil, kebebasan berbicara, dan gerakan antiperang Vietnam.

Intinya, aksi langsung (*direct-action*) bagi perubahan sosial dikategorikan sebagai perlawanan aktif atau protes terhadap kondisi kehidupan politik atau hukum yang ada (Carter, 1973). Orang-orang dapat bergabung bersama dalam upaya mobilisasi temporer sepanjang krisis atau selama adanya gerakan berskala luas (misanya, gerakan-gerakan hak-hak asasi manusia dan gerakan antiperang Vietnam). Banyak juga sejumlah kecil orang yang turut ambil bagian dalam organisasi gerakan yang memunculkan isu-isu seputar permasalahan sosial atau ekonomi di tingkat tetangga, kota, bahkan nasional dan negara.

Biasanya, jenis usaha perubahan dari gerakan sosial yang lebih besar muncul karena merasakan adanya kekurangan dari sistem politik formal. Misalnya, adanya erosi kemerdekaan sipil termasuk kebebasan personal dalam berekspresi. Mereka akan memprotes bila kebebasan politik dianggap sebagai tindakan tidak efektif dalam menyangkut masalah-masalah struktural (Carter, 1973).

Pada umumnya, organisasi aksi langsung (*direct-action*) yang bersifat lebih kecil dan lokal memiliki kekuatan yang terbatas. Sebab itu, muncullah keterbatasan dalam mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Biasanya, hal semacam itu akan bergerak dan bergulir menjadi isu-isu yang membesar dari hanya tujuan materi berubah menjadi politik. Gerakan tersebut lahir berdasarkan pemikiran kelompok sayap kiri-kanan. Dalam hal ini, ideologi bukanlah rintangan dalam upaya menggunakan beragam metode praktek perubahan sosial.

Pada hakikatnya, pembagian nilai-nilai aksi langsung (*direct-action*), baik melalui gerakan maupun organisasi lokal, menginginkan tegaknya keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang dikerjakan dengan memberikan segala sesuatunya secara tepat, proporsional, atau pada tempatnya terhadap semua yang dikuatirkan. Keadilan seperti ini sejajar di bawah hukum atau undang-undang, atau sesuai dengan standar keadilan. Tetapi, definisi tersebut masih memiliki banyak interpretasi. Maksudnya, masih harus melihat dua pandangan filosofis politik, yakni liberal dan sosialis—dua pandangan yang sangat kontras dalam melihat hakikat keadilan.

Liberalisme dan Keadilan Liberal

Robert A. Dahl, seorang peneliti politik liberal ternama berhasil membedah liberalisme dan keadilan liberal dalam bukunya yang bertitel *Democracy and its Critics*. Dahl menggambarkan betapa sukar upaya menggabungkan konstitusional karena di dalam sistem struktur liberal masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Pemahaman konsep kepentingan yang tidak memadai, konflik-konflik yang terus bermunculan akibat banyaknya kepentingan yang berseberangan, dan sulitnya mengawali kebaikan yang bersifat umum bagi seluruh keheterogenitasan warga masyarakat, dan masalah mengadopsi teori republik dalam skala bangsa-negara (Dahl, 1989).

Untuk mencapai keadilan melalui konteks yang dijelaskan di atas, Dahl mengutip pendapat seorang filosof, John Rawls, yang mengatakan: "Cukup cantik, jaranganya prosedur sempurna yang adil, di banyak kepentingan pelaksanaan... Rencana terbaik yang dapat dicapai adalah tidak sempurnanya prosedur keadilan" (Dahl, 1989). Pernyataan persuasif Dahl—dilihat dari sudut pandang ini—menyebutkan bahwa proses demokratik sangat membantu warga negara untuk dapat menyatukan hak-hak, kemerdekaan, dan hal yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh, sebagai warga negara yang sama dalam membuat semua keputusan yang dicapai. Proses demokratik bukan hanya bermakna penting bagi salah satu kepentingan tertentu, melainkan juga bagi semua kepentingan politik. Hak warga negara untuk mengatur diri mereka sendiri merupakan dasar yang substantif (Dahl, 1989).

Jelaslah bahwa praktek perubahan sosial dengan sedikit insting dari para praktisi meletakkan sikap kompromistis sebagai dasar permainan politik. Jika salah satu kepentingan tidak mewakilinya, akan lebih baik bila mengorganisasikannya lagi tahun depan. Lebih baik ada ketidaksempurnaan dalam keadilan daripada tidak ada keadilan sama sekali.

Liberalisme mencakup perlindungan kebebasan individu tanpa kecuali. Untuk dapat mengembangkan kekuatan seperti itu perlu penggabungan keadilan. Dengan cara demikian, terjadinya pendistribusian keadilan adalah sesuatu yang memungkinkan. Ketika keadaan kelompok sosial terjepit, sistem liberal yang telah dibangun difungsikan untuk memeriksa dan mengimbangi keluhan tersebut. Sayangnya, ada

semacam indikasi kekuatan “pasar gaib” dibandingkan dengan mewujudkan stabilitas dan standar hidup yang biasanya dapat mencelakakan kelompok sosial tertentu.

Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, kita dapat menyaksikan perusahaan kapitalis terintegrasi secara penuh sebagai bentuk perekonomian global. Tingkat pengangguran para pekerja Amerika Serikat meningkat pesat akibat perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang sebelumnya menghasilkan barang-barang manufaktur, sekarang bergeser ke negara-negara dunia ketiga dengan upah yang lebih rendah. Penyetelan kembali kontrak militer akibat menurunnya belanja militer telah membuat kecenderungan penurunan ekonomi yang sangat drastis di negara-negara Barat. Pada sisi lain, pajak dan bentuk-bentuk kesejahteraan fiskal yang berbeda bagi perusahaan besar dan warga negara berpenghasilan tinggi semakin memperburuk keadilan di bidang ekonomi, terutama bagi kelompok minoritas ras, etnik, serta kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Sungguhpun demikian, Amerika Serikat tetap bersikeras untuk optimis bahwa *politic voting* dan perubahan garis partai akan dapat menciptakan kondisi pembaharuan yang lebih baik. Alternatif-alternatif struktur dasar bagi lembaga ekonomi dan politik adalah sesuatu hal yang tidak lagi realistis untuk dipertimbangkan.

Sosialisme dan Keadilan Sosial

Kymlicka memberikan pernyataan yang sangat jelas dan lugas antara keadilan liberal dan sosial. Menurutnya, keadilan tegak di dalam sistem kapitalis liberal sebagai konsep keadilan yang berusaha memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, baik konflik kepentingan yang muncul antarindividu maupun konflik yang muncul akibat kelangkaan sumber. Tetapi, kelompok Marxian dan komunitarian percaya bahwa supersesi keadilan merupakan salah satu aspek pembangunan yang dapat mengantarkan pada pembentukan masyarakat yang lebih tinggi (Kymlicka, 1989).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah contoh yang baik dalam pengaturan institusi masyarakat liberal yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam penegakan keadilan. Sayangnya, ekonomi pasar (*market economy*) mengalami resesi seiring dengan munculnya tekanan terhadap pembongkaran program kesejahteraan sosial yang semakin meningkat.

Sosialisme bukanlah filosofi yang monolitik. Karena itu, negara sosialis sebelumnya semisal Uni Soviet sangat berbeda dengan demokrasi sosialis yang lahir dan dikembangkan di Perancis, Spanyol, atau Swedia. Sosialis murni hanyalah teoretis murni seperti halnya pasar bebas liberal murni. Dasar pemikiran utama antara kedua filosofi liberal dan sosial tersebut adalah hubungan ekonomi superstruktur, dan kerja sama kapitalisme. Salah satu kritikan tajam dari kelompok Marxian terhadap kapitalis adalah sistem produksi yang mengabaikan *social nature*. Menurut Marxian, paham kapitalis-liberalis hanya menjadikan orang sebagai objek nilai surplus dan keuntungan yang dihasilkan. Kapitalis juga memunculkan alienasi sosial yang menjadikan dan membedakan antara pekerja dan orang-orang yang memainkan peranan keseluruhan dari proses tersebut. Inilah yang oleh Arendt digambarkan sebagai "kepemilikan perbudakan secara privat dan kebutuhan wanita dalam keadaan di mana hak-hak kemerdekaan itu sirna (Kymlicka, 1989).

Acapkali terjadi konflik struktural dalam hubungan sosial pembagian kerja kapitalis. Juga, memunculkan kontradiksi antara kepentingan individu atau keluarga individu, dan kepentingan umum bagi semua individu (Kymlicka, 1989). Sosialisme dicari dan ditemukan untuk melengkapi liberalisme, atau paling tidak untuk membentuk sisi ekonomi demokratik yang ideal (Kymlicka, 1989). Juga, sosialisme menolak ekonomi *laissez-faire* dalam upaya mengembangkan perencanaan dan kepemimpinan terpusat dari atas, dan mempercayai bahwa ekonomi yang dijalankan akan dapat melindungi jumlah yang besar. Oleh sosialisme, keadaan-keadaan tersebut dapat dicapai dan keadilan dapat dimunculkan jika semua kepemilikan tidak dipegang oleh sekelompok kepentingan privat, tetapi oleh masyarakat (Williams, 1976).

Banyak pemikir yang menggunakan analisis sosialis dalam mengkaji ekonomi politik. Menurut mereka, kemakmuran ekonomi dan kekuatan politik dapat menjadi media perubahan yang amat mendasar, meskipun kita mengetahui bahwa konsep Marxian pasca-Soviet menjadikannya perbaikan yang sangat berani dalam pelayanan pekerja sosial.

Historis Materialisme

Teori Marx bahwa alienasi berhubungan erat dengan keadaan substantif sehari-hari, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang sangat kontras dengan idealisme konsep liberal. Menurut teori ini, kedudukan kesadaran individu terbentuk dari pengembangan ide dan kepercayaan-

an yang menjelaskan perilaku manusia dan hubungan sosial mereka. Interpretasi sejarah materialis adalah sesuatu yang perlu dikaji untuk mengimbangi interpretasi liberal dengan merujuk pada sejarah logika langsung (*directing logic*). Sementara itu, sejarah materialisme mencari gagasan-gagasan untuk mendapatkan kenyataan dari proses sejarah yang berlangsung. Hal tersebut dijelaskan sebagai sejarah manusia sebagaimana dijelaskan dalam perputaran waktu tertentu. Pada kenyataannya, manusia menjadi keadaan sejarah itu sendiri yang diikat oleh keadaan sosial dan konteks ekonomi (Tillich, 1977). Pola yang lebih sederhana, tetapi idealis, cenderung mengarah pada sebuah mitologi yang mengatakan bahwa “impian Amerika” hanya dapat ditempuh dengan kepercayaan bahwa hanya dengan kerja keras segala keinginan individu akan dapat diwujudkan dengan apa yang disebut organisasi sistem produktif dan distribusi. Persoalan ini akan diperjelas secara lebih detil dalam analisis dialektika.

Analisis Dialektika

Analisis dialektika adalah sebuah proses yang sangat penting dalam mempelajari berbagai situasi sosial sepanjang sejarah sehingga pandangan tentang pekerja yang sesungguhnya dapat diperoleh. Sesungguhnya, dialektika ini hadir mendahului Marxisme. Bahkan, jangkauannya pun sangat luas dan dapat dipakai dalam beragam konteks masyarakat, politik maupun ekonomi. Analisis tipe ini tidak seperti analisis pengetahuan yang kering, tetapi analisisnya lebih bersifat interaktif yang terdiri dari tiga bagian, yakni tesis (pusat ide, didukung oleh asumsi dan argumen), antitesis (berlawanan dengan tesis), dan sintesis, yang umumnya tengah-tengah atau ide yang terdiri dari bagian tesis dan antitesis. Dialektika ini mengimplikasikan penemuan aktif seperti munculnya kesadaran akibat alienasi sosial yang tidak dapat tercakup dalam tindakan dan refleksi kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lama semakin memberikan pemahaman yang nyata dalam keadaan yang ada, serta perubahan yang terjadi. Analisis budaya, sosial, ekonomi, dan lembaga-lembaga politik sebagaimana hubungan kekuasaan semuanya berhubungan dalam satu dimensi realitas baru.

Kontradiksi dalam Hubungan Sosial

Analisis dialektika menjelaskan dua tipe kontradiksi dalam perubahan sosial, yakni kontradiksi dalam distribusi barang dan jasa,

serta kontradiksi dalam produksi kapitalis. Marx mempercayai bahwa sistem distribusi kapitalis tidak dapat menciptakan keadilan bagi buruh, bekerja dengan etos kerja yang bagus untuk mendapatkan upah yang jauh dari layak, sementara pemiliknya memperoleh investasi keuangan yang sangat besar (nilai-nilai surplus dari total investasi, termasuk buruh dan keuntungan). Selain itu, kapitalisme modern telah menciptakan pembagian tenaga kerja dalam proses produktif, alienasi pekerja dalam berpartisipasi untuk membuat produk yang sempurna, menciptakan alienasi produksi dari produk, serta alienasi diri antara satu pekerja dengan lainnya (Longres, 1986).

Dalam keadaan seperti ini, pekerja sosial memiliki pengalaman berkaitan dengan kontradiksi tersebut. Misalnya, banyak agen pelayanan sosial mengakui bahwa mereka melayani klien dengan penuh perhatian dan keadilan. Kendatipun semua usaha sudah dilakukan oleh mereka, tetapi bagi para klien mendapatkan kesejahteraan, keuntungan, atau pelayanan yang memadai tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kendatipun masih ada keluhan-keluhan yang muncul dalam proses pelayanan tersebut, analisis dialektika belum dapat memecahkan kontradiksi tersebut sehingga proses penyadaran para klien atas dirinya pada tingkat tinggi untuk dapat menolong mereka dalam upaya mencari pemecahannya belum terpenuhi.

Keadaan yang sama sulit dengan risiko yang juga berat dimainkan oleh kelompok sosialis maupun liberal di bawah kondisi pengendalian yang terpusat. Keadaan demikian hanya meletakkan kekuatan di atas pengontrolan sepanjang pengontrolan itu hanya dilakukan oleh kelompok kekuatan tertentu. Mengenai masalah ini, Tillich menyebutkan sebagai kecenderungan antara kekuatan yang memunculkan kekuatan struktur asli untuk mendukung struktur masyarakat (impian Amerika, perasaan nasionalis) yang berhubungan erat dengan tuntutan keadilan (Tillich, 1977).

Banyak kritikan yang diarahkan kepada analisis kelompok Marxian dan liberalisme oleh para pekerja sosial. Menurut pekerja sosial, kemunculan analisis tersebut dianggapnya hanya sebagai kesadaran palsu tentang perekonomian bahwa *materialism is economism*. Dalam hal ini, Tillich menyebutkan bahwa Marx hanya memahami satu sisi bahwa ekonomi dan semangat adalah sesuatu yang tak terpisahkan (Tillich, 1977). Pada perkembangan berikutnya, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels mengenai materialis. Tillich mengatakan bahwa

kejadian-kejadian politik yang terjadi atas perlawanan terhadap gerakan kaum proletar merupakan gerakan yang sama untuk melakukan perlawanan terhadap Marx (Tillich, 1977).

Meskipun pekerja sosial tidak bermaksud mengganti lembaga sosial yang telah ada, tetapi analisis tentang hubungan yang realistis atas pilihan mereka untuk melakukan strategi aksi langsung (*direct-action*) merupakan sesuatu yang tetap diperlukan. Bahaya yang kemungkinan muncul saat menggunakan analisis tersebut adalah pengorbanan visi yang telah disepakati. Perlakuan politik veto untuk menghentikan inisiatif dukungan negara. Pada akhirnya, kurangnya jaminan mendorong terjadinya aksi langsung (*direct-action*) dan mobilisasi massa yang dikhawatirkan menimbulkan *chaos*. Sejarah mengajarkan bahwa gerakan tersebut tidak dapat bertahan setelah mengalami krisis yang berkepanjangan. Karena itu, perlu dicari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai analisis tentang perencanaan tindakan tersebut. Dengan cara demikian, organisasi metodis tetap didorong untuk tetap melakukan perlawanan.

Metodologi aksi langsung (*direct-action*), sesungguhnya, lebih banyak mendukung aksi dari tingkat lokal daripada tingkat nasional. Bagaimanapun, partisipasi pekerja sosial dalam tindakan semacam itu akan menjadi perluasan yang penting dalam tradisi politik pekerja sosial. Kendatipun demikian, ada banyak kontradiksi dalam produktivitas kerja pekerja sosial yang sangat membutuhkan praktek profesionalisme untuk mengembangkan sistem teori. Sistem ini mencakup analisis dialektika dan pemahaman ekonomi-politik. Adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana apabila membiarkan perubahan ideologi dalam ketidakjelasan politik global meskipun penggunaan hal-hal tersebut mungkin cocok bagi keadaan saat ini. Oleh seorang ahli, keadaan ini dikatakannya sebagai perspektif ekonomi politik (Hasenfeld, 1983) atau perspektif baru neo-Marxian, sebuah kekuatan dasar analisis yang memerlukan ketelitian politik, ekonomi, dan realitas dimensi struktural.

Praktek Transformasi Perubahan Sosial

Sukar berargumentasi dengan para praktisi tradisional dan aksi langsung (*direct-action*) ketika mereka mengkritik praktek perubahan sosial pendidikan remaja dan peningkatan kesadaran kaum lemah — salah satu bentuk diversifikasi dari aksi. Salah satu responsnya adalah

aksi tanpa refleksi, tanpa analisis, menggerakkan orang-orang pada saat belum siap, atau memanipulasi massa untuk melaksanakan agenda kepentingan orang lain merupakan resiko. Karena itu, tidak semua bentuk praktek perubahan sosial dimulai pada saat yang sama, bahkan mungkin memakan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan konkret, jika memang pernah mencapai. Ini merupakan salah satu kasus praktek transformasi perubahan sosial.

Pekerja sosial seyogianya memikirkan perbedaan tiga tipe masyarakat fungsional, yakni (a) masyarakat rasional (politik) yang berhubungan dengan dimensi kehidupan publik; (b) masyarakat produktif yang berhubungan dengan transaksi ekonomi sebagaimana isu kesejahteraan (alienasi yang dijelaskan oleh Marxisme); dan (c) masyarakat afektif, kelompok masyarakat yang kurang berhubungan dengan intimasi, persahabatan, dan pemenuhan subjektif (Wolf, 1968).

Jika para praktisi perubahan sosial mengoperasikan secara eksklusif masyarakat produktif dan politik (sebagaimana yang dilakukan organisasi tradisional dan *direct-action*), hal itu akan meninggalkan masyarakat afektif secara keseluruhan terhadap keluarga. Bahkan, mereka terisolasi dan terpecah-belah masing-masing anggota keluarga. Ada beberapa problem yang sangat penting sehubungan dengan kecenderungan ini untuk mengabaikan atau mengisolasi keluarga dari dua aspek tipe masyarakat lainnya. Dalam kaitan ini, sebuah latar belakang sejarah akan dapat menjelaskannya.

Munculnya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas uang, kini lebih mendominasi perekonomian rumah tangga (sebuah masa *post-feodalisme* yang membedakan kepemilikan produktif kaum borjuis), termasuk di dalamnya kesatuan personal dan produktivitas kehidupan dalam bentuk diri dan unit ekonomi. Keadaan ini terjadi juga pada perekonomian kapitalis yang membedakan antara kepemilikan privat dalam bentuk modal, tenaga kerja (Zaretsky, 1976). Antara terdisintegrasinya feodalis pada abad ke-14 dan munculnya kapitalis pada abad ke-16 terjadilah perubahan yang teramat penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Zaretsky mencatat ada dua divisi atau bagian organisasi sosial yang mencapai sesuatu yang bersifat jauh, yakni munculnya konsekuensi negatif bagi seorang perempuan. Selama konsep kapitalis muncul, kaum perempuan mencapai hubungan status sosial yang sama dalam kerja sama perekonomian keluarga. Divisi pertama adalah antara sosialisasi buruh dalam perusahaan kapitalis dan buruh perempuan

dalam rumah tangga. Adanya pembagian ini menyebabkan semakin menurunnya peran perempuan dalam proses produksi rumah tangga. Bahkan, sebaliknya peranan kaum pria semakin meningkat dalam dominasi proses kehidupan rumah tangga. Divisi kedua adalah antara kehidupan sosial personal dan tempat adanya pembagian kerja (*division of labor*). Bila divisi atau bagian pertama digabungkan dengan bagian pertama akan terjadi pembagian kerja dan kehidupan yang harmonis sebagaimana yang terjadi di Yunani. Juga, terjadi perubahan kebutuhan dan kebebasan. Konsekuensi bagi hadirnya kaum perempuan diringkaskan oleh Zaretsky (Zaretsky, 1976).

Ketika ibu rumah tangga mengerjakan tugas produksi tradisional-pekerjaan rumah, menjaga anak, dan lain-lain, tanggung jawab mereka akan semakin terisolasi dari nilai surplus produksi sosial. Juga, ibu-ibu dan ibu rumah tangga diberikan tanggung jawab baru untuk tetap mempertahankan emosi dan psikologi yang sesungguhnya dalam hubungan pribadi. Bagi wanita dalam sebuah keluarga, bekerja dan kehidupan tidaklah terpisah yang boleh jadi akan mempercepat keruntuhan atau kehancuran satu sama lainnya.

Kecenderungan tersebut terjadi di Inggris pada abad ke-17 dan 18 yang mengarah pada revolusi industri dan sosiologi yang dicetuskan oleh Marxisme. Adanya perlawanan kelas proletar atas kelas industri kapitalis mengakibatkan semakin dominannya peran-peran individu yang terjadi sebelumnya. Pada awal abad ke-19, keluarga sudah tidak ditempatkan lagi dalam produksi sosial, tetapi diletakkan dalam pabrik-pabrik yang tidak berperikemanusiaan dan kejam. Bentuk identitas baru yang bersifat personal dikembangkan di antara pria dan wanita yang tidak menjelaskan keberadaan pekerjaan mereka (Zaretsky, 1976).

Tekanan yang dihadapi wanita dalam keluarga inti disayangkan oleh kaum sosialis sebagaimana yang ditulis oleh Zaretsky. Tulisan Zaretsky ini didasarkan pada hasil survei para feminis secara lengkap. Data itu mencatat bahwa feminis radikal tidak menyetujui adanya posisi sosialis yang menyatakan bahwa hubungan keluarga (dan semua hubungan sosial) akan ditransformasikan secara otomatis dengan perlakuan yang sejajar terhadap wanita dalam bekerja, dan perluasan partisipasi wanita dalam produksi sosial. Zaretsky menyatakan bahwa pandangan keluarga kontemporer untuk mengembangkan kapitalis, feminisme radikal menjadi satu dalam menghadapi tekanan (Zaretsky, 1976). Sebaliknya, Firestone menyatakan bahwa

munculnya feminisme merupakan akibat ekonomi yang sesungguhnya psikoseksual (Zaretsky, 1976: 63).

Tantangan feminisme terhadap sosialis dan liberalis (mengenai posisi liberal telah secara baik diterangkan oleh Locke, Mill, dan Rawls) adalah penolakan ekonomi sebagai dasar unit analisis (di bawah sosialis), sedangkan penolakan teori liberalis didasarkan atas kesejajaran individu. Pada kenyataannya, pria sebagai kepala keluarga diletakkan sebagai unit inti dalam proses analisis politik, sedangkan wanita di bawah bayang-bayang. Di sisi lainnya, dalam keluarga posisi natural pria dan wanita baru terjadi (Kymlicka, 1989).

Selanjutnya, Zaretsky mencatat adanya perkembangan dua kritik terhadap feminis dan sosialis. Pada awal ke-20, feminis menekankan betapa pentingnya mempertahankan dimensi subjektif kehidupan personal dalam mengembangkan tradisi kebebasan personal melalui budaya radikal. Bagaimanapun, kehidupan pribadi merupakan keadaan di luar konteks politik (Zaretsky, 1976). Survei feminis yang lebih kontemporer menyarankan tentang peningkatan kesadaran perlunya organisasi untuk sosialisasi agar dimasukkan sebagai dimensi personal kehidupan politik. Di dalamnya tercakup domestik kekerasan dan pemeliharaan anak, meskipun kadangkala menimbulkan perlawanan dan konflik sosial. Inilah yang selanjutnya menurunkan kehidupan personal dalam kehidupan politik yang kemudian terefleksi dalam bentuk hegemoni ideologi dominan dalam kerja sama dan lembaga keagamaan. Kedua hal tersebut menjadi simbol dan bahasa budaya modern, termasuk dukungan terhadap diskriminasi kebijakan dan lembaga. Semua yang diuraikan tersebut menjadi dasar bagi strategi gerakan wanita. Akhirnya, adanya alienasi individual mendorong semakin kuatnya politik gerakan feminis.

Dengan perkataan lain, sosialisme pada awal abad ke-20 merefleksikan tradisi transformasi sosial yang memandang kehidupan keluarga dan kondisi wanita dalam keluarga- sebagai bagian penting dalam psikoanalisis produksi sosial. Teori solusi individu-petunjuk mendapatkan hal tersebut oleh masyarakat kapitalis (Zaretsky, 1976).

Perspektif feminis memberikan kritik intelektual penting terhadap patriarki, dualisme, hierarki sebagai sosial dominan, budaya, politik, ekonomi, dan prinsip organisasi teologikal. Juga, menekankan makna pentingnya pengalaman personal dan pandangan seksual secara ilmiah. Sementara itu, feminisme di Amerika Serikat gagal diterapkan dalam konsep gerakan liberal ras, dan etnik perempuan minoritas,

khususnya wanita Amerika-Afrika dan Latin. Bahkan, gerakan ini mengambil keuntungan dari proses komunal feminisme. Gerakan feminisme tersebut menyangkut pelecehan yang dialami oleh kaum wanita yang semua ini tidak akan terpecahkan tanpa adanya gerakan wanita yang lebih luas di Amerika Serikat.

Dengan kegigihan praktek-praktek religus, perempuan Latin merupakan manifestasi dari gerakan Latina Feminisme. Sebaliknya, wanita Hispanic (kaum wanita keturunan Spanyol) dengan kultur dominannya tetap mendukung identitas diri dan kesatuan budaya untuk tetap mempertahankan proses asimilasi, melawan tekanan yang diberikan pria, diskriminasi politik-ekonomi, dan berkomitmen diri untuk mengubah struktur yang tidak adil (Isasi-Diaz dan Tarango, 1988).

Secara umum, teologi feminis membutuhkan jaringan solidaritas (*solidarity network*) di antara banyak masyarakat feminis untuk menentang sistem patriarki serta konteks perbedaan budaya dan agama (Ruether, 1985). Lebih dari 3000 tahun, sistem patriarki tetap bertahan dan ada upaya-upaya yang terus dilakukan dalam waktu yang sangat panjang untuk mengembangkan lembaga baru. Sebagaimana yang dikatakan Rosemary tentang gerakan feminis, teologi kebebasan (*freedom theology*) – teologi orang hitam, teologi Asean, teologi Amerika Latin – merupakan bagian dari teologi yang saling menjelaskan mengenai teologi itu sendiri. Kita melakukannya karena ikatan patriarki, bukan karena keinginan semua orang (Ruether, 1985). Sungguhpun demikian, apa yang terjadi di atas belum memberikan kepuasan atas apa yang terjadi pada diri wanita dalam upaya memperoleh kesejajaran di bidang pekerjaan dan urusan rumah tangga.

Latar belakang tersebut dapat dijadikan masukan terhadap partisipasi kaum wanita dalam aksi sosial (*social action*). Masih ada dua elemen analisis penting lainnya yang harus dipertimbangkan, yakni fungsi atau peranan pendidikan dalam proses transformasi sosial, dan pentingnya budaya-agama dalam proses evolusi perilaku politik.

Pendidikan bagi Perubahan Sosial

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa *creation of mass society* untuk menggantikan perilaku dalam melakukan sesuatu tindakan adalah sebuah keniscayaan (Arendt, 1958). Pendidikan massa publik di Amerika Serikat, menurut pandangan lain, sudah menyepakati bahwa fungsi proses belajar-mengajar orang-orang adalah untuk

saling memperoleh ilmu pengetahuan satu sama lain (Zaretsky, 1976). Sayangnya, pendidikan publik belum memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama anak muda, sehingga mereka belum mampu menciptakan rasa kebersamaan dan kemandirian di antara mereka.

Paulo Friere yang menulis buku tentang *Pedagogy* (1970) menawarkan pendidikan yang liberal dalam proses transformasi bagi perubahan masyarakat. Meskipun buku tersebut ditulis dari perspektif Brazilia mengenai kehidupan petani, namun isinya memberikan kekuatan besar dalam proses transformasi di atas, dan digunakan dalam perubahan masyarakat Amerika.

Salah satu isi garis besar buku karya *masterpiece* Friere adalah *Education Suffers from Naration Sickness* (Friere, 1970). Dalam bukunya itu, Friere mengatakan bahwa terjadinya penurunan ketidakpedulian dan tekanan kualitas merupakan wujud *banking metode* pendidikan. Guru merupakan segala sumber ilmu pengetahuan. Keadaan tersebut bertentangan dengan pemecahan masalah pendidikan yang ditransformasikan kepada siswa. Bagaimanapun, proses ini berpartisipasi aktif dalam kenyataan proses demitologisasi. Menurutnya, *banking metode* disebut-sebut sebagai konsep yang fatalistik, yakni masalah pendidikan menimbulkan *susceptible* bagi proses transformasi (Friere, 1970).

Bentuk pendidikan adalah sebuah konsep yang bebas ketika dikembangkan oleh tekanan yang dialami. Dalam kaitan ini, banyak analisis Marx yang menggunakan analisis dialektika untuk memahami dasar dominasi, termarginalisasikannya kelompok-kelompok tertentu, termasuk minoritas etnik dan rasional, wanita, kaum gay, dan lesbian penerima kesejahteraan. Bahkan, penderita kesehatan mental yang kemungkinan menggunakan metode tersebut dengan tahapan: membuat segala keadaan ketertekanan untuk didialogkan dan dikembangkan mitologi tua (Friere, 1970).

Dengan pendekatan kemanusiaan (*humanity approach*), Friere bermaksud membebaskan orang-orang tertekan dari tekanan yang ada. Menurutnya, tanpa persepsi transformasi tekanan, perubahan peran atau status hanyalah menimbulkan tekanan yang baru. Praksis inisial (*action*) dari tekanan adalah sesuatu yang imitatif bagi orang-orang yang benar-benar berada di bawah tekanan dominasi budaya secara keseluruhan, dan bahkan orang-orang yang ditekan tersebut melakukan tekanan ulang terhadap orang-orang yang berada di bawah dominasinya.

Di akhir buku ini, Friere berargumen bahwa kadang-kadang organisasi kerja masyarakat — yang terdiri atas karakter orang yang menekan dengan kemurahan hatinya yang bersifat palsu — tidak bersungguh-sungguh menolong orang-orang (klien mereka, ibu-ibu, orang tua tunggal) agar dapat keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Akan tetapi, tekanan yang menimpa mereka merupakan cara untuk membebaskan mereka dari belenggu permasalahan itu sehingga mereka dapat terbebas dari penekan. Pada akhirnya, kelas yang tertekan tidak dapat membebaskan diri dari tekanan satu sama lainnya. Seharusnya, praktek transformasi perubahan sosial menggunakan pemimpin yang tertekan dalam proses kebebasan mereka. Perkembangan kesadaran kritik yang dilakukan melalui *problem-posing* “proyek pendidikan” merupakan jantungnya metode transformasi dalam proses pengorganisasian yang sedang berlangsung (Friere, 1970).

Kritik Friere terhadap pendekatan tradisional dan *direct-action* perubahan sosial adalah metode seperti yang telah diuraikan di atas. Secara sistematis, metode itu tidak dapat menembus karakter dominasi budaya, termasuk orientasi *action* dan tujuan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti bahwa *action* tidak penting bagi keberlangsungan proses transformasi praktek. Tanpa partisipasi itu sendiri untuk membebaskan dirinya dari ketertekanan tersebut, akibat yang ingin dicapai dan diciptakan tidak akan membentuk tujuan yang diinginkan. Perbedaan yang tampak jelas adalah bahwa pemain-pemain peran baru akan memenuhi posisi-posisi institusi tersebut.

Dimensi Budaya dan Agama dalam Praktek Perubahan Sosial

Kita mengharapkan dapat membuat beragam metode transformasi yang sangat jelas sehingga dapat diterima untuk beragam etnik, ras, dan budaya masyarakat yang lebih luas. Metodologi yang terpenting adalah kesejajaran dan kesederajatan para paraktisi untuk menggunakan orientasi sekuler atau keagamaan di tingkat *grassroot* organisasi. Pada saat yang bersamaan, kita menekankan tentang makna penting pengenalan dimensi keagamaan dalam praktek perubahan sosial ke dalam populasi yang beragam ras dan etnik minoritas. Salah satu kenyataan yang tidak dapat dikesampingkan adalah adanya gereja yang menjadi institusi sentral bagi populasi Amerika-Afrika dan Latin Amerika. Gereja kulit hitam telah menjadi salah satu sumber utama

dan terpenting bagi kekuatan masyarakat kulit hitam dan masih terus berlanjut untuk menjadi tempat lahirnya pemimpin-pemimpin kulit hitam. Hingga kini, hal tersebut belum menunjukkan tanda-tanda signifikansi kemunduran (Washington dan Beasley, 1988).

Menurut Poole (1988), meskipun gereja-gereja orang berkulit hitam dihalang-halangi untuk berkembang karena dedikasinya yang terus-menerus untuk mencapai integrasi, akhirnya konsep gereja itu diadopsi oleh gereja orang-orang kulit putih. Dalam pandangan Poole, gereja-gereja orang kulit hitam – sekali lagi – masih sangat membutuhkan peranan sejarah mereka yang terkemuka dalam upaya meningkatkan pendidikan di antara orang-orang kulit hitam, sebagaimana upaya-upaya mereka dalam menyesuaikan diri dengan keadaan politik, ekonomi, dan kebebasan sosial. Upaya ini telah dilakukan oleh tokoh kulit hitam Amerika-Afrika, misalnya, Martin Luther King Jr, Malcolm X, Black Power, dan Black Theology. Lebih lanjut, hal tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam strategi sosial yang efektif (Poole, 1988).

Bagi orang Amerika-Meksiko, tepatnya pada saat melakukan proses penelitian demografi di Amerika Serikat, dikenal pentingnya nilai-nilai keagamaan dan institusi dibandingkan anggapan orang Amerika Afrika. Bagaimanapun, populasi Meksiko-Amerika sebagian besar adalah orang-orang yang memegang prinsip religius dan beragama Katolik adalah sesuatu yang mungkin. Barangkali para elite mengabaikan pertimbangan atas salah satu metode transformasi yang telah dikenal secara sukses dengan mengaitkan berbagai sektor kelompok orang-orang Latin dan Meksiko-Amerika melalui pendekatan dasar *ecclesial* (keagamaan masyarakat) atau *Basic Ecclesial Community* (BEC).

Sudah menjadi kajian dan wacana yang terus menyeruak bahwa warga sekolahan dan feminis mendukung kelompok-kelompok yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang afektif. Pendekatan BEC memberikan gambaran yang sama dalam memposisikan dirinya sebagai jembatan nilai keagamaan dan budaya tradisional bagi budaya sipil baru di Amerika Serikat. Dalam kenyataannya, pendekatan BEC memberikan kontribusi yang banyak dalam kehidupan masyarakat dengan orientasi ide-ide sekulernya sebagaimana yang dikatakan Friere dalam teologi liberal Amerika Latin. Perbedaannya, dalam praktek adakalanya diperlukan keterkaitan orang-orang tertentu untuk melancarkan perubahan sosial

sepanjang hal tersebut dipandang penting dalam kehidupan dan agama. Kendati demikian, politik adalah sesuatu yang penting bagi orang-orang Latin dan Meksiko-Amerika untuk masa depan Amerika Serikat (khususnya daerah bagian barat dan selatan) karena wilayah ini tidak dapat ditekan.a



9

URGENSI STRATEGI PEMBERDAYAAN DALAM KONTEKS KRISIS EKONOMI DI INDONESIA

Krisis Ekonomi: Penyebab dan Akibat

Sejak 1997-an akhir hingga kini, Indonesia telah mengalami berbagai tragedi yang memilukan hati dan menegangkan jiwa. Tragedi tersebut dipicu dan dipacu oleh krisis moneter (disparitas nilai tukar rupiah terhadap dolar) menjadi krisis ekonomi, dan berdampak luas pada semua bidang pembangunan menjadi krisis sosial, politik, dan budaya yang akhirnya pembangunan mengalami distorsi yang sangat parah.

Pendekatan sentralistis disemua bidang pembangunan sebelum terjadi krisis semakin memperparah keadaan. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan daya responsivitas dan kreativitasnya dalam membangun masa depan dirinya. Ini mengindikasikan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi ketidakberdayaan (*powerless*) untuk menghadapi perubahan dan permasalahan di satu pihak, dan semakin besarnya akumulasi frustrasi sosial dan kekecewaan berbagai unsur masyarakat di lain pihak. Akumulasi keresahan dan frustrasi sosial ini ditunjukkan oleh semakin luasnya keresahaan sosial (*social unrest*), kerusuhan dan amuk massa, kekerasan (*riot*) yang sangat anarkis-destruktif, konflik sosial dan gejala disintegrasi sosial di berbagai wilayah di Indonesia (Selo, 1998). Di sisi lain, taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin memburuk dari tahun-tahun

sebelumnya. Bahkan, terjadi peningkatan penduduk miskin dan permasalahan sosial lainnya.

Agaknya, adanya krisis ekonomi yang terus menggelembung hingga kini telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik. Salah satunya adalah munculnya gerakan-gerakan demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), desakan diberlakukannya otonomi daerah, desentralisasi dan berbagai gerakan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik, baik yang diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah melalui program-program penanggulangan dampak sosial dari krisis ekonomi. Dampak sosial yang terjadi secara kuantitas dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya – bahkan peningkatannya mencapai tiga kali lebih banyak – jumlah penduduk miskin berdasarkan data Biro Pusat Statistik (Agustus 1998). Angka kenaikan jumlah penduduk miskin kira-kira 39,1%, atau kira-kira menjadi 79,4 juta orang. Kondisi perekonomian secara makro mengalami penurunan sebesar minus 13,68%, dan inflasi sekitar 77,68%. Pada awal Repelita VI, jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 25,9 juta orang, menurun menjadi 22,6 juta orang atau 11,3% dari jumlah penduduk pada 1996.

Pada 1996, jumlah penduduk miskin di perkotaan kira-kira 7,2 juta orang (9,7%) yang kemudian meningkat menjadi 22,6 juta orang (28,8%) pada 1998. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan sekitar 15,3 juta orang atau 12,3% dan meningkat menjadi 56,8 juta orang (45,6%) pada 1998. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Mengingat sedemikian kompleks persoalan yang melilit masyarakat kelompok *grassroot* ini, penanganan penduduk miskin tersebut akan semakin sulit. Ini terjadi bukan hanya karena mereka yang paling miskin, terbelakang, terpinggirkan, dan sebagai penderita masalah sosial, melainkan juga karena kemunculan penduduk miskin baru yang semakin terpuruk, tidak berdaya atau tidak mampu, serta tidak memiliki ketahanan sosial dalam menghadapi dampak sosial krisis ekonomi. Berbagai kerusuhan sosial, penjarahan, tindak kejahatan (kriminalitas) atau perilaku menyimpang lainnya merupakan salah satu akibat negatif dari ketidakberdayaan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Keadaan mereka yang semakin sengsara, miskin, kelaparan, kekurangan gizi, dan berbagai kondisi yang membuat mereka kehilangan fungsi sosial di masyarakat itulah yang

menjadi pemicunya. Kondisi krisis ekonomi menjadi simultan dengan krisis sosial yang ditandai oleh munculnya konflik-konflik sosial berkepanjangan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti untuk kebutuhan makan (pangan), pakaian (sandang), pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kondisi ini yang mengakibatkan semakin meningkatnya permasalahan sosial lainnya karena kemiskinan yang bersumber dari ketidakberdayaan secara ekonomi akibat krisis masih merupakan penyebab utama munculnya permasalahan sosial lainnya, seperti anak-anak jalanan, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, dan permukiman kumuh atau tidak layak huni.

Dampak sosial dari krisis ekonomi juga menimbulkan meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan yang terpuruk dalam pengadaan faktor produksi. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja 1999, krisis di Indonesia telah mengakibatkan sebanyak 817 perusahaan melakukan PHK sebanyak 168.933 tenaga kerja, di antaranya terdapat 56,1% sudah di PHK, 7,9% masih dalam proses PHK, dan 36% terancam PHK.

Pengangguran ini dapat menimbulkan kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan dapat pula menyebabkan pengangguran. Orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan secara otomatis tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini ia berada dalam kondisi miskin. Keadaan yang berlarut-larut akibat kemiskinan dapat melahirkan pengangguran. Orang miskin yang dihimpit oleh berbagai persoalan, termasuk rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, keterampilan dan akses sumber pelayanan sosial, akan semakin sulit memperoleh pekerjaan yang layak sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Akibatnya, permasalahan sosial meningkat pesat seiring dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pengangguran dan kemiskinan pada akhirnya dapat menimbulkan disintegrasi sosial, seperti terjadinya kerusuhan sosial, konflik sosial, dan perilaku tindak kejahatan lainnya.

Kekurangmerataan penguasaan sumber-sumber ekonomi, politik, dan sosial, juga rendahnya penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan diskriminasi sosial yang semakin melebar dapat memim-

bulkan kecemburuan sosial yang akan mudah menyulut berbagai kerusuhan sosial.

Sebagai ilustrasi, setelah kerusuhan di Jakarta pada 1998 (yang dikenal sebagai Tragedi Mei), Komite Nasional Hak Asasi Manusia menerima laporan kerugian material yang mencolok, antara lain, pembakaran 40 pusat pertokoan, 2.479 ruko, 1.604 toko, 1.119 mobil, 1.026 rumah penduduk, 383 kantor, dan 1.188 orang meninggal, serta 101 orang luka-luka. Demikian pula kerusuhan yang terjadi antara Nopember-Desember 1998 di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakibatkan 310 orang meninggal dunia, 310 dalam keadaan menderita secara fisik dan mental, dan kerusakan rumah sebanyak 310 buah. Akibat kerusuhan yang terjadi di Maluku yang meletus pada 19 Januari-Mei 1999, jumlah pengungsi sebanyak 44.427 jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan rumah yang rusak sebanyak 2.340 buah. Kerusuhan lain juga terjadi di Aceh yang sampai Mei 1999 menunjukkan bahwa jumlah orang yang meninggal sebanyak 32 orang, dan luka parah 115 orang. Di Sambas, Kalimantan Barat, sampai Mei 1999 menunjukkan bahwa jumlah pengungsi sebanyak 15.295 jiwa. Di Timor-Timur karena kondisi politik yang tidak stabil mengakibatkan 6.146 jiwa atau 1.428 KK harus mengungsi.

Korban kerusuhan dan konflik sosial tersebut berada dalam situasi kehidupan yang memprihatinkan. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan layak, seperti kehilangan pekerjaan dan penghasilan, rawan pangan, putus sekolah bagi anak-anak, kondisi kesehatan yang semakin memburuk, terkena penyakit penular, kehilangan tempat tinggal, dan berada dalam kondisi psikologis yang memprihatinkan, seperti timbulnya masalah *post traumatic syndrome*, depresi, stres. Seluruh keadaan tersebut akhirnya semakin menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini menunjukkan masyarakat tidak hanya berada dalam krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial yang berkorelasi pada timbulnya masalah sosial yang terjadi ketika masyarakat melewati perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi atau *sudden economy change*.

Krisis ekonomi dapat berakibat semakin meningkatnya jumlah penduduk, dan ini semakin memperberat upaya penanganannya. Dengan asumsi bahwa peningkatan penduduk miskin proporsional dengan peningkatan kelompok rentan, jumlah anak terlantar (termasuk anak jalanan), lanjut usia terlantar, keluarga sangat miskin,

penyandang cacat terlantar dan tuna sosial juga semakin meningkat. Namun demikian, peningkatan populasi kelompok rentan tersebut belum dapat dilaporkan secara lengkap karena belum ada mekanisme pendataan yang sistematis mengenai dampak krisis, kecuali data populasi anak jalanan yang berasal dari dua belas kota besar. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan Pemetaan dan Survai Anak Jalanan 1999 yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial dan Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya Jakarta.

Gejala sosial anak jalanan (*street children*) merupakan akibat langsung dari krisis yang benar-benar terasa, terutama di kota-kota besar. Dari sekitar 40 ribu anak jalanan, 48% adalah anak-anak yang baru turun ke jalanan sejak 1998 atau setelah terjadi krisis. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa populasi anak jalanan sebelum krisis adalah sekitar 20 ribu anak. Berdasarkan survai terungkap bahwa alasan utama dari sebagian besar anak-anak bekerja di jalan setelah terjadinya krisis adalah karena membantu pekerjaan orang tua (35%) dan menambah biaya sekolah (27%). Ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama semakin banyaknya anak-anak bekerja di jalan setelah terjadi krisis.

Jumlah populasi anak jalanan dilaporkan sebanyak 39.861 anak, di antaranya sekitar 48% adalah anak-anak yang baru turun ke jalanan sejak 1998 atau pada masa krisis telah berlangsung. Dengan demikian, diperkirakan jumlah anak-anak jalanan sebelum krisis sebanyak 20.568 anak. Dilaporkan pula bahwa hampir separuh (44%) anak-anak jalanan masih sekolah, dan sebagian besar (83%) masih tinggal bersama orang tua mereka.

Dampak krisis telah mengakibatkan keluarga miskin semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan anak-anaknya. Akibat kondisi ini, setelah terjadi krisis 13% anak-anak jalanan mengalami putus sekolah. Fenomena sosial anak-anak jalanan yang meningkat setelah terjadinya krisis moneter dan ekonomi menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh krisis tersebut dirasakan berat oleh masyarakat, apalagi bagi kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pemenuhan kebutuhan makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kebutuhan sosial lainnya.

Berdasarkan laporan terakhir UNICEF dan UNDP pada Juli 1999, hampir 24% dari seluruh penduduk atau hampir 50% juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Separuh dari anak Indonesia kekurangan gizi dengan ratusan anak sudah meninggal karena kekurangan gizi

berat, atau yang disebut *marasmus kwashiokor*. Data tersebut juga menyebutkan bahwa 60% dari ibu hamil dan anak sekolah kekurangan zat besi atau penyakit anemia; 15% dari anak yang lahir memiliki berat badan yang sangat rendah. Juga disebutkan bahwa sampai 6.5 juta anak kemungkinan tidak masuk sekolah dan menjadi pekerja anak, anak jalanan (*street children*), atau terjerumus dalam dunia prostitusi atau pekerjaan lain. Di antara mereka yang sekolah pun hanya separuh dari mereka yang masuk kelas satu SD akan menyelesaikan sampai kelas enam, dan kurang dari 50% dari yang lulus akan meneruskan ke sekolah lanjutan pertama. Berdasarkan kenyataan ini, pada hakikatnya, Indonesia secara potensial berisiko dapat mengalami *the lost generation* (generasi yang hilang), bahkan sesuatu yang tidak dapat dihindari jika tidak ada langkah-langkah perbaikan. Lebih-lebih deraan kemiskinan yang tak kunjung usai, kurang gizi yang terus menyebar, kurang sehat, kurang pendidikan, serta kurang memperoleh perawatan dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan psiko-sosial, mental dan rohaninya. Dengan demikian, Indonesia suka tidak suka harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang membuka peluang terjadinya deprivasi kualitas sumber daya manusia. Ini semua membutuhkan penanganan yang serius dan dilakukan secara komprehensif.

Berkembangnya fenomena kemiskinan, keterlantaran, dan tuna sosial akibat krisis yang berkepanjangan membutuhkan intervensi pemerintah yang komprehensif. Hanya dengan cara ini dampak yang ditimbulkan bagi anggota keluarga, seperti anak-anak dan lanjut usia tidak menjadi terlantar atau berada di jalanan dapat ditekan. Selain itu, dimensi sosial, ekonomi, dan politik merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya krisis ekonomi yang menimbulkan beban sosial yang sangat berat bagi masyarakat dan pemerintah. Upaya penanganan masalah sosial yang meningkat setelah terjadi krisis tidak dapat lagi ditangani hanya dengan pendekatan kuratif dan residual. Penanganan secara holistik dan komprehensif dalam konteks pembangunan sosial diperlukan agar kontribusi terhadap penanggulangan dampak sosial dari krisis dapat semakin nyata.

Dampak sosial, psikologis, dan budaya dari krisis ekonomi dan politik secara kualitatif dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan nilai-nilai dari norma-norma dan moral masyarakat dalam menyikapi

situasi politik-ekonomi yang berkembang sedemikian cepat. Konflik-konflik sosial yang berbasiskan etnik, agama, dan kejahatan yang mengarah pada tindakan-tindakan anarki telah berkembang dan mengkhawatirkan semua pihak. Keadaan ini dapat berakibat pada konflik sosial yang semakin meluas, yaitu terjadinya disintegrasi bangsa dan semakin tidak dilindunginya hak-hak asasi manusia.

Rasionalisasi atas penyimpangan perilaku sosial masyarakat jika terus menerus terjadi akan menumbuhkan sikap dan perilaku anomie (tidak dapat membedakan benar dan salah, halal dan haram, boleh dan tidak boleh). Keadaan ini, pada akhirnya, menciptakan format masyarakat Indonesia yang kepribadiannya pecah, kehilangan identitas diri dan tidak mempunyai harga diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural upaya mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial semakin membutuhkan reformasi kebijakan pembangunan sosial yang komprehensif (*comprehensive reform*).

Ketidaktahanan, ketidakberdayaan (*powerless*), keterasingan (alienasi), keterpurukan, keterlantaran, dan kerawanan sosial lainnya semakin tampak jelas dalam situasi ketersediaan sumber daya dalam mengatasi permasalahan sosial yang terbatas. Kondisi krisis ini juga mempengaruhi kemampuan organisasi sosial (orsos) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk tetap menyelenggarakan pelayanan sosial (layanan publik) bagi kelompok rentan karena menurunnya donasi masyarakat.

Berdasarkan data Departemen Sosial 1999, dari 9.070 LSM/Orsos yang ada diperkirakan sebanyak 46% mengalami kesulitan pendanaan untuk dapat membiayai operasional pelayanan sosial. Selain itu, 3.996 orsos desa yang memberikan pelayanan sosial berbasiskan masyarakat diperkirakan juga mengalami kondisi yang sama. Atas dasar itu, pertanyaan mendasar yang kemudian mengemuka adalah apa yang dapat dijadikan modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan menata kembali Indonesia dari puing-puing keruntuhan yang diakibatkan krisis nasional yang melanda Indonesia? Apa saja masalah-masalah mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia pada tahun-tahun mendatang?

Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan masalah kemiskinan dalam situasi krisis secara nasional telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial

(JPS) atau *social safety net* (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau *Poverty Alleviation* (PA). Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak (Haryono, 1998; Justika, 1998). Sebagai inovasi sosial, JPS sudah mulai diterapkan pada awal 1880-an ketika pemerintah Otto von Bismark di Jerman dan David Loyd George di Inggris melembagakan sistem perlindungan dan jaminan sosial (*social security*). Untuk selanjutnya, program ini diikuti oleh Amerika Serikat yang mulai diluncurkan pada 1935, Eropa Timur yang diluncurkan pada 1980-an (Justika, 1998). Adapun JPS masuk ke Indonesia termasuk ke dalam paket program strategi penyesuaian struktural atau *Structure Adjustment Programme* (SAP) yang disodorkan oleh lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *the World Bank* berbarengan dengan pinjaman yang akan dikucurkan (Yulfita, 1998).

Sementara itu, Program Kompensasi (*Compensatory Programme*) bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk menolong penduduk yang secara langsung terkena dampak kebijakan penyesuaian struktural ekonomi (*economic structural adjustment*). Kebijakan yang berlangsung secara bersamaan ini juga menimbulkan eksekusi bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Haryono, 1998). Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan program intervensi pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih, silih asuh, dan silih asah*. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (*Gerdu Taskin*) yang dicanangkan pemerintah sejak 1998. *Gerdu Taskin* merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan organisasi masyarakat, masyarakat luas, serta keluarga miskin itu sendiri.

Program lain yang diwujudkan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan adalah proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K) pada bidang pertanian; inpres desa tertinggal (IDT); kelompok usaha bersama (KUBE); kelompok belajar usaha (KBU); usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), Takesra, dan Kukesra. Program di atas dilaksanakan atas inisiatif pemerintah melalui lembaga departemen atau nondepartemen. Sungguh pun telah dilakukan secara *massif* dan terpadu, ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tuntas. Juga, belum mampu menumbuhkembangkan ketahanan sosial masyarakat secara optimal dalam menghadapi krisis ekonomi. Kegagalan ini — jika dapat dikatakan demikian — disebabkan oleh program-program tersebut terlalu berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, bersifat sektoral, dan cakupan pelayanannya sangat terbatas, serta bukan bertumpu pada pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau pengembangan manusianya (*human development oriented*).

Program-program tersebut dikembangkan atas dasar perspektif bahwa ekonomilah — sebagai tujuan akhir — yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataan, perspektif ini tidak terwujud. Berdasarkan perspektif pembangunan sosial, sesungguhnya ekonomi harus ditempatkan sebagai cara (*means*) bukan sebagai tujuan akhir, sedangkan tujuan akhirnya (*ends*) adalah kualitas hidup manusia itu sendiri (Harry, 1999). Dengan demikian, setiap indikator keberhasilan harus dilihat manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hidup manusia dan kemaslahatannya (*well-being*).

Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan, partisipasi, dan kesetaraan gender merupakan elemen yang sangat esensial jika pembangunan ingin menjadi berkelanjutan dan berpusatkan pada rakyat (*people centered development*). Pengembangan kapasitas manusia didasarkan pada spektrum *helping people to help themselves*, pada kualitas individu, kelompok, penguatan organisasi *civil society* yang diikuti oleh sistem yang demokratis dan pemerintah yang profesional, efektif, dan *accountable* — akuntabilitasnya diakui (ESCAP, 1999).

Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan reformasi pembangunan sosial, seperti yang tercermin dalam program JPS. Program ini berupaya keras meningkatkan upaya penyelamatan (*rescue*), pemulihan (*recovery*), pemberdayaan diri (*empowering*), dan perlindungan (*protection*) masyarakat agar terhindar dari dampak sosial krisis ekonomi (Haryono, 1998; Gunawan, 1998; Justika, 1999).

Peran LSM dan Organisasi Sosial

Pelaksanaan program JPS dihadapkan pada kenyataan adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara pada satu sisi, dan besarnya permasalahan yang harus ditangani pada sisi lainnya. Dalam menghadapi kondisi demikian, strategi pelaksanaannya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk membangun dan memberdayakan dirinya atas dasar kekuatan (*power*) potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan peluang dan kondisi yang kondusif-stabil bagi tumbuhkembangnya peran aktif masyarakat. Ini tercermin dari berbagai upaya peningkatan kemitraan dengan infrastruktur sosial, seperti LSM, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan penanganan masalah kemiskinan dan penanggulangan dampak sosial krisis ekonomi.

Program pemulihan keberdayaan masyarakat (PKM) merupakan program yang dikelola oleh jaringan LSM atas dukungan teknis dan keuangan dari Bank Dunia, UNDP, CIDA, DFID, Unicef, ADB dan lembaga lainnya yang sama memiliki kepedulian. Jaringan ini merupakan mekanisme baru yang dirintis dan dipimpin oleh masyarakat madani (kadang disebut sebagai *civil society*) untuk membantu masyarakat yang paling parah terkena dampak krisis sosial-ekonomi. Cara yang kemudian ditempuh adalah menyalurkan berbagai sumber daya guna mendukung lembaga atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan proyek bantuan tersebut (Bambang, 1998). Program ini dikelola oleh 27 LSM dengan sasaran lokasi yang tersebar di seluruh 27 propinsi; sedangkan kegiatan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat miskin.

Ditinjau dari sisi pemerintah, penanganan masalah kemiskinan dan penanggulangan dampak sosial krisis ekonomi merupakan hasil dari perencanaan dari atas sehingga masyarakat akhirnya hanya sebagai pelaksana. Walaupun dalam perencanaan pembangunan dikatakan bahwa masyarakat bertindak sebagai subjek pembangunan, pada kenyataannya keterlibatan mereka secara langsung dalam proses perencanaan dari bawah sulit dilaksanakan. Keadaan ini berbeda dengan pembangunan masyarakat yang biasa dilakukan oleh LSM. Secara umum, ini terjadi karena LSM dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal (maksudnya wilayah administrasi) sehingga LSM dapat mengembangkan masyarakat yang mereka kelola secara

lebih leluasa dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan masyarakat yang melibatkan peran aktif antara pemerintah dan LSM, pada akhirnya, harus bersifat komplementer. Alasannya, bagaimanapun, pemerintah mengalami banyak keterbatasan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerja sama ini, LSM diharapkan lebih mampu untuk menggerakkan warga masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan bersama dalam satu kesatuan komunitas.

Sungguh demikian, tidak semua masalah dapat diatasi di tingkat lokal sehingga perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan masyarakat di tingkat yang lebih luas. Kecenderungan peran pemerintah yang terlalu dominan dalam perencanaan pembangunan masyarakat di semua tingkatan struktur organisasi masyarakat sampai tingkat lokal, pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif, yakni tidak adanya titik temu antara program-program pembangunan masyarakat dan kebutuhan aktual masyarakat itu sendiri. Secara umum, kondisi ini terjadi pada tahap awal program JPS digulirkan. Ketidaksiesuaian tersebut akhirnya menimbulkan reaksi dan protes keras dari kalangan LSM karena selain sifatnya yang masih *top-down*, juga munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan perkembangan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, campur tangan pemerintah pusat dan daerah diharapkan akan menjadi seminimal mungkin. Sebaliknya, otonomi daerah tersebut harus diupayakan dapat semakin menumbuhkan peran aktif masyarakat selalu mungkin. Masyarakat sebagai sumber sosial diharapkan semakin aktif dalam mengambil peran sebagai subjek pembangunan. Langkah-langkah tersebut pada hakikatnya harus dilandasi oleh pertimbangan dan pemikiran konseptual untuk lebih meningkatkan citra pembangunan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan cara demikian, permasalahan sosial yang dihadapi dapat diselesaikan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri.

Refleksi atas Situasi Krisis

Bangsa Indonesia akan memasuki babak baru yang berada pada awal milenium ketiga. Kondisi abad yang biasa disebut era globalisasi-

informasi ini cenderung ditandai oleh adanya berbagai perubahan yang sangat mendasar, terutama dalam keterkaitan antarbangsa yang penuh persaingan kompetitif dalam situasi global. Atas dasar itu, suatu bangsa suka tidak suka harus mempersiapkan diri untuk memiliki keunggulan bersaing (*competitive advantage*), bukan keunggulan berbanding (*comparative advantage*).

Menghadapi situasi-kondisi yang kecenderungannya akan menimbulkan banyak perubahan pada masa mendatang itu, terlepas dari sikap senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, tampaknya akan menimbulkan implikasi yang sangat luas terhadap kelanjutan pembangunan sosial di Indonesia. Karena itu, untuk mengantisipasi-nya perlu dilakukan analisis kebijakan yang lebih cermat dan mendalam terhadap berbagai kecenderungan perubahan tersebut. Hasil analisis tersebut diharapkan membantu dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam rangka membuat perumusan kebijakan pembangunan sosial yang lebih sesuai dan tepat dengan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Refleksi terhadap situasi-kondisi krisis yang terus berkembang harus menghindari dari kecenderungan untuk melihat sesuatu pada permukaannya saja, tanpa berusaha mendalami apa yang sesungguhnya terjadi di bawah permukaan itu. Maksudnya, refleksi harus dilakukan berdasarkan data-data riset dan analisis yang keakuratan dan validitasnya sangat meyakinkan. Bagaimanapun, bisa saja terjadi bahwa hasil pengamatan yang sepintas lalu seolah-olah menunjukkan bahwa pembangunan ini telah berjalan secara normal kembali. Padahal, bila diselami secara lebih mendalam tampak jelas adanya arus keras yang dapat berakibat timbulnya gelombang yang tidak terduga sebelumnya. Adalah fakta yang sangat mengejutkan semua pihak dan tidak dapat dihindari yang terjadi sepanjang 1998-1999, yaitu meletusnya konflik sosial antargolongan, etnis, agama. Konflik sosial ini diikuti oleh tindak agresivitas masyarakat dan penjarahan yang disertai oleh korban jiwa dan harta yang meniyat hati manusia normal.

Perumpamaan yang dapat digunakan dalam keadaan krisis seperti ini adalah seperti tindakan burung kasuari yang menanam kepalanya di pasir. Setelah melakukan tindakan tersebut, burung kasuari berargumentasi bahwa ia tidak melihat sesuatu masalah yang terjadi. Maka, ia beranggapan bahwa tidak ada permasalahan yang membayakn. Dengan perkataan lain, abu tidak dapat dihilangkan hanya dengan menyapunya ke bawah permadani yang mahal.

Sesungguhnya, dampak sosial yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan ini adalah permasalahan yang sangat besar. Besarnya persoalan yang dihadapi seharusnya semakin besar pula perhatian yang harus diberikan kepadanya sehingga pemecahannya pun menjadi lebih matang secara konseptual. Memberikan perhatian hanya kepada permasalahan yang mudah untuk dipecahkan mungkin saja memberikan rasa kepuasan. Akan tetapi, kepuasan yang demikian hanya bersifat semu dan sementara, padahal kepuasan sejati hanya diperoleh apabila masalah-masalah yang dampak sosialnya sangat strategis seharusnya memperoleh pemecahan yang sesungguhnya.

Upaya-upaya yang bersifat strategis pun harus dirumuskan. Perumusan ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan masyarakat secara aktif merupakan salah satu wujud nyata program penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*). Juga, pembangunan menjadi landasan bagi pencapaian kembali taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang pernah dialami sebelum masa krisis.

Semantic Confusion tentang Pemberdayaan

Kini, istilah pemberdayaan masyarakat digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti oleh pembuat kebijakan, kalangan praktisi pelaksana program atau proyek, petugas sosial, dan kelompok profesional. Berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, program, proyek, dan kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan, antara lain, Program IDT, Program Takesra/Kukesra, program Kelompok Usaha Bersama, dan program Kredit Lunak. Di daerah-daerah, gerakan pemberdayaan juga dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat seperti *Gerakan Rereongan Sarupi* di Jawa Barat, sedangkan gerakan pemberdayaan dilaksanakan oleh LSM dalam menangani masalah kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Demikian juga lembaga donor, seperti UNICEF dan UNDP, sangat mendukung program-program *participatory community empowerment* melalui LSM. Program-program di atas ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan (*vulnerable group*).

Di tengah-tengah semakin gencarnya upaya-upaya penanggulangan dampak krisis di berbagai sektor pembangunan acapkali terungkap kata-kata dan istilah-istilah yang arti hakikinya agak berbeda dari

apa yang dimaksud oleh para ahli atau ilmuwan. Kadang-kadang, terselip distorsi atau penyelewengan terhadap arti sebenarnya. Ini sering terjadi apabila kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang diserap dari bahasa asing (baca: Inggris). Salah satu contoh yang sangat menarik adalah penggunaan istilah *empowerment* atau diterjemahkan secara bebas menjadi "pemberdayaan".

Oleh kalangan birokrat yang ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat penguasa untuk mengatasi masalah sosial sebagai dampak krisis, istilah pemberdayaan didistorsikan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks usaha ekonomi. Juga, timbul kecenderungan sebagai usaha untuk menarik simpati masyarakat bagi kepentingan politik atau elite politik tertentu. Pemberdayaan lebih diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan eksternal golongan atau kelompok penguasa, bukan sebagai tujuan internal dalam mencapai ketahanan sosial, partisipasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi krisis. Selain itu, orientasi pada pencapaian target kuantitatif dari proyek yang digarap lebih dominan daripada orientasi pada pencapaian target fungsional melalui proses pemberdayaan yang sebenarnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ini merupakan contoh kekacauan dan penyimpangan peristilahan (*semantic confusion*). Secara ilmiah objektif, dan bersandarkan pada sumber referensi ilmiah, pemberdayaan sesungguhnya adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Secara paradoks, makna *empowerment* adalah memberdayakan sistem lain; atau secara paternalistik, *empowerment* merupakan proses pelimpahan kekuatan (*power*) kepada orang lain yang berarti juga memberdayakan kehidupan mereka.

Memberikan kekuatan (*power*) akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (*powerless*) seperti yang dikemukakan oleh Simon (1990). Jelasnya, Simon menyatakan bahwa pemberdayaan adalah aktivitas refleksif, atau proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek tertentu yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*). Sementara itu, proses lainnya hanya memberikan iklim, menciptakan hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang dengan perantaranya masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dan berkolaborasi dengan lingkungan sosial dan fisik. Dengan perkataan lain, pemberda-

yaan bukanlah merupakan upaya pemaksaan kehendak, atau proses yang dipaksakan, atau kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, atau keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dominasi Pemberdayaan Ekonomi

Permasalahan lain pada era reformasi dan situasi krisis ekonomi yang saat ini sedang mendera Indonesia yang entah kapan akan berakhir, pemberdayaan yang digulirkan lebih kuat diwarnai oleh perspektif politik-ekonomi daripada perspektif sosial-budaya. Ini terlihat jelas dengan adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan sumber yang datang dari atas untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan kurang memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan inisiatif masyarakat. Penuh-kembangan perilaku masyarakat yang telah berdaya guna itu harus didukung oleh program-program pengayaan orientasi, motivasi, dan perluasan mantra pengambilan keputusan oleh masyarakat itu sendiri. Juga, yang tak kalah penting adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Sebagai konsep sosial-budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, pemberdayaan tidak hanya bertujuan menumbuh-kembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial-budaya. Karena itu, kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya maupun politik, menjadi sangat penting sebagai masukan untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Melalui program pemberdayaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun diri secara partisipatif.

Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan terlebih dahulu sedemikian rupa agar esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Mengenai pemecahan masalah pembangunan melalui pemberdayaan, Friedman (1992) menyatakan bahwa

"...involves a process of social and political empowerment whose long-term objective is to rebalance the structure of power in society by making state action more accountable, strengthening the powers of civil society in the management of its own affairs, and making corporate business more socially responsible".

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku (subjek) utama dalam pembangunan (ESCAP, 1999). Masalah ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial di tingkat mikro, mezzo dan makro. Dengan cara demikian, masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi diri tanpa adanya hambatan eksternal yang berarti pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten kota dan propinsi, sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah (*top-down*) daripada dari bawah ke atas (*bottom-up*). Kebijakan ini mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah; dalam bahasa lain, perlu desentralisasi peranan pemerintah.

Adanya kebijakan otonomi daerah dapat merupakan tantangan sekaligus peluang untuk menata kembali mekanisme perencanaan program atau proyek-proyek pembangunan sosial. Kebijakan ini selain sebagai respons terhadap aspirasi yang berkembang, juga sesuai dengan kecenderungan pembangunan yang lebih bernuansa pemberdayaan regional atau lokal. Implikasinya, kebijakan-kebijakan cetak-biru (*blueprint policies*) yang lebih bersifat *top-down* akan berkurang, sedangkan partisipasi lokal menjadi *mainstream* pembangunan. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan yang memandang inisiatif-kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan paling utama. Juga, memandang bahwa kesejahteraan material dan spiritual mereka merupakan tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. a

10

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASISKAN SISTEM SOSIAL BUDAYA LOKAL

Kendatipun keanekaragaman sistem sosial budaya di Indonesia telah dikenal lama, namun cenderung diabaikan dan bahkan mulai dilupakan oleh sebagian masyarakat, termasuk kalangan pemerintah. Salah satu bukti bahwa pemerintah telah melakukan distorsi terhadap keanekaragaman sistem sosial-budaya adalah perencanaan program pembangunan dari atas (*top down planning*) dan penggunaan pola penyeragaman strategi dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. Memang, pemerintah memiliki kepedulian untuk berupaya mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya, tetapi kebijakan yang dibuat cenderung didesain oleh pemerintah dengan pola seragam dan bersifat instruksi dari atas. Instruksi inilah yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*). Dalam hal ini, masyarakat lebih berperan sebagai objek pembangunan dan pelaksana program yang telah dirancang sebelumnya oleh pemerintah, bukan sebagai subjek pembangunan yang aktualisasi dirinya diakui. Pola kebijakan semacam Inpres Desa Terpadu, Takesra/Kukesra, Kelompok Usaha Bersama, UP2K, JPS, dll. merupakan contoh nyata dari strategi pembangunan yang diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Berbagai laporan evaluasi dari program pembangunan tersebut hasilnya semu dan kurang menunjukkan kondisi nyata yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Akhirnya, keberhasilan pema-

ngunan pun penuh dengan data-data yang manipulatif dan bertujuan hanya untuk menyenangkan pihak pemrakarsa program dari pemerintah.

Kondisi krisis ekonomi yang memiliki dampak sosial secara signifikan terhadap kerentanan masyarakat membuktikan bahwa strategi pembangunan masyarakat yang selama ini dilaksanakan, terutama masa Orde Baru, tidaklah tepat. Kita baru menyadari bahwa selama ini, banyak potensi lokal yang sudah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun kurang dimanfaatkan sebagai bagian sumber daya dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, upaya untuk menggali, membangkitkan, dan mengaktualisasikan potensi lokal yang ada di masyarakat yang kemudian diubah menjadi gagasan-gagasan strategis sebagai bagian yang penting – bahkan, terpenting dalam pembangunan masyarakat pada masa yang akan datang – adalah keniscayaan yang sulit dihindari.

Sistem sosial budaya yang beranekaragam harus dipahami dan disadari sebagai sumber daya atau modal sosial (*social capital*) yang telah tersedia di masyarakat, walaupun di beberapa daerah, sistem sosial budaya tersebut telah mengalami pergeseran dan mulai memudar. Namun, jika hal ini dimobilisasi kembali dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya setempat, secara bertahap akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional.

Kajian tentang keanekaragaman sistem sosial-budaya di Indonesia – dapat dipastikan – akan membuka wacana baru untuk didiskusikan secara lebih serius. Media ini juga sekaligus menjadi upaya untuk menyadarkan kembali bahwa Indonesia bukanlah negara kecil yang seragam, tetapi negara yang terdiri dari beraneka warna budaya yang tidak dapat diseragamkan dalam gerak pembangunan pada masa yang akan datang. Tiga daerah, yaitu Propinsi Jawa Barat, Sumatera Barat (khususnya Kabupaten Tanah Datar), dan Bali sistem sosial budayanya yang potensial semestinya dikaji dan diaktualisasikan dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rereongan Sarupi di Propinsi Jawa Barat

Di Propinsi Jawa Barat, sudah sejak lama dikenal nilai-nilai budaya (khususnya Sunda) yang berlaku dalam tata kehidupan berma-

syarakat. Nilai-nilai itu dapat difungsikan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Perilaku prososial yang telah lama dikenal diwujudkan dalam falsafah *silih asih*, *silih asuh*, dan, *silih asah*. Secara harfiah, arti falsafah hidup yang sangat tinggi adalah saling mengasihi, saling mengasuh, dan saling memberikan pengetahuan di antara warga masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga, tetangga, kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kendatipun situasi kemiskinan menimpa sebagian penduduk pedesaan yang pekerjaan utamanya ada di sektor pertanian, namun mereka masih tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun dalam kondisi yang kurang memadai.

Nilai-nilai budaya tersebut tercermin jelas dalam berbagai adat atau kebiasaan masyarakat, pergaulan sehari-hari, dan berbentuk peribahasa atau *babasan*, seperti

- a) *sabilulungan dasar gotong royong*,
- b) *sareundeuk saigel sabobot sapihanean*,
- c) *nulung kanu butuh, nalang kanu susah*,
- d) *silih asih, silih asuh, silih asah*, dan
- e) *gemah ripah repeh rapih*.

Berdasarkan *babasan* tersebut, beberapa perilaku sosial yang khas berlaku di masyarakat Jawa Barat, antara lain, sebagai berikut.

1. Kerja sama yang harmonis dalam mengerjakan kegiatan pembangunan sosial dan gotong-royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal dengan prinsip *sabilulungan dasar gotong royong*. Prinsip ini terlihat jelas dalam kegiatan kerja bakti untuk membangun sarana prasarana sosial (misalnya pembangunan mesjid, jembatan, MCK, dan perbaikan saluran air) yang dibutuhkan masyarakat. Juga, berbagai kegiatan bersama lainnya seperti dalam menghadapi perayaan hari kemerdekaan atau hari-hari besar lainnya.
2. Musyawarah dalam memecahkan masalah kemasyarakatan semisal rapat-rapat atau pengajian (sering disebut *minggonan*) antarwarga, antartokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat

- desa atau kelurahan. Media rapat difungsikan untuk mendiskusikan kegiatan keagamaan dan menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan dengan prinsip *silih asih*, *silih asuh*, dan *silih asah*. Biasanya, pada akhir pertemuan selalu dirumuskan hasil musyawarah atas dasar sumbangan pemikiran dari warga masyarakat yang hadir.
3. Saling menolong antartetangga (kesetiakawanan sosial) yang terlihat jelas dari spontanitas masyarakat dalam menolong anggota masyarakat lainnya yang terkena musibah (misalnya: sakit, meninggal, kecelakaan, kendaraan mogok) atau dalam membantu perayaan khitanan, perkawinan, membangun rumah. Adanya lumbung desa, arisan keluarga, jimpitan, dana kematian/ kesehatan, dana modal bergulir, dan kegiatan sosial lainnya merupakan perwujudan bersama dalam *nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah*.
 4. Saling mengingatkan jika tetangga melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat dan adanya kerukunan antartetangga (*sareundeuk saigel sabobot sapihanean*).

Perilaku-perilaku sosial tersebut merupakan ciri khas masyarakat Jawa Barat yakni untuk mewujudkan masyarakat yang *gemah ripah repeh rapih*. Kendatipun demikian, falsafah nilai budaya pada hakikatnya berlaku universal bagi masyarakat di propinsi lain di Indonesia.

Berdasarkan adat-istiadat yang ada di masyarakat, ada satu kegiatan masyarakat yang dikenal sejak 1940-an yang merupakan wujud nyata dari kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan masyarakat tersebut dikenal dengan istilah *beas perelek* (mengumpulkan beras sekitar satu sendok atau *canting*) setiap bulan yang dikumpulkan di lumbung desa. Hasil pengumpulan beras tersebut digunakan untuk menghadapi musim *paceklik*, menolong anggota masyarakat yang termasuk fakir miskin, mengatasi kelaparan dan permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan dana dan sarana yang siap pakai.

Pemerintah Propinsi Jawa Barat sangat menyadari bahwa di Jawa Barat masih cukup banyak masalah pembangunan kesejahteraan sosial berikut segala implikasinya. Atas dasar itu, lahirilah Instruksi

Gubernur Jawa Barat No. 2/1995 tentang Peningkatan Kepedulian dan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Instruksi gubernur ini dimaksudkan untuk mengambil langkah-langkah konkret ke arah pelestarian sikap hidup yang berazaskan kebersamaan dan gotong-royong, sekaligus meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Perwujudan sikap hidup masyarakat tersebut dimanifestasikan melalui gerakan yang disebut *Gerakan Rereongan Sarupi* (seratus rupiah untuk setiap kepala keluarga atau *umpi*). Dana yang diperoleh dialokasikan untuk bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan.

Gerakan Rereongan Sarupi bertujuan memupuk dan melestarikan sikap hidup masyarakat Jawa Barat yang berazaskan kebersamaan, solidaritas, dan gotong-royong. Juga, dalam rangka menggerakkan potensi dominan tersebut dalam bentuk nyata, yaitu membantu pemerintah di bidang pembangunan, khususnya dalam usaha-usaha menciptakan kesejahteraan sosial yang prioritasnya ditentukan oleh Bupati/Walikota atas usul masyarakat yang dikoordinasikan oleh LKMD (sekarang BPD) dan Camat di wilayahnya masing-masing.

Pengelolaan dana dari masyarakat tersebut dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk yayasan sesuai dengan Pasal 9 UU No. 6/1974 dan Pasal 13 Kepmensos No. 40/Huk/Kep/X/1980 yang pembentukannya dilakukan oleh Pemerintah. Sebutan yayasan adalah untuk Yayasan Rereongan yang dapat dirangkaikan dengan motto juang masing-masing daerah. Yayasan Rereongan bergerak dalam usaha-usaha menciptakan kesejahteraan sosial yang meliputi pembangunan fisik di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam program Rereongan Sarupi merupakan potensi nyata yang sangat mendukung upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah kemiskinan, masalah sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui yayasan ini, pemerintah terbantu dan memiliki mitra kerja yang secara efektif dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam investasi pembangunan sosial pada masa yang akan datang. Gerakan Rereongan Sarupi secara efektif

telah dilaksanakan sejak Januari 1995. Hingga Agustus 1997, terkumpul sebanyak 16 milyar rupiah yang berasal dari 24 kabupaten/kota, atau sekitar 9% dari dana APBD untuk sektor sosial budaya. Dana tersebut dikelola oleh yayasan yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Untuk mengetahui perkembangan hasil Gerakan Rereongan Sarupi telah dilaksanakan kegiatan penelitian evaluasi yang dilaksanakan oleh penulis dan Yusman Iskandar bersama-sama tim evaluasi Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat efektivitas Gerakan Rereongan Sarupi dalam meningkatkan kepedulian sosial berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial dan melestarikan sikap hidup masyarakat. Gerakan ini berazaskan pada sikap kebersamaan, solidaritas, dan gotong-royong. Populasi sasaran penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Untuk kepentingan evaluasi Gerakan Rereongan Sarupi, mengingat adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data secara survai. Secara keseluruhan unit analisis penelitian adalah organisasi Yayasan Rereongan Sarupi di setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota diwakili oleh dua kecamatan yang termasuk pada kategori pelaksanaan Gerakan Rereongan Sarupi berkembang dan maju.

Sasaran penelitian setiap kecamatan adalah (1) pemerintah wilayah kecamatan, instansi terkait dan kepala desa/kelurahan, dengan jumlah responden sebanyak dua puluh lima orang; (2) petugas pengumpul dana yang terdiri atas ketua RT, dasawisma, karang taruna dan unsur lainnya, dengan jumlah total responden sebanyak dua puluh lima orang; dan (3) warga masyarakat yang dijadikan tokoh dan bisa baca-tulis dengan jumlah total responden sebanyak lima puluh orang. Secara keseluruhan, jumlah responden yang memberikan informasi sebanyak 3.648 orang. Beberapa informasi dari hasil penelitian tersebut menarik sekali untuk ditelaah. Hasil telaah ini dapat menjelaskan potensi sosial-budaya masyarakat Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun hasil penelitian tentang penerapan nilai-nilai budaya Sunda dalam kehidupan bermasyarakat (budaya *rereongan*) dapat terlihat dalam bentuk

- a) kerja sama,
- b) musyawarah,
- c) kerukunan,
- d) gotong royong, dan
- e) kesetiakawanan sosial atau tolong-menolong antaranggota masyarakat.

Adanya perubahan sosial yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini mengakibatkan adanya pergeseran nilai budaya masyarakat. Perubahan ini merupakan dampak dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi. Pertumbuhan ekonomi nasional yang begitu tinggi dengan pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial-budaya masyarakat. Kemunculan format masyarakat yang heterogen akibat dari mobilitas penduduk yang tinggi dari propinsi lain dan imbasan penduduk dari ibukota DKI Jakarta adalah keadaan yang tidak dapat dipungkiri. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di daerah-daerah yang pesat pertumbuhan ekonominya (khususnya wilayah Botabek, Priangan, dan Cirebon) mengalami penurunan dan kurang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

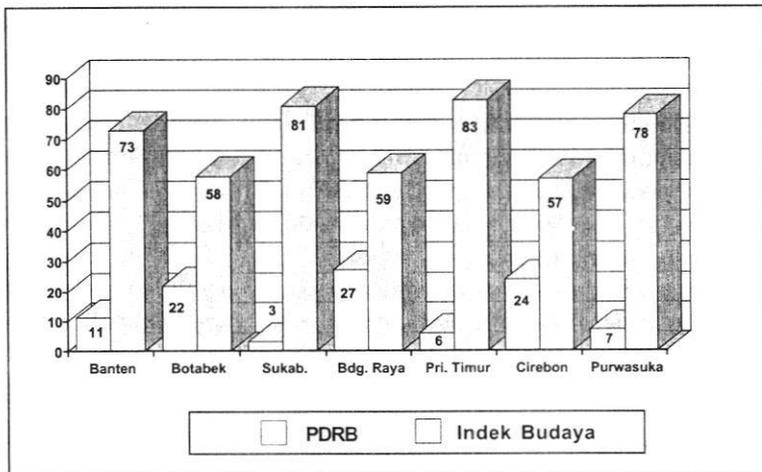
Di wilayah Botabek, Priangan, dan Cirebon, keadaan tersebut sudah kurang dirasakan lagi oleh masyarakat (berdasarkan ukuran indeks budaya = 0,58 atau 58%). Kondisi ini berbeda dengan wilayah Jawa Barat bagian selatan. Masyarakat wilayah menilai budaya *rereongan* masih kuat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (indeks budaya = 0,79 atau 79%). Indeks budaya tersebut dihitung dalam skala 0 s.d. 1 (*ranting scale*) dengan ketentuan semakin mendekati 1 berarti semakin kuat penerapan nilai-nilai budaya Sunda dalam kehidupan bermasyarakat yang ditanyakan kepada responden. Sebaliknya, semakin mendekati 0 berarti semakin berkurang penerapan nilai-nilai budaya Sunda dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang aktivitas dan pertumbuhan ekonominya tinggi menjadikan budaya *rereongan* semakin rendah. Adanya disparitas ekonomi regional di wilayah Jawa Barat cenderung mempengaruhi terjadinya inkonsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan penerapan nilai budaya *rereongan* dalam pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini. Gambaran adanya

hubungan negatif antara tingkat aktivitas ekonomi yang didasarkan atas indikator distribusi *produk domestik regional bruto* (PDRB) dan indeks budaya dapat dilihat pada diagram berikut.

Hasil pengujian koefisien korelasi Spearman (r_s) diperoleh informasi bahwa ada hubungan negatif yang nyata antara persentase distribusi PDRB dan Indeks Budaya masyarakat di Jawa Barat ($r_s = -0,67$; $p = 0,0003$). Informasi ini penting untuk menganalisis lebih lanjut jika ada kabupaten/kota yang kurang berhasil dalam mencanangkan Gerakan Rereongan Sarupi. Ciri masyarakat yang aktivitas perekonomiannya sangat maju, terutama di perkotaan, adalah cenderung memiliki ciri solidaritas sosial yang mekanistik karena masyarakat semakin heterogen. Ikatan profesi cenderung lebih kuat daripada ikatan komunal di masyarakat. Karena itu, beberapa kabupaten/kota, khususnya di wilayah Botabek, ada yang menggunakan strategi pemberdayaan antarprofesi pekerjaan dalam menyukseskan Gerakan Rereongan Sarupi.

Diagram 10.1 Distribusi PDRB (%) dan Indeks Budaya (%) di Propinsi Jawa Barat



Sumber: PDRB: Susenas 1994; Indeks Budaya: Hasil Penelitian (N) = 3.648 orang)

Dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan mempercepat kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama di masyarakat telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan berbagai jenis dana masyarakat setiap bulan di tingkat RT dan RW.

Kegiatan pengumpulan dana tersebut, antara lain, dilakukan melalui dana kebersihan sampah, dana keamanan, dana kematian, dana pendukung kegiatan PKK, dan dana lainnya yang dikumpulkan secara insidental (misalnya: sumbangan HUT RI atau perayaan hari besar lainnya). Kegiatan pengumpulan dana tersebut merupakan tradisi masyarakat dan merupakan upaya menggali potensi masyarakat yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dalam lingkup terbatas (tingkat RT atau RW).

Gerakan Rereongan Sarupi ini diarahkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya menyelesaikan pembangunan kesejahteraan sosial dengan ruang lingkup dan peran masyarakat yang lebih luas. Dalam penelitian di atas diungkapkan pula keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan. Melalui penelitian ini dapat diketahui persentase besarnya dana yang dikeluarkan atau disumbangkan masyarakat untuk mendukung Gerakan Rereongan Sarupi dibandingkan dengan besarnya dana yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya semisal dana kebersihan, keamanan, kegiatan PKK, karang taruna, dan dana kematian.

Rata-rata persentase dana yang dikeluarkan untuk Rereongan Sarupi sebanyak 32% dari keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat, dengan interval antara 10%-65%. Nilai rupiah sumbangan masyarakat untuk *rereongan* setiap bulannya berkisar antara Rp100,00-Rp10.000,00 (tidak termasuk sumbangan spontan para pengusaha seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor). Ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan masyarakat tidak terbatas sebesar Rp100,00, meskipun ada juga yang lebih dari Rp100,00. Sebanyak 48% responden termasuk anggota masyarakat yang menyumbangkan setiap bulannya lebih dari Rp100,00.

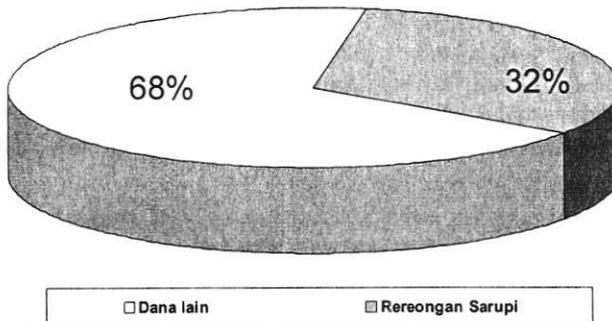
Secara keseluruhan ada kecenderungan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, semakin besar nilai sumbangannya, baik untuk *rereongan sarupi* maupun untuk dana kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hasil pengujian koefisien korelasi Spearman (r_s) diperoleh informasi bahwa ada hubungan positif yang

nyata antara status sosial ekonomi dan besarnya nilai sumbangan ($r_s = -0,58$; $p = 0,001$). Sungguhpun demikian, belum semua lapisan masyarakat dapat terjangkau Gerakan Rereongan Sarupi. Munculnya permukiman-permukiman baru di kota-kota besar dan wilayah industri di Jawa Barat – yang umumnya adalah masyarakat pendatang (urbanisasi) – sangat mempengaruhi target pencapaian pengumpulan dana di setiap kabupaten/kota. Petugas pengumpul dana mengalami kesulitan untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat yang termasuk kelas menengah ke atas.

Dari penelitian yang dilakukan dengan mengambil responden dari aparat kabupaten/kota ($N = 25$ orang) diperoleh informasi bahwa pengumpulan dana belum mencapai target. Kendala ini merupakan unsur dominan dalam proses pengumpulan dana yang menyebabkan Gerakan Rereongan Sarupi dianggap kurang berhasil di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat (40%). Pada umumnya (80%), berpendapat bahwa kelompok warga masyarakat menengah ke atas (terutama para pengusaha) masih belum optimal terjangkau oleh Gerakan Rereongan Sarupi. Karena itu, diperlukan strategi yang lebih tepat dan intervensi khusus untuk menjangkau lapisan masyarakat tersebut.

Menurut informasi dari pengurus Yayasan Rereongan masih terdapat banyak kendala dalam pengumpulan dana, antara lain, kurang serasinya antarpengumpulan dana masyarakat di tingkat rukun tetangga.

Diagram 10.2 Persentase besarnya dana Rereongan Sarupi dibandingkan dana masyarakat lainnya (Jumlah: 3648 responden)



Ini dibuktikan lebih lanjut oleh hasil survai yang menunjukkan bahwa sebagian besar (52%) kegiatan pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh petugas yang tidak sama, masing-masing jenis pengumpulan dana waktunya berbeda-beda, ada bulan-bulan tertentu dana yang dikeluarkan lebih besar daripada bulan-bulan lainnya (misalnya menjelang HUT RI), dan tidak semua penggunaan dana diketahui oleh masyarakat (kurang transparan dan tidak ada mekanisme pelaporan alokasi penggunaan dana). Kondisi tersebut cenderung mempengaruhi naik-turunnya perkembangan hasil pengumpulan dana Rereongan Sarupi di setiap wilayah.

Dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa responden menyatakan sangat setuju (indeks > 4.0) tentang Gerakan Rereongan Sarupi, khususnya tentang tujuan, pengelolaan oleh yayasan, dan besarnya uang pungutan Rp100,00 per bulan. Sementara itu, hal-hal yang tidak disetujui oleh responden adalah tentang kemungkinan uang yang dikumpulkan lebih dari Rp100,00 dan pengumpulannya per triwulan.

Secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat (77%) menyatakan setuju tentang mekanisme pengumpulan dana yang diberlakukan sekarang. Walaupun ada perubahan, mereka menginginkan perubahan itu lebih diarahkan pada upaya-upaya untuk menginternalisasikan nilai budaya *rereongan* di setiap unsur terkait dalam mekanisme pengumpulan dana yang sekarang berjalan.

Salah satu upaya terorganisir adalah apa yang dilakukan oleh bupati dan aparat kecamatan di Kabupaten Bogor. Peran bupati dan aparat kecamatan—selain peran para pengurus yayasan—yang memiliki idealisme tinggi patut dipertimbangkan dan dijadikan contoh. Bupati dan aparat kecamatan merancang sebuah strategi pengumpulan dana yang tepat sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat menengah ke atas, khususnya para pengusaha. Para pengusaha dilibatkan sedemikian rupa dalam acara pengguliran dana Rereongan Sarupi, sekaligus diminta partisipasinya secara langsung. Pada hakikatnya, upaya tersebut didasarkan pada keinginan untuk dapat meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Gerakan Rereongan Sarupi di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui cara ini, upaya-upaya untuk melestarikan budaya khas masyarakat Jawa Barat dapat diwujudkan secara nyata.

Hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkapkan dari hasil penelitian adalah bahwa bidang pembangunan kesejahteraan sosial seluruhnya dibiayai oleh dana Rereongan Sarupi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk program-program kependidikan yang bersifat nonfisik memperoleh pembiayaan dari Yayasan Rereongan sebanyak 60%, seperti bantuan beasiswa anak sekolah dan honorarium guru honorer. Adapun untuk pembangunan dan perbaikan sarana fisik pendidikan, seperti rehabilitasi bangunan dialokasikan dana sebanyak 40%. Dana untuk program kesehatan sebagai besar (60%) diberikan kepada pembangunan dan perbaikan sanitasi lingkungan, seperti pembangunan MCK dan plesterisasi beberapa ruas jalan kecil. Sisanya (40%) diberikan kepada bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat yang tidak atau kurang mampu.

Selanjutnya, untuk program kesejahteraan sosial sebagian besar diberikan kepada rehabilitasi rumah jompo dan keluarga miskin (60%), serta sisanya diberikan kepada program anak asuh (20%) dan program-program kepemudaan (20%).

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa sistem perencanaan untuk pengguliran dana Rereongan Sarupi belum didasarkan atas model perencanaan sosial (*social planning*) yang memperhitungkan secara optimal indikator-indikator sosial. Padahal, indikator sosial tersebut turut menentukan skala prioritas secara makro dari pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, hubungan antara skala prioritas dan peruntukan dana tidak berarti menghilangkan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mengajukan usulan proyek pembangunan kesejahteraan sosial. Sebelum proyek-proyek yang dibiayai oleh dana Rereongan Sarupi tersebut digulirkan, pengurus yayasan, aparat kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya berkewajiban untuk selalu mendiskusikan target kemajuan sosial yang akan dicapai, baik dalam bentuk perencanaan jangka pendek (*short-term planning*) maupun jangka panjang (*long-term planning*). Bagaimanapun, masalah ini berkaitan erat dengan keharusan adanya model perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat. Model inilah menjadi acuan untuk penentuan prioritas yang dibantu dari dana Rereongan Sarupi.

Berdasarkan acuan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan bahwa masyarakat tertarik terhadap Gerakan Rereongan Sarupi karena dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional oleh pemerintah bersama-sama Yayasan Rereongan Sarupi dan pihak-pihak lain yang terkait. Juga, adanya kejelasan manfaat dan kegunaan langsung dari pengumpulan dana masyarakat yang dikumpulkan secara sukarela tersebut. Sementara itu, hal-hal yang cenderung dipersepsi secara negatif oleh masyarakat adalah berkaitan dengan belum lancarnya pengumpulan dana berikut peruntukannya kembali ke masyarakat. Juga, nilai nominal peruntukan dana yang kembali ke masyarakat dianggap kurang mencukupi biaya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan yang diusulkan. Selain itu, masyarakat melakukan penilaian yang sangat kritis bahwa pelaksanaan Gerakan Rereongan Sarupi masih kurang tertib, kurang jelas mekanisme pengguliran dana, diragukan kejujuran pengelola, diragukan kemampuan mengelola dana, kurang terbuka dalam penggunaan dana, dan dilaksanakan dengan kondisi antara instruksi dan sukarela.

Pada hakikatnya, Gerakan Rereongan Sarupi merupakan wujud keikhlasan masyarakat dalam upaya berperan serta menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial. Bahkan, sebagian besar masyarakat berpinsip bahwa apa yang dilakukannya adalah terkandung makna ibadah atau *shadaqah jariah*. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kadangkala ada unsur-unsur terkait yang “terlampau bersemangat” untuk menyukseskan Gerakan Rereongan Sarupi sehingga memberi kesan bahwa dana yang dikumpulkan merupakan instruksi atasan kepada masyarakat. Dalam hal ini, beberapa kabupaten/kota yang melihat kecenderungan tersebut telah berupaya untuk mengkampanyekan kembali makna filosofis yang terkandung dalam Gerakan Rereongan Sarupi, antara lain, dengan melibatkan secara aktif ulama atau tokoh agama dalam memberikan penyuluhan tentang makna Gerakan Rereongan Sarupi ditinjau dari pandangan agama. Tentu saja, cara ini merupakan langkah strategis dalam memberdayakan masyarakat agar berlangsung secara terus-menerus dan menuju ke arah kemampuan dan kemandirian. Akhirnya, tiga unsur penting yang ada di masyarakat, yaitu (1) tokoh masyarakat; (2) tokoh agama; dan (3) pimpinan pemerintahan harus bahu-membahu menggalakkan

dan menyukseskan Gerakan Rereongan Sarupi. Jika keadaan demikian tercipta secara kondusif akan mempengaruhi keberhasilan Gerakan Rereongan Sarupi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Jika mengacu pada budaya *rereongan* dalam pelaksanaan proyek pembangunan kesejahteraan sosial, unsur partisipasi aktif sangat menentukan keberhasilan proyek pembangunan tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam Gerakan Rereongan Sarupi relatif terbatas sebagai penyumbang uang Rp100,00 atau lebih. Namun, untuk kegiatan *rereongan* lainnya yang merupakan wujud gotong-royong relatif masih kurang. Keadaan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi rasa memiliki terhadap Gerakan Rereongan Sarupi pada masa yang akan datang. Karena itu, upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat merasa memiliki dan bangga terhadap Gerakan Rereongan Sarupi menjadi sesuatu sangat penting. Dalam hal ini, peran instansi pembina masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi contoh yang baik bagi kabupaten/kota lainnya sehubungan dengan pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap langkah operasional Yayasan Rereongan Sarupi.

Untuk mengetahui faktor-faktor tertentu yang dirasakan responden dapat mempengaruhi keberhasilan atau kurang-berhasilan dari Gerakan Rereongan Sarupi, disajikan pada tabel berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, beberapa faktor kritis yang mempengaruhi kurang-berhasilan Gerakan Rereongan Sarupi di suatu wilayah, sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang budaya *rereongan*.
2. Adanya pergeseran nilai budaya.
3. Kurangnya penyuluhan sosial.
4. Kurangnya informasi penggunaan dana.
5. Adanya hambatan geografis dalam pelaksanaan pengumpulan dana.
6. Kinerja yayasan yang belum optimal dan masih menghadapi masalah-masalah organisasi secara internal.
7. Kurang dukungan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi terkait.

8. Upaya pelebagaan kembali budaya *rereongan* cenderung memobilisasi massa yang bersifat instruktif daripada melalui peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat (pemberdayaan).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mengatasi masalah kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Gerakan Rereongan Sarupi menjadi sangat penting sebagai salah satu alternatif dalam strategi pemerataan pembangunan yang berbasiskan masyarakat (*community base development*). Strategi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk (*basic needs*) melalui strategi pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatra Barat

Program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penanganan anak-anak terlantar adalah tindakan yang sangat urgen untuk dilaksanakan. Salah satu pertimbangannya adalah peningkatan jumlah anak terlantar dan keluarga miskin yang semakin nyata, sedangkan potensi masyarakat yang bersumber dari sistem sosial-budaya setempat masih perlu dibangkitkan dan diaktualisasikan untuk masa-masa yang akan datang. Prinsip dasar program pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat agar dapat mengatasi masalah keterlantaran anak khususnya dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya dengan inisiatif dan kekuatan sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya untuk mendorong dan memobilisasi sumber-sumber sosial sehingga masyarakat dapat menyatakan kebutuhannya, menyampaikan pendapatnya, serta memiliki kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber lokal yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah mulai dari identifikasi masalah sampai menikmati hasilnya.

Pengertian masyarakat (*society*) mengacu pada sekelompok orang yang belajar hidup dan bekerja secara bersama-sama. Dari sudut pandang

sistem, masyarakat merupakan *holon* (konsep yang menyatakan bahwa sistem dapat dipandang sebagai unit yang berdiri sendiri, juga dapat dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar atau sebagai subsistem). Berkaitan dengan konsep masyarakat semacam itu, pengertian kebudayaan mengacu pada tatacara kehidupan yang dianut atau diikuti oleh kelompok orang yang disebut masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan faktor yang mengikat atau mempersatukan kehidupan manusia dalam kelompok yang disebut masyarakat. Di dalam konsep kebudayaan tercakup adat-istiadat, nilai-nilai, moral, peralatan (*tools*), dan teknik-teknik.

Gejala peningkatan anak terlantar, sebagai salah satu permasalahan sosial yang kini sedang merebak di berbagai kota besar di Indonesia, merupakan masalah sosial yang sangat serius. Di Kabupaten Tanah Datar, data peningkatan anak terlantar menunjukkan adanya permasalahan setidak-tidaknya di tingkat masyarakat. Data 1999 dari Dinas Sosial setempat mencatat bahwa ada sekitar 3.984 anak terlantar yang berasal dari keluarga miskin, dengan kondisi *drop-out* dari SD (34,24%), 918 anak di antaranya mengalami kasus gizi yang sangat buruk. Dibandingkan dengan jumlah anak terlantar tahun

Tabel 10.1 Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kekurang-berhasilan Gerakan Rereongan Sarupi menurut responden masyarakat, pengumpul dana dan aparat pemerintah (N=3.648)

Faktor penghambat	Indeks	Pengaruh
Kurang penyuluhan	3,94	tinggi
Kurang jelas cara pengumpulan dana	1,90	rendah
Perilaku petugas pengumpul dana	1,20	rendah
Kondisi geografis sulit	3,71	tinggi
Kurangnya informasi penggunaan dana	3,77	tinggi
Pergeseran nilai budaya	3,96	tinggi
Berkembang permukiman baru	2,81	cukup
Berkembang daerah industri	2,91	cukup
Kurang pemahaman budaya rereongan	4,12	sangat tinggi
Kurang tepat waktu pengumpulan dana	3	cukup

Sumber: Yusman dan Harry, 1995. *Evaluasi Gerakan Rereongan Sarupi di Jawa Barat, Bandung: Pemda Jabar*

sebelumnya, data tersebut mengalami peningkatan sebanyak 17% dan merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Solok dan Padang Panjang. Sementara itu, rasio anak terlantar dan panti sosial hanya 1 : 398, jauh dari kebutuhan masyarakat yaitu sekitar 1 : 30.

Jika data di atas dikaitkan dengan potensi yang dimiliki, keberadaan lembaga-lembaga adat (*Julo-julo, Bunda Kanduang, Tungku Tigo Sajaringan*, yaitu Ninik Mamak, Cerdik Pandai dan Alim Ulama) telah lama dikenal sebagai lembaga masyarakat yang mampu mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Terungkapnya permasalahan keterlantaran anak dan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam forum nasional tentang *Social Sector Strategy and Capacity Building (S3CB)* yang berlangsung pada Agustus 1999, ternyata mengejutkan semua pihak, terutama bagi perwakilan para peserta (Bappeka, Pemkab, Tokoh Masyarakat) dari Sumatera Barat. Pada umumnya, mereka tidak meyakini permasalahan itu sebagai fakta yang telah terjadi. Ketidakyakinan itu disebabkan oleh sentimen kedaerahan bahwa fakta-fakta itu memalukan daerahnya yang selama ini dibanggakan sebagai daerah sejahtera.

Kini, struktur dan keorganisasian kebudayaan masyarakat tampak kurang berfungsi lagi. Bukti-bukti yang dapat ditunjukkan adalah semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan penanganan anak terlantar melalui sistem panti, selain indikasi lain yakni meningkatnya jumlah perceraian dan keluarga miskin. Berdasarkan laporan Dinas Sosial setempat, tercatat bahwa ada sekitar 43,57% anak terlantar yang bekerja membantu orang tuanya. Praktek ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya eksploitasi anak. Tentu saja, kondisi ini bertolak belakang dengan citra Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai pusat adat budaya Minangkabau yang disebut *Pusek Jalo Pumpunan Ikan*. Makna ungkapan tersebut adalah bahwa semua persoalan Nagari dapat dipecahkan melalui musyawarah-mufakat yang berpusat pada Ninik Mamak, Cerdik Pandai, dan Alim Ulama. Selanjutnya, upaya pemecahan masalah akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, tanpa bantuan dari luar yang terlampau jauh. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan sosial tidak lagi menjadi masalah masyarakat lokal, tetapi sudah menjadi masalah institusi sosial yang didirikan pemerintah. Lebih luas dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut sudah menjadi masalah departemen teknis atau dinas sosial. Di lain pihak, pola penanganan masalah anak-anak terlantar yang dikembangkan pemerintah terlalu

sentra-listik dan kurang melibatkan peran aktif masyarakat. Ini disebabkan oleh sistem panti yang dibentuk lebih mengarah pada organisasi tertutup (*closed system*) dan keberadaannya eksklusif di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Struktur atau keorganisasian kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis; artinya berada dalam keadaan yang berubah-ubah secara terus menerus. Jadi, teori evolusi juga berlaku bagi kebudayaan. Organisasi sosial dari kebudayaan tertentu yang sedang berevolusi, pada dasarnya, mengarah pada keadaan yang semakin kompleks. Ini disebabkan oleh semakin kompleks dan meningkatnya volume relasi antarberbagai unsur kebudayaan. Karena itu, kebudayaan *Pusek Jalo Pumpunan Ikan* yang dikatakan sedang dalam keadaan "stagnasi" menunjukkan adanya interelasi yang relatif statis, dan interaksi antarberbagai unsurnya relatif tidak berubah-ubah. Hal yang harus diingat adalah bahwa sebenarnya tidak ada sistem yang benar-benar statis, atau sama sekali tidak berubah. Jadi, kebudayaan tetap harus diposisikan sebagai potensi yang dapat dijadikan sumber sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Sementara itu, kebudayaan menjadi semakin kompleks dan berdiferensiasi. Maka, sistem pengasuhan anak dalam sebuah keluarga yang seperti itu telah mendorong munculnya berbagai lembaga pelayanan (lembaga sosial). Lembaga-lembaga publik ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi keluarga berkaitan dengan pengasuhan anak. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan mobilitas yang semakin besar dalam sistem ekonomi dewasa ini, peranan keluarga besar (*extended family*) menjadi semakin berkurang. Gejala seperti itu diikuti pula oleh semakin jelas kebutuhan-kebutuhan pelayanan panti asuhan anak, penitipan anak (*day care services*), taman kanak-kanak, pramusiwi (*baby sister*), dan pramuwisma.

Sebaliknya, seiring dengan semakin maraknya kemunculan institusi sosial baru seperti Panti Asuhan Anak Terlantar, semakin cepat pula perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga. Perubahan-perubahan yang dimaksud tidak selalu (dan tidak perlu) berkaitan dengan keruntuhan keluarga. Dengan perkataan lain, eksistensi keluarga dan fungsi-fungsinya harus tetap bertahan,

meskipun di luar rumah telah bertumbuhan institusi-institusi baru yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan sistem pelayanan baru tersebut berkaitan erat dengan kesadaran untuk memberikan jawaban yang lebih tepat terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari perubahan-perubahan dalam keluarga, serta nilai-nilai yang semakin kompleks dalam kebudayaan.

Sebagai sistem sosial, kebudayaan selalu memiliki organisasi; dalam arti bahwa kebudayaan tersebut – dalam keadaan terorganisasi (*organized*) – sedang dalam proses pengorganisasian, atau sedang dalam keadaan disorganisasi (*disorganized*). Dengan demikian, dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar kebudayaan lokal cenderung stagnasi dan disorganisasi. Untuk itu, diperlukan reaktualisasi kebudayaan masyarakat setempat melalui strategi pemberdayaan institusi tradisi guna mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, termasuk permasalahan anak-anak terlantar.

Namun, bagaimanapun dan kapan pun dimensi organisasi selalu ada dalam setiap kebudayaan. Di sini, pengertian organisasi bukanlah pengertian formal, melainkan mengacu pada struktur sistem sosial. Kebudayaan selalu memiliki struktur atau dalam keadaan terstruktur, dalam arti bahwa dalam setiap kebudayaan selalu ada sistem unsur-unsur yang berinteraksi. Jika terjadi perubahan pada salah satu unsur atau pola relasi tertentu, secara otomatis perubahan tersebut akan mempengaruhi perubahan pada unsur-unsur lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud tidak hanya ditujukan secara langsung dalam mengatasi masalah-masalah sosial, tetapi sekaligus sebagai strategi dalam melakukan perubahan struktur masyarakat atau mengaktualisasi kebudayaan masyarakat sesuai dengan struktur masyarakat yang berlaku.

Dimensi kebudayaan yang akhir-akhir ini sedang mendapat perhatian yang agak mendalam adalah aspek kewilayahan (*territoriality*) yang berhubungan erat dengan kebijakan desentralisasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan manusia dalam setiap sistem sosialnya untuk memperoleh dan memelihara wilayah (*territorynya*). Ada banyak ahli yang mengartikan wilayah teritorial sebagai keruangan (*spacial*), sedangkan beberapa ahli lainnya mengaitkan konsep kewilayahan

ini dengan aspek-aspek interaksional. Berdasarkan pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa konsep kewilayahan mengacu pada kecenderungan manusia untuk mengadakan batasan mengenai wilayah keruangan (*spacial*) dan interaksionalnya. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, isu kampanye tentang potensi kebudayaan Minangkabau yang dimiliki harus selalu dikaitkan dengan aspek kewilayahan Kabupaten Tanah Datar. Cara ini dilakukan untuk menumbuhkan kembali kebanggaan dan rasa memiliki kembali.

Langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah menyadarkan atau mengingatkan kembali masyarakat terhadap berbagai masalah kemasyarakatan. Dengan perkataan lain harus dilakukan konsientisasi terhadap masyarakat untuk memberikan respons yang positif dan sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya (retrospektif pengalaman kemasyarakatan). Dalam kondisi masyarakat yang sudah menyadari eksistensi masalah dan potensi kebudayaan yang dimilikinya, proses pemecahan masalah melalui pemberdayaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dengan cara demikian, terjadinya aktualisasi eksistensi budaya lokal untuk mengatasi masalah keterlantaran anak dan masalah sosial lainnya muncul ke permukaan.

Tujuan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak oleh dan dari masyarakat.
- b. Mendorong dan memberi peluang masyarakat untuk meningkatkan perlindungan sosial hak-hak anak.
- c. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak.
- d. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai agama, dan adat istiadat setempat.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan sistem sosial budaya setempat, antara lain, sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kegiatan *julo* dalam pengembangan usaha ekonomi.
- b. Mengembangkan kegiatan remaja mesjid untuk mensosialisasikan hak anak.

- c. Melakukan musyawarah tokoh-tokoh adat dan masyarakat, yaitu kerapan adat nagari (KAN), Ninik Mamak, Bundo Kandung, Datuak, Alim Ulama dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran *Tigo Tungku Sajarangan*.
- d. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap *Lumbang Pitih Nagari* dan *Bareh Pinjik (Simpanan Bajapuik)* dengan mengangkat isu masalah-masalah sosial pada *Pusek Jalo Pumpunan Ikan*.
- c. Membangun Balariung Nagari agar dapat menjadi pusat dalam pengembangan masyarakat (*community centre*) atau *Pusek Jalo Pumpunan Ikan*.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Reaktualisasi Sistem Banjar di Propinsi Bali

Sudah sejak lama Propinsi Bali terkenal sebagai daerah propinsi yang sistem pemerintahan desanya menggunakan *Sistem Banjar*. Potensi desa yang dimiliki adalah tersedianya bangunan *bale banjar*, tempat warga banjar mengadakan musyawarah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. *Bale banjar* tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat yang, pada umumnya, terletak di tengah-tengah perumahan warga *banjarnya*. Pada kenyataannya, penamaan desa atau kelurahan bagi satu-kesatuan komunitas di Propinsi Bali tidak menimbulkan masalah. Dengan perkataan lain, penamaan tersebut tidak merusak sistem sosial budaya yang berlaku di daerah setempat karena sistem pemerintahan desa yang bersangkutan disesuaikan dengan *banjar* yang ada.

Hingga kini, *Sistem Banjar* masih dapat bertahan karena adanya beberapa faktor pendukung, seperti kesesuaian dan kecocokan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang mengikat orang Bali berdasarkan prinsip keturunan, adanya kesatuan adat, dan upacara-upacara keagamaan yang keramat. Sungguhpun demikian, *Sistem Banjar* ini tidak tertutup bagi warga pendatang atau terbuka bagi warga yang lahir di *banjar* lainnya. Itu semua merupakan satu-kesatuan kehidupan yang utuh dan harmonis.

Pola kepemimpinan yang diterapkan di desa-desa di seluruh Propinsi Bali juga menarik untuk dikaji. Salah satu daya tarik ini adalah kepala desa/kelurahan yang diangkat pada umumnya adalah tokoh

masyarakat yang juga telah dikenal sebagai kepala banjar atau disebut *kliang*. Jika ada yang menjadi kepala banjar yang bukan sebagai kepala kelurahan, biasanya, terjadi di kelurahan-kelurahan yang telah berkembang menjadi pusat kota, seperti di Denpasar. Sedemikian penting dan prestisius posisi-status *kliang* atau kepala banjar, masyarakat sangat menghormati mereka.

Penghormatan masyarakat terhadap mereka adalah karena kewenangan *kliang* dalam mengatur kegiatan kemasyarakatan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat tanah, masalah-masalah seputar pertanian dan irigasi (menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sistem *subak*), masalah ketersediaan pangan, dan penanganan masalah-masalah sosial. Mengenai sistem *subak*, kewenangan pengelolaan diatur tersendiri oleh *klian subak* karena pengaturan *subak* belum tentu menyatu dengan pengaturan *Sistem Banjar*. Di dalam satu *subak* dapat terjadi merupakan gabungan dari beberapa banjar. Sungguhpun kewenangan pengelolaan tidak diatur dengan aturan yang sama oleh satu pimpinan masyarakat, antara *klian subak* dan *klian banjar* terdapat hubungan yang harmonis yang diikat oleh kesamaan adat-istiadat.

Organisasi kemasyarakatan lain yang juga berpotensi dalam pembangunan masyarakat adalah *seka*. *Seka truna*, misalnya, merupakan perkumpulan pemuda yang memiliki kegiatan olahraga, tari, seni lukis, dan seni patung. Para pemuda itu juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya, misalnya, dalam upacara-upacara keagamaan dan gotong-royong membangun fasilitas sosial. Ikatan antarpemuda tersebut jauh lebih kuat daripada ikatan pemuda yang dibentuk pemerintah, yaitu karang taruna. *Seka-seka truna* di beberapa wilayah di Propinsi Bali tidak mempersoalkan kehadiran karang taruna; bahkan, yang dimaksud karang taruna di Bali adalah *seka truna*. Seperti halnya *klian banjar* yang berhubungan dengan istilah kepala kelurahan, *seka truna* juga ada yang berbeda dengan karang taruna. Kondisi ini merupakan gejala-gejala bahwa perubahan sosial yang dibawa pemerintah yang cenderung bersifat *top-down* — setelah sampai di masyarakat — acapkali harus diformat sama dengan sistem yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap keanekaragaman budaya lokal yang sebenarnya sudah

memiliki pranata sosial kebudayaan. Padahal, esensi pranata sosial kebudayaan tersebut sama dengan yang dimaksud oleh pihak pemerintah.

Keberadaan dan tetap terpeliharanya pranata sosial yang berbasis adat-istiadat inilah yang membuat masyarakat Bali terkenal dengan kegiatan gotong-royongnya. Sistem gotong royong masyarakat Bali berlaku dalam berbagai kegiatan, seperti *ngoupin*, *ngedeng*, dan *ngayang*.

Ngoupin merupakan kegiatan gotong royong dalam kegiatan bertani (menanam, menyangi, memanen), membangun rumah warga dan fasilitas air bersih (sumur), perayaan perkawinan, upacara-upacara keluarga (khususnya kemati-an). Saling membantu antarkeluarga dalam berbagai kegiatan merupakan ciri khas masyarakat Bali. Sungguhpun demikian, seiring dengan perubahan zaman dan proses modernisasi yang cepat bergulir dalam berbagai aspek kehidupan, sistem ini mulai memudar, terutama di daerah perkotaan. Model pengupahan tenaga kerja, sistem borongan membangun rumah, sistem pengairan dengan sistem ledeng (PAM), dan kehadiran perusahaan jasa katering untuk kegiatan perkawinan telah mengubah sistem gotong royong tersebut. Solidaritas antarwarga mulai memudar dan digantikan oleh sistem kontraktual atas dasar kesepakatan harga, kesepakatan pekerjaan yang akan dihasilkan, sistem pembayaran dalam menggunakan jasa, dan berlakunya mekanisme pasar yang bersifat mekanistik dan didasarkan atas untung rugi (*profit and lost oriented*).

Hal sama juga terjadi pada sistem *ngedeng* yang dulunya merupakan sarana untuk menghubungkan antar*seka*. Misalnya, jika ada upacara perkawinan, *seka truna* dan *seka gamelan* akan bergabung untuk memeriahkan upacara tersebut. Kondisi ini sudah berubah, terutama di perkotaan, karena antar*seka* sudah berlaku sistem pembayaran jual beli jasa. Sistem ini bukan berarti tidak boleh dilakukan, namun *ngedeng* sebaiknya harus tetap dipelihara sebagai salah satu potensi budaya masyarakat Bali dan jangan sampai kehilangan esensinya dalam kehidupan bermasyarakat hanya karena hubungan yang bersifat materialistis.

Sistem *ngayah* atau *ngayang* juga telah mengalami pergeseran makna. Sekarang ini, *ngayah* lebih banyak diartikan sebagai kegiatan gotong royong untuk kepentingan pemerintah, khususnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu. Istilah kerja bakti yang digunakan untuk memobilisasi masyarakat menjadi campur baur

dengan sistem *ngayah* yang dimaksud masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, *ngayah* tumbuh berkembang untuk kegiatan gotong royong, misalnya membangun kuil atau pure. Kesadaran masyarakat Bali secara spontan akan muncul bila ada kegiatan pembangunan sarana keagamaan. Potensi ini tidak salah bila kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dalam kegiatan kerja bakti dengan cara-cara yang tetap peka terhadap budaya lokal. Adanya kepentingan tertentu yang bernuansa politis dan ketakutan aparat terhadap pimpinan yang lebih atas justru merusak institusi tradisi masyarakat Bali yang sudah lama tumbuh dan terpelihara oleh masyarakat Bali itu sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat Bali yang masih kuat dan memegang teguh serta menjaga sistem sosial budaya lokal sangat kecewa dengan upaya-upaya politisasi sistem sosial budaya mereka yang sudah terpelihara secara turun-temurun. Seiring dengan semakin maraknya gerakan reformasi di segala bidang pasca-krisis diharapkan dapat menyadarkan semua pihak bahwa sistem *ngayah* harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya yang ada di Indonesia, kebudayaan Bali masih relatif terpelihara dalam beberapa segi kehidupan. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah sistem adat istiadat, keagamaan dan perilaku sosial budaya terdapat hubungan yang masih harmonis. Hubungan yang harmonis ini didukung oleh pengembangan potensi pariwisata yang juga berbasis pada potensi budaya setempat. Kondisi inilah yang merupakan faktor pendukung berkembangnya Propinsi Bali sehingga pernyataan bahwa tidak ada keluarga masyarakat Bali yang termasuk kategori prasejahtera (kategori kemiskinan dari Menkokesra dan Taskin) adalah sesuatu yang senyatanya. Terlepas dari akurat tidaknya data tersebut, namun kondisi objektif di masyarakat masih dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari ukuran terpenuhinya kebutuhan dasar minimal (*subsistence level*). Hal-hal yang mengkhawatirkan justru adanya gejala degradasi moral kalangan remaja (misalnya mabuk-mabukan, kehidupan seks bebas, dan homoseksual) akibat pengaruh budaya asing yang masuk ke wilayah itu. Dalam hal ini, pendekatan agama merupakan potensi yang sesungguhnya harus dioptimalkan guna menangkal pengaruh budaya asing ke masyarakat Bali, terutama pengaruh terhadap kalangan remaja.

Aktualisasi Institusi Tradisi

Sudah sejak lama Indonesia terkenal dengan nilai-nilai budaya yang beraneka ragam yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam berbagai adat atau kebiasaan masyarakat, dan dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku sosial tersebut menjadi ciri khas masyarakat tertentu, kendatipun falsafah nilai budaya itu sesungguhnya juga dapat berlaku universal bagi masyarakat di berbagai propinsi lainnya di Indonesia.

Perubahan sosial yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini telah menimbulkan banyak pergeseran nilai budaya masyarakat. Pergeseran nilai merupakan dampak kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi yang tidak dapat dihindari. Dengan perkataan lain, ekses negatif dari perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan kondisi zaman yang sudah mengglobal sehingga sekat-sekat wilayah nyaris tidak berlaku. Pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat tinggi secara otomatis sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Kemunculan masyarakat yang heterogen sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang tinggi dari satu propinsi ke propinsi lain hanyalah salah satu efeknya. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di daerah-daerah yang pesat pertumbuhan ekonominya atau daerah perkotaan mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan tidak lagi dirasakan oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri masyarakat yang aktivitas perekonomiannya sangat maju, terutama di perkotaan, cenderung memiliki ciri solidaritas sosial yang mekanik. Bahkan, ikatan profesi lebih kuat daripada ikatan komunal di masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Indonesia diprediksikan masih berada dalam kondisi rentan untuk munculnya krisis lanjutan. Bila tidak segera diantisipasi, krisis lanjutan ini dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami keterpurukan yang semakin mendalam. Kendatipun keadaan itu sangat tidak diharapkan, antisipasi dini terhadap krisis lanjutan adalah langkah yang paling bijak. Apalagi, kondisi masyarakat semakin tidak berdaya dan rentan

terhadap timbulnya berbagai kerusuhan sosial, penjarahan, tindak kejahatan atau perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, kelompok yang semakin sengsara, miskin, terbelakang, kelaparan, kekurangan gizi dan berbagai kondisi rawan lainnya akan meningkat. Peningkatan ini berdampak pada semakin menurunnya fungsi-fungsi sosial di masyarakat.

Dalam menghadapi situasi demikian, kenyataan yang dilematis mau tidak mau harus dihadapi, yaitu keterbatasan kemampuan keuangan negara pada satu sisi, dan besarnya permasalahan yang harus ditangani pada sisi lainnya. Kalau pun ada peningkatan anggaran, tambahan itu bukan bersumber dari pendapatan nasional, melainkan bergantung pada pinjaman luar negeri, seperti sumber untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang merupakan dana pinjaman dari IMF. Menghadapi kondisi demikian, strategi pembangunan sosial secara struktural harus mengalami perubahan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan menjadi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Salah satu caranya adalah memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk membangun dirinya atas dasar kekuatan yang dimilikinya. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan peluang dan kondisi yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya peran aktif masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan salah satu strategi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang memerlukan pengkajian mendalam adalah belajar dari pengalaman (retrospeksi) dengan mengambil butir-butir kebijakan, program, atau kegiatan yang memberikan manfaat dan tidak mengulangi kesalahan yang tidak diharapkan. Sikap demikian sesuai dengan esensi reformasi dalam pembangunan sosial. Karena itu, pemerintah harus

- a) mengoptimalkan sumber daya yang ada, tidak bertumpu pada sumber APBN dan dana pinjaman luar negeri, tetapi mengembangkan sumber daya masyarakat yang ada melalui penciptaan mekanisme pemberdayaan yang tepat,
- b) memantapkan program, proyek, atau kegiatan yang berbasiskan masyarakat dan telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,

- c) melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan dan program yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kondisi krisis, dan
- d) melakukan berbagai program terobosan dan inovasi.

Upaya yang bersifat strategis perlu dirumuskan, kemudian diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai salah satu wujud nyata program penyelamatan dan pemulihan, juga sebagai landasan untuk mencapai kembali taraf kesejahteraan masyarakat yang pernah dialami sebelum masa krisis. Karena itu, diperlukan peningkatan kemitraan dengan infrastruktur sosial, seperti Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui kemitraan ini diharapkan dapat terwujud hubungan dan interaksi yang semakin harmonis dan serasi antara masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sosial. Masyarakat sebagai sumber sosial diharapkan semakin mengambil peran sebagai subjek pembangunan.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, "campur tangan" pemerintah – baik pusat maupun daerah – diharapkan akan menjadi seminimal mungkin, dan diupayakan untuk semakin menumbuhkan peran aktif masyarakat seluas mungkin. Dalam kaitan ini, kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat harus diserahkan dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat lokal. Apabila belum dapat dilakukan oleh masyarakat, pelaksanaan pembangunan itu harus didampingi oleh pekerja sosial atau tenaga profesional yang berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan peran lainnya dalam pemberdayaan masyarakat. Restrukturisasi peran pelaku pembangunan di tingkat mikro, menengah, dan makro menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan.

Pembangunan sosial perlu – bahkan harus – direformasi secara komprehensif dengan memberikan dukungan luas bagi terbukanya peluang dan akses untuk memberikan kesempatan bagi peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dijelaskan sebagai berikut.

- a) pembangunan merupakan kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat,
- b) penekanan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pemantapan otonomi daerah yang diselenggarakan secara nyata dan dinamis, serta didukung oleh kesiapan jajaran pemerintah daerah dan pusat,
- c) restrukturisasi perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek untuk menghilangkan inefisiensi penggunaan dana pembangunan yang terbatas dengan tetap memperhatikan akses universal terhadap pelayanan kebutuhan dasar sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM),
- d) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan yang semakin erat antarmanusia, antardaerah, antara pusat dan daerah, antar-sektor, serta antara kegiatan makro dan mikro pembangunan sosial, dan
- e) pengembangan dan pengerahan sumber-sumber sosial dengan meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas dan efektifitas pelayanan, peningkatan mutu, pengembangan, dan penyebaran, serta pemanfaatan SDM dan piranti lunak dan keras untuk pembangunan sosial.

Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat menikmati pelayanan pembangunan dan berkesempatan berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan, sesungguhnya, adalah para penyandang permasalahan sosial. Dengan demikian, pada dasarnya, pembangunan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sosial masyarakat, termasuk mereka yang dikategorikan sebagai penyandang permasalahan sosial agar tidak tertinggal oleh warga masyarakat lainnya. Karena itu, pembangunan masyarakat adalah aktivitas yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial yang merupakan salah satu aspek pembangunan sosial. Atas dasar itu, rumusan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat yang harus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dijelaskan sebagai berikut.

- a) Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
- b) Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik daripada perencanaan yang berasal dari atas atau penguasa.
- c) Proses pemberdayaan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.
- c) Proses pemberdayaan masyarakat dan partisipasi semua pihak dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis.
- d) Sistem sosial budaya setempat sejak lama memosisikan masyarakat sebagai subjek dan berperan langsung dalam setiap gerak pembangunan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, pada dasarnya, menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, dan pelayanan sosial personal. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan masyarakat harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan dari pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai kesatuan sebuah sistem. Strategi pembangunan masyarakat merupakan sistem yang berkaitan erat dengan hukum atau perundang-undangan, kebijakan, serta program-program dan kegiatan pelayanan dan atau pelayanan sosial atau intervensi sosial, serta pengadaan atau provisi yang mengindikasikan adanya organisasi formal yang mendapat dukungan sosial.

Di dalam pengertian sistem tersebut tercermin adanya interaksi yang intensif dan keterkaitan yang kuat antara berbagai bidang di dalam sistem itu, serta antara sistem pembangunan sosial dan lingkungannya. Dengan keadaan demikian, antara aspek-aspek hukum dan perundang-undangan; antara kebijakan, program-program, dan kegiatan-kegiatan di bidang usaha sosial, serta antara usaha sosial

dan sistem ekonomi-politik-sosial-budaya dan segenap aspek kehidupan masyarakat lainnya terjadi keterkaitan demikian kuat.

Pengorganisasian pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui organisasi-organisasi formal, baik pemerintah mau-pun swasta. Selain itu, pembangunan masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan menjadi bagian dari sistem nilai budaya masyarakat. Sebab itu, strategi pembangunan masyarakat harus berupa institusi dan kegiatan yang berkembang dalam, dapat diterima atau didukung masyarakat. Dalam hal ini, peran institusi tradisi yang ada di masyarakat tersebut harus diperhitungkan secara sungguh-sungguh yang kemudian diaktualisasikan kembali sebagai sumber daya berbasis sistem sosial-budaya lokal.

Berdasarkan strategi pembangunan masyarakat di atas, hal penting yang harus diperhatikan adalah keterpaduan secara fungsional dan tataruang. Keterpaduan fungsional adalah keterpaduan yang mencakup semua aspek dan kegiatan, serta pelayanan sosial-ekonomi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keterpaduan tataruang adalah keterpaduan hubungan antarberbagai kegiatan sosial-ekonomi. Secara spesifik, keterpaduan ini mempunyai lokasi tertentu dalam berhubungan dengan fungsi-fungsi lainnya dan memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dengan lokasi lainnya (propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan). Sungguhpun demikian, komunitas yang berada dalam suatu ruang wilayah geografis tertentu dalam melaksanakan pembangunan atau pengembangan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat melepaskan diri dari komunitas lain yang berada di sekitarnya.

Contoh, Gerakan Rereongan Sarupi merupakan gerakan yang berupaya mengaktualisasikan kembali sistem institusi tradisi budaya gotong royong atau kepedulian sosial warga masyarakat terhadap masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan lainnya. Gerakan Rereongan Sarupi merupakan gerakan wadah penyaluran aspirasi dan pencapaian tujuan bersama yang merupakan perpaduan antara kelembagaan masyarakat dan kelembagaan formal.

Model ini dikembangkan dari teori kelembagaan sosial yang mengacu pada pandangan bahwa proses pelebagaan institusi tradisi berupaya untuk menetapkan norma-norma yang bersifat pasti yang menen-

tukan posisi status dan fungsi peranan untuk perilaku tertentu. Proses pelebagaan ini akan berhasil apabila mekanisme dan manfaatnya berupa seperangkat harapan perilaku. Partisipasi dari semua pihak terhadap mekanisme kerja yang dipolakan secara teratur akan diterima dan menggantikan pola yang sama. Diharapkan, institusi tradisi tersebut menjadi institusi sosial sebuah bentuk formal budaya yang terdiri atas kebutuhan sosial yang sangat mendasar. Sarat utama yang harus ada apabila institusi tradisi ini ingin melembaga adalah keberfungsian institusi sebagai prasarana partisipasi efektif masyarakat dalam merealisasikan kebutuhan-kebutuhan dasar, pengawasan sosial dan individual, serta sarana efektivitas untuk membangkitkan kembali potensi masyarakat yang ada.

Peninjauan lebih lanjut terhadap institusi sosial adalah tentang sejauhmana gerakan ini berfungsi sebagai agen stabilitas atau pengekang. Pendekatan yang lebih tepat untuk melihat diterima-tidaknya mekanisme sosial-budaya (sebagai institusi) adalah dilihat dari segi penyesuaian dan penyimpangan individu yang ada di dalamnya.

Di antara segenap unsur sosial-budaya terdapat unsur-unsur lain yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Apabila terjadi ketidakserasian antara aspirasi – utamanya dalam mencapai kesejahteraan sosial atau mencip-takan keluarga sejahtera – dengan saluran-saluran yang ada yang tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut, terjadilah perilaku yang menyimpang. Jadi, masyarakat dan pemerintah hanya mementingkan terciptanya sosial-budaya tertentu daripada kaidah-kaidah yang ada (demokratis, partisipasi, kebersamaan, dan gotong-royong) untuk mencapai tujuan tersebut. Pola adaptasi individu (warga masyarakat) terhadap aktualisasi institusi tradisi tersebut adalah adaptasi yang bersifat konformitas, motivasi, ritualisme, pengunduran diri, dan menentang.

Proses aktualisasi institusi tradisi akan segera diterima apabila kegiatannya berazaskan pada partisipatif dengan mengoptimalkan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Maksudnya, warga masyarakat berpartisipasi dengan cara-cara mereka sendiri mulai dari merencanakan, memutuskan, melaksanakan, menikmati hasil, hingga mengevaluasi hasil pekerjaan-

nya. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan hingga menilai dan mengevaluasi hasilnya ini akan menentukan berhasil atau diterima-tidaknya institusi tradisi sebagai institusi sosial.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terlihat secara nyata bahwa potensi yang dimiliki masyarakat Jawa Barat, Bali, dan Sumatra Barat (khususnya Kabupaten Tanah Datar) semisal gotong-royong dan kesetiakawanan sosial sesungguhnya sangat besar. Jika seluruh potensi tersembunyi digerakkan dan digugah secara sungguh-sungguh akan menjadi ujung tombak dalam menggali sumber daya program pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Bentuk-bentuk program yang sudah ada dan telah menjadi ciri khas pembangunan sosial di Jawa Barat adalah Genta Masekdas, Gerakan Rereongan Sarumpi, Gerakan Rereongan Sapujaga, dan Santri Raksa Desa. Bila program tersebut ditindaklanjuti menjadi paket program yang berisi kegiatan-kegiatan terpadu dan terintegrasi dapat menjadi model program yang sangat efektif bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat. Demikian juga sosialisasi *Sistem Banjar* di Bali dan sistem *Pusek Jalo Pumpunan Ikan* di Kabupaten Tanah Datar merupakan sumber daya lokal yang tidak dapat diabaikan dalam suksesi program penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, strategi pembangunan masyarakat pada masa mendatang lebih cenderung mengembangkan program-program yang ditujukan untuk mengoptimalkan program-program pembangunan yang bercirikan sistem sosial budaya setempat. Dengan cara demikian, selain lebih tepat sasaran dan program, juga dapat meningkatkan kehidupan orang-orang miskin dan penduduk umumnya hingga mencapai standar minimum. Mereka juga diharapkan dapat meraih kesempatan-kesempatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Strategi pembangunan masyarakat berada dalam satu kesatuan sistem pembangunan sosial yang berinteraksi. Apabila pembangunan nasional secara menyeluruh berupaya untuk meningkatkan kemajuan, kemampuan, kesejahteraan dan keadilan sosial, pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah upaya-upaya yang sistematis dan

berkesinambungan agar setiap orang – bagaimanapun kondisi objektifnya – berkesempatan dan berkemampuan untuk menikmati pelayanan pembangunan. Mereka juga dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dari proses aktualisasi institusi tradisi yang telah tumbuh-berkembang secara turun-temurun yang hingga kini masih kuat berurat-berakar di masyarakat.

Berdasarkan kajian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Pada hakikatnya, masalah kemiskinan, keterlantaran, dan permasalahan sosial lainnya adalah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat lokal. Untuk itu, penanganan masalah sosial harus berbasiskan masyarakat karena masyarakatlah yang paling tahu kondisi permasalahannya. Penanganan permasalahan sosial yang sentralistik dan sektoral hanya mengakibatkan masyarakat semakin tidak peduli terhadap masalah sosial yang berkembang di lingkungannya.
2. Keanekaragaman sistem sosial-budaya di Indonesia harus dipahami sebagai potensi pemanfaatannya belum optimal dalam proses pembangunan masyarakat. Padahal, sistem sosial-budaya lokal merupakan modal sosial (*social capital*) yang besar yang telah tumbuh-berkembang secara turun-menurun yang hingga kini masih kuat berurat-berakar di masyarakat.
3. Aktualisasi sistem sosial-budaya lokal menjadi masalah yang sangat strategis untuk didiskusikan kembali. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan keadaan Indonesia yang berada dalam proses demokrasi dan reformasi di segala bidang pembangunan. Ketika Indonesia mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat agaknya membutuhkan perubahan yang sangat mendasar, dari pendekatan yang karitas (*charity*) atau residual menjadi sistem pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasiskan sistem sosial-budaya lokal perlu diformulasikan secara tepat tanpa harus membuat pola-pola seragam seperti pada masa Orde Baru.

Karena itu, penancangan penanggulangan masalah kemiskinan atau permasalahan sosial lainnya harus dibatasi sampai pada tahap mobilisasi sosial atau penyadaran (konsientisasi) masyarakat. Sementara itu, proses pemberdayaannya harus dilimpahkan kepada masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, sistem pendukung, pengakses sumber sosial, dan peran-peran lain yang bersifat tidak langsung (*indirect services*).^a

11 TANTANGAN PERUBAHAN STRATEGI MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA PARTISIPATIF

Kasus Proyek Pengembangan Masyarakat di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes

Evaluasi proyek pengembangan masyarakat di Desa Grinting, Sengon, Kedunguter, dan Kecipir ini telah dilaksanakan dengan baik melalui prakarsa Yayasan Usaha Mulya (YUM) yang bekerja sama dengan Susila Dharma Jerman bersama tim peneliti dari Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Kasus yang terjadi di Desa Kecipir sangat menarik untuk dikaji. Daya tarik tersebut adalah karena YUM—ketika evaluasi dilakukan—sedang menghadapi masalah kurangnya penerimaan masyarakat terhadap beberapa orang tokoh dan konflik yang terjadi dengan salah seorang tokoh agama di desa tersebut.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Dalam rangka evaluasi proyek pengembangan masyarakat di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap.

Tahap I

- a. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 28-29 Maret 2000 secara efektif dimulai pada pukul 8.00 sampai 20.00.
- b. Informan yang dimintai keterangan terdiri atas penanggung jawab proyek Desa Kecipir/Pengurus YUM, Kepala Desa dan perangkatnya, Petugas Sosial Kecamatan (PSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), tokoh masyarakat (guru), Ketua LKMD, tokoh agama (lebe), Kepala Dusun Blangko, kader Posyandu, mantan peserta latihan menjahit, dan keluarga penerima bantuan beasiswa.
- c. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
 - 1) wawancara terhadap penanggung jawab proyek, PSK, PSM, tokoh-tokoh masyarakat serta penerima bantuan tentang tahapan pelaksanaan dan hasil-hasil proyek pengembangan masyarakat,
 - 2) diskusi kelompok terarah bersama-sama kepala desa, PSK, Ketua LKMD, tokoh agama tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat, dan
 - 3) studi dokumentasi tentang kegiatan YUM selama setahun terakhir yang diperoleh dari laporan 1999 dan profil Desa Kecipir.
- d. Data yang diperoleh adalah
 - 1) Profil Desa Kecipir;
 - 2) Pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat.

Tahap II

- a. Waktu pengumpulan data yang efektif mulai dilaksanakan pada 17 s.d. 19 Maret 2000, secara efektif mulai pukul 05.00 s.d 23.00. Ini dapat terlaksana karena petugas pengumpul data menginap di Desa Kecipir Tengah, tepatnya di rumah keluarga orang tua asuh.

- b. Informan yang dihubungi dan dimintai keterangan adalah pengurus YUM, aparat desa, LMD, LKMD, Kelompok Usaha Tani, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak penerima beasiswa, orang tua dari anak asuh, peserta pelatihan keterampilan tatarias dan menjahit, pengurus dan anggota kelompok usaha bersama, kader posyandu, tokoh pemuda/karang taruna, PSK, peternak bebek, petani bawang, petani cabe.
- c. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan observasi lapangan bersama-sama masyarakat dan koordinator desa.
- d. Hasil yang diperoleh adalah
 - 1) intervensi/kinerja YUM yang signifikan lebih mempengaruhi perkembangan masyarakat dibandingkan dengan program-program sejenis dari sumber lain (JPS, dan program sektor);
 - 2) penerimaan masyarakat terhadap keberadaan YUM dan kemungkinan difungsikannya Kantor YUM secara lebih efektif di Desa Kecipir;
 - 3) potensi pertanian, peternakan, perikanan dan sumber-sumber penghasilan lainnya;
 - 4) kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan layak huni, air bersih, sarana prasarana rumah tangga, dan peluang pekerjaan;
 - 5) strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis potensi dan sumber lokal, serta peran-peran YUM yang sesuai dalam memfasilitasi proyek pengembangan masyarakat;
 - 6) manajemen dan administrasi proyek pengembangan masyarakat di tingkat yayasan, desa, dan dusun; serta
 - 7) kebutuhan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi pengelolaan proyek pengembangan masyarakat selanjutnya.

Profil Desa Kecipir

Potensi Alam

Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes terletak sekitar 4 km dari ibukota kecamatan dan 24 km dari ibukota kabupaten. Letak geografis Desa Kecipir adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Desa Tengguli, sebelah barat Desa Losari Lor, dan sebelah timur Desa Pengaradan.

Wilayah desa terbagi atas tiga dusun/lingkungan, yaitu Dusun Bancang, Dusun Kecipir Tengah, dan Dusun Blangko, serta 3 RW dan 12 RT. Jarak antardusun sekitar 1 km, dan lokasi perumahan penduduk memanjang dari arah selatan (pinggir jalan raya) menuju ke utara mendekati pantai (Laut Jawa).

Luas wilayah Desa Kecipir sekitar 616,4 ha, 359 ha di antaranya digunakan untuk tanah sawah, 211,600 ha untuk pertambakan, dan 45,8 ha tanah darat. Penggunaan tanah, antara lain, untuk tanah sawah (70%), lahan perumahan (20%), kebun (5%), serta kolam ikan dan tambak udang (5%). Tingkat kesuburan tanah termasuk kategori sedang dengan curah hujan 100 mm per tahun dan tinggi tempat dari permukaan laut adalah 25 m.

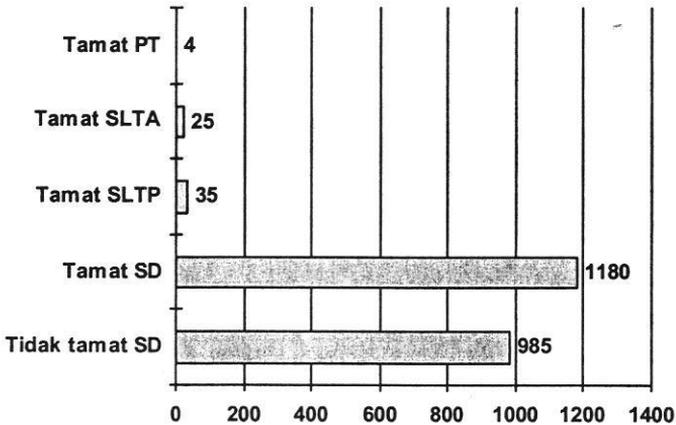
Potensi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kecipir 3.941 orang, terdiri atas 1.962 orang laki-laki dan 1.979 orang perempuan yang terbagi dalam 956 KK. Lahan yang dihuni seluas 63,1 km² dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 62,5 jiwa per kilometer. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur termasuk kategori penduduk muda dengan tingkat ketergantungan 70%. Jumlah pasangan usia subur tercatat 868 orang, 436 orang di antaranya adalah sebagai akseptor KB.

Tingkat pendidikan penduduk sebanyak 39% dapat mencapai tamat SD, 33% tidak tamat SD, dan hanya 3% yang dapat menamatkan SLTP, SMU, atau Perguruan Tinggi. Sisanya, masih sekolah atau belum tamat SD. Data remaja yang putus sekolah SD sebanyak 285 orang, putus SMU 17 orang, putus SMU 8 orang, dan putus kuliah 3 orang.

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, yaitu hanya 2 buah gedung SD dan 1 Madrasah. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi harus melintasi desa lain atau ke ibukota Kabupaten Brebes. Selain terbatasnya fasilitas pendidikan, faktor ekonomi dan budaya masyarakat sangat mempengaruhi terbatasnya penduduk yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Diagram 11.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kecipir



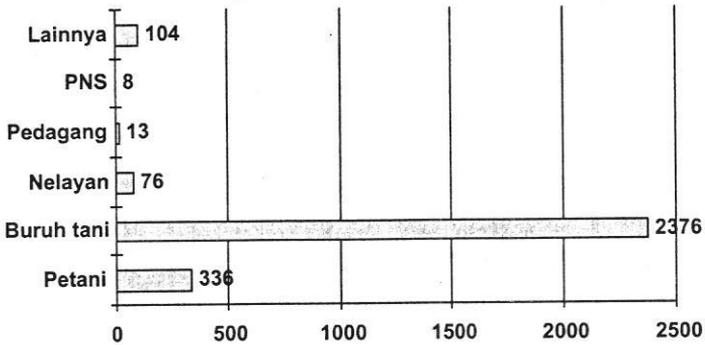
Sumber: Buku daftar isian profil desa/kelurahan 1999

Bagaimanapun, tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang tersedia. Penduduk usia kerja sebanyak 1.867 orang, di antaranya yang bekerja sebanyak 1.477 orang. Kualitas angkatan kerja tamat SD sebanyak 246 orang, tamat SLTP sebanyak 177 orang, dan tamat SMU sebanyak 75 orang, serta hanya 4 orang tamat PT, sisanya angkatan kerja yang tidak tamat SD.

Struktur Mata Pencaharian

Struktur mata pencaharian dan potensi usaha yang menonjol adalah usaha perikanan, pertanian tanaman pangan, industri kecil (seperti kerajinan, peternakan), dan jasa perdagangan.

Diagram 11. 2 Distribusi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Kecipir 1999



Sumber: Buku daftar isian profil desa/kelurahan 1999

Sesuai dengan kondisi geografis, secara umum (atau sekitar 94%) dari penduduk Desa Kecipir memiliki mata pencaharian dari sektor pertanian atau perkebunan, baik sebagai petani pemilik tanah sawah (336 orang), pemilik tanah tegalan atau ladang (39 orang), penyewa atau penggarap (236 orang), buruh tani dan (2.376 orang). Mata pencaharian lainnya adalah nelayan (76 orang), pedagang (13 orang), pegawai negeri (6 orang), dan pensiunan (2 orang).

Di bidang usaha pertanian tanaman pangan, pemilik tanah sawah yang pada umumnya hanya memiliki luas pemilikan 0.5 ha ke bawah sebanyak 106 orang, sebanyak 50 orang memiliki tanah sawah seluas 0,6 - 1 ha, sedangkan sisanya di atas 1 ha sebanyak 41 orang. Hasil padi setiap tahun rata-rata 4 ton per hektar.

Potensi peternakan tercatat sebanyak 28.500 ekor itik yang dimiliki oleh 30 KK, ayam kampung sebanyak 3.505 ekor yang dimiliki oleh 200 KK, kambing sebanyak 176 ekor yang dimiliki oleh 30 orang peternak, dan kerbau sebanyak 20 ekor yang dimiliki oleh 2 orang peternak. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 247 KK pemilik, dan buruh peternakan sebanyak 30 orang. Potensi ternak itik ini mampu menambah penghasilan penduduk karena pasarnya memungkinkan sehubungan dengan citra Kabupaten Brebes yang terkenal sebagai daerah pengolah dan penghasil telur asin.

Namun demikian, mekanisme pemasaran hasil usaha masih menggunakan sistem *tengkulak* atau *pengijon*. Itulah sebabnya kondisi kehidupan peternak bebek pada umumnya (sekitar 80%) terlilit oleh utang kepada para *tengkulak* (istilah mereka adalah "bos").

Usaha di bidang perikanan, tepatnya sejak 1990-an telah berkembang pesat, terutama usaha pertambakan udang. Sebanyak 134 rumah tangga membuka usaha tambak udang dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang dengan hasil sekitar 1 ton per tahun. Usaha ini juga belum tersentuh oleh sistem permodalan resmi melalui program kredit lunak atau melalui KUD. Sebagian besar dari mereka justru mengakses modal dari para *tengkulak*.

Selain jenis-jenis usaha yang disebutkan di atas, dari tahun ke tahun, penduduk yang pindah ke kota (urbanisasi) secara musiman semakin bertambah. Sepanjang 1999, tercatat sebanyak 75 orang penduduk berusia antara 18 s.d. 40 tahun yang bekerja di berbagai kota besar di Jawa (Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, dll.) dan luar Jawa, seperti Lampung. Kencenderungan ini telah mendorong dan menjadi "daya tarik" tersendiri bagi anak-anak, terutama mereka yang putus sekolah untuk ikut serta mengikuti kegiatan musiman tersebut. Padahal, di tempat perantauan itu sebagian besar menjadi kuli pelabuhan, kuli pasar, dan kegiatan kasar lainnya seperti aktivitas jalanan (pengamen, pemulung, semir sepatu, dll.).

Prasarana dan Sarana Rumah Tangga

Kondisi perumahan sebanyak 380 rumah (60%) masih tidak permanen (tipe C) yang terbuat dari bilik kayu dan sebagian besar di antaranya belum diplester/lantai tanah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk yang masih sangat kurang. Jumlah penduduk sebanyak 490 KK (50%) ini masih termasuk kategori prasejahtera atau keluarga miskin. Untuk tipe A, sebanyak 125 rumah dan tipe B sebanyak 150 rumah. Tingkat kemiskinan penduduk semakin nyata ketika penelitian diarahkan ke wilayah utara atau semakin jauh dari jalan raya Kabupaten Brebes. Sungguhpun demikian, Desa Kecipir ini tidak termasuk kategori desa IDT. Ini bukan karena tingkat kesejahteraan penduduk yang

sudah memadai, tetapi lebih disebabkan oleh indikator fasilitas desa yang terdapat di pinggir jalan raya atau di sebelah selatan seperti puskesmas, restoran, pertokoan, dan sarana angkutan kota yang sudah tersedia. Jika memasuki wilayah Desa Kecipir, keterbatasan berbagai sarana dan prasarana pedesaan akan tampak jelas. Sarana dan prasarana yang tersedia di desa ini, antara lain, sebagai berikut.

- a. Air bersih bersumber dari air tanah dengan jumlah KK yang menggunakan pompa air sebanyak 12 buah, dan 6 buah sumur gali yang dibangun oleh YUM. Sumber air untuk pertanian menggunakan sistem pengairan irigasi, sekaligus sebagai sarana MCK masyarakat. Dari 655 rumah, jumlah rumah yang mempunyai WC sendiri hanya 26 rumah dan jumlah rumah memiliki jamban hanya 5 rumah, selebihnya menggunakan sarana umum MCK di sekitar pompa air dan Sungai Tanjung. MCK umum yang ada sangat terbatas sehingga satu MCK digunakan untuk sekitar 20 keluarga.
- b. Jalan utama desa baru tingkat pengerasan, atau belum diaspal. Pengerasan jalan sepanjang 3,5 km dari Dusun Blangko sampai Bancang dibangun melalui program P3DT senilai Rp149.000.000,00. Sayangnya, untuk jalan menuju perumahan di setiap dusun umumnya masih jalan tanah, dan hanya sebagian kecil yang sudah dikeraskan. Sungguhpun demikian, kendaraan roda empat dapat menjangkau dusun yang terjauh, yaitu Blangko.
- c. Sarana pemenuhan kebutuhan energi ternyata belum ada listrik sehingga digunakan minyak tanah dan mesin disel untuk penerangan, sedangkan untuk masak digunakan kayu bakar dan minyak tanah. Jumlah rumah tangga yang menggunakan lampu minyak tanah sebanyak 956 KK, sedangkan yang menggunakan kayu untuk bahan bakar sebanyak 900 KK.
- d. Sarana transportasi yang digunakan sebagian besar penduduk adalah ojeg motor, termasuk untuk mengangkut hasil panen sawah dan kebun.

Pranata Sosial

Fenomena lain yang termasuk menonjol adalah keswadayaan masyarakat pada bidang keagamaan. Desa ini berhasil membangun sarana ibadah berupa musala sebanyak lima bangunan (setiap dusun terdapat 1 musala), dan 3 mesjid di Dusun Bancang, Kecipir Tengah, dan Blangko untuk masyarakat yang seluruhnya adalah pemeluk agama Islam. Seluruh musala dan mesjid dibangun atas hasil swadaya masyarakat dengan nilai total Rp453.000.000,00 selama 3 tahun sejak 1997 atau rata-rata Rp100.000.000,00 s.d. Rp120.000.000,00 setiap mesjid. Sampai Maret 2000, kondisi mesjid telah selesai sekitar 80%. Demikian juga untuk pembangunan musala dibangun dengan swadaya masyarakat senilai rata-rata Rp 5.000. 000,00 setiap musala. Keadaan ini agak berbeda dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak PBB yang hanya mencapai 65% setiap tahunnya.

Kegiatan keagamaan merupakan pranata sosial yang paling menonjol di Desa Kecipir. Masing-masing dusun mempunyai kegiatan pengajian ibu-ibu, remaja, dan pengajian umum lainnya. Melalui kegiatan ini, tokoh-tokoh agama menyampaikan berbagai informasi tentang keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pengaruh tokoh agama cenderung lebih kuat daripada tokoh formal seperti aparat desa dan petugas kecamatan.

Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya yang sangat menonjol adalah *Jamiah* dan *Arisan Perayaan*. Kegiatan *jamiah* telah berjalan sejak sekitar 15 tahun lalu dan sampai sekarang masih terus berjalan secara teratur. Bentuk *jamiah* antardusun agak berbeda-beda. Dusun Kecipir Tengah dan Blangko lebih mengutamakan bentuk gotong-royong dalam kegiatan perayaan keluarga (terutama untuk hajatan pernikahan, sunatan, dan aqiqah) atau semacam arisan dalam biaya perayaan. Bentuk *jamiah* di Dusun Bancang lain lagi karena lebih mengutamakan sebagai media silaturahmi. *Jamiah* ini dilaksanakan setiap malam Jumat di rumah salah seorang anggotanya. Dalam silaturahmi tersebut, setiap anggota menyumbang sejumlah uang secara sukarela sesuai dengan kemampuannya sehingga keluarga yang dijadikan tempat pertemuan memperoleh sejumlah dana dari sumbangan tersebut.

Fenomena yang sangat menarik adalah besar sumbangan setiap anggota tercatat oleh salah seorang sekretaris yang dipercaya oleh para anggota. Catatan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besarnya sumbangan jika yang bersangkutan berkunjung kepada anggota lainnya yang menjadi tuan rumah dalam *jamiahan* berikutnya. Cara yang sama diterapkan untuk arisan biaya hajatan atau perayaan di Dusun Blangko dan Kecipir Tengah.

Program Pembangunan Masuk Desa

Program-program pembangunan masuk desa yang difasilitasi oleh pemerintah berjalan sedemikian rupa kendatipun memiliki keterbatasan jangkauan pelayanan. Misalnya, program Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan sebanyak lima anak, Posyandu sebanyak empat buah yang dilaksanakan di setiap dusun, program keluarga berencana masih belum berkembang secara optimal. Salah satu buktinya adalah adanya data yang menunjukkan bahwa hanya 25% PUS yang menjadi akseptor KB, sementara kegiatan musyawarah desa dilaksanakan pada saat bulan bakti LKMD atau saat pengusulan proyek pembangunan desa. Juga, program yang masuk ke Desa Kecipir tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti program Keluarga Binaan Sosial yang berbentuk bantuan usaha ekonomi produktif berupa sapi sebanyak 25 ekor. Bantuan ini, akhirnya tidak berkembang atau dijual kembali oleh kelompok penerima bantuan. Program lain yang diterima masyarakat, yaitu PMDK sebanyak 4 KK dan Kukesra sebanyak 12 KK.

Kondisi Umum Pelaksanaan Proyek

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah informan dapat diketahui tentang gambaran umum pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat di Desa Kecipir. Nama proyek pengembangan masyarakat itu adalah Karya Usaha Utama (KUU), yang berarti "berkarya dan berusaha untuk menuju yang utama" atau "komitmen pada usaha mulia". Proyek ini dilaksanakan melalui program kemitraan dengan Susila Dharma Indonesia dan Susila Dharma Jerman.

Pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat di Desa Kecipir secara efektif dimulai sejak 1993. Program ini merupakan program replikasi atau pengembangan lanjutan dari Desa Grinting dan Desa Sengon yang lebih dulu menjadi desa binaan YUM. Latar belakang proyek pengembangan masyarakat di desa Kecipir sebagai berikut.

- a. Sebagian besar penduduk termasuk kategori miskin dan berada dalam taraf kehidupan *subsistence level* yang mengalami kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- b. Kebanyakan keluarga yang memperoleh penghasilan dari buruh tani tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat SLTP. Banyak anak-anak yang tidak tamat SD serta tidak mampu melanjutkan ke SLTP dan SMU karena sudah dilibatkan dalam usaha ekonomi produktif oleh orang tuanya, terutama pada musim tanam dan panen.
- c. Adanya arus anak-anak dan remaja dari Desa Kecipir ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, dan Semarang yang menjadi anak-anak jalanan.
- d. Kondisi perumahan, sarana rumah tangga, dan sanitasi lingkungan yang tidak memperhatikan syarat kesehatan, kelayakan fisik, dan sosial. Sebelum masuk proyek pengembangan ini data yang diketahui menunjukkan bahwa hanya ada empat sumber air bersih yang layak minum. Untuk minum, mandi, mencuci, dan buang air besar sebagian besar masyarakat menggunakan air sungai. Rumah tangga yang memiliki MCK berjumlah tiga keluarga dan kondisi perumahan sebagian besar masih berlantai tanah dan terbuat dari bilik bambu yang kurang memperhatikan aspek kesehatan atau sirkulasi udara.
- e. Adanya usulan dari Muspika Losari agar Desa Kecipir dijadikan desa binaan YUM karena pertimbangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Losari.

Berdasarkan kondisi awal tersebut, tujuan umum proyek pengembangan adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial kemanusiaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuan proyek ini belum dirinci sampai pada tingkat perumusan tujuan yang objektif. Perumusan objektif tersebut memuat kriteria spesifik sasaran, ukuran keberhasilannya jelas terukur dan berdasarkan penggunaan indikator sosial, realistik, dan ada batas waktu pencapaian tujuan (*specific, measurable, appropri-ateness, realistic, dan time table*). Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek sangat sulit diketahui tanpa penggunaan rumusan yang jelas tentang tujuan dan kriteria keberhasilannya.

Persepsi penanggung jawab proyek di Desa Kecipir tentang “pengembangan masyarakat” adalah bahwa proyek merupakan kegiatan bantuan sosial kemanusiaan dari YUM dalam bentuk paket-paket kegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang diberikan kepada individu (anak-anak, remaja, ibu-ibu), kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan. Mengingat kegiatan sosial kemanusiaan di Desa Kecipir merupakan kegiatan pengembangan dari Desa Grinting, untuk mengawali kegiatan ini cukup dengan melakukan mobilisasi pihak-pihak kecamatan, aparat desa, dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh. Adapun identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat digali dari data monografi desa dan informasi terbatas dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dalam hal perencanaan program, belum ada upaya nyata agar perencanaan itu berawal dari bawah ke atas (*bottom-up planning*), terutama dalam perencanaan jangka menengah (setiap empat tahun sekali). Walaupun mekanisme perencanaan ini ditinjau ulang setiap tahun dan meninjau kembali kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Namun, keterlibatan masyarakat sangat terbatas atau hanya segelintir yang terlibat. Untuk pelaksanaan kegiatannya – karena sudah merupakan satu paket kegiatan – tidak terlalu dipentingkan bentuk swadaya masyarakat dalam hal pendanaan, tenaga kerja, dan partisipasi sumbang pemikiran terhadap setiap tahap pelaksanaan proyek sebagaimana proyek pembangunan pompa air dan sumur gali.

Sementara itu, rincian sasaran proyek pengembangan masyarakat diuraikan sebagai berikut

- a. anak-anak yang rawan putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin,

- b. keluarga miskin yang masih memiliki potensi dan kemauan untuk meningkatkan keterampilan usaha ekonomi produktif,
- c. keluarga-keluarga yang dalam radius tertentu tidak memiliki sarana air bersih,
- d. kader-kader Posyandu, bidan desa, pekerja sosial masyarakat, dan karang taruna, dan
- e. masyarakat umum.

Pengelola proyek di Desa Kecipir berada di bawah tanggung jawab seorang pengurus YUM. Dalam pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab proyek bekerja sama dengan Petugas Sosial Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Ketua LKMD, dan tokoh agama (terutama di Dusun Blangko). Bentuk kerja samanya adalah kegiatan koordinasi dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan. Organisasi proyek belum sedemikian rupa dirumuskan sampai ke tingkat desa bahkan dusun karena masih terbatas pada organisasi yang terstruktur di tingkat yasan.

Sistem administrasi keuangan proyek dikelola terpusat di YUM Brebes sesuai dengan petunjuk operasional proyek yang telah disepakati oleh pihak lembaga donor. Seluruh item anggaran dan unit biaya telah ditentukan oleh YUM Pusat sehingga – baik YUM Brebes maupun koordinator desa – tidak memiliki kewenangan lebih jauh tentang pengelolaan anggaran.

Kendala yang dihadapi muncul ketika adanya kebutuhan masyarakat yang berbeda dengan plafon anggaran yang telah tersedia. Misalnya, jumlah yang dilatih untuk latihan elektro yang telah ditentukan adalah jatah untuk sepuluh orang, ternyata peminatnya mencapai enam belas orang. Dalam hal ini, koordinator proyek mengalami kesulitan untuk memodifikasi anggaran yang ada.

Hambatan utama yang dialami YUM dalam melaksanakan proyek pengembangan masyarakat adalah terjadinya konflik yang berkepanjangan sejak 1993 (awal kegiatan YUM di Desa Kecipir) dengan salah seorang tokoh agama yang sangat berpengaruh di desa. Konflik tersebut bermula dari kurangnya penerimaan tokoh agama tersebut terhadap kehadiran YUM dan bergulirnya isu SARA seolah-olah YUM akan membawa misi agama tertentu yang berbeda dengan agama Islam yang dianut seluruh masyarakat. Padahal, pada

kenyataannya tidak ada misi tertentu selain kepentingan kemajuan masyarakat. Berbagai faktor pendorong terjadinya konflik tersebut, baik dari pihak YUM maupun dari masyarakat itu sendiri, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pertemuan awal yang sesungguhnya melibatkan berbagai komponen masyarakat, tidak dihadiri oleh salah seorang tokoh agama yang sangat berpengaruh sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak YUM dan tokoh agama tersebut.
- b. Adanya kekhawatiran dari tokoh agama tersebut tentang kehilangan pengaruh yang selama ini mereka peroleh.
- c. Adanya keinginan tokoh agama tersebut untuk mengelola sepenuhnya proyek YUM.
- d. Masyarakat yang kurang informasi tentang program YUM dan sebagian besar mengalami ketakutan untuk mendekati YUM karena takut terhadap tokoh agama tersebut.
- e. Paternalistik kekuasaan di desa yang berakibat masyarakat tidak berdaya melawan pengaruh yang disebarluaskan.
- f. Acuan keberhasilan pendekatan pengembangan masyarakat di Desa Grinting sebagai model yang direplikasi di Desa Kecipir, membuat YUM kurang sensitif terhadap kondisi sistem sosial-budaya lokal, termasuk pranata atau jaringan sosial yang berlaku di Desa Kecipir, yang pada intinya tidak dapat disamakan dengan Desa Grinting. Setiap desa mempunyai karakteristik sosial-budaya yang berbeda-beda satu sama lain dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.

Puncak konflik tersebut terjadi saat Kantor YUM di Desa Kecipir diserang dan dirusak oleh sekelompok masyarakat untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kehadiran YUM di Desa Kecipir. Kantor YUM sendiri diban- gunkan karena sudah terlanjur dianggarkan di dalam program tersebut sejak 1993. Akibat dari kejadian itu, hubungan sosial antara YUM dan masyarakat menjadi tidak harmonis lagi, terutama di Dusun Kecipir Tengah dan Dusun Bancang. Akibatnya, seluruh pelaksanaan program menjadi tidak sesuai lagi dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Bahkan, pihak YUM menjadi tidak leluasa untuk mendekati masyarakat, dan

seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan diwakilkan kepada anggota masyarakat yang mau menerima YUM (misalnya melalui PSK, PSM, Guru, Kepala Desa, Ketua LKMD).

Pihak orang tua dan anak yang menerima bantuan beasiswa dari YUM, khususnya di Dusun Bancang seringkali mendapat tekanan dari tokoh masyarakat. Akhirnya, anak-anak penerima beasiswa tidak berminat lagi untuk meneruskan sekolah karena ketakutan. Bentuk intimidasi yang digunakan, antara lain, mempengaruhi umat bahwa "jika di antara anggota keluarga yang ikut program YUM meninggal, tidak boleh dishalatkan". Intimidasi ini diikuti dengan penyebaran isu-isu kristenisasi.

Berbagai upaya untuk memecahkan masalah ini telah dilakukan, antara lain, melalui musyawarah desa yang menghadirkan pihak Muspida (Sospol, Kanwil Depag, Bappeda, Bupati), Muspika, dan Babinsa. Namun, konflik tersebut tetap tidak terselesaikan dengan baik. Dalam kurun waktu 1994 sampai 1997, diperoleh informasi bahwa proyek pengembangan masyarakat yang dikoordinasi oleh YUM tetap dapat dilaksanakan, tetapi sifatnya lebih terbatas dan lebih banyak di Dusun Blangko. Kondisi ini jelas-jelas merugikan masyarakat sendiri, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan sosial, seperti beasiswa dan pelatihan keterampilan di Dusun Bancang dan Kecipir Tengah.

Periode 1997 hingga sekarang, hubungan antara YUM dan masyarakat semakin membaik dan sebagian masyarakat yang tinggal di Dusun Bancang sudah menunjukkan respons yang lebih baik, lebih terbuka, dan mulai menjalin komunikasi-dialogis dengan pengurus YUM dalam berbagai kegiatan. Respons yang semakin membaik tersebut berkaitan erat dengan hasil nyata dari proyek YUM, utamanya program pendidikan masyarakat desa yang menampakkan kemajuan, usaha kelompok ekonomi produktif yang semakin meningkat, serta kegiatan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga, masyarakat mulai menyadari bahwa isu SARA atau misi agama tertentu di luar Islam tidak terbukti sama sekali sehingga agitasi dan pengaruh tokoh agama tersebut sudah mulai memudar, bahkan tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat. Hubungan yang dapat dikatakan masih tertutup terjadi di Desa Kecipir Tengah, terutama dengan tokoh

agama tersebut yang sering datang ke Desa Kecipir (yang bersangkutan sebenarnya tidak menetap di dusun tersebut, tetapi orang tuanya memang berasal dari dusun tersebut).

Kondisi yang semakin membaik ini membutuhkan introspeksi yang sangat mendalam dari kedua belah pihak. Kelanjutan proyek pengembangan masyarakat yang merupakan kerja sama dengan YUM bergantung pada keterbukaan kedua belah pihak untuk melaksanakan komitmen bersama dalam membangun masyarakat. Memperhatikan kondisi objektif di lapangan, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kecipir sesungguhnya masih membutuhkan perhatian semua pihak, baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat itu sendiri untuk tetap teguh membangun masyarakat secara bersama-sama.

Evaluasi Kegiatan

Program Pendidikan: Bantuan Beasiswa SD, SLTP dan SMU

Untuk mengatasi permasalahan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah di Desa Kecipir, pihak YUM memberikan paket bantuan berupa beasiswa kepada anak-anak yang sangat rawan putus sekolah atau mereka yang berasal dari keluarga sangat miskin. Program beasiswa ini sudah merupakan paket dari YUM pusat yang pelaksanaannya dijabarkan sesuai dengan kondisi desa masing-masing oleh setiap koordinator desa.

Penilaian situasi awal di Desa Kecipir menunjukkan kualitas SDM yang rendah, antara lain, berdasarkan data-data berikut.

- a. Banyak anak yang putus sekolah dan angka partisipasi sekolah yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTP dan SMU) sangat rendah. Data remaja putus sekolah sebanyak 285 orang, putus SLTP 17 orang, putus SMU 8 orang, dan putus kuliah 3 orang.
- b. Banyak anak yang pergi ke Jakarta, Bandung, dan Semarang hanya sekedar menjadi anak jalanan (pedagang asongan, gelandangan, pengemis, tukang cuci mobil, tukang semir sepatu, tukang koran, buruh pasar, kuli bangunan, dan ojek

sepeda). Adanya arus anak-anak dan remaja yang melakukan urbanisasi dari Desa Kecipir ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, dan Lampung menjadi kuli atau buruh pelabuhan. Bahkan, ada pula yang menjadi anak-anak jalanan, pengemis dan tunasusila.

Informan Lebe:

"... anak-anak (dari) sini itu banyak yang pergi ke Jakarta, Lampung, yah ... di sana (mereka) jadi kuli di pelabuhan dan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kalibaru, ya ... kerjanya ngantar-ngatar barang milik orang asing, misalnya, itu dikasih Rp5.000,00; yah lumayanlah ..."

Informan PSK:

"...anak-anak (dari) sini banyak yang diajak orang tuanya pergi ke Jakarta. Padahal, anak itu masih sekolah, Pak. Memang, orang tua di sini itu susah kalau dinasihati biar anaknya sekolah gitu, ..."

- c. Banyak anak yang terlibat membantu pekerjaan orang tuanya (buruh pembuatan batu-bata, buruh tani, mencari ikan ke laut, buruh nelayan, buruh pasar, dll). Kebanyakan keluarga yang memperoleh penghasilan dari buruh tani tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat SLTP. Bahkan, banyak anak yang tidak tamat SD dan tidak dapat melanjutkan ke SLTP dan SMU karena sudah dilibatkan dalam usaha ekonomi produktif oleh orang tuanya, terutama pada musim tanam dan panen, seperti yang disampaikan informan Kepala Sekolah berikut.

"... di sini, dulu itu anak-anak banyak yang tidak sekolah, ya, karena orang tuanya [yang] memintanya untuk membantu ibunya. Ada yang disuruh momong adiknya, ada juga yang disuruh membantu orang tuanya di sawah..."

Hal yang sama disampaikan juga oleh informan PSM:

"... Kalau musim panen udang, anak-anak di sekolah sini banyak yang tidak masuk karena ikut mencari sisa-sisa udang"

yang habis dipanen (nggoler)... ya lumayan dapatnya satu [ekor] udang windu itu harganya bisa Rp 5.000,00; ... kalau ditanya "Kenapa kemarin tidak masuk?" Mereka menjawabnya dengan gampang saja: "Disuruh Mak untuk nggoler ..."

- d. Banyak warga penduduk yang kawin pada usia muda (usia sekolah), terutama anak-anak perempuan yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Rata-rata usia kawin pertama adalah lima belas tahun untuk perempuan; dan tujuh belas tahun untuk laki-laki.
- e. Program-program yang dicanangkan pemerintah di bidang pendidikan masih terbatas pada pembangunan fisik (pembangunan gedung SD) dan pengadaan sarana-prasarana sekolah (guru dan peralatan sekolah), dan belum dapat— untuk tidak mengatakan tidak ada— memberikan beasiswa atau mengembangk-an program sistem jaminan sosial (*social security for education*) pada bidang pendidikan. Sunguhpun sudah ada program Wajib Belajar sembilan tahun dan bebas SPP, namun biaya pendidikan masih harus disediakan oleh orang tua murid untuk BP3, biaya ujian, seragam, buku-buku dan peralatan sekolah lainnya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya faktor kemiskinan yang melilit kehidupan orang tuanya, yang sebagian besar adalah menjadi buruh tani. Akibatnya, kondisi kemiskinan orang tua dan kualitas SDM anggota keluarganya sangat rendah. Faktor-faktor inilah yang akan menghambat kemajuan masyarakat Desa Kecipir, baik dalam hal percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, maupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam program pendidikan ini, proses penentuan seleksi sasaran terhadap pihak yang akan diberi bantuan dilakukan atas kerja sama antara YUM dan sekolah. Secara kebetulan, salah seorang guru di sekolah tersebut adalah relawan sosial atau pekerja sosial masyarakat (PSM). Selain itu, YUM juga bekerja sama dengan aparat desa dan petugas sosial kecamatan (PSK) dalam pengorganisasian kegiatan di lapangan. Dukungan dari sekolah untuk kelancaran pelaksanaan proyek ini sangat banyak membantu YUM hingga

berhasil merealisasikan proyek ini. Tentang hal ini, koordinator desa menegaskan bahwa

"... dalam program beasiswa ini pihak YUM melibatkan guru untuk mendata siapa saja yang akan mendapat bantuan. Penyaluran bantuannya ada yang dilakukan lewat PSM, terutama untuk anak-anak SD (di Bancang dan Kecipir Tengah). Kemudian, untuk anak-anak SLTP Islam, pembayarannya dilakukan lewat PSK, sedangkan anak-anak di SLTP Negeri Losari saya sendiri yang melakukannya ..."

Informan PSM:

"... koordinator desa itu menghubungi saya kalau-kalau ada yang berminat mendapatkan bantuan beasiswa. Lalu, ia meminta saya untuk mendata anak-anak yang akan dibantu..."

Partisipasi masyarakat yang terlihat dalam tahap seleksi sasaran ini terbatas pada masukan yang diberikan oleh PSM, PSK dan aparat. Masukan ini digunakan untuk menentukan anak yang layak dibantu dan pengorganisasian penyaluran dana bantuan.

Informan PSM:

"... saya juga ngasih masukan kepada Pak Safei (koordinator desa) tentang anak-anak mana yang akan dibantu. Setelah saya mendata jumlah anak-anak yang ada di sini, data itu kemudian saya kasih ke Pak Safei ..."

Dalam proses pemberian bantuan, penyaluran dana yang dilakukan pihak YUM memanfaatkan jalur lain, yakni orang tua murid yang diberikan secara langsung (terutama untuk Dukuh Blangko). Juga, lewat jalur PSM, terutama untuk Dukuh Bancang dan Kecipir Tengah, dan lewat jalur PSK, terutama untuk anak-anak yang sekolah di SLTP Islam. Cara ini ditempuh untuk menghindari konflik langsung, terutama, dengan tokoh agama yang tidak menyukai proram yang dilakukan YUM.

Bantuan beasiswa bagi anak-anak SD berupa peralatan sekolah (buku tulis 20 buku per tahun; buku gambar 2 buah per tahun; pensil 2 buah per tahun; pulpen 2 buah per tahun, penggaris, penghapus, pinsil berwarna, dan jangka); pakaian (2 stel seragam,

kaos olah-raga), sepatu dan uang untuk pembayaran BP3 sebesar Rp2000,00 per bulan, serta biaya ujian (biaya THB sebesar Rp3.500,00, biaya ujian akhir sebesar Rp25.000,00). Selain itu, juga diberikan biaya tambahan, yakni biaya piknik (karyawisata) antara Rp10.000,00 s.d. Rp15.000,00 per anak, dan biaya kenangan-kenangan dari anak-anak ke sekolah saat mereka sudah lulus sebesar Rp25.000,00 per anak. Sementara itu, bantuan untuk anak-anak siswa SLTP/SMK, antara lain, berupa uang BP3, uang praktek (terutama untuk yang SMK ditanggung 50% dari biaya yang harus dikeluarkan), dan uang buku. Untuk uang BP3 besarnya bantuan disesuaikan dengan jenis sekolahnya (Rp8.000,00 untuk SLTP Islam) dan Rp7.500,00 untuk SMU Negeri). Adapun untuk anak-anak siswa SMU ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp2.000,00 per bulan. Selain itu, jika ada kegiatan ekstrakurikuler, mereka juga mendapat biaya tambahan sebesar Rp15.000,00 per bulan, dan uang bantuan kerja praktek sebesar 50% dari total biaya yang diperlukan.

Bentuk partisipasi masyarakat yang tampak jelas hanya pada orang tua murid yang dibantu, tidak pada masyarakat secara umum. Bentuk partisipasi tersebut, antara lain, orang tua (yang mampu) berkenan membayar biaya yang tidak ditanggung oleh YUM, misalnya biaya praktek untuk anak yang sekolah di SMK sebesar 50% dari total biaya yang diperlukan.

Keberhasilan program *sponsorship*, menurut penanggung jawab di Desa Kecipir, antara lain, adanya data yang sangat menggembirakan, yakni bahwa sekarang sudah banyak anak yang mau bersekolah. Bahkan, mereka menampilkan antusiasme yang sangat baik. Sejak 1993, melalui proyek ini anak-anak sekolah telah diberi beasiswa sebanyak 178 murid SD (52% dari total anak-anak, sekitar 325 murid) yang membutuhkan beasiswa. Jumlah murid SD kelas I s.d. VI sebanyak 95 orang. Adapun untuk murid SLTP, mereka yang dapat dibantu sebanyak 49 orang, dan SMU sebanyak 7 orang. Sementara untuk kegiatan beasiswa 1999 dapat dilaporkan seperti tampak pada tabel 11.1.

Selain bantuan yang diberikan secara langsung kepada anak-anak, baik melalui sekolah maupun orang tuanya, YUM juga membantu pengadaan sarana buku-buku sekolah dan bacaan bagi anak-anak

yang disalurkan melalui perpustakaan SD Negeri II Dusun Bancang. Juga, membuat perpustakaan di salah satu rumah penduduk yang berdekatan dengan lokasi SD di Dusun Blangko. Program beasiswa ini merupakan salah satu paket program dari YUM sendiri sehingga tidak tampak partisipasi masyarakat secara langsung untuk mengajukan beberapa alternatif dari permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat.

Kendati demikian, ada banyak manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, misalnya, dari segi ekonomi berupa berkurangnya beban biaya pendidikan bagi keluarga. Kehidupan ekonomi mereka yang serba pas-pasan, bahkan *lebih besar pasak daripada tiang*, banyak keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya. Faktor ekonomi ini menguras perhatian mereka untuk mencukupi kebutuhan pangan semata-mata. Kemudian dari segi sosial-budaya, program ini telah menumbuhkembangkan kesadaran tentang makna penting pendidikan bagi masa depan anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak adalah investasi masa depan bagi keluarganya. Dalam hal ini, kalimat bijak mengatakan bahwa "hendaklah seseorang itu takut meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah ilmu dan lemah akhlak".

Tabel 11.1 Jumlah murid SD, SLTP, dan SMU yang memperoleh beasiswa dari YUM pada 1999

Sekolah	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
SD II	V	2	7	9	Lokasi di Dusun Bancang, Desa Kecipir Di bawah bimbingan sosial PSM yang juga guru SD tersebut
Jumlah		8	11	19	
SLTP I	I	4	5	8	Lokasi di luar Desa Kecipir
	II	4	4	8	
	III	6	2	8	
SLTP Islam	I	4	4	8	Lokasi di luar Desa Kecipir

Sekolah	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
	II	4	2	6	3 anak DO kelas I bulan Januari 1999
	III	1	1	2	1 anak DO kelas II bulan Agustus 1999
Jumlah		23	18	41	
SMTN Tegal	I	2	-	2	Lokasi di luar Desa Kecipir
	II	1	-	1	
SLTP Cirebon	II	1	-	1	Lokasi di Luar Desa Kecipir
Jumlah		4	-	4	
Total		35	29	64	

Sumber: Laporan tahunan proyek YUM di Desa Kecipir, 1999

Ada banyak dampak positif dari proyek yang dilaksanakan oleh YUM ini, antara lain sebagai berikut.

- a) Adanya peningkatan partisipasi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan dari SD ke SLTP dan dari SLTP ke SMU, walaupun mereka acapkali dihadapkan pada keterbatasan pilihan peluang kerja setelah menyelesaikan sekolah.
- b) Berhasil mengurangi angka anak-anak usia yang putus sekolah atau *drop-out* yang secara kuantitatif, angka partisipasi sekolah ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat terbatas, namun memberikan harapan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM masyarakat Desa Kecipir;
- c) Semakin berkurangnya penduduk yang kawin berusia muda. Di Desa Kecipir dan desa-desa lainnya yang sebagian besar penduduknya berpikiran tradisional, perkawinan berusia muda adalah sesuatu yang dianggap lumrah. Banyak anak yang di bawah 15 tahun yang sudah kawin, bahkan di antaranya ada yang masih berusia 12 tahun.

Selain dampak positif, proyek ini juga menimbulkan dampak negatif yang sesungguhnya harus diantisipasi sejak awal. Salah

satu dampak negatif proyek ini adalah munculnya ketergantungan masyarakat yang sedemikian kuat terhadap YUM, terutama dalam hal pembiayaan kebutuhan sekolah. Karena itu, YUM harus mengarahkan masyarakat agar mandiri dan membangun kesadaran mereka tentang makna penting ilmu dan sekolah karena bagaimanapun, YUM tidak akan selamanya berada di Desa Kecipir. Hal yang perlu dipikirkan adalah masyarakat – sampai saat ini – belum memiliki mekanisme pengembangan jaminan sosial pada bidang pendidikan (miminal pendidikan dasar) yang berbasiskan masyarakat. Apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti, YUM tidak lagi berada di Desa Kecipir? Persoalan inilah yang harus dipikirkan. Jika masalah ini dikaitkan dengan pemerintah, ternyata pemerintah pun memiliki banyak keterbatasan. Bagaimanapun, program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui JPS pendidikan hanya dapat membantu sebanyak lima orang murid SD pada 1998. Sementara itu, sumber dana bantuan lainnya, seperti gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA), juga hanya dapat menjangkau segelintir anak-anak di Desa Kecipir (sekitar lima orang setiap tahunnya).

Tersebarinya informasi bahwa kemungkinan besar YUM tidak melanjutkan proyeknya di Desa Kecipir membuat resah masyarakat desa yang selama ini memperoleh bantuan beasiswa. Mereka tetap berharap agar kegiatan YUM untuk beasiswa ini terus dilanjutkan. Tokoh masyarakat dan aparat desa sangat khawatir jika YUM tidak melanjutkan programnya, anak-anak yang selama ini bisa melanjutkan sekolah akan berhenti di tengah jalan alias putus sekolah. Tentang hal ini, kepala Dusun Blangko menyatakan:

“... Saya berharap YUM terus melakukan proyek bantuan di Desa Kecipir ini. Bila bantuan itu dihentikan, bagaimana dengan anak-anak kami. Mereka pasti tidak akan sekolah lagi.... Biarin saja isu-isu kristenisasi tidak usah digubris ... ‘kan enggak ada buktinya. Semua masyarakat di sini merasakan manfaatnya ada YUM ... anak-anak pun bisa sekolah terus ... yang tadinya enggak mau sekolah ...”

Sementara itu, untuk Dusun Kecipir Tengah kehadiran YUM saat ini belum sepenuhnya diterima. Sebabnya, ada kekhawatiran yang berlebihan dari tokoh masyarakat bahwa masyarakat tidak tenang

dengan kehadiran YUM di lingkungannya. Karena itu, mereka menyarankan agar YUM segera menghentikan programnya di Desa Kecipir.

Program Kesehatan

a. Pemberian Makanan Tambahan melalui Posyandu

Pemberian makanan tambahan (PMT) merupakan program nasional yang diprakarsai oleh pemerintah sejak 1995. Pemerintah berharap program ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan peran aktif LSM.

Sebelum YUM masuk, Posyandu di Desa Kecipir sebenarnya sudah ada sejak dulu. Akan tetapi, Posyandu ini tidak aktif dan banyak warga yang tidak mau datang ke Posyandu. Kondisi ini diperparah oleh sikap aparat yang pasif dan tidak ada *political will* yang kuat dari atas. Juga, tidak ada inisiatif dari masyarakat untuk menghidupkan kembali kegiatan Posyandu tersebut. Tentang ini, seorang informan PSM mengatakan

".... Sebenarnya, sebelum YUM masuk ke sini Posyandu itu sudah ada. Namun, kegiatannya tidak diaktifkan, dan banyak warga yang nggak mau datang. Alasannya, anaknya tetap sehat-sehat saja ..."

Melihat kondisi Posyandu yang seperti itu, YUM mengambil inisiatif untuk menyukseskan program tersebut dengan turut menyalurkan bantuan berupa dana. Dana tersebut, selanjutnya dikelola oleh Posyandu untuk memberikan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau atau makanan pengganti lainnya guna meningkatkan gizi balita. Partisipasi masyarakat untuk mencari alternatif dalam memecahkan masalah Posyandu ini tidak tampak.

YUM memberikan bantuan paket untuk makanan tambahan kepada setiap Posyandu sebesar Rp25.000,00 setiap kegiatan. Sebelum itu, YUM pernah memberikan paket bantuan berupa

kebutuhan mentah, yaitu kacang hijau dan uang untuk membeli kelapanya. Paket bantuan itu diberikan lewat kader yang mengelola setiap Posyandu. Jumlah kader yang terlibat dalam kegiatan Posyandu sebanyak empat belas orang yang tersebar di setiap dusun. Selain itu, YUM juga memberikan pembinaan, terutama pemberian motivasi kepada para kader agar melaksanakan kegiatan di Posyandu secara sungguh-sungguh. Kesungguhan akan banyak membantu peningkatan kesehatan di desanya, terutama gizi balita. Untuk meningkatkan motivasi para kader, YUM memberikan seragam yang diberikan setiap setahun sekali. Partisipasi yang tampak dalam program ini adalah adanya tanggapan dan dukungan, khususnya dari kader-kader dan umumnya dari masyarakat yang menerima kegiatan ini setelah ada program pemberian makanan tambahan.

Kriteria keberhasilan yang digunakan oleh pengurus untuk menilai berhasil-tidaknya adalah adanya kegiatan yang dilakukan secara rutin dari setiap Posyandu dan antusiasme masyarakat untuk mendatangi Posyandu. Adanya dukungan yang sangat baik dari kader-kader Posyandu terhadap proyek ini membuat kegiatan PMT dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.

Bentuk pembinaan kader yang diprogramkan YUM adalah untuk memotivasi semangat para kader agar melaksanakan setiap kegiatan di Posyandu secara sungguh-sungguh. Sekali lagi, kesungguhan mereka adalah harga yang sangat mahal untuk dapat meningkatkan gizi balita. Berkat kesungguhan para kader untuk melakukan penyuluhan dan pemberian motivasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita, kehadiran masyarakat yang mendatangi Posyandu semakin meningkat. Citra yang meremehkan aktivitas Posyandu pun semakin memudar.

Peningkatan kehadiran masyarakat mendatangi Posyandu semakin membaik. Ini terlihat dari rata-rata keluarga yang hadir ke Posyandu sebanyak 15 s.d. 20 keluarga setiap ada kegiatan. Selain itu, hasil yang tampak lebih kelihatan adalah

banyaknya anak yang tidak kekurangan gizi lagi karena diberikan makanan tambahan bubur kacang hijau. Hasil ini dicapai karena usaha sungguh-sungguh dari para kader untuk terus melakukan penyuluhan dan pemberian motivasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Tentang ini, seorang informan kader Posyandu berujar:

“Alhamdulillah, Pak! Sekarang, sudah banyak masyarakat yang mendatangi Posyandu untuk menimbang bayinya. Kalau dulu itu, Pak, .. susah banget kalau disuruh datang...”^

Kini, kendala yang dihadapi adalah tidak adanya bidan desa. Bidan desa yang dulu praktek di desa ini, masa kontraknya sudah habis sehingga ia harus pindah ke tempat lain. Karena itu, kegiatan Posyandu saat ini hanya mengandalkan bidan Puskesmas. Dengan demikian, keaktifannya tidak seperti dulu lagi karena bergantung pada kehadiran bidan Puskesmas tersebut.

Kendala yang dihadapi pelaksanaan pemberian bantuan makanan tambahan di Dukuh Bancang dan Kecipir Tengah adalah masih adanya warga yang tidak mau menerima bantuan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau dari YUM. Untuk meng-atasi masalah itu, pihak YUM menyalurkan bantuan itu lewat kader dan dikatakan kepada mereka bahwa bantuan itu dari Puskesmas. Tentang ini, seorang informan kader Posyandu berujar:

Di sini (Dukuh Bancang), pernah mendapat bantuan: kacang hijau dari YUM lewat saya, tetapi setelah bantuan itu saya berikan kepada Posyandu, para pengurus bertanya: “Bantuan ini dari mana?” Waktu itu, saya menjawab bahwa bantuan itu dari pemerintah (Puskesmas). Setelah itu, mereka baru mau menerima. Lalu, saya tanya juga: “Untuk kelapanya, mau saya kasih uang atau saya belikan kelapa?” Mereka menjawab: “Uangnya saja ...”

Sebagian besar masyarakat mengusulkan agar secepatnya dicari bidan desa pengganti yang ditempatkan di Desa Kecipir

agar kegiatan Posyandu berjalan rutin kembali. Ketika kontrak bidan desa sudah habis, kegiatan di Posyandu pun vakum. Tentang ini, seorang informan kader Posyandu berujar:

"Mulai kontrak bidan desa yang lalu itu habis, kegiatan Posyandu kurang begitu aktif. Yah... mudah-mudahan saja cepet ada gantinya sebab kalau mengandalkan bidan Puskesmas, 'kan belum tentu teratasi ..."

b. Pembangunan Sarana Rumah Tangga

Pembangunan sarana rumah tangga yang dilaksanakan YUM di Desa Kecipir diprioritaskan pada pengadaan air bersih berupa pembuatan sumur bor (pompa air), sumur gali, dan WC umum.

Kondisi awal sumber air bagi masyarakat berasal dari Sungai Tanjung, Sungai Bancang, dan Sungai Tengguli yang melintas di perbatasan Dusun Kecipir Tengah dan Dukuh Blangko. Ketiga sungai tersebut melintasi Desa Kecipir dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kecipir untuk sarana mandi, mencuci, dan kakus (MCK), termasuk sumber air minum. Kondisi ini tidak memenuhi persyaratan kesehatan selain air Sungai Tanjung itu sanga keruh, juga terasa asin karena bermuara ke laut. Sungguhpun demikian, masyarakat Desa Kecipir kelihatannya sudah terbiasa sejak lama dan dianggap bukan permasalahan pokok bagi mereka untuk hidup di Desa Kecipir dengan segala keterbatasan sumber air bersih.

Sebelum YUM masuk ke Desa Kecipir, rumah tangga yang mempunyai MCK hanya 3 keluarga dan kondisi perumahan sebagean besar masih berlantai tanah dan terbuat dari bilik atau bambu, serta kondisi rumah masih kurang memperhatikan aspek kesehatan atau sirkulasi udara. Dalam pengembangan program sara-na rumah tangga tersebut, pihak YUM meminta masukan dari aparat dan tokoh masyarakat (LKMD) tentang lokasi manakah yang tepat untuk diberi bantuan pembangunan sarana rumah tangga, baik sumur bor, sumur pompa, dan pembangunan MCK. Jadi, identifikasi yang dilakukan pihak YUM sebatas menerima masukan dari aparat dan tokoh masyarakat (LKMD). Salah seorang informan koordinator desa

mengatakan:

“Memang, program YUM itu berupa paket. Tetapi, kami juga meminta masukan dari masyarakat untuk penyusunan rencana program tahunan. Misalnya, kami membuat program bantuan sumur pompa. Saya serahkan kepada aparat dan tokoh masyarakat di sini tentang lokasi mana yang membutuhkan bantuan itu, yang kemudian saya ajukan ke atas untuk program tahunan ...”

Partisipasi yang diberikan masyarakat hanya sebatas masukan dalam penentuan lokasi yang akan dibangun dan yang lebih memerlukan bantuan. Ini juga terbatas pada masukan dari aparat desa dan tokoh masyarakat, terutama yang ada di Dukuh Blangko. Masukan dari aparat, biasanya, digunakan untuk rencana pembangunan di wilayah Bancang.

Informan Kaur Umum:

“Waktu membangun MCK di dekat rumah saya dulu itu, yang mengusulkannya adalah saya, Pak. Saya melihat bahwa masyarakat di sekitar saya itu kalau buang air besar selalu di sungai. Jadi, ya ... kasihanlah ...”

Informan Lebe:

“Kalau masyarakat sini malah banyak yang mengusulkan untuk meminta bantuan, Pak. Masyarakat sini sudah mau menerima yayasan dan mereka mengetahui bahwa yayasan sudah banyak membantu desa ini ...”

Berdasarkan kondisi desa yang seperti itu, YUM membuat paket program MCK yang didasarkan pada kebutuhan desa tersebut. Paket bantuan ini diputuskan setelah hasil observasi pihak koordinator YUM menyimpulkan demikian. Untuk bantuan ini, YUM juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tertentu di Dukuh Blangko, sedangkan untuk Dukuh Bancang dan Kecipir Tengah dilakukan melalui aparat desa yang tinggalnya di wilayah dukuh itu. Dalam program ini, masyarakat

kat kurang dilibatkan untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang ada di wilayahnya. Penyusunan program ini hanya dilakukan oleh pihak YUM yang kemudian diputuskan berupa paket. Jadi, tidak ada alternatif lain, misalnya, penggerakan kesadaran dan keswadayaan masyarakat itu sendiri.

Pemberian bantuan MCK ini ada yang langsung diberikan kepada masyarakat yang melibatkan tokoh setempat (Dukuh

Tabel 11.2 Jadwal Kegiatan Posyandu di Desa Kecipir

Nama Posyandu	Jadwal	Tempat	Jumlah Kader
Sejahtera I	Selasa Mg. 1	Rumah Kades di Blanko	4
Sejahtera II	Selasa Mg. 2	Rumah "Tok-mas" di Kecipir	3
Sejahtera III	Selasa Mg. 3	Balai Desa	4
Sejahtera IV	Selasa Mg. 4	Rumah Sekdes di Blanko	4

Sumber: Laporan tahunan proyek YUM di Desa Kecipir, 1999

Blanko). Ada pula yang diberikan melalui aparat desa yang dipantau oleh YUM (Dukuh Bancang dan Kecipir Tengah). Seluruh dana bantuan untuk pembangunan MCK ini ditanggung oleh YUM, baik pengadaan material, upah tenaga kerja, maupun peralatan lainnya; kecuali lahan tempat yang akan dibangun merupakan swadaya masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang tampak jelas dalam program ini adalah kesanggupan warga untuk menyediakan lahan atau tempat yang akan dibangun MCK. Lahan itu masih milik warga atau milik desa. Sementara itu, bentuk partisipasi warga masyarakat berupa tenaga untuk membangun MCK tidak tampak karena upah tenaga ditanggung sepenuhnya oleh YUM. Bentuk partisipasi yang tidak tampak lainnya adalah tidak adanya upaya warga yang turut aktif dalam pemeliharaan sarana tersebut. Tentang ini, seorang informan koordinator desa menjelaskan:

"Dalam membangun pompa dan MCK ini, kami dari YUM yang membiayai semua. Masyarakat di sini tinggal mencari tempat mana yang akan dibangun. Biaya ini termasuk upah tenaga, ... memang kami sengaja hanya membuat begitu (tanpa plester). Maksudnya, agar masyarakat di sini melakukan swa-

daya sendiri. Yah .. berupa iuran atau apalah namanya untuk merawat sumur atau MCK ini. Tetapi, kenyataannya susah juga dirasakan sehingga keberadaannya sama seperti yang kami bangun dulu ...”

Adanya pompa air yang dibangun sebanyak 12 unit dan sumur gali 6 unit, serta WC 4 unit sejak 1993 banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Pompa air khususnya telah menjadi sumber air minum, sekaligus tempat mandi dan mencuci makanan atau pakaian. Sementara itu, untuk buang air besar perilaku masyarakat masih sangat sulit diubah dari kebiasaan buang air besar di Sungai Tanjung atau menggali lubang di kebun. Selain itu, jumlah sumber air yang tersedia tidak memadai karena hanya mampu menjangkau sekitar 40% penduduk Desa Kecipir. Sisanya, masih tetap menggunakan sumber air dari Sungai Tanjung atau air hujan yang ditampung. Setiap pompa air hanya mampu menjangkau sekitar 20 KK, dan kondisi satu pompa air sekarang dalam keadaan tidak berfungsi. Pompa air mengalami kerusakan yang cukup parah karena kesalahan teknis penggalian atau kurang dalam. Keadaan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara pompa tersebut.

Kriteria yang dipakai pengurus untuk mengukur keberhasilan program ini hanya sebatas pada data lapangan bahwa pembangunan sudah terlaksana dan nilai manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Juga, dapat mengurangi warga yang mengambil air atau buang air besar di sungai. Sementara itu, kendala yang dihadapi Dukuh Bancang dan Kecipir Tengah adalah adanya tokoh masyarakat yang menolak bantuan dalam bentuk apa pun dari YUM sehingga menghambat langkah YUM untuk memberikan paket program bantuan secara leluasa. Khusus untuk Dukuh Blangko, kendala yang dihadapi adalah belum adanya partisipasi aktif masyarakat yang secara sadar bertanggung jawab memelihara sarana umum tersebut.

Hal yang harus menjadi perhatian utama adalah bahwa pembangunan sarana tersebut belum diikuti secara optimal

oleh perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, mereka harus terus dibina dan diberdayakan agar menyadari makna penting kesehatan keluarga, baik dari segi air bersih, memelihara sanitasi lingkungan, maupun perilaku sehat lainnya. Sumber dana pembangunan sarana tersebut meliputi bahan bangunan, peralatan, dan tenaga sepenuhnya dibiayai oleh YUM. Sesungguhnya, ini sangat berisiko terhadap kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap sarana tersebut dan kurang terbina aspek keswadayaan masyarakat. Juga, kurang berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi pompa air yang tidak difungsikan secara optimal sebagai sarana MCK. Misalnya, adanya inisiatif masyarakat untuk menata ulang lingkungan sekitar pompa air dengan membangun fasilitas MCK. Hingga kini, bangunan pompa air tetap tidak ada perubahan yang berarti. Walaupun ada, sebatas dipleset lantainya dan ini pun hanya terdapat di dua lokasi.

Dari segi teknologi, pompa air sesungguhnya termasuk teknologi tepat guna. Namun, proses sosialisasi kepada masyarakat jangan dipandang sebagai teknologi praktis (artinya, setelah dibangun, selesailah tugasnya). Akan tetapi, pelaksana pembangunan harus juga melihat aspek budaya dan organisasi masyarakat yang menyertainya. *Pertama*, dari segi perubahan budaya, belum tampak upaya secara serius dari YUM dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat. *Kedua*, dari segi organisasi, belum ada upaya yang realistis untuk membentuk sistem pengelolaan pompa air oleh masyarakat itu sendiri.

Padahal, melalui pengorganisasian dan pemeliharaan teknologi pompa air tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, termasuk pengembangannya dalam hal membangun fasilitas MCK. Juga, berbagai upaya untuk mendorong masyarakat agar mau membangun MCK di setiap rumah masih perlu ditingkatkan karena kondisi geografis perumahan penduduk yang berdekatan dengan Sungai Tanjung. Tindakan ini sangat memungkinkan, dalam arti sumber air tanah diperkirakan cukup tersedia. Air yang dihasilkan dari pompa air tersebut kualitasnya

juga sangat baik, bening, dan tidak berbau, serta rasanya tawar.

Program Ekonomi

a. Bantuan Modal untuk Kelompok Usaha Bersama

Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat Desa Kecipir merupakan prioritas utama proyek pengembangan masyarakat. Penempatan prioritas ini berpijak pada satu alasan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar dalam taraf *subsistence level* – sekitar 40% termasuk kategori miskin dan sangat miskin (prasejahtera). Sumber penghasilan dari buruh tani dan nelayan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas.

Kondisi masyarakat yang masih berpikiran tradisional dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mengambil keuntungan dari ternak bebek. Sebagian hasilnya dinikmati oleh pemilik modal, sedangkan masyarakat hanya berposisi sebagai pelaksana. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum tidak pernah mengalami peningkatan, baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, sejak 1998 YUM telah berusaha mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui pembinaan kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama Melati dengan jumlah anggota sepuluh orang.

Dalam rangka mengidentifikasi untuk pembentukan kelompok usaha bersama ini, pihak YUM meminta masukan dari anggota yang pernah mengikuti pelatihan tatarias dan menjahit. Para peserta pelatihan – kemudian menjadi anggota kelompok itu – sangat memerlukan modal untuk mengembangkan usaha dan penerapan hasil pelatihan agar dapat menambah penghasilan keluarga. Jadi, kelompok usaha bersama ini muncul atas ide dan usulan dari masyarakat, khususnya peserta yang pernah mengikuti pelatihan yang diadakan YUM. Kelompok tersebut telah terbentuk dengan

susunan pengurus: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sedangkan anggota secara administratif bertanggung jawab langsung kepada YUM melalui koordinator desa, terutama dalam hal pelaporan perputaran uang untuk modal usaha.

Usaha Bersama Melati ini memiliki kegiatan yang masih terbatas pada organisasi simpan-pinjam. Sementara itu, jenis usaha yang dikelola masih bergantung pada usaha anggota masing-masing yang beragam. Di antara anggota ada yang menekuni usaha menjahit, dan ada pula yang menekuni tatarias. Anggota mendapat pinjaman awal (tahap I) dari YUM rata-rata sebesar Rp300.000,00. Bantuan itu ada yang digunakan untuk membeli mesin jahit, modal jahitan, dan ada yang digunakan untuk membeli peralatan tatarias. Dukungan partisipasi anggota berbentuk keaktifan dalam pembayaran setiap angsuran dan pertemuan dilakukan setiap sebulan sekali. Keberhasilan program ini adalah antusiasme anggota untuk mem-bentuk kelompok dan rutinnya anggota menyetorkan iuran.

Periode I (Januari s.d. Desember 1999), setiap anggota diwajibkan menyetorkan modal awal atau modal sendiri. Selanjutnya, dengan dukungan modal dari YUM, setiap anggota dapat meminjam dengan bunga cicilan sebesar 10 %. Untuk 1999, telah tersalurkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan modal awal dari anggota sebanyak Rp1.400.000,00. Dengan bunga sebesar 10% per bulan, diperkirakan uang yang akan terkumpul sebesar Rp6.700.000,00 pada akhir bulan ke-12. Penghasilan kelompok tersebut akan digulirkan lagi untuk anggota kelompok lainnya.

Untuk lebih meningkatkan usaha ekonomi, kelompok Usaha Bersama Melati telah memperpanjang pinjaman ke pihak YUM sebesar Rp2.000.000,00 yang telah dimulai sejak Februari. Diperkirakan, cicilan tersebut akan selesai pada Nopember 2000 (Periode II) berdasarkan peraturan yang sama. Hasil yang dirasakan anggota Usaha Bersama Melati ini, antara lain, bantuan pinjaman modal usaha tersebut dapat memperlancar usaha yang mereka kelola. Juga, bahkan yang lebih penting, dapat menambah penghasilan keluarga dan mengembangkan usaha.

Informan pengurus Usaha Bersama Melati:

"Saya dapat pinjaman dari YUM dulu itu untuk modal usaha, Pak. Saya itu kan... usaha mengkreditkan pakaian bayi. Karena saya dukun bayi, jadi sekalian membiayai orang yang saya tolong, biasanya kredit pakaian pada saya..."

Berdasarkan keberhasilan pinjaman tahap pertama, kelompok Usaha Bersama Melati mengajukan kembali pinjaman tahap kedua sebesar Rp2.000.000,00. Pinjaman ini mulai digulirkan sejak Februari 2000 dan seluruh cicilan diperkirakan akan selesai pada November 2000 berdasarkan peraturan yang sama pada tahap pertama.

Ditinjau dari sisi usaha pengembangan kelompok, usaha YUM patut dihargai karena program sejenis yang digulirkan pemerintah relatif kurang berhasil di Desa Kecipir. Program Keluarga Binaan Sosial yang dikoordinasikan Kanwil Depsos juga telah mengalami kegagalan. Saat warga diberi bantuan modal berupa dua puluh lima ekor kambing, seluruh bantuan itu akhirnya dijual oleh keluarga penerima bantuan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak penyandang dana. Ini terjadi karena belum terbentuk rasa tanggung jawab dan kurang pembinaan rasa kebersamaan dalam pengelolaan usaha ekonomi tersebut. Juga, pemberian bantuan yang tidak diawali oleh penelitian lapang yang akurat padahal bantuan itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Kendala yang dirasakan oleh pengurus dan anggota adalah keberadaan YUM yang belum dapat diterima secara luas oleh masyarakat, khususnya di Dukuh Bancang dan Kecipir Tengah. Juga, ada tekanan psikologis yang dirasakan anggota oleh Usaha Bersama Melati dari tekanan tetangga yang tidak mau menerima kehadiran YUM.

Informan anggota Usaha Bersama Melati:

"Bagaimana menjawabnya nanti Pak, kalau saya ditanya tetangga dapat mesin jahit dari mana?... sebab, kalau saya jawab dari YUM, pasti tetangga itu bilang wah ... kamu sudah masuk Kristen, gitu Pak, ..."

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menumbuh-kembangkan usaha ekonomi produktif masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal bimbingan sosial kelompok, peningkatan keterampilan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki, budaya kewira-usahaan (*entrepreneurship*) dan pemeliharaan penghasilan (penyadaran masyarakat dalam menggunakan hasil usaha untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan gizi anggota keluarga). Juga, perlu dimotivasi untuk aktif-dinamis-kreatif dalam kegiatan lain dan memberdayakan setiap pertemuan agar tidak hanya berbentuk arisan.

Informan (anggota):

"Kalau kita ngumpul-ngumpul begini itu, kalau bisa tidak hanya pengocokan arisan. Tetapi, mungkin perlu adanya pelatihan atau tambahan informasi lainnya yang dapat menambah wawasan anggota lainnya ..."

- b. Pelatihan Keterampilan Menjahit, Rias Pengantin, dan Pembuatan Krupuk

Peningkatan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh YUM, selain berupa pengembangan usaha melalui usaha simpan-pinjam Usaha Bersama Melati, juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan menjahit, tatarias pengantin, dan pembuatan krupuk. Program pelatihan ini merupakan kegiatan yang muncul dari YUM yang merupakan program paket, sedangkan keterlibatan masyarakat hanya pada penawaran jenis kegiatan pelatihan apa yang akan diikuti. Untuk peningkatan usaha ekonomi produktif di desa binaannya, YUM memberikan program paket pelatihan yang disusun berdasarkan jenis pelatihan yang diusulkan masyarakat sesuai dengan yang pernah ditawarkan sebelumnya oleh koordinator YUM di desa tersebut.

Sejak 1993, sedikitnya tujuh kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, yakni pelatihan montir sepeda motor sebanyak 2 orang peserta (dikursuskan di Tegal), menjahit dasar 26 orang, menjahit terampil 12 orang, membuat kue 12 orang, tatarias pengantin 3 orang, membuat krupuk 13 orang, dan penetasan itik alami 6 orang.

Sebelum kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan, koordinator desa menyampaikan program itu lewat aparat, tokoh masyarakat (LKMD di Dukuh Blangko), para kader, dan PSM. Berdasarkan masukan dari aparat, tokoh masyarakat, dan para kader, dapat diketahui jumlah peserta yang berminat untuk mengikuti pelatihan yang ditawarkan. Gambaran kegiatan pelatihan yang dilakukan pada 1999 sebagai berikut.

- a. Pelatihan menjahit tingkat terampil telah dilaksanakan pada 1999 selama empat bulan dari 26 April s.d. 26 Agustus 1999 yang diikuti oleh sepuluh orang penduduk yang berasal dari masyarakat Dukuh Blangko dan Bancang (dua orang). Tempat pelatihannya di SD Negeri II Kecipir, Dusun Bancang. Peserta yang mengikuti kursus menjahit sampai selesai dan dinyatakan lulus tujuh orang, dua orang di antaranya sudah dapat membuka usaha menjahit. Sebagian besar peserta sudah pernah mengikuti kursus; artinya sudah mempunyai dasar kemampuan menjahit sehingga tinggal melanjutkan. Hingga kini, peserta pelatihan yang masih menekuni dan berwira-usaha menjahit ada empat orang, sedangkan peserta lainnya tidak aktif lagi. Dalam hal ini, YUM juga menghubungkan kegiatan usaha menjahit dengan pembuatan seragam SD dalam proyek bantuan beasiswa.
- b. Kursus tatarias pengantin telah dilaksanakan pada 1999 selama tiga bulan dari 15 Februari s.d. 15 April 1999 untuk tiga orang penduduk yang dilaksanakan di SD Negeri II Kecipir Dusun Bancang. Pada awalnya, banyak warga yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut, terutama dari Dukuh Bancang. Akan tetapi, setelah tahu bahwa yang mengadakan kursus pelatihan adalah YUM, semua peserta dari Bancang membatalkan niat itu.

Informan (Nt):

"Dulu itu, Mas, sebenarnya kursus tatarias ini banyak yang ikut, terutama ibu-ibu dari Dukuh Bancang ini. Tetapi, setelah Pak Pii datang dan memperkenalkan dari YUM, eh ... besoknya sudah pada tidak datang lagi karena tahu kalau yang mengadakannya adalah YUM ..."

Dikatakan bahwa kursus tatarias pengantin hasilnya belum optimal bermanfaat bagi masyarakat. Ini disebabkan oleh belum banyaknya para lulusan peserta pelatihan yang membuka usaha tatarias pengantian. Kalaupun ada, hanya satu orang yang membuka usaha tatarias pengantin. Ini pun tidak murni hasil kursus yang dilaksanakan oleh YUM karena yang bersangkutan sebelumnya sudah berpengalaman bekerja di salon kecantikan kurang lebih 5 tahun.

Informan (In):

"Dulu itu, sebelumnya saya sudah ikut (bekerja) di salon 5 tahun, Pak. Jadi, ikut kursus itu yah... biar nambah pengalaman lagi ..."

- c. Kursus membuat krupuk udang, krupuk jengkol, dan krupuk jinten telah dilaksanakan pada 1999. Pelatihan ini berlangsung selama dua minggu yang diikuti oleh tiga belas orang penduduk. Tempat pelatihan adalah rumah Kepala Desa Dusun Blangko. Seluruh biaya pelaksanaan pelatihan ini ditanggung oleh YUM, baik peralatan, bahan, maupun instruktur.

Seperti halnya hasil kursus tatarias pengantin, hasil kursus membuat krupuk juga belum tampak manfaatnya bagi masyarakat. Ini terjadi, menurut dugaan, kurang sesuai dengan potensi desa itu sendiri, kecuali krupuk udang yang pencarian bahan bakunya masih memungkinkan karena diperoleh dari sekitar Desa Kecipir tersebut.

Kegiatan pelatihan keterampilan tersebut, sebenarnya sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kecipir. Namun demikian, jenis pelatihan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan potensi dan sumber lokal yang tersedia. Demikian juga kondisi pasar yang tersedia dan faktor dukungan aparat desa, serta aparat kecamatan dalam mengembangkan perekonomian desa secara lebih luas menjadi sesuatu

yang sangat penting dalam program pengembangan usaha ekonomi produktif. Juga, upaya untuk mendorong tumbuhnya budaya kewirausahaan menjadi relevan dihubungkan dengan kondisi potensi dan sumber daya alam yang tersedia di Desa Kecipir. Usaha di bidang pengolahan pascapanen pertanian, peternakan dan perikanan perlu dipertimbangkan sebagai area pengembangan usaha ekonomi produktif, termasuk pelatihan-pelatihan yang diberikan.

Pembahasan

Hubungan kemitraan antara Susila Dharma Indonesia (SDI) dan YUM dalam bentuk konkret hanya sebatas dalam bidang pengembangan sistem informasi, sedangkan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) manajemen dan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat belum tampak secara nyata. Ini didasarkan pada kecenderungan intervensi sosial kepada masyarakat yang masih terkesan konvensional. Maksudnya, belum ada upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat dengan teknik-teknik pekerjaan sosial (misalnya: bimbingan individu, kelompok, masyarakat), peningkatan keterampilan sosial, pengungkapan masalah, potensi dan perencanaan secara partisipatoris (*participatory assessment and planning* atau *participatory rural appraisal*), penataan manajemen dan administrasi proyek bersama masyarakat, pelatihan-pelatihan keterampilan dan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi dan sumber lokal. Kondisi ini tidak dapat disalahkan, dan sumber kelemahannya tidak dapat ditimpakan kepada pengurus YUM atau penanggung jawab proyek di Desa Kecipir.

Bagaimanapun, keadaan itu terkait erat dengan keadaan dengan sumber daya (SDM, sarana, dana) yang tersedia di YUM-KUU Brebes sangat terbatas. Maka, hasil-hasil yang dicapai sudah cukup memadai. Jika pencapaian tersebut ingin ditingkatkan lebih lanjut, peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan yang diprakarsai oleh mitra kerja YUM, dalam hal ini SDI adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dipandang masih belum optimal karena terbatas pada sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran langsung proyek tersebut, yaitu individu atau keluarga penerima pelayanan. Juga, dalam tahap peningkatan kesadaran masyarakat (konsientisasi) dan perencanaan, serta evaluasi kegiatan belum optimal dalam melibatkan tokoh formal dan informal yang ada di Desa Kecipir. Kasus yang terjadi di Dusun Kecipir Tengah disebabkan oleh faktor pendekatan awal (sekitar 1992) yang keliru, yaitu tidak dilibatkannya seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dan tidak diberi wewenang dalam mengelola proyek-proyek yang digulirkan YUM. Selain itu, karakteristik tokoh tersebut yang memang takut kehilangan pengaruhnya di masyarakat atas kehadiran YUM. Konflik internal ini sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Kecipir Tengah yang akhirnya tidak memperoleh bantuan sosial dari YUM secara optimal seperti yang diterima oleh Dusun Bancang dan Blangko. Bagaimanapun, kasus yang terjadi di Kecipir Tengah mempengaruhi keberhasilan yang dicapai di dusun terdekat, yaitu Bancang, itu-tama pada tahun-tahun awal kegiatan (periode 1993-1996).

Sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh YUM di Desa Kecipir sejak 1993 hingga 1999. Namun, dalam manajemen proyek belum didukung oleh standar manajemen proyek yang sekurang-kurangnya mengandung komponen berikut.

- a. Terdapat kerangka kerja proyek yang jelas, yaitu adanya kejelasan hubungan dan informasi antara faktor masukan, proses, dan hasil yang dicapai, serta identifikasi yang jelas dan upaya mengatasi faktor peng-hambat dan optimalisasi faktor-faktor pendukung.
- b. Terdapat indikator kinerja proyek yang tidak hanya mengukur keluaran (*output*), tetapi juga indikator manfaat (*outcomes*), dan dampaknya bagi masyarakat yang dipantau melalui mekanisme evaluasi internal oleh masyarakat dan penanggung jawab proyek.
- c. Pelibatan secara menyeluruh komponen-komponen masyarakat dalam konteks *stakeholder* di tingkat lokal (sekurang-kurangnya sampai tingkat kecamatan).
- d. Strategi bantuan sosial perlu dipertimbangkan kembali

menuju strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris (*participatory community empowerment*) untuk menghindari kemungkinan ketergantungan masyarakat secara berlebihan terhadap bantuan sosial kemanusiaan dari YUM pada masa-masa mendatang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Proyek pengembangan masyarakat yang dikelola YUM telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat, terutama Dusun Blangko dan Bancang. Dampak proyek dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk memajukan pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan peningkatan keterampilan ekonomi produktif. Sementara itu, adanya kasus konflik berkepanjangan di Dusun Kecipir Tengah antara YUM dan salah seorang tokoh masyarakat mengakibatkan proyek tidak dapat masuk ke masyarakat seperti di dusun lainnya.

Proyek pengembangan masyarakat tersebut menggunakan strategi bantuan sosial yang sebagian besar sumber-sumber sosialnya (dana, tenaga, peralatan) diperoleh dari YUM dan belum optimal menggunakan sumber-sumber lokal, misalnya melalui proses pengembangan keswadayaan masyarakat. Adanya keterbatasan jangkauan pelayanan proyek mengakibatkan hasil-hasil yang dicapai belum berpengaruh secara nyata kepada masyarakat, termasuk di Dusun Kecipir Tengah.

Dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat dan terbatasnya pelayanan sosial dari sumber lain (pemerintah), keberadaan proyek pengembangan masyarakat masih dapat dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk dilanjutkan di Desa Kecipir. Masalah yang harus menjadi perhatian utama sebelum proyek itu digulirkan adalah upaya penyelesaian konflik internal melalui pendekatan kembali kepada tokoh-tokoh agama dan pendidik. Juga, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat, optimalisasi penggunaan sumber-sumber lokal, dan pelibatan semua pihak (dusun sampai kabupaten, koordinasi program secara lebih intensif dengan pemerintah, pelibatan petugas lapangan dari sektor lain) dalam kerangka

pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris (*participatory community empowerment*).

Manajemen proyek yang sentralistik mengakibatkan pengelola proyek di Brebes tidak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang situasional. Berbagai kendala yang dihadapi sebenarnya dapat diatasi jika YUM Brebes diberi otoritas dan kewenangan yang lebih luas atau kebebasan untuk mengembangkan program di desa masing-masing (desentralistik). Bagaimanapun, koordinator lapangan menghadapi karakteristik sosial-budaya yang sangat bervariasi dan heterogen. Dalam hal ini, YUM pusat hanya bertugas membuat kerangka acuan yang bersifat umum dalam proyek pengembangan masyarakat. Untuk itu, sistem perencanaan dan anggaran tampaknya perlu dicoba kembali dengan menggunakan mekanisme *block grant*. Langkah yang dipandang paling tepat adalah menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun sebuah proposal. Proses penyusunannya tetap harus didampingi oleh koordinator desa (sejak awal masyarakat sudah dilibatkan secara penuh dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi). Uji-coba ini pernah dilakukan di Desa Grinting dan Sengon pada 1990-an.

Perlu dilakukan pergeseran strategi dari *community organization* atau *community development* menuju *participatory community empowerment*. Caranya dengan penumbuhan kesadaran masyarakat (konsientisasi) untuk menganalisis masalah yang mereka hadapi, mengidentifikasi sebab-akibat (hubungan kausalitas), menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru untuk memajukan desa dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Juga, perlu dikembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui proses dialog (persiapan kerja sama, pembentukan kemitraan, artikulasi tantangan, identifikasi sumber kekuatan, penentuan arah secara bersama-sama masyarakat); penemuan bersama (pemahaman sistem sumber, analisis kapasitas sumber, menyusun kerangka pemecahan masalah); dan pengembangan masyarakat (mengaktifkan sistem sumber, memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan dan mengintegrasikan keberhasilan yang dicapai untuk kepentingan yang lebih luas).

Pemahaman dan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis sistem sosial-budaya setempat juga harus dimiliki. Pemahaman ini juga mencakup teknik pendekatan yang tepat yang berpijak pada kegiatan agama dan pranata sosial yang sudah lama

tumbuh berkembang di masyarakat. Pranata sosial semacam inilah yang menjadi sumber kekuatan masyarakat dalam membangun secara swadaya; seperti potensi swadaya dalam membangun mesjid, mushola dan kegiatan jamiahan.

Perubahan strategi pengembangan masyarakat tersebut membutuhkan reposisi peran koordinator dan pengurus YUM. Misalnya, semula menjadi *services provider* (SP) harus direposisi menjadi peran fasilitator, mediator, dan *supporting system* bagi pelaksanaan program pembangunan desa. Untuk itu, diperlukan peningkatan keterampilan pengelola proyek dalam hal penerapan metode dan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat, seperti keahlian dalam penerapan metode dan teknik-teknik *participatory rural appraisal*, teknik-teknik dinamika kelompok, teknik pengembangan usaha kewirausahaan (*entrepreneurship*), teknik-teknik pengambilan keputusan secara demokratis, teknik-teknik pelatihan secara andragogi, teknik-teknik konsientisasi dan sensitisasi masalah sosial, dan teknik-teknik evaluasi secara partisipatoris. Berbagai kegiatan pelatihan, magang kerja, lokakarya, seminar atau kegiatan yang sejenis dapat diciptakan untuk mempercepat peningkatan kemampuan pengelola program secara lebih profesional. Lebih penting lagi, diperlukan rumusan *conceptual framework* pemberdayaan masyarakat yang mengoreksi (*critical review*) secara kritis proyek pengembangan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi ini.

Pola rekrutmen tenaga lokal (*indigenous worker*), terutama dari mantan penerima bantuan YUM yang sudah berhasil harus dipertahankan untuk memelihara rasa memiliki (*sense of belonging*) dan komitmen mereka dalam memajukan masyarakat. Juga, diperlukan upaya peningkatan keterampilan pekerjaan sosial melalui program-program latihan secara berkelanjutan.

Sementara itu, berkaitan dengan fasilitas kantor YUM di Desa Kecipir yang tidak berfungsi, beberapa alternatif tindakan yang harus dilakukan, sebaiknya langkah-langkah berikut harus ditempuh.

- a. Bangunan kantor YUM di desa tersebut sebaiknya dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun *Community Centre* di Desa Grinting (kantor YUM sekarang).
- b. Lokasi kantor YUM dipindahkan ke Dusun Blangko, sementara kantor YUM yang lama diruisslag. Langkah dilakukan dengan alasan bahwa aspek positif penerimaan

masyarakat di Dusun Blangko sangat baik, sementara aspek negatif eksistensi YUM semakin terbatas di seluruh desa.

- c. Bekas kantor YUM dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya (bergantung pada hasil musyawarah desa), tanpa perlu menonjolkan peran-peran YUM selama ini. Cara ini terutama untuk meraih simpati kembali dan mengawali hubungan yang lebih harmonis.

Untuk mengatasi konflik dengan masyarakat, alternatif pemecahannya adalah beberapa tindakan berikut.

- a. YUM harus memperbaharui teknik pendekatan kepada masyarakat (*review* strategi secara total) melalui pendekatan yang berbasiskan kegiatan keagamaan. Harus disadari bahwa masjid bukanlah semata-mata tempat kegiatan yang bersifat ritual, melainkan juga pusat kegiatan masyarakat (Islam) seperti yang telah diyakini oleh masyarakat Desa Kecipir. Ini membutuhkan tim kerja yang dapat bekerja sama dengan pengurus masjid.
- b. Jika fasilitator akan diperankan oleh YUM, pemberian bantuan tidak harus atas nama YUM. Dalam hal ini, pelaksana di desa harus didorong untuk berperan aktif dan dapat bekerja sama dengan kader-kader desa yang telah lama berdampingan dengan YUM. YUM lebih berperan sebagai lembaga penyanggah dana, sedangkan operasionalisasi diserahkan kepada masyarakat melalui PSM, orang tua penerima bantuan beasiswa, atau anggota masyarakat yang berhasil memanfaatkan hasil latihan keterampilan.
- c. Harus ada usaha untuk memperbaiki hubungan komunikasi dan sosial yang difasilitasi oleh pihak Muspika.
- d. Pihak keluarga penerima bantuan tetap harus memperoleh perlindungan dari berbagai pihak terkait, terutama aparat desa.

Jika akhirnya YUM diputuskan harus “terminasi” dari Desa Kecipir, perlu ada jeda waktu (sebagai *conditioning process*) untuk menghindari “drop” yang dramatis dari keberhasilan yang sudah dicapai selama ini. Ini berkaitan dengan tingkat ketergantungan masyarakat penerima bantuan yang sangat tinggi kepada YUM.

Sehubungan dengan perubahan strategi pembangunan dan kebijakan otonomi daerah, eksistensi LSM dalam pembangunan masyarakat akan semakin diperhatikan dan menjadi mitra kerja pemerintah yang dapat diandalkan. Karena itu, penyebarluasan informasi tentang YUM secara lengkap perlu dilakukan ke berbagai pihak, pemerintah, dan masyarakat Brebes pada umumnya. Misalnya, melalui media massa, melaksanakan kegiatan bakti sosial, aksi sosial, lokakarya, forum konsultasi, temu wicara, dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Sebenarnya, lokasi Kantor YUM di Brebes sangat strategis untuk dikembangkan menjadi *Community Centre*. Operasionalisasi lembaga ini harus menggunakan pendekatan sistem terbuka (*open system*) dan memiliki berbagai alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat semisal sarana workshop, pusat pelatihan, pusat konseling keluarga, serta pelayanan kesehatan dan gizi). Sungguhpun demikian, studi kelayakan tetap harus dilakukan dengan melibatkan secara aktif pengelola proyek di desa (koordinator dan kader desa,) serta semua unsur masyarakat dalam kerangka peran dan kontribusi *stakeholder* yang partisipatif.

Dalam jangka panjang, upaya memandirikan YUM Brebes perlu dipersiapkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam menggali sumber daya lokal atau sumber lain yang tersedia dari berbagai lembaga donor lainnya, seperti yang terjadi pada periode sebelum 1990. Saat itu, YUM berhasil memperoleh bantuan dari Depnaker dan Pemkab setempat.

Pada hakikatnya, pelaksanaan program pengembangan masyarakat itu bersifat *nonprofit oriented*. Namun, seperti halnya LSM yang telah maju, pengalaman bekerja bersama masyarakat akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dapat disebarluaskan kepada LSM lainnya yang membutuhkannya. Karena itu, jika pengelola program mampu memformulasikan pengalaman-pengalaman tersebut, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan yang diikuti oleh teknik pemberdayaan masyarakat yang memadai, niscaya mampu menarik minat pihak lain untuk belajar dari pengalaman YUM tersebut. Implikasinya, upaya YUM menjual karya nyatanya kepada pihak lain berupa teknologi pelayanan sosial akan berubah sifat menjadi *profit oriented*.

Perubahan strategi tersebut harus diikuti oleh restrukturisasi pengelola program dari pengelola yang berbasiskan desa menjadi pengelola yang berbasiskan program. Saat pelaksanaannya, setidaknya terdapat tiga penanggung jawab program, yaitu penanggung jawab program pendidikan, program kesehatan dan program ekonomi; ditambah seorang koordinator program. Setiap penanggung jawab memiliki tim kerja yang dibentuk secara *ad-hoc* sesuai dengan kebutuhan.

Mengingat tanggung jawab setiap pengelola program semakin meningkat, insentif dan kesejahteraannya harus diperhatikan secara memadai. Dalam hal ini, mereka sekurang-kurangnya harus memperoleh tunjangan kesehatan, pendidikan anak, dan hari tua (pensiun). Pengembangan indikator keberhasilan proyek yang memadukan indikator pencapaian target fisik atau administratif, serta target fungsional perlu dilakukan untuk lebih menunjukkan akuntabilitas proyek, baik kepada masyarakat maupun lembaga donor.

12

TEKNIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA PARTISIPATIF

Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program, proyek, dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas. Faktanya, konsep pembangunan ini sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Para praktisi pembangunan juga sering mengalami frustrasi terhadap kegagalan program tersebut. Karena itu, reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat adalah keniscayaan. Kemunculannya lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Sebenarnya, masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber sosial-budaya. Masyarakat memiliki "kekuatan" yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada di masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Di dalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang paling penting adalah bagaimana mendudukkan masyarakat pada posisi pelaku (subjek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok adalah memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat.

Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan perkataan lain, gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan “dari, oleh, dan untuk” masyarakat.

Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus selalu didorong dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, ajeg, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan, dan cita-cita bersama.

Karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu, dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan tersebut dalam semua aspek dan tingkatan. Komitmen itu mencakup

- a) perumusan konsep,
- b) penyusunan model,
- c) proses perencanaan,
- d) pelaksanaan gerakan pemberdayaan,
- e) pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan, dan
- f) pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Mengenai masalah ini, banyak nama untuk teknik pemberdayaan yang memiliki misi sama, antara lain, adalah

- a) *participatory rural appraisal* (PRA),
- b) *participatory research and development* (PRD),
- c) *participatory rapid appraisal* (PRA),
- d) *participatory assessment and planning* (PAP),
- e) *participatory teknologi development* (PTD),
- f) *participatory learning methods* (PLM),
- g) *participatory action reseacrh* (PAR), dan
- h) *participatory learning and action* (PLA).

Sementara itu, prinsip-prinsip penerapan PRA yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Masyarakat dipandang sebagai subjek, bukan objek.
- b) Praktisi berusaha menempatkan posisi sebagai “insider”, bukan “outsider”.
- c) Dalam menentukan parameter yang standar, lebih baik mendekati benar daripada benar-benar salah.
- d) Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, memberi angka atau nilai, mengkaji atau menganalisis, memberikan contoh, mengidentifikasi masalah, menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi.
- e) Pelaksanaan evaluasi, termasuk penentuan indikator keberhasilan dilakukan secara partisipatif.

Teknik-teknik PRA meliputi:

- a) uraian data sekunder atau analisa data dasar;
- b) pemetaan prasarana, bangunan, ruangan, sumber daya alam, dan lokasi;
- c) observasi langsung terhadap dinamika sosial;
- d) analisis pola penggunaan waktu (jadwal sehari-hari);
- e) kalender musim dan profil perubahan;
- f) diskusi kelompok terarah;
- g) profil sejarah;
- h) analisis pola keputusan;
- i) studi kasus atau cerita tentang kehidupan;
- j) bagan hubungan antarpihak (diagram *venn*);
- k) peta mobilitas klien masyarakat;
- l) pengurutan potensi atau kekayaan;
- m) bagan alur input-output;
- n) pengorganisasian masalah.

Pemahaman terhadap kegunaan teknik-teknik PRA tersebut dengan mudah dapat dikaji melalui pendekatan sistem sosial. Perlu diingat bahwa setiap teknik sangat fleksibel untuk digunakan dalam berbagai kegiatan bersama masyarakat karena sifatnya situasional dan kontekstual. Satu teknik dapat digunakan untuk berbagai tujuan bersama masyarakat, atau untuk satu tujuan perlu menggunakan beberapa teknik PRA, seperti tampak pada gambar 12.1 tentang contoh penggunaan teknik PRA dan informasi yang dihasilkan.

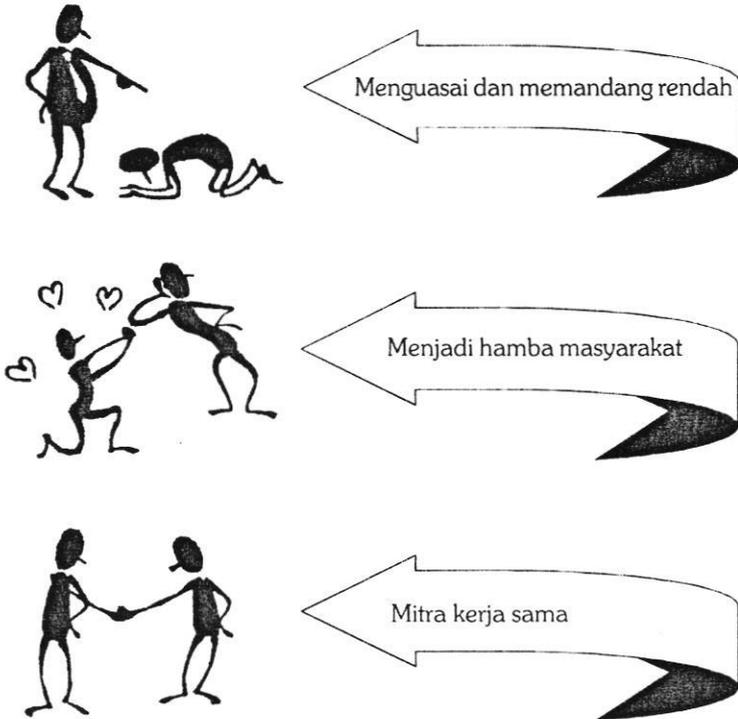
Tabel 12.1 Contoh terapan teknik-teknik PRA

Aspek	Teknik PRA	Tujuan/Informasi
Kondisi awal (<i>preexisting condition</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian data sekunder - Pengorganisasian masalah - Profil sejarah 	<p>Kondisi sosio-demografi, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya</p> <p>Konsientisasi masalah, sebab akibat, prioritas, pengetahuan masyarakat tentang masalah</p> <p>Sejarah program & perubahan potensi</p>
Masukan program (<i>inputs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan sosial - Pengurutan kekayaan - Pola penggunaan waktu 	<p>Prasarana, bangunan, ruangan, sumber daya, lokasi pembangunan</p> <p>Tingkat relatif kekayaan/sumber daya</p> <p>Keserasian penggunaan waktu dengan aktivitas program</p>
Proses pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi partisipatif - Diskusi kelompok terarah - Analisis pola keputusan - Studi kasus 	<p>Hubungan masyarakat dengan lingkungan</p> <p>Proses dialog (kerja sama, kemitraan, artikulasi tantangan, kekuatan, arah kegiatan)</p> <p>Proses penemuan (eksplorasi sistem sumber, analisis kapasitas sumber, kerangka pemecahan masalah)</p> <p>Kondisi spesifik dan unik</p>
Faktor internal & eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Diagram venn - Peta mobilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme vertikal dan horizontal antar-sumber sosial, interaksi sosial, dan respon pihak luar - Akses masyarakat terhadap sumber sosial dan mobilitas sosial
Hasil yang dicapai (<i>outputs, outcomes & impacts</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagan alur input-output - Kalender musim dan profil perubahan 	<p>Deskripsi dan penilaian interaksi antarfaktor dalam proses mobilisasi potensi dan hasil program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pranata sosial, perkembangan hasil, perkembangan sumber daya, dan perkembangan organisasi - Proses pengembangan (pengaktifan sumber, perluasan kesempatan, penguatan keberhasilan, integrasi kemajuan) - Keberdayaan masyarakat (aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi)

Mitra Kerja Sama

Mitra kerja sama merupakan cara pandang seseorang terhadap orang lain untuk memposisikan dirinya sejajar dengan orang lain (masyarakat) dengan cara tidak memandang rendah atau tidak memandang lebih tinggi. Pemahaman tentang mitra kerja sama ini sangat penting sebelum memahami teknik-teknik PRA dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemetaan Masalah, Potensi dan Sumber-sumber Sosial



Gambar 12.1: Posisi antara praktisi pembangunan dengan orang lain (masyarakat)

Pemetaan masalah, potensi dan sumber-sumber sosial merupakan langkah awal bagi para aktivis atau praktisi pembangunan masyarakat. Hal yang membedakan dengan kegiatan pembangunan masyarakat secara konvensional adalah mengenai hal-hal berikut.

1. Orientasi terhadap masalah kemasyarakatan selalu diikuti oleh pemahaman tentang potensi dan sumber lokal yang tersedia di masyarakat.
2. Masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemetaan.
3. Praktisi pembangunan berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakatlah yang harus mengidentifikasi, membuat, mendiskusikan, menganalisis, dan menyimpulkannya.
4. Peran fasilitator dapat dilakukan jika menggunakan media dan peralatan sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat. Gambar, diagram, dan tabel yang sederhana merupakan alternatif peralatan pemetaan. Media tidak selalu harus di atas kertas dengan alat tulis spidol atau pensil karena dapat juga di atas hamparan tanah dan menggunakan simbol-simbol yang ada di sekitarnya (ranting pohon, daun-daunan, buah-buahan, batu, dll.).
5. Selama kegiatan pemetaan dilakukan, hasil akhir bukanlah tujuan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Biarkanlah masyarakat yang menilai hasil akhir pekerjaan mereka.
6. Tidak ada aturan yang baku, sehingga fleksibilitas situasi, kondisi, dan waktu merupakan bagian dari proses bekerja sama dengan masyarakat.

Teknik-teknik PRA untuk pemetaan masalah, potensi, dan sumber yang dapat digunakan dan saling berkaitan satu sama lain dapat diuraikan seperti berikut.

Data Sekunder: Analisa Data Dasar dan Profile Masyarakat

Tujuan uraian data sekunder dilakukan dalam rangka memperoleh informasi awal mengenai sosio-demografis, sosio-ekonomi, dan

socio-budaya masyarakat. Melalui data ini, hasil yang diharapkan adalah berupa

- a) kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial,
- b) tingkat kebutuhan dasar, dan
- c) kuantitas dan kualitas potensi sosial.

Sementara itu, berdasarkan analisis data yang diperoleh tersebut maka akan diketahui

- a) permasalahan sosial yang menonjol,
- b) permasalahan sosial yang harus segera ditangani, dan
- c) potensi dan sumber sosial yang dapat dimanfaatkan.

Proses analisis data harus melibatkan masyarakat dengan cara diskusi, yakni tentang data dasar dan profile masyarakat, misalnya, data monografi desa.

Pengorganisasian Masalah

Pengorganisasian masalah ditujukan untuk menyusun kembali masalah, menyeleksi masalah, melihat hubungan sebab-akibat dari masalah tersebut, mendiskusikan prioritas masalah dan menggalinya, menganalisis alternatif pemecahan masalah data pengembangan potensi sosial. Sementara itu, hasil yang diharapkan diperoleh informasi tentang hasil analisis masalah, identifikasi sebab-akibat, penetapan prioritas, dan proses sosialisasi pengetahuan baru kepada masyarakat dalam pengorganisasian masyarakat.

Pengorganisasian masalah merupakan tahapan yang sangat kritis dalam proses pembangunan masyarakat. Seringnya terjadi kesalahan dalam menganalisis masalah dapat mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat tidak dapat diketahui. Di lain pihak, proses analisis masalah seringkali merupakan proses yang dilakukan sepenuhnya oleh praktisi pembangunan. Sikap ini muncul karena mereka menganggap masyarakat tidak mengerti atau dianggap bodoh, sementara para praktisi merasa dirinya paling tahu dan memiliki "teori" yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang ditemukan di masyarakat.

Perubahan cara berpikir dalam menganalisis masalah ditentukan oleh peran para praktisi pembangunan yang lebih memposisikan diri sebagai mitra kolaboratif daripada menonjolkan peran sebagai ahli sosial. Karena itu, peran praktisi terbatas hanya pada memfasilitasi proses-proses dialog, diskusi, curah pendapat, menstrukturkan masalah, menemukan prioritas dan mensosialisasikan temuan kelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya yang lebih luas. Karena itu, jadikan forum pengorganisasian masalah sebagai forum masyarakat itu sendiri.

Seringkali hasil pengorganisasian masalah dilihat dari sisi logika *an-sich*. Boleh jadi, hal ini tidak sesuai dengan "teori" yang praktisi ketahui dan gambaran hasil analisis sebab-akibat mungkin terlihat rumit. Namun demikian, itulah pikiran masyarakat. Jangan sekali-kali menggurui masyarakat selama proses diskusi berlangsung atau menyalahkan hasil diskusi. Apa pun hasilnya, haruslah dihargai sebagai karya masyarakat dan itulah yang dipahami oleh masyarakat tentang dunianya sendiri.

Observasi Langsung terhadap Pola Kehidupan Masyarakat

Observasi langsung merupakan metode perolehan informasi yang mengandalkan pengamatan langsung di lapangan, baik yang menyangkut objek, kejadian, proses, hubungan atau kondisi masyarakat dan lingkungan alam yang berkaitan dengan proses dialog, penemuan, dan pengembangan masyarakat. Informasi yang diperoleh ini dicatat dalam bentuk catatan atau gambaran. Fotografi juga dapat digunakan untuk mereduksi data secara efektif dan cepat dari teknik observasi langsung yang telah dilakukan.

Arah atau petunjuk observasi akan efektif berdasarkan hasil pemetaan masalah dan potensi desa. Selama perjalanan observasi, galilah informasi sebanyak mungkin dan berilah kesempatan kepada informan untuk menjelaskan situasi-kondisi lapangan yang dilihat. Tentang hal ini, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan observasi sebagai berikut.

1. Observasi dilakukan bersama-sama masyarakat, dengan cara mengunjungi lokasi-lokasi yang secara potensial dapat memberikan informasi penting bagi pembangunan masyarakat.

2. Praktisi tidak boleh bersikap seperti pejabat yang melakukan inspeksi atau seperti pengawas bangunan karena hasil observasi bukan untuk kepentingan praktisi, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
3. Pencatatan dan foto dokumentasi tidak harus dilakukan oleh praktisi pembangunan, tetapi berikan kesempatan kepada masyarakat untuk melengkapi informasi yang mereka butuhkan.
4. Ciptakan suasana santai selama dalam perjalanan observasi (anggap saja sebagai kegiatan rekreasi atau jalan-jalan biasa bersama masyarakat).

Studi Kasus atau Cerita tentang Kehidupan

Studi kasus digunakan untuk informasi yang sulit dijelaskan dengan statistik, tetapi dapat menolong untuk menggambarkan kondisi dan lingkungan sosial yang spesifik atau unik di masyarakat.

Dari sisi pengetahuan masyarakat itu sendiri, studi kasus ini boleh jadi tidaklah terlalu penting karena mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Namun demikian, studi kasus ini dapat digunakan untuk memberikan refleksi langsung kepada masyarakat tentang proses dinamika kehidupan melalui penggalian pemahaman masyarakat terhadap kasus-kasus yang terjadi. Misalnya, proyek pembangunan pompa air yang dibiayai oleh salah satu instansi pemerintah yang saat ini tidak berfungsi lagi. Praktisi dapat mengangkat kembali permasalahan ini dalam diskusi yang lebih luas, misalnya tentang cara memelihara hasil-hasil pembangunan yang harus dilakukan masyarakat. Praktisi dapat memfasilitasi penggalian informasi dengan menggunakan rincian peristiwa dari waktu ke waktu, bagan alir, atau tabel-tabel, dll.

Pemetaan Prasarana, Bangunan, Ruangan, Sumber Daya dan Lokasi Pembangunan

Peta dibuat dengan gambar dan simbol yang sederhana, sedangkan *sketsa* dimulai dengan satu objek yang dikenal oleh semua anggota

masyarakat yang terlibat (misalnya: peta potensi sosial). Selanjutnya, dibuat juga gambar-gambar yang lebih spesifik untuk setiap jenis potensi sosial.

Kajian tentang potensi ini dihubungkan dengan temuan permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Biasanya, akan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat jika dihubungkan dengan permasalahan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, kantor desa, lapangan olahraga, dan balai desa. Dengan sendirinya, permasalahan akan muncul, misalnya masalah transportasi, jarak yang terlalu jauh, waktu untuk mengakses fasilitas, tidak tersedianya tenaga yang cukup, dll.

Untuk memberikan gambaran secara lebih komprehensif, cara lain yang dapat dilakukan adalah membuat matrik transek. Cara ini akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang profil potensi. Kriteria dari profil potensi ditentukan bersama-sama masyarakat.

Bagan Hubungan antar-Pihak (Diagram Venn)

Diagram venn atau bagan hubungan antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam kehidupan bermasyarakat digunakan untuk mengetahui mekanisme vertikal dan horizontal antar-sumber sosial yang ada di masyarakat, interaksi sosial termasuk pandangan pihak lain terhadap fungsi sumber sosial. Penyajian bagan ini berbentuk lingkaran. Besar kecilnya lingkaran dan jarak antar-lingkaran menentukan keeratan hubungan dan penting-tidaknya keberadaan sumber sosial tertentu di antara pihak-pihak yang terkait serta hubungan saling pengaruh.

Peta Mobilitas

Peta ini memperlihatkan ruang lingkup gerak dengan menggambarkan sumber-sumber sosial mana saja yang dapat diakses masyarakat dalam satu jangka waktu tertentu. Jenis garis dan warna yang berbeda yang digambarkan dari pusat sketsa ke tempat yang dikunjungi dapat memperlihatkan apakah tempat atau ruangan tertentu secara rutin digunakan masyarakat, secara berkala ataukah hanya insidental atau jarang terjadi. Peta mobilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui pergerakan anggota masyarakat antarlokasi.

Pengurutan Kekayaan

Teknik ini digunakan untuk menentukan bagaimana tingkat relatif kekayaan antara kelompok dan atau antara sumber sosial dalam tatanan sosial masyarakat tertentu.

Pola Penggunaan Waktu (Jadwal Sehari-hari)

Analisis penggunaan waktu atau jadwal sehari-hari dari masyarakat hubungan dalam berinteraksi dengan sumber sosial ditampilkan dalam bentuk grafik. Pola penggunaan waktu dapat berubah dari waktu ke waktu karenanya akan diulang dalam hari-hari berikutnya (minimal selama satu minggu). Informasi ini sangat penting untuk menunjukkan hubungan antara keserasian penggunaan waktu dan setiap langkah yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Profil Sejarah Program dan Penerimaan Masyarakat

Sejarah masyarakat merupakan ringkasan-ringkasan dari berbagai kejadian penting atau transisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sedang diteliti dalam periode waktu yang panjang. Gambaran berbagai kejadian penting tentang sejarah masyarakat dan perubahan ketersediaan potensi dan sumber-sumber sosial yang ada digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Sebaiknya, penulisan sejarah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat difasilitasi untuk menyusun sejarahnya sendiri atau kejadian-kejadian yang dipandang penting dari waktu ke waktu. Konsep penyusunannya dapat dilakukan secara tertulis atau berbentuk tabel-tabel. Jika diperlukan, uraian keterangan waktu dirinci sedemikian rupa, baik tentang tentang tahun atau bulan; bahkan, tanggal dan waktu kejadian.

Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dapat dilaksanakan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh

masyarakat. Untuk dapat menjadi pendamping yang baik, ada beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki, antara lain, kemampuan melakukan diskusi kelompok yang terarah dan memfasilitasi analisis pola keputusan yang dilakukan masyarakat dalam proses perencanaan.

Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi kelompok yang terarah digunakan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di antara kelompok-kelompok atau organisasi sosial masyarakat. Dalam diskusi ini dikemukakan pula kiat-kiat mendayagunakan potensi sosial dan penciptaan interaksi-komunikatif dengan sumber-sumber sosial.

Fokus perhatian diskusi ini adalah mengamati proses dialog yang dilakukan antara pendamping dan masyarakat dalam rangka

- 1) persiapan untuk berkerja bersama,
- 2) pembentukan kemitraan,
- 3) artikulasi tantangan,
- 4) identifikasi kekuatan, dan
- 5) penentuan arah kegiatan.

Analisis Pola Keputusan

Analisis pola keputusan adalah gambaran yang menggambarkan arus penentuan keputusan. Dasar pertimbangan yang dipakai dalam pengambilan keputusan tersebut adalah keputusan cara mendayagunakan potensi sosial.

Fokus perhatian analisis pola keputusan adalah mengamati proses penemuan yang dilakukan bersama antara pendamping (petugas sosial) dan masyarakat dalam hal

- 1) eksplorasi sistem sumber,
- 2) analisis kapasitas sumber, dan
- 3) penyusunan kerangka pemecahan masalah.

Manajemen Perencanaan Partisipatif

Manajemen perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari adanya implementasi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat

yang mempunyai peran utama sebagai pengelola perencanaan dari mulai tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi potensi lokal, pendayagunaan sumber-sumber lokal, penyusunan dan pengusulan rencana, hingga evaluasi dari mekanisme perencanaan.

Dalam kaitan dengan masalah ini, para praktisi pembangunan berposisi sebagai pihak yang memfasilitasi upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber lokal. Karena itu, para praktisi pembangunan harus memiliki keterampilan dalam rangka menciptakan kemampuan-kemampuan internal masyarakat. Keterampilan diri itu mencakup beberapa hal berikut.

- a. Negoisasi, yakni keahlian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal penawaran program, proyek, dan kegiatan yang diusulkan masyarakat kepada sumber-sumber lokal.
- b. Pengambilan keputusan, yakni keahlian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara demokratis, transparan, dan memperhatikan akuntabilitas masyarakat itu sendiri.
- c. Pelibatan berbagai pihak (*stakeholder*) di tingkat lokal, yaitu keahlian meningkatkan kemampuan mengidentifikasi semua unsur masyarakat yang seharusnya memiliki peran-peran yang optimal dalam pembangunan. *Stakeholder* ini harus diidentifikasi bersama-sama masyarakat, siapa saja, peran apa dan apa kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat sebagai anggota *stakeholder* primer. Seandainya ada unsur-unsur yang seharusnya terlibat di luar komunitas lokal, dapat dikategorikan sebagai anggota *stakeholder* sekunder.

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Beberapa unsur dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah rancangan metode evaluasi partisipatif, teknik dan prosedur, instrumentasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta pelaporan. Praktisi pembangunan harus memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal. Sementara itu, teknik-teknik PRA yang perlu dikembangkan dan dilakukan adalah berikut ini.

Bagan Alur Input-Output

Bagan alur *input-output* dapat digunakan untuk meng-gambarkan dan menilai penggunaan dan interaksi antara faktor-faktor yang penting dalam proses mobilisasi potensi sosial dan hasil program pemberdayaan masyarakat.

Kalender Musim dan Profil Perubahan

Kalender musim dapat digunakan untuk memperlihatkan pemanfaatan waktu sepanjang tahun. Profil perubahan potensi sosial dapat dibuat untuk jangka waktu yang lebih panjang guna menunjukkan perubahan dalam hal: perubahan pranata sosial, perkembangan sarana dan prasarana, perkembangan sumber daya manusia, perkembangan organisasi sosial/LSM, dan perkembangan hasil proyek.

Gambaran perubahan yang didukung oleh hasil uraian dari bagan alur *input-ouput* ini sangat berguna untuk menunjukkan keadaan transisi dan hubungan antara perubahan-perubahan yang berbeda yang timbul di masyarakat.

Fokus perhatiannya adalah mengamati proses pengembangan yang dilaksanakan bersama antara pendamping [para praktisi] pembangunan dan masyarakat dalam hal

- 1) pengaktifan sumber,
- 2) perluasan kesempatan,
- 3) pengakuan terhadap keberhasilan, dan
- 4) mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai.

Indikator keberhasilan terapan PRA dalam perencanaan partisipatif dapat diketahui melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat yang menunjukkan keberdayaan dilihat dari dua dimensi, yakni *aktualisasi diri* dan *koaktualisasi eksistensi*.

Aktualisasi diri mencakup, a) ekspresi diri setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tahap dialog, penemuan, maupun pengembangan untuk program selanjutnya; b) internalisasi penilaian yang merupakan hasil ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan kelompok.

Koaktualisasi eksistensi mengandung makna bahwa gejala-gejala perilaku yang menunjukkan adanya aktualisasi bersama dalam kelompok, komunitas, atau masyarakat yang berimplikasi pada eksistensi kelompok/komunitas/masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial di lingkungannya.

Tabel 12.2 Perbandingan Evaluasi Konvensional dan Partisipatif

Aspek	Evaluasi konvensional	Evaluasi partisipatif
Siapa	Ahli dari luar	Anggota masyarakat, staf proyek, fasilitator
Apa	Indikator keberhasilan, efisiensi biaya dan keluaran hasil/produk yang telah ditentukan	Masyarakat mengidentifikasi sendiri indikator keberhasilan, termasuk hasil yang dicapai
Bagaimana	Fokus pada "objektivitas ilmiah", ada jarak antara evaluator dan partisipan, ada pola seragam, prosedur kompleks, akses terbatas pada hasil	Evaluasi sendiri, metode sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, terbuka, ada diskusi hasil dengan melibatkan partisipan dalam proses evaluasi
Kapan	Biasanya tergantung jadwal, kadangkala juga ada evaluasi <i>midterm</i>	Bergantung pada proses perkembangan masyarakat dan intensitas relatif sering
Mengapa	Pertanggungjawaban, biasanya sumatif, menentukan biaya selanjutnya	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk inisiasi, mengontrol, melakukan tindakan koreksi

Sumber: Narayan, Deepa. 1993. *Participation Evaluation*. World Bank Technical Paper Number 207. Washington, D.C. : The World Bank.

KEPUSTAKAAN

- Achlis. 1988. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Bandung: STKS Bandung.
- Anderson, R.E. dan I.E. Carter. 1974. *Human Behavior in the Social Environment: A Social System Approach*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Arendt, H. 1958. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Bachrach, P. dan M.S. Baratz. 1970. *Power and Poverty: Theory and Practice*. New York: Oxford University Press.
- Baharsjah, Justika. 1998. "Social Safety Net dan Pelayanan Sosial bagi Keluarga Miskin" dalam Yulfitra Rahardjo dan Ingrid Kolb-Hindarmanto (ed.). Jakarta: PPT LIPI & UNICEF.
- Baharsjah, Justika (ed.). 1999. *Menuju Masyarakat yang Berketahanan Sosial: Pelajaran dari Krisis*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Batistiana, M.B. dan D. Muphy. 1996. *Rural Community Organizing in the Philippines*. Quezon City: COTRAIN.
- Berger dan Neuhaus. 1988. "Memberi Wewenang Kepada Rakyat" dalam *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bergsman, J. 1979. *Growth and Equity in Semi-Industrialized Countries*. Washington: The World Bank.
- Biro Pusat Statistik. 1990. *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: BPS.

- Blaikie, N. 1993. *Approaches to Social Enquiry*. Cambridge: Blackqwell Publishers Ltd.
- Blakely, E. 1979. *Community Development Research*. New York: Human Science Press.
- Bloom, M. dan J. Fishert. 1982. *Evaluating Practice, Guidelines for the Accountable Professional*. London: Prentice-Hall. Inc.
- Boff, C. 1987. *Theology and Praxis*. (penerjemah R. Barr). Maryknoll, New York: Orbis Books.
- Brinckerboff, P.C. 1996. *Financial Empowerment: More Money for More Mission, An Essential Financial Guide for Not-For-Profit Organizations*. Colorado: Alpine Guild, Inc.
- Brody, R. 1982. *Problem Solving: Concepts and Methods for Community Organizations*. New York: Human Sciences Press.
- Brown, Tony. 1998. *Empower the People*. New York: Quill William Morrow.
- Cary, Lee J. (ed.). 1970. *Community Development as a Process*. Columbia: University of Missouri Press.
- Chernichhovsky, Dov dan Oey Astra Meesook. 1984. *Poverty in Indonesia: A Profile*. Washington D.C.: The World Bank.
- Clarke, J. 1991. *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*. London: Earthscan.
- Covey, S.R.; A.R. Merrill; dan R.R. Merrill. 1994. *First Things First*. New York: Simon & Schuster.
- Cox, David. 1992. *International Social Work*. Melbourne: La Trobe University.
- Cox, David. 1992. *Social Development Personnel. A Vital Missing Link in Development Work*. Melbourne: La Trobe University.
- Cox, David. 1995. *Social Development Personnel A Vital Missing Link In Development Work*. New York: John Wiley and Sons Limited.
- Craig, G. dan M. Mayo (ed.). 1995. *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. London: Zed Books.
- Dahl, R. A. 1989. *Democracy and Its Critics*. New York: Yale University Press.
- Djohani, Rianingsih (ed). 1996. *Buku Acuan Penerapan PRA, Berbuat Bersama Berperan Setara*. Kupang: Driyamedia.
- Donnison, D. 1993. "The Challenge of Urban Regeneration for Community Development." *Community Development Journal*, Vol. 18. No. 4.

- Dubois and K. K. Miley. 1996. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Eade, D. 1997. *Capacity Building: An Approach to People Centred Development*. Oxford: An Oxfam Publication.
- Enriquez. 1990. *Indigenous Psychology: A Book Readings*. Filipina: Philippine Psychology Research and Training House.
- ESCAP. 1999. *HRD Course for Poverty Alleviation*. Bangkok : HRD Division.
- Field, Gary S. 1984. "Employment, Income Distribution and Economic Growth in Seven Small Open Economics." *The Economic Journal* No. 94.
- Freire, P. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Friedmann, John. 1988. "Perencanaan sebagai Proses Belajar" dalam Korten dan Sjahrir (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blacwell.
- Garcia, Nuneg and Jose. 1992. *Improving Family Planning Evaluation*. West Harvard: Kumarian Press Inc.
- Gaol, H. Lumban. 1996. "Perkembangan dan Perubahan Gagasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan" (tidak dipublikasikan). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gilbert, N. dan H. Specht. 1986. *Handbook of the Social Services*. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall.
- Glennerster, H. dan J. Midgely (ed). 1991. *The Radical Right and the Welfare State*. Brighton: Harvester Wheatsheaf.
- Gore, Charles. 1984. *Regions in Question: Space, Development Theory and Regional Policy*. London: Methuen and Co. Ltd.
- Green, R.H. 1978. "Basic Human Needs" dalam *IDS Bulletin*. No. 4.
- Gutch, R. 1992. *Contracting Out: Lesson from the US*. London: National Council for Voluntary Organization.
- Hanna, M. G. dan B. Robinson. 1994. *Strategies for Community Empowerment: Direct-Action and Transformative Approaches to Social Change Practice*. New York: The Edwin Mellen Press.
- Hardiman, M. dan J. Midgley. 1982. *The Social Dimensions of Development : Social Policy and Planning in the Third World*. New York: John Wiley and Sons Limited.
- Haryono Suyono, 1998. *Jaringan Pemberdayaan Sosial-Social Safety Net dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

- Hikmat, Harry dan Jusman Iskandar. 1995. *Evaluasi Program Rereongan Sarupi di Propinsi Jawa Barat*. Bandung: Pemda Tk. I Jawa Barat.
- Hikmat, Harry. 1995. "Paradigma Pembangunan dan Implikasi dalam Perencanaan Sosial." Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hikmat, Harry. 1996. "Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi dengan Kemajuan Sosial di Propinsi DT I Jawa Barat." Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hikmat, Harry. 1999. "Pembangunan Sosial yang Berpusatkan pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis." Makalah. Bandung: UNPAD.
- Isasi-Diaz, A.M. dan Y. Tarango. 1988. *Hispanic Women: Prophetic Voice in the Church*. San Francisco: Harper and Row, Publishers.
- Jazairy, I.; M. Alamgir; dan Panuccio. 1992. *The State of World Rural Poverty*. New York: University Press.
- Jossy, Aziz, dan Nasution, D. 1994. *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: LPEM-UI.
- Kahn, A.J. 1969. *Theory and Practice of Social Planning*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kammerman, S.B., dan A.J. Kahn. 1976. *Social Services in the United States: Policies and Programs*. Philadelphia: Temple University Press.
- Koentjaraningrat. 1999. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Edisi ke-18. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Korten, D.C. 1990 (a). "Pendahuluan: Kita Menghadapi Masalah" dalam *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Korten, D. C. 1990 (b). "Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat: Menuju suatu Kerangka Kerja" dalam Korten dan Sjahrir (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Korten, D.C. 1990 (c). "Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Proses Belajar" dalam Korten dan Sjahrir (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Korten, D.C. dan F.B. Alfonso (ed.). 1981. *Bureaucracy and Poor: Closing the Gap*. New York: McGraw-Hill International Book Company.
- Korten, D.C. dan Carner. 1988. "Kerangka Kerja Perencanaan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat" dalam Korten dan Sjahrir (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Korten, D.C. dan Sjahrir. (ed.). 1993. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.

- Korten, D.C. dan R. Klauss(ed.) 1984. *People Centered Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*. USA: Kumarian Press.
- Kotze, D. 1987. "Contradictions and Assumption in Community Development." *Community Development Journal* Vol. 22. No. 1.
- Lauffer, A. 1981. "*The Practice of Social Planning*" dalam N. Gilbert dan H. Specht (ed.). New York: Prentice-Hall.
- LPEM FEUI. 1993. "Pengembangan Sistem Kelembangan Keuangan untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat di Pedesaan" (laporan hasil studi tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Libassi, M.F. dan A.N. Maluccio 1986. "Competence-centered Social Work: Prevention in Action." *Journal of Primary Prevention* No. 6, 168-180.
- Lipton, M. 1991. *The Poor and the Poorest*. Washington DC: World Bank.
- Lipton, Michael dan Martin Ravallion 1993. *Poverty and Policy*. Washington D.C. : The World Bank.
- Lisk, F. 1977. "Conventional Development Strategies and Basic Needs Fulfilment." dalam *International Labour Review*.
- MacArdle, J. 1989. "Community Development Tools of Trade." *Community Quarterly Journal* Vol. 16.
- Mas' oed, Mohtar. 1993. "Pembangunan Ekonomi: Suatu Tinjauan Teoritis." dalam Mansyur A. dan M. Nadjib. [ed.]. Jakarta: LKPSM.
- Mayo, M. 1994. *Communities and Caring: The Mixed Economy of Welfare*. London: Macmillan.
- McKay, John. 1990. "The Development Model" (in *Human Centred Economics*). *Development Journal of The Society for International Development* Vol. 1990: 3/4.
- Mendehall, W.; Lyman Ott; dan R. L. Scheafter. 1971. *Elementary Survey Sampling*. California: Warswoth Publishing Company Inc.
- Mishra, R. 1990. *The Welfare State in Capitalist Society*. Brighton: Harvester Wheatsheaf.
- Morris, Robert, (ed.). et. al. 1971. *Encyclopedia of Social Work*. New York: NASW.
- Oakley, P. et al. 1991. *Projects with People*. Geneva: International Labour Office.
- Ossowski, S. 1963. *Class Structure in the Social Consciousness*. New York: The Free Press.

- P., Onny S. dan A.M.W. Pranarka (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Paul, S. 1987. *Community Participation in Development Project*. New York: World Bank.
- Payne, Malcolm. 1986. *Social Care in the Community*. London: Macmillan.
- Payne, Malcolm. 1991. *Modern Social Work Theory: A Critical Introduction*. London: Macmillan.
- Poole, T.G. 1988. "The Role of the Church in Black Education." *The Western Journal of Black Studies* 12 (3).
- Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. "Pemberdayaan" dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed.). Jakarta: CSIS.
- Prus, Robert. 1999. *Beyond the Power Mystique: Power as Intersubjective Accomplishment*. New York : State University of New York Press.
- Ranis, Gustav. 1977. "Trade-offs or Complements" dalam *Economic Development, Poverty, and Income Distribution*.
- Rappaport. 1985. "The Power of Empowerment Language." *Social Policy* No. 17, 15-21.
- Rappaport, J. 1987. "Terms of Empowerment: Toward a Theory for Community Psychology." *American Journal of Community Psychology*, Vol. 15. No 2.
- Ritzer, G. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Rescher, Nicholas. 1972. *Welfare, The Social Issues in Philosophical Perspective*. Pittsburg: University of Pittsburg Press.
- Rojek, Chris. 1986. "The 'Subject' in Social Work." *British Journal of Social Work* 16 (1) 65-79.
- Romanyshyn, J.M. 1971. *Social Welfare: Charity to Justice*. New York: Random House.
- Rose, S. dan B. Black. 1985. *Advocacy and Empowerment: Mental Health Care in the Community*. New York: Routledge&Kegan Paul.
- Royse, D. dan B. Thyer. 1996. *Program Evaluation*. Chicago: Nelson-Hall Publishers.
- Russel-Erlich, John L. dan Felix G. Rivera. 1986. "Community Empowerment as a Non-Problem." *Journal of Sociology and Social Welfare*, 13 (3) 451-65.
- Ruether, R. 1985. *Feminist Theology in the Academy*. t. kota: Christianity and Crisis.

- Saleebey, Dennis. 1992. *The Strength Perspective in Social Work Practice*. t. penerbit.
- Sen, Amartya. 1992. *Inequality Reexamined*. New York: Harvard University Press.
- Sharp, Robin. 1995. "Organizing for Change: People Power and the Role of the Institutions." dalam Kirby, John; Phil O'Keefe; dan Lloyd Timberlake (ed.). London, Earthscan Publications Ltd.
- Shaw, T.M. (ed.). 1995. *Government-NGO Relations in Asia: Prospects and Challenges for People Centred Development*. Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Centre.
- Simon, B.L. 1990. "Rethinking Empowerment." *Journal of Progressive Human Services*, 1. 27-39.
- Soemarjan, Selo, 1998. "Prihatin Lahir Batin: Dampak Berbagai Krisis dalam Rumah Tangga." dalam Roosmalawati Rusman dkk. (ed.). Jakarta: Unicef & PPT-LIPI.
- Solomon, Barbara Bryant. 1976. *Black Empowerment: Social Work in Oppressed Communities*. New York: Columbia University Press.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Thee Kian Wie. 1981. *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan: Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Thomas, A. 1992. "Non Governmental Organisations and the Limits to Empowerment." dalam M. Wuyt, M. Mackintosh, dan T. Hewitt (ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Thursz, D. dan J.L. Vigilante 1975. "Basic Social Service Needs for Human Communities." dalam *Meeting Human Needs*. London: SAGE Publications.
- Tillich, P. 1977. *The Socialist Decision*. New York: Harper and Row.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi keempat. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Tofler, A. 1990. *Power Shift*. New York: Bantam Books.
- Topatimasang, R. et al. 1985. *Belajar dari Pengalaman: Panduan Latihan Pemandu Pendidikan Orang Dewasa untuk Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- UNDP. 1993. *Human Development Report 1993*. Oxford: Oxford University Press.
- UNDP. 1997. *Human Development Report 1997*. Oxford: Oxford University Press.

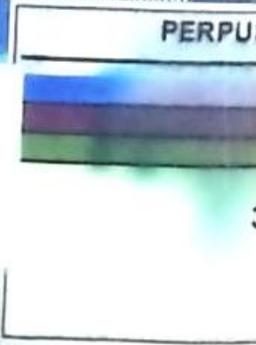
- United Nations Research Institute for Social Development. 1980. *The Quest for A Unified Approach*. An UNRISD Report.
- Verhagen, Koenraad. 1987. "Self-Help Promotion: A Challenge to the NGO Community." dalam *Theoretical Basis for Self-Help Promotion*, Bab I. Netherland, Royal Tropical Institute.
- Verhagen, Koenraad. 1996. *Pengembangan Keswadayaan: Pengalaman LSM di Tiga Negara*. Jakarta: Yayasan Bina Swadaya.
- Warburg, Annabel (ed.). 1995. *Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation*. London : Save The Children.
- Washington, G. dan W. Beasley. 1988. "Black Religion and the Affirmation of Complementary Polarity." *The Western Journal of Black Studies* 12 (3).
- Williams, R. 1976. *Keyword: A Vocabulary of the Culture and Society*. New York: Oxford University Press.
- York, R.O. 1982. *Human Service Planning: Concepts, Tools, and Methods*. Chapell Hill: The University of North Carolina Press.
- Yulfita Rahardjo, 1998. "Social Safety Net dalam Perspektif Nasional" dalam Yulfita Rahardjo dan Ingrid Kolb-Hindarmanto (ed.). Jakarta: PPT LIPI & UNICEF.
- Zastrow, Charles. 1992. *The Practice of Social Work*. California: A Division of Wadsworth, Inc.

... pemberdayaan bukanlah merupakan sikap pemaksaan belanda, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan-kekuatan yang dimiliki rakyat.

... pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai-budaya setempat. Sebagai konsep sosial-budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (*centered for people*), pemberdayaan tidak saja menumbuh-kembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial-budaya.

Dalam konteks kekinian dan kedisinian, dan seiring dengan semakin banyaknya anggota komunitas-masyarakat marginal, wacana pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar itu, buku ini layak untuk menjadi referensi penting tentang langkah-langkah yang tepat dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat marginal.

Buku ini memberikan wacana yang menyeluruh-diskursif tentang konsep strategi pemberdayaan masyarakat. Harapan saya, buku ini dapat memperkaya literatur yang berbasis perspektif sosial-budaya tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Kusnaka Adimihardja, Direktur LPM UNPAD



PENERBIT HUMANIORA
berkhidmat untuk ilmu
ISBN 979-9231-55-X